



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas salah satunya untuk menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

dengan

BUPATI BOGOR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

13. Strategi...

13. Strategi adalah langkah berisikan program-sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Periodisasi pembangunan jangka panjang Daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah Daerah, dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD pada saat belum disusun RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Berisi tentang penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III...

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
Berisi tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045.
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
Berisi tentang arah kebijakan periode Tahun 2025-2029, periode Tahun 2030-2034, periode Tahun 2035-2039, dan periode Tahun 2040-2045 serta sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
- BAB VI : PENUTUP.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Program pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Hasil evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (2/131/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional junto Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, dan akan berakhir pada Tahun 2025. Selanjutnya, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang menginstruksikan kepada Bupati bersama DPRD untuk segera membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Tahun 2024 merupakan momen penting penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, mengingat adanya kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Penyusunan...

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara dan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta substansi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga mengacu pada ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, serta Ketentuan Peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 129

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.2 Demografi	II-46
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-55
2.3 Aspek Daya Saing	II-73
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-73
2.3.2 Daya Saing SDM	II-77
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-80
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-81
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-82
2.4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	II-83
2.4.2 Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	II-83
2.4.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-83
2.4.4 Inovasi Daerah	II-83
2.4.5 Akuntabilitas Kinerja Daerah	II-84
2.4.6 Kualitas Kebijakan	II-84
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025	II-85
2.5.1 Capaian Pembangunan berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Per-tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	II-85

2.5.2	Capaian Pembangunan Berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Pada Tahun 2023	II-101
2.5.3	Rekomendasi Tindak Lanjut berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025	II-104
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-111
2.6.1	Proyeksi Demografi	II-111
2.6.2	Kebutuhan Sarana Prasarana	II-119
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-122
2.7.1	Gambaran Arah Rencana Tata Ruang	II-122
2.7.2	Rencana Struktur Ruang	II-123
2.7.3	Rencana Sistem Pusat Permukiman	II-125
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III-1
3.1	Permasalahan	III-2
3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	III-2
3.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-5
3.1.3	Aspek Daya Saing	III-7
3.1.4	Aspek Pelayanan Umum	III-8
3.2	Isu Strategis Daerah	III-9
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		IV-1
4.1	Visi	IV-2
4.2	Misi	IV-12
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		V-1
5.1	Arah Kebijakan	V-1
5.2	Sasaran Pokok	V-33
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah	V-33
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V-40
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan	V-47
BAB VI PENUTUP		VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Bogor	II-3
Gambar 2.2	Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor	II-4
Gambar 2.3	Kawasan Budidaya Peruntukan Pertanian di Kabupaten Bogor	II-7
Gambar 2.4	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bogor	II-17
Gambar 2.5	Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bogor	II-17
Gambar 2.6	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor	II-20
Gambar 2.7	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Bogor	II-22
Gambar 2.8	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor	II-24
Gambar 2.9	Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor	II-26
Gambar 2.10	Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor..	II-28
Gambar 2.11	Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	II-30
Gambar 2.12	Peta Rawan Banjir di Kabupaten Bogor	II-31
Gambar 2.13	Peta Rawan Pergerakan Tanah di Kabupaten Bogor	II-32
Gambar 2.14	Peta Rawan Bencana Gunung Api di Kabupaten Bogor..	II-33
Gambar 2.15	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bogor	II-37
Gambar 2.16	Peta Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Bogor	II-39
Gambar 2.17	Peta Kelas Kemampuan Lahan	II-42
Gambar 2.18	Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRW....	II-44
Gambar 2.19	Peta Penggunaan Lahan pada Fungsi Kawasan RTRW...	II-46

Gambar 2.20	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-46
Gambar 2.21	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	II-47
Gambar 2.22	Perbandingan LPP Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	II-47
Gambar 2.23	Perbandingan LPP Kabupaten Bogor Tahun 2023	II-48
Gambar 2.24	Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023	II-49
Gambar 2.25	Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023	II-50
Gambar 2.26	Perbandingan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.....	II-52
Gambar 2.27	Perbandingan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	II-52
Gambar 2.28	Perbandingan Komposisi Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023	II-53
Gambar 2.29	Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023	II-53
Gambar 2.30	Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	II-54
Gambar 2.31	Perbandingan LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2023 (%)	II-56
Gambar 2.32	Perbandingan Perkembangan LPE Kabupaten Bogor Tahun 2022 – 2023 dengan Kabupaten/Kota Perbatasan	II-57
Gambar 2.33	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023	II-58
Gambar 2.34	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 (%)	II-59
Gambar 2.35	Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor 2019-2023.....	II-59

Gambar 2.36	Perbandingan TPT Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023	II-60
Gambar 2.37	Kinerja Penurunan Tingkat Pengangguran Dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2022-2023	II-60
Gambar 2.38	Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-61
Gambar 2.39	Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023.....	II-61
Gambar 2.40	Kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2022-2023	II-62
Gambar 2.41	Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.42	Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023.....	II-64
Gambar 2.43	Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.44	Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023	II-66
Gambar 2.45	Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.46	Perbandingan AHH Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023.....	II-67
Gambar 2.47	Perkembangan Pengeluaran per Kapita (ribu Rp) per Tahun Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-68
Gambar 2.48	Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023	II-69
Gambar 2.49	Capaian Indeks Kebahagiaan Tahun 2019-2023	II-71
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2023.....	II-72

Gambar 2.51	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2023	II-72
Gambar 2.52	PDRB ADHB dan PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2023	II-75
Gambar 2.53	Perbandingan Perkembangan PDRB atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023 dengan Kabupaten/Kota Perbatasan	II-76
Gambar 2.54	Perbandingan Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023 dengan Kabupaten/Kota Perbatasan.....	II-77
Gambar 2.55	Indeks Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	II-78
Gambar 2.56	Indeks Membaca Kabupaten Bogor Tahun 2019–2023...	II-78
Gambar 2.57	Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor Tahun 2019- 2023	II-79
Gambar 2.58	Kondisi TPAK Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	II-79
Gambar 2.59	Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-80
Gambar 2.60	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor 2019-2023	II-83
Gambar 2.61	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2019- 2023.....	II-84
Gambar 2.62	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045.....	II-112
Gambar 2.63	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor	II-112
Gambar 2.64	Proyeksi Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045.....	II-113
Gambar 2.65	Proyeksi Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045	II-113
Gambar 2.66	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-114
Gambar 2.67	Proyeksi Usia 0-14 Tahun	II-115
Gambar 2.68	Proyeksi Usia 15-64 Tahun.....	II-116

Gambar 2.69	Proyeksi Usia 65+ Tahun	II-116
Gambar 2.70	Rasio Ketergantungan	II-118
Gambar 4.1	Keselarasan Visi Pusat, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2045	IV-5
Gambar 5.1	Tahap Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025- 2045	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor	II-4
Tabel 2.2	Wilayah Sungai di Kabupaten Bogor	II-4
Tabel 2.3	Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bogor	II-5
Tabel 2.4	Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan)	II-9
Tabel 2.5	Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan)	II-14
Tabel 2.6	Luasan Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor	II-18
Tabel 2.7	Luasan Jasa Penyediaan Air di Kabupaten Bogor	II-20
Tabel 2.8	Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor	II-22
Tabel 2.9	Luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor.....	II-24
Tabel 2.10	Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor	II-26
Tabel 2.11	Luasan Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Bogor	II-28
Tabel 2.12	Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023	II-30
Tabel 2.13	Tabel Kejadian Bencana di Kecamatan di Kabupaten Bogor	II-33
Tabel 2.14	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bogor.....	II-35
Tabel 2.15	Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bogor	II-36
Tabel 2.16	Luasan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Bogor.....	II-38
Tabel 2.17	Luasan Kemampuan Lahan Kabupaten Bogor	II-40

Tabel 2.18	Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RTRW Kabupaten Bogor.....	II-42
Tabel 2.19	Perubahan Penggunaan Tanah Pada Fungsi Kawasan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020	II-44
Tabel 2.20	Kondisi Kecamatan dengan LPP Diatas LPP Kabupaten Bogor Tahun 2023.....	II-48
Tabel 2.21	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023.....	II-50
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.....	II-58
Tabel 2.23	Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor	II-62
Tabel 2.24	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2023.....	II-70
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	II-73
Tabel 2.26	Perbandingan PDRB AHB Kabupaten/Kota Perbatasan.....	II-75
Tabel 2.27	Perbandingan PDRB AHB per Kapita Kabupaten/Kota Perbatasan.....	II-76
Tabel 2.28	Indikator Pembangunan Infrastruktur Wilayah	II-80
Tabel 2.29	Kondisi Iklim dan Tingkat Investasi Kabupaten Bogor	II-81
Tabel 2.30	Angka Kemiskinan	II-86
Tabel 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-87
Tabel 2.32	Indeks Gini	II-88
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Manusia	II-89
Tabel 2.34	Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku	II-90
Tabel 2.35	Nilai Investasi Daerah.....	II-91
Tabel 2.36	Indeks Ketimpangan Williamson.....	II-92
Tabel 2.37	Peningkatan Pemenuhan Sarana & Prasarana Permukiman	II-93
Tabel 2.38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-94
Tabel 2.39	Presentase Gangguan Trantibum	II-95
Tabel 2.40	Indeks Risiko Bencana	II-96
Tabel 2.41	Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural	II-98
Tabel 2.42	Nilai AKIP.....	II-99

Tabel 2.43	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-100
Tabel 2.44	Indeks SPBE	II-101
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Makro pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 pada Tahun 2023	II-101
Tabel 2.46	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045	II-119
Tabel 2.47	Proyeksi Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045	II-119
Tabel 2.48	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045	II-119
Tabel 2.49	Proyeksi Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045	II-120
Tabel 2.50	Proyeksi Kebutuhan Pemukiman Tahun 2025-2045.....	II-120
Tabel 2.51	Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045.....	II-121
Tabel 2.52	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025 – 2045.....	II-121
Tabel 2.53	Proyeksi Kebutuhan Persampahan Tahun 2025 – 2045 ...	II-122
Tabel 2.54	Indikasi Program Utama dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036	II-132
Tabel 3.1	Tabel Data Saling Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	III-27
Tabel 3.2	Proyeksi Isu Strategis Kabupaten Bogor.....	III-34
Tabel 4.1	Sinkronisasi Sasaran Visi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045	IV-9
Tabel 4.2	Keselarasan Misi Kabupaten Bogor dengan Misi (Agenda) Nasional dan Misi Provinsi Jawa Barat	IV-15
Tabel 5.1	Tahapan Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045	V-4
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-6
Tabel 5.3	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bogor dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V-34
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045	V-40

Tabel 5.5	Penyelarasan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bogor dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V-48
Tabel 5.6	Misi, Arah Pembangunan, Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045	V-53
Tabel 5.7	Penetapan Target Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045.....	V-56

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menyongsong periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 dimana secara nasional Indonesia ditargetkan akan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang nasional dan Jawa Barat. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perencanaan jangka menengah dan tahunan hingga tahun 2045 mendatang. Pentingnya dokumen RPJPD disusun karena memuat visi dan misi daerah jangka panjang yang disertai dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan ketentuan Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musrenbang;
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD;
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
11. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

1. teknokratik

Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan secara teknis dan akademis berdasarkan kajian-kajian substantif ilmiah yang dilakukan oleh perangkat daerah.

2. partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan, dan memberikan aspirasi berdasarkan ruang lingkup masing-masing agar terwujud rasa memiliki terhadap apa yang direncanakan bersama.

3. politis

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan politis kepala daerah.

4. atas bawah dan bawah atas

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan sinkronisasi perencanaan tingkat pusat ke daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan serta sebaliknya, memperhatikan usulan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat nasional.

5. holistik-tematik

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan perencanaan terhadap keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

6. integratif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, dalam lingkup pelaksanaan pembangunan lintas sektoral.

7. spasial

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pentingnya RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2025-2045 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Bogor mencerminkan keseriusan pemerintah daerah meletakkan fondasi jangka panjang sebagai cita-cita bersama yang ingin dicapai pada tahun 2045 mendatang. Konsekuensi dari tidak adanya peraturan daerah yang disetujui dan ditetapkan bersama, adalah dikenakannya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Disamping itu, penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Bogor, bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, serta sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

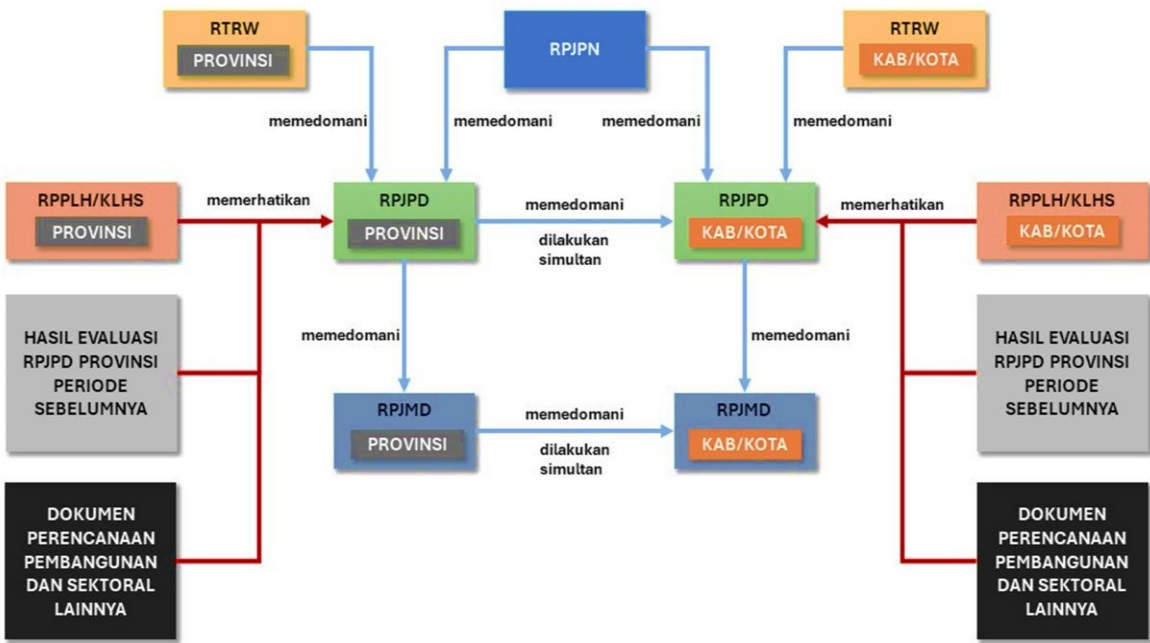
- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen dengan dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 memiliki kaitan erat dengan dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dalam hal:
 - a. sinergi pencapaian visi dan misi nasional.

- b. dukungan terhadap target-target kinerja dan kebijakan nasional jangka panjang yang wajib direalisasikan di tingkat Kabupaten Bogor.
- 2. RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 berkaitan erat dengan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dalam hal:
 - a. sinergi pencapaian visi dan misi Jawa Barat.
 - b. dukungan terhadap target kinerja dan kebijakan Jawa Barat.
- 3. RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 berkaitan dengan dokumen RTRW Nasional sebagai bagian dari penataan kebijakan ruang nasional.
- 4. RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 berkaitan dengan dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat.
- 5. RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 berkaitan dengan dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 dalam hal arah kebijakan program yang bersinergi dengan penataan ruang, dan menjadi bagian dalam perumusan sasaran pokok maupun arah kebijakan pada tahapan per periode;
- 6. RPJPD Kabupaten Bogor menjadi pedoman penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 adalah untuk menjadi arah pembangunan jangka panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dan perwujudan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 adalah sebagai:

1. arah bagi perumusan kebijakan perencanaan jangka menengah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD;
2. pedoman bagi calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam konstelasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya berorientasi pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 mengikuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping itu, sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

- a. Latar Belakang, yang menguraikan pengertian ringkas, proses penyusunan, alasan disusun, risiko jika tidak tersedia, dan pendekatan yang digunakan;

- b. Dasar Hukum Penyusunan, yang menguraikan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait;
- c. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, yang menguraikan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota;
- d. Maksud dan Tujuan, yang menguraikan secara ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi Kabupaten Bogor;
- e. Sistematika penulisan, yang menguraikan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan:

- a. Permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat, dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
- b. Isu strategis daerah, yang memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung

ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Disamping itu, juga menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang:

- a. visi yaitu kondisi daerah hasil pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.
- b. misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini menguraikan:

- a. Arah kebijakan, yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
 2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
 3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
 4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045;yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.
- b. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kaidah-kaidah yang perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan, serta manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

A. Peran Strategis Kewilayahan

Kabupaten Bogor merupakan daerah otonomi, yang diperingati hari jadi-nya setiap tanggal 3 Juni, dan hingga tahun 2024 telah berusia 542 tahun, terhitung sejak jaman kerajaan Pajajaran berkuasa pada tahun 1482. Dalam perkembangannya, keberadaan Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam konteks lingkup regional Jabodetabekpunjur maupun wilayah yang lebih luas. Kabupaten Bogor merupakan kawasan peri-urban Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memegang peran sebagai kawasan penyangga, baik secara aktivitas ekonomi, fungsi lingkungan hidup, serta penyedia pemukiman.

(1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Bogor kurang lebih mencapai 299.178 hektar yang terbagi ke dalam 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Selain itu, Kabupaten Bogor secara administratif berbatasan langsung dengan 11 kabupaten/kota dengan batas-batas wilayah, meliputi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- Sebelah Tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.

Wilayah yang luas serta banyaknya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, menjadi potensi kewilayahan sekaligus merupakan penyebab terjadinya berbagai permasalahan, baik yang disebabkan oleh rentang kendali pemerintah daerah yang terlalu lebar,

maupun perbedaan/kesenjangan antar wilayah perbatasan dalam kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta administrasi kependudukan. Oleh karena itu, optimalisasi kerjasama dan kemitraan antar kabupaten/kota yang berbatasan dan juga dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

(2) Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bogor terletak di antara 6°18'0"-6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45"-107°13'30" Bujur Timur, dan dengan letak Kabupaten Bogor di sekitar wilayah Jakarta, ibu kota Indonesia, menjadikan Kabupaten Bogor sangat strategis sebagai daerah penyangga dan memungkinkan mobilitas yang cepat, baik untuk kebutuhan ekonomi, pemerintahan, maupun sosial. Selain itu, karena kedekatannya dengan Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki kemudahan akses untuk distribusi barang dan jasa, sehingga menjadikannya titik konektivitas yang penting bagi perdagangan dan logistik.

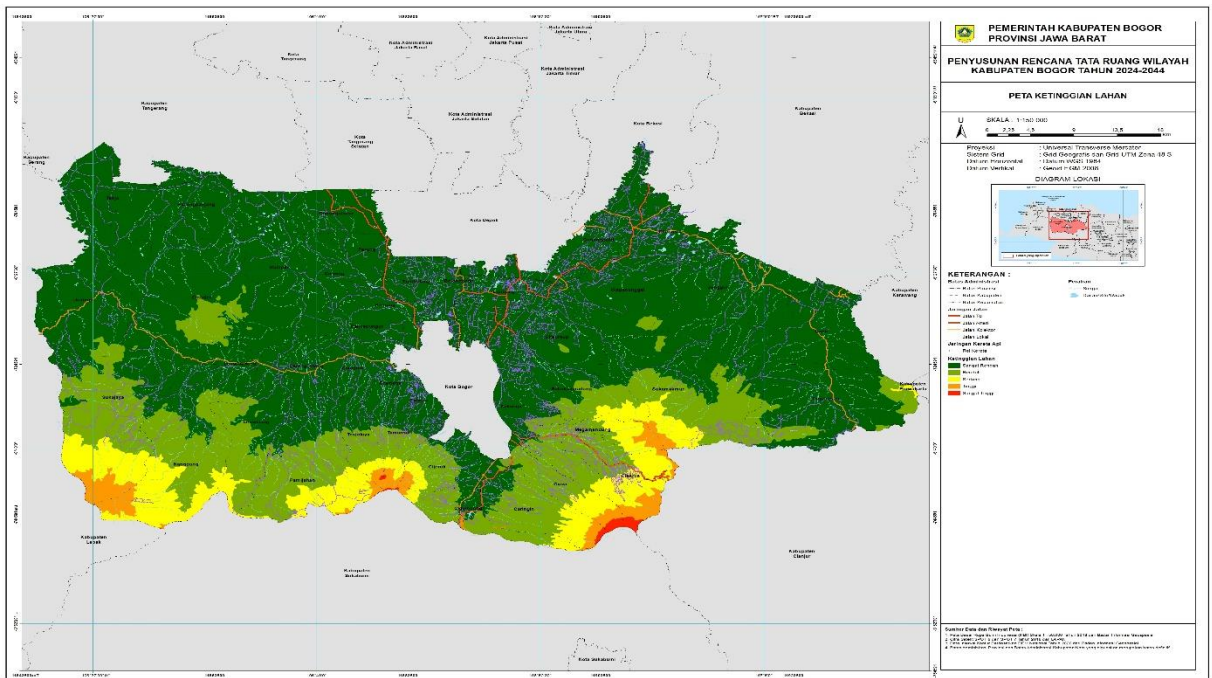
Kondisi geografis Kabupaten Bogor dikelilingi oleh beberapa rangkaian gunung atau pegunungan yang tinggi dan besar, antara lain di bagian Barat ada Pegunungan Halimun Salak yang membentang dari Kabupaten Lebak, Banten hingga kaki timur Gunung Salak. Kemudian, dua pegunungan yang mengurung Kawasan Puncak di sebelah Selatan, yaitu Pegunungan Gede Pangrango yang membentang di 3 (tiga) wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi; kemudian di sebelah Utara Puncak, terdapat Pegunungan Jonggol yang membentang dari Sentul, Sukamakmur (Jonggol) hingga Cipanas Kabupaten Cianjur. Selain itu, terdapat beberapa pegunungan kecil yang biasanya tandus dan terdiri atas batuan kapur, antara lain Pegunungan Cigudeg-Rumpin, Pegunungan Kapur Leuwiliang, Pegunungan Kapur Cileungsi, dan Pegunungan Sanggabuana, Jonggol yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

(3) Kondisi Morfologi, Geologi dan Topografi

Dari sisi morfologi atau bentuk permukaan bumi, Kabupaten Bogor sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan yang menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor ini termasuk ke dalam wilayah rawan bencana tanah longsor. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik geologi batuan di Kabupaten Bogor berupa batuan penyusun

yang berasal dari hasil letusan gunung, dan jenis tanah penutup yang berasal dari material vulkanik lepas (seperti tanah Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol) sehingga agak peka dan sangat peka terhadap erosi. Komposisi batuan penyusun sebagaimana dimaksud merupakan gabungan batu yang terdiri dari jenis batu andesit, tufa, dan basalt dengan sifat relatif lulus air atau memiliki daya resap tinggi terhadap air hujan. Oleh karena itu, jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah apabila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi.

Adapun dari segi topografi, ketinggian lahan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.1
Peta Ketinggian Lahan di Kabupaten Bogor

(4) Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cibeet; dan (7) DAS Cibeureum. Luas DAS, wilayah sungai dan Peta DAS di Kabupaten Bogor disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.1
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor

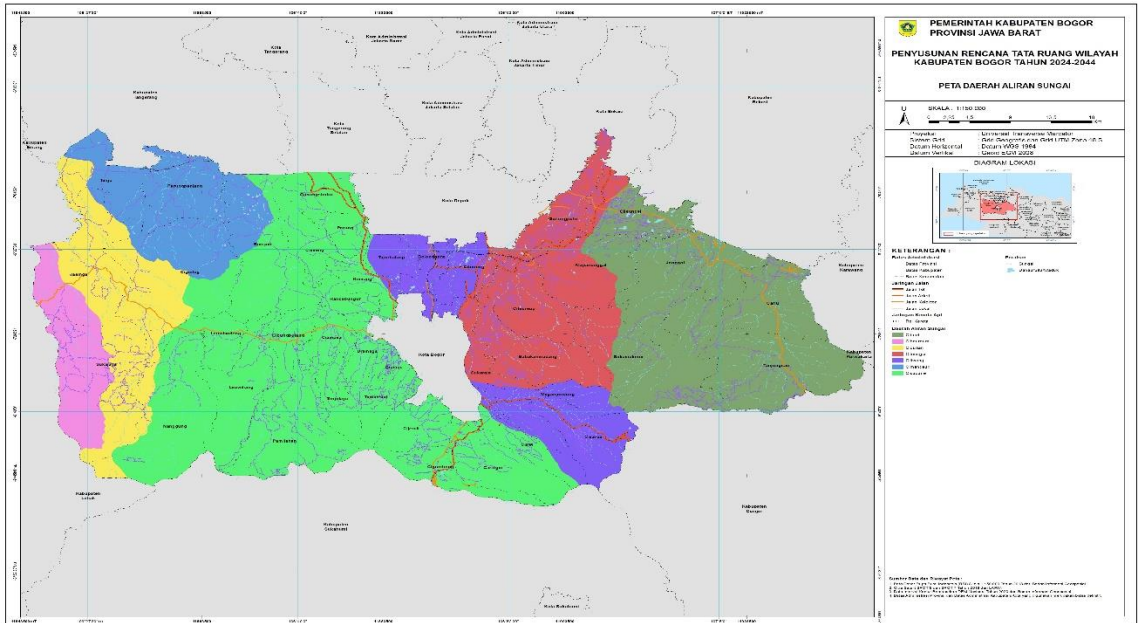
No	Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)	Persentase
1	Cibeet	59.805,85	20,00
2	Cibeureum	13.184,21	4,40
3	Cidurian	28.463,38	9,50
4	Cileungsi	38.158,97	12,80
5	Ciliwung	25.818,57	8,60
6	Cimanceuri	25.379,07	8,50
7	Cisadane	108.367,81	36,20
TOTAL		299.177,85	100,00

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Tabel 2.2
Wilayah Sungai di Kabupaten Bogor

No	Wilayah Sungai	Luas (Ha)	Persentase
1	WS Cidanau - Ciujung – Cidurian	41.647,58	13,90
2	WS Ciliwung – Cisadane	197.724,41	66,10
3	WS Citarum	59.805,85	20,00
TOTAL		299.177,85	100,00

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044



Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bogor memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dimana bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan karakteristik dan fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan generasi yang akan datang. Adapun potensi sumber daya alam di Kabupaten Bogor diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bogor

No	Potensi	Keterangan	
1	Hutan	Luas hutan di Kabupaten Bogor sebesar 77.920 hektar	
2	Keanekaragaman hayati	1	Flora : Jenis tumbuhan yang ada di Kabupaten diperkirakan sedikitnya terdapat 79 jenis tumbuh-tumbuhan
		2	Fauna : Kabupaten Bogor memiliki beragama jenis hewan yang terdiri dari 18 jenis mamalia, 69 jenis burung, 17 jenis reptil, 18 jenis amphihi dan 33 jenis serangga.
3	Pertambangan	Kawasan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bogor seluas 1.337 hektar yang meliputi Kecamatan Cariu, Cigudeg, Citeureup, Jasinga, Nanggung, Parungpanjang, Rumpin, dan Tenjo. Bahan galian yang menjadi potensi pertambangan di Kabupaten Bogor terdiri dari 19 jenis, terdiri dari : andesit, pasir, tanah liat, lempung, batu gamping, trass, bentonit, Felsdpar, Pasir Kuarsa, Bond Clay, Kaolin, Zeolit, Perlit, Obsidian, Fosfat, Diatomea, Emas, Perak, Bijih besi	
4	Pertanian	1	Tanaman Pangan : Komoditas strategis terdiri dari Padi Sawah yang memiliki luas areal sebesar 77.996 hektar. Komoditas unggulan terdiri dari : Talas (luas areal 752 hektar, Ubi Jalar (luas areal 2.367 hektar), Ubi Kayu (luas areal 3.179 hektar)
		2	Hortikultura : Komoditas unggulan terdiri dari : Jambu Biji (luas arel 927 hektar), Pepaya (luas areal 444 hektar), Rambutan (luas areal 2.321 hektar), Manggis (luas arel 1.299 hektar), Nanas (luas arel 9.298 hektar), Tanaman Obat (luas arel 544 hektar), Tanaman Hias Bunga (luas arel 91.835 hektar), Tanaman Hias Daun Indah (luas arel 100.899 hektar).
		3	Perkebunan : Kopi (luas areal 6.198,99 hektar), Karet (luas areal 252 hektar), Pala (luas areal 1.224,79 hektar), Cengkeh (luas areal 1.311,14 hektar)
		4	Perikanan : Ikan Konsumsi (luas areal 1.595,26 hektar), Ikan Hias (luas areal 39,78 hektar), Benih Ikan (luas areal 1.153,37 hektar)

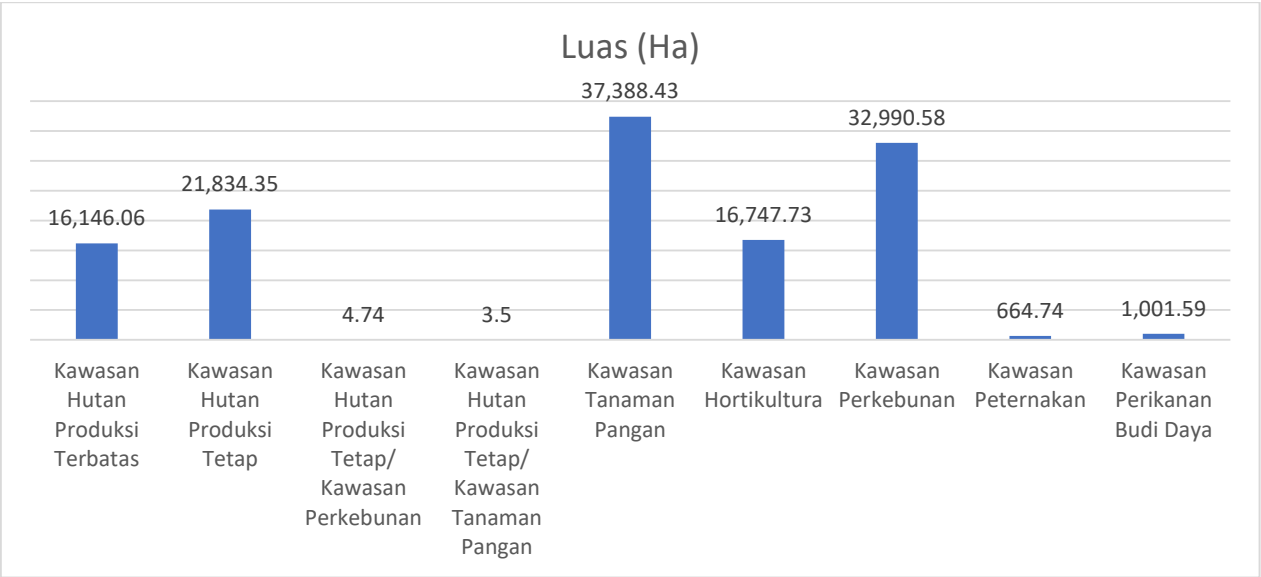
No	Potensi	Keterangan	
1	Hutan	Luas hutan di Kabupaten Bogor sebesar 77.920 hektar	
		5	Peternakan : Daging (luas areal 198.874 hektar), Telur (luas areal 146.482 hektar), Susu (luas areal 23.829 hektar)
5	Pariwisata	1	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Puncak-Lido dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Taman Sari dan Ciomas, bertema utama wisata alam pegunungan dan rekreasi olahraga serta tema pendukung MICE, budaya dan kuliner .
		2	KSPD Halimun-Salak dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Tenjolaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Sukajaya, Jasinga, bertema utama alam, budaya dan geopark serta tema pendukung edukasi .
		3	KSPD Sentul-Cibinong dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja, Citeureup, Cibinong dan Bojonggedede bertema utama wisata olahraga (Sport) dan MICE serta tema pendukung rekreasi dan perkotaan .
		4	KSPD Sukamakmur-Cariu dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari bertema utama wisata alam dan agrowisata , serta tema pendukung wisata minat khusus .
		5	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Cileungsi-Jonggol dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunungputri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol bertema utama perkotaan-rekreasi alam serta tema pendukung wisata religi dan budaya .
		6	KPPD Ciseeng-Kemang dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunungsindur, Parung, Ciseeng, Tajurhalang, Kemang, Rancabungur bertema utama minawisata serta tema pendukung perkotaan dan rekreasi .
		7	KPPD Dramaga-Cigudeg dan sekitarnya , dengan cakupan wilayah Kecamatan Dramaga, Cigudeg, Ciampea, Cibungbulang, Rumpin, Tenjo, Parungpanjang bertema utama perkotaan dan rekreasi serta tema pendukung geopark .

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023, diolah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor bercirikan perdesaan dan bentang alam yang memiliki potensi pengembangan produksi sumber daya alam dan wisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan konservasi alam. Komoditas unggulan pertanian tanaman pangan terdiri dari padi sawah, talas, ubi jalar, dan ubi kayu. Dari sektor tanaman hortikultura memiliki unggulan buah-buahan dan tanaman obat. Komoditas unggulan dari

perkebunan adalah kopi, pala, dan cengkeh. Sementara peternakan diunggulkan oleh komoditas daging, telur ayam dan susu. Potensi bentang alam juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata berbasis alam, terutama pada pengembangan Geopark Nasional Bogor Halimun Salak.

Kabupaten Bogor memiliki lahan sebagai kawasan budidaya seluas 254.234,04 hektar atau 84,98 persen dari luas Kabupaten Bogor. Dari luas tersebut, kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian dalam arti luas, sebesar 126.781,72 hektar. Kawasan ini merupakan salah satu potret ketahanan pangan daerah. Kawasan yang dominan untuk mendukung ketahanan pangan daerah adalah kawasan tanaman pangan, perkebunan, hutan produksi tetap, kawasan hortikultura, dan hutan produksi terbatas.



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

Gambar 2.3
Kawasan Budidaya Peruntukan Pertanian di Kabupaten Bogor

C. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Bogor yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk menguantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar

keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan Jasa Lingkungan penyedia bahan pangan dan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi (*closed system*).

➤ **Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan**

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penyokong pangan untuk kesatuan wilayah megapolitan Jabodetabek. Hal ini karena Kabupaten Bogor memiliki bentang lahan yang subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan utama dan hortikultura. Jasa lingkungan fungsi penyedia (pangan) Kabupaten Bogor termasuk ke dalam katagori kelas tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu lingkungan dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

Akan tetapi, status DDDTLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor sudah melewati batas ambang dimana ketersediaan pangan sebesar 2.792.414.284.778,40 kkal tidak dapat mengimbangi kebutuhan pangan Kabupaten Bogor sebesar 4.881.865.400.500,00 kkal. Terjadi selisih ketersediaan pangan sebanyak -2.089.451.115.721,60 kkal dengan ambang batas penduduk sebanyak 3.558.254 jiwa, dan luas yang belum melampaui seluas 30,25 persen.

Tabel 2.4
Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	61,940,203,514.10	151,295,091,500.00	-89,354,887,985.90	78,922	24.09
2	Bojonggede	26,774,876,671.80	120,274,708,750.00	-93,499,832,078.20	34,116	0.00
3	Caringin	58,609,696,486.20	84,552,104,000.00	-25,942,407,513.80	74,681	37.76
4	Cariu	67,016,154,062.20	144,168,776,750.00	-77,152,622,687.80	85,395	7.68
5	Ciampea	41,333,448,011.80	74,748,222,250.00	-33,414,774,238.20	52,672	2.57
6	Ciawi	33,975,822,824.50	77,365,363,500.00	-43,389,540,675.50	43,292	35.32
7	Cibinong	36,362,324,597.40	163,836,966,000.00	-127,474,641,402.60	46,338	0.00
8	Cibungbulang	49,351,834,713.10	84,138,540,750.00	-34,786,706,036.90	62,888	8.53
9	Cigombong	48,940,974,755.30	66,950,946,250.00	-18,009,971,494.70	62,363	24.41
10	Cigudeg	143,005,497,186.00	143,063,848,750.00	-58,369,564.00	182,229	60.20
11	Cijeruk	40,004,054,144.70	111,294,029,750.00	-71,289,975,605.30	50,974	18.21
12	Cileungsi	93,973,228,818.90	184,086,655,000.00	-90,113,426,181.10	119,748	7.43
13	Ciomas	15,084,300,926.20	81,945,949,250.00	-66,861,648,323.80	19,221	0.00
14	Cisarua	67,007,907,290.30	87,842,560,750.00	-20,834,653,459.70	85,383	43.99
15	Ciseeng	59,954,990,871.00	72,865,607,000.00	-12,910,616,129.00	76,400	33.41

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
16	Citeureup	38,309,233,962.10	137,667,907,750.00	-99,358,673,787.90	48,809	0.00
17	Dramaga	28,108,113,678.60	75,253,601,250.00	-47,145,487,562.40	35,815	0.00
18	Gunungputri	59,963,134,719.40	287,558,296,250.00	-227,595,162,030.60	76,412	2.36
19	Gunungsindur	70,282,924,780.50	101,470,529,250.00	-31,187,604,469.50	89,563	43.95
20	Jasinga	121,086,098,604.00	141,844,347,250.00	-20,758,248,646.00	154,273	47.36
21	Jonggol	125,086,128,919.00	242,452,436,250.00	-117,366,307,331.00	159,390	11.06
22	Kemang	36,948,051,897.10	79,829,478,500.00	-42,881,426,602.90	47,081	15.29
23	Klapanunggal	82,683,749,807.60	155,427,585,000.00	-72,743,835,192.40	105,373	13.16
24	Leuwiliang	78,667,142,783.60	117,105,888,250.00	-38,438,745,466.40	100,247	23.25
25	Leuwisadeng	27,019,090,073.50	48,164,816,000.00	-21,145,725,926.50	34,432	7.90
26	Megamendung	50,772,769,296.80	86,816,107,750.00	-36,043,338,453.20	64,697	39.17
27	Nanggung	126,351,114,526.00	125,275,920,500.00	-1,075,194,026.00	161,010	55.12
28	Pamijahan	116,015,851,181.00	178,476,477,250.00	-62,460,626,069.00	147,842	22.66
29	Parung	34,546,178,338.60	70,266,515,000.00	-35,720,336,661.40	44,022	29.52
30	Parungpanjang	121,528,215,696.00	117,083,130,500.00	4,445,085,196.00	154,865	55.64
31	Rancabungur	22,310,333,810.20	31,320,942,000.00	-9,010,608,189.80	28,428	36.96
32	Rumpin	190,531,175,403.00	169,227,413,750.00	21,303,761,653.00	242,803	64.80
33	Sukajaya	127,207,932,728.00	167,459,372,000.00	-40,251,439,272.00	162,096	38.51

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
34	Sukamakmur	131,990,983,573.00	244,448,840,250.00	-112,457,856,677.00	168,176	18.20
35	Sukaraja	34,010,417,049.30	170,859,693,750.00	-136,849,276,700.70	43,341	0.00
36	Tajurhalang	38,660,662,839.30	90,289,411,250.00	-51,628,748,410.70	49,264	2.74
37	Tamansari	29,525,442,647.50	66,768,099,500.00	-37,242,656,852.50	37,619	23.89
38	Tanjungsari	98,092,020,207.80	171,008,796,250.00	-72,916,776,042.20	124,968	24.94
39	Tenjo	121,123,219,016.00	98,392,739,750.00	22,730,479,266.00	154,354	72.47
40	Tenjolaya	38,259,002,358.00	58,967,684,500.00	-20,708,682,142.00	48,752	34.05
	Kabupaten Bogor	2,792,414,284,778.40	4,881,865,400,500.00	-2,089,451,115,721.60	3,558,254	30.25

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

➤ **Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih**

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 disusun dengan pertimbangan bahwa air merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini, sehingga daya dukung dan daya tampung air ditetapkan secara nasional dan diterjemahkan dalam skala kabupaten.

Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi tanaman. Kekurangan atau kelebihan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta berpengaruh pada kemampuan penyedia pangan dalam menyediakan jasa lingkungan hidup. Keterkaitan pengelolaan air dengan produktivitas pangan dapat dianalisis melalui konsep siklus hidrologi. Setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor memiliki peran dan tanggung jawab melakukan perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan fungsi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air. Ekosistem alam tetap terjaga hingga mempengaruhi ketersediaan sumber pangan bagi manusia.

Berkaitan strategisnya peran air dalam fungsi lingkungan, maka dampak bencana akibat pengelolaan air dapat mengancam peradaban dan kehidupan manusia, seperti kerentanan pangan dan defisit air. Ketersediaan air yang cukup dan bersih merupakan tuntutan kebutuhan hidup mendasar. Pentingnya peran air bagi kebutuhan hidup mendorong pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan air demi menjamin keberlanjutan ketersediaan air, diantaranya melalui penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Secara agregat, DDDTLH Air di Pulau Jawa terindikasi telah terlampaui karena minimnya selisih ketersediaan air di masing-masing wilayah dan kecenderungan kinerja jasa lingkungan fungsi penyedia (air bersih) yang semakin menurun setiap tahunnya. Ketersediaan air dari keenam provinsi di Pulau Jawa sebanyak 118.901.282.137 m³/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi penduduk paling banyak 148.626.602 jiwa dengan tanpa mempertimbangkan pembangunan dan perubahan lahan. Proporsi pemanfaatan air di Provinsi Jawa Barat sendiri tercatat bahwa 1.196.453,33 hektar (31,81 persen) sudah terlampaui dan 2.564.412,74 hektar (68,19 persen) sisanya masih belum terlampaui.

Sementara itu, hasil analisis untuk status DDDTLH penyedia air di Kabupaten Bogor tercatat dengan ketersediaan air sebanyak 2.373.481.483,85 m³, kebutuhan air sebanyak 2.256.573.575,49 m³, sehingga selisih ketersediaan air sebanyak 116.907.908,36 m³, dimana luas wilayah yang belum terlampaui di Kabupaten Bogor seluas 161.244 hektar atau 54,46 persen. Secara rinci, tabulasi status DDLH per kecamatan di Kabupaten Bogor tersaji pada tabel berikut:

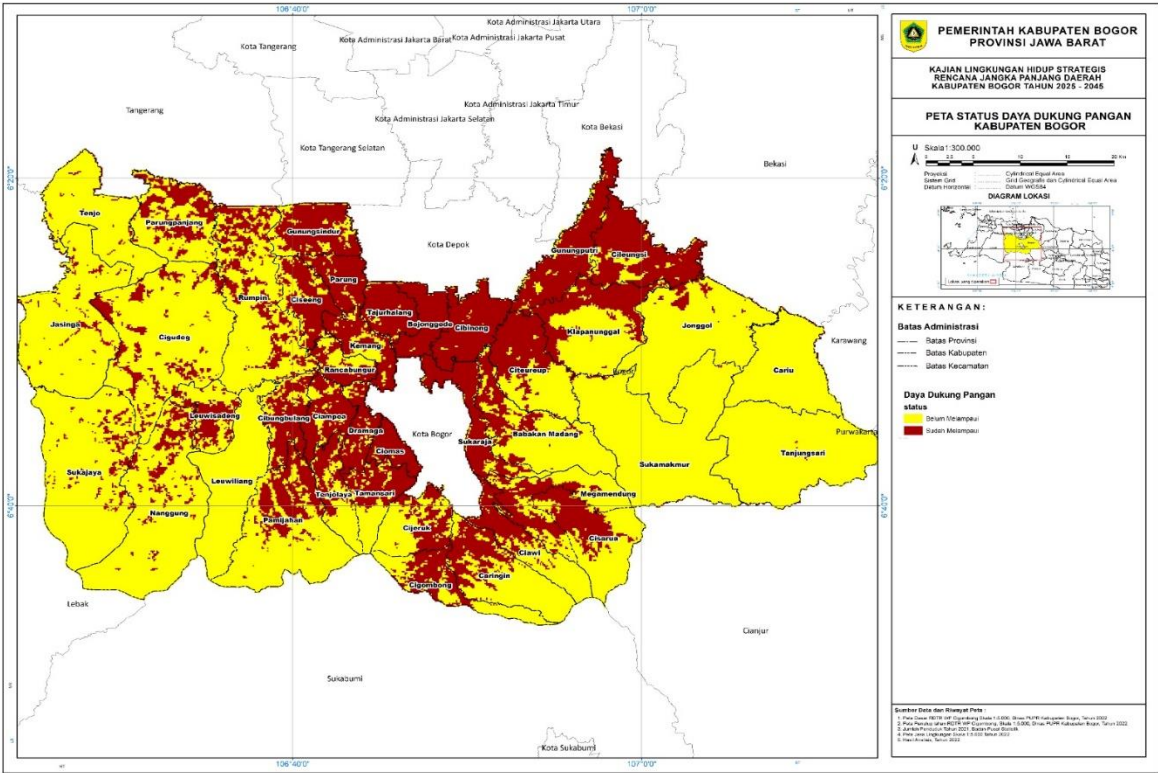
Tabel 2.5
Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	67,541,719.02	75,158,440.51	-7,616,721.49	104,641	61.60
2	Bojonggede	10,766,728.46	20,931,942.67	-10,165,214.21	35,612	18.35
3	Caringin	19,795,901.47	30,654,362.38	-10,858,460.91	-17,930	34.46
4	Cariu	79,358,203.71	114,060,528.68	-34,720,324.97	-217,931	38.14
5	Ciampea	7,345,680.23	50,675,206.74	-43,329,526.51	-406,248	2.57
6	Ciawi	20,702,141.00	20,018,481.30	683,659.70	106,501	48.00
7	Cibinong	33,093,597.90	27,249,209.72	5,844,388.17	276,424	92.60
8	Cibungbulang	9,445,823.53	64,154,981.46	-54,709,157.93	-525,991	0.00
9	Cigombong	31,688,832.41	26,812,713.42	4,876,118.98	141,754	32.25
10	Cigudeg	267,030,475.17	86,649,521.14	180,380,954.02	2,270,044	86.26
11	Cijeruk	10,546,740.27	32,295,773.00	-21,749,032.73	-109,902	16.36
12	Cileungsi	59,449,226.26	57,505,131.08	-1,944,095.18	257,076	74.14
13	Ciomas	3,997,931.95	19,606,394.34	-15,608,462.39	-76,230	0.00
14	Cisarua	71,979,085.05	33,715,580.34	38,363,504.72	554,800	82.64
15	Ciseeng	8,453,384.24	27,990,075.29	-19,536,691.04	-133,267	0.00

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
16	Citeureup	43,435,189.96	44,006,642.33	-571,452.37	168,817	66.28
17	Dramaga	5,523,781.57	37,571,764.23	-32,047,982.66	-275,031	0.00
18	Gunungputri	52,683,560.90	46,632,615.03	6,050,945.87	436,467	92.19
19	Gunungsindur	10,350,837.14	39,664,156.86	-29,313,319.73	-209,971	0.00
20	Jasinga	166,311,654.42	100,091,831.40	66,219,823.02	947,181	91.62
21	Jonggol	113,221,141.45	187,879,920.51	-74,658,779.07	-555,156	23.48
22	Kemang	7,049,553.87	25,673,958.48	-18,624,404.62	-113,832	0.00
23	Klapanunggal	61,275,727.92	76,588,922.52	-15,313,194.60	20,827	34.24
24	Leuwiliang	22,044,921.06	63,435,658.70	-41,390,737.64	-329,836	11.16
25	Leuwisadeng	6,872,838.26	22,888,775.86	-16,015,937.60	-123,992	5.25
26	Megamendung	46,204,322.53	42,453,947.25	3,750,375.28	154,034	68.92
27	Nanggung	67,940,394.70	69,693,695.97	-1,753,301.27	139,342	46.55
28	Pamijahan	45,437,747.08	89,144,031.89	-43,706,284.81	-278,421	32.82
29	Parung	6,145,909.39	17,683,290.40	-11,537,381.01	-43,996	2.96
30	Parungpanjang	183,662,994.88	72,306,315.33	111,356,679.55	1,438,050	100.00
31	Rancabungur	4,425,918.60	17,649,268.92	-13,223,350.32	-113,137	0.00
32	Rumpin	137,514,682.52	94,453,144.48	43,061,538.04	714,040	42.95
33	Sukajaya	191,667,076.43	83,450,243.54	108,216,832.90	1,465,909	96.13

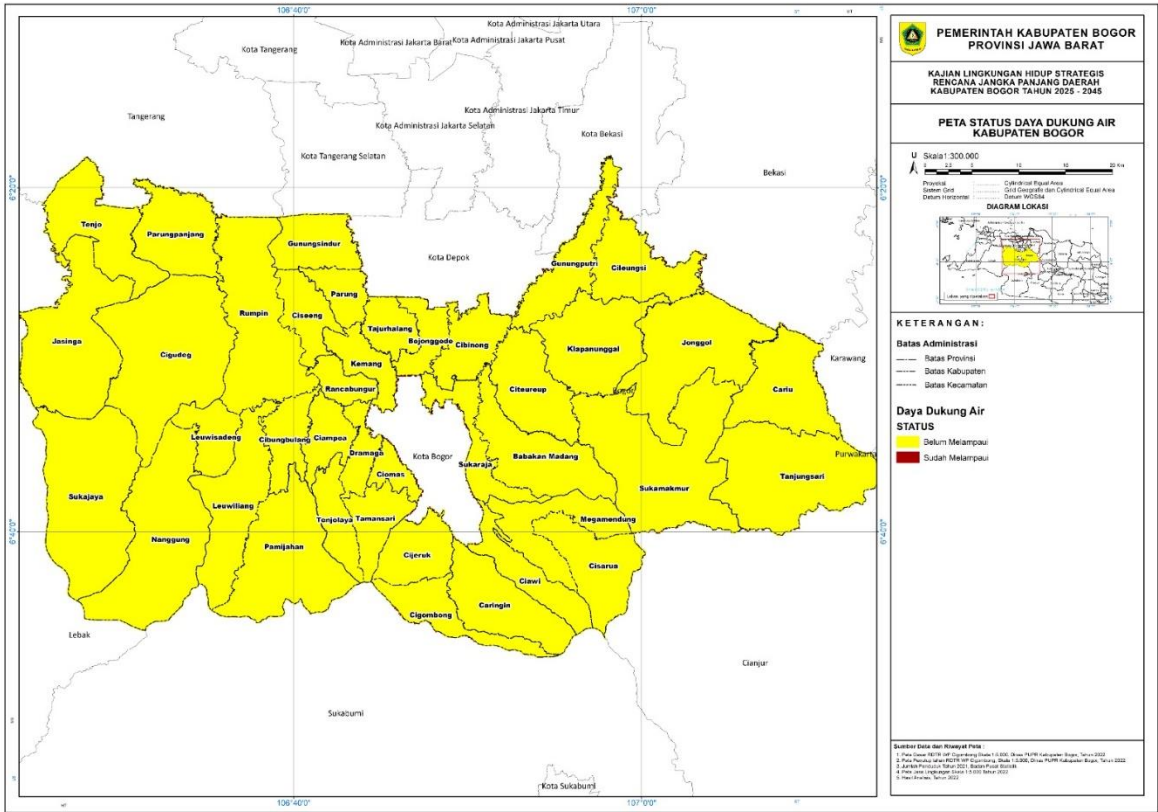
No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih ketersediaan air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas yang Belum Melampaui (%)
34	Sukamakmur	140,353,396.56	147,202,005.46	-6,848,608.90	232,232	58.61
35	Sukaraja	30,275,157.25	49,547,029.65	-19,271,872.40	-5,330	45.86
36	Tajurhalang	6,367,946.07	23,029,226.31	-16,661,280.24	-77,785	0.00
37	Tamansari	8,087,882.41	21,726,863.59	-13,638,981.18	-72,774	23.89
38	Tanjungsari	127,885,115.43	105,335,434.64	22,549,680.79	478,906	76.18
39	Tenjo	179,318,017.17	50,564,937.36	-128,753,079.81	1,615,577	100.00
40	Tenjolaya	8,230,245.63	40,421,552.69	116,907,908.36	-297,442	31.76
	Kabupaten Bogor	2,373,481,483.85	2,256,573,575.49	116,907,908.36	7,574,032	54.46

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.4
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bogor



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.5
Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bogor

➤ **Kinerja Layanan Jasa Lingkungan**

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh Jasa Lingkungan, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas Jasa Lingkungan dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Jasa Lingkungan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa kultural, dan jasa pendukung.

Nilai untuk setiap Jasa Lingkungan selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Ekosistem (IJE) ditentukan dengan pembobotan setiap ekoregion dan penutup lahan. Hasil perhitungan akan menghasilkan rentang indeks 0 sampai 5 yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dengan menggunakan skala likert. Nilai interval tiap kategori adalah 1 untuk nilai sangat rendah hingga 5 untuk nilai sangat tinggi. Guna memudahkan visualisasi pada peta, masing-masing kategori nilai memiliki warna yang berbeda.

Berikut ini rincian luasan Jasa Lingkungan penyedia pangan per kecamatan di Kabupaten Bogor:

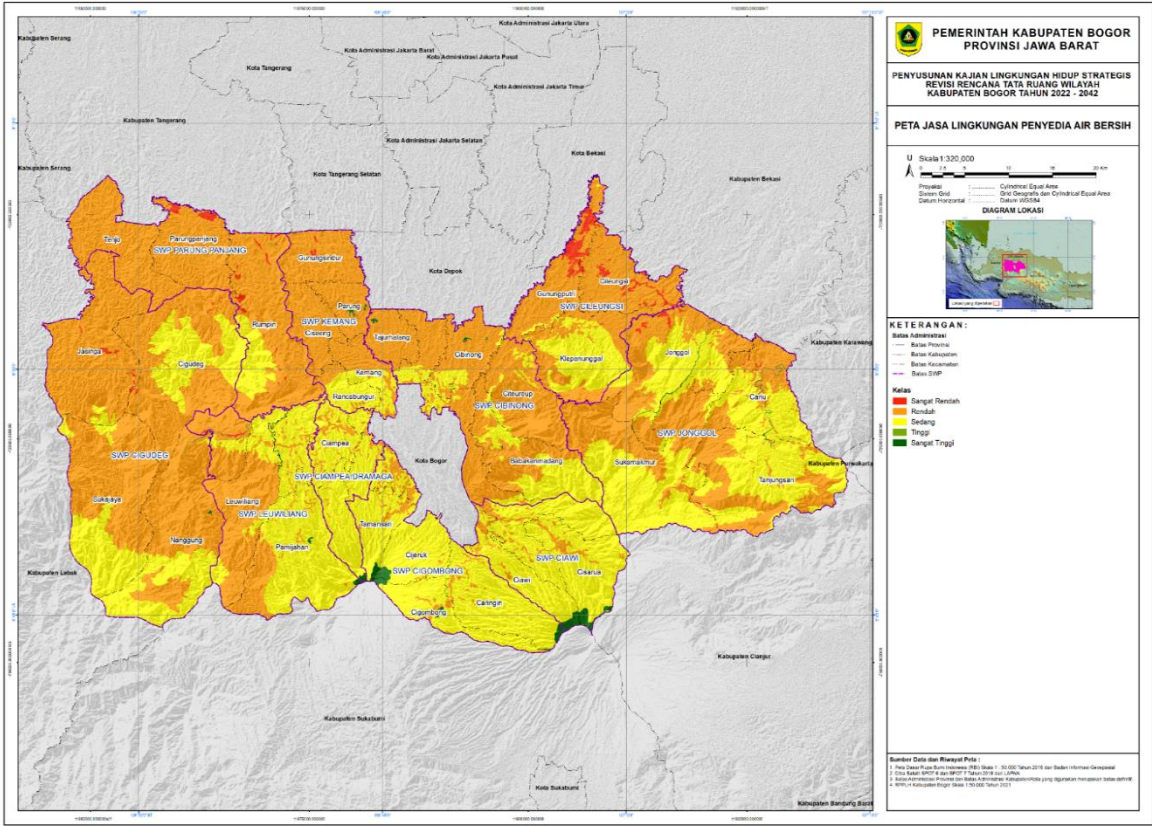
Tabel 2.6
Luasan Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Penyedia Pangan (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	557,93	1.731,04	3.928,57	1.884,92	758,28	8.860,74
2	Bojonggede		1.950,94		936,35	6,68	2.893,97
3	Caringin		690,95	5.554,46	1.527,81	17,77	7.791,00
4	Cariu	58,24	594,75	1.893,07	4.097,83	1.842,16	8.486,05
5	Ciampea		804,19	106,96	674,69	1.812,02	3.397,86
6	Ciawi		809,87	3.381,30	338,17	177,78	4.707,11
7	Cibinong		3.286,17		1.381,51	41,03	4.708,71
8	Cibungbulang		567,76	133,01	866,81	2.202,33	3.769,92
9	Cigombong		607,33	3.250,44	775,80	21,06	4.654,63
10	Cigudeg		8.844,42	8.169,46	18,54	896,17	17.928,59
11	Cijeruk		444,82	2.592,45	1.684,62	78,00	4.799,90
12	Cileungsi		4.458,38	1.525,20	421,59	925,19	7.330,36
13	Ciomas		864,70		700,71	222,46	1.787,87
14	Cisarua	2,61	1.362,42	5.225,17	516,25		7.106,46
15	Ciseeng		1.259,57	196,79	1.204,73	1.329,96	3.991,05

No	Kecamatan	JE Penyedia Pangan (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
16	Citeureup	357,03	2.323,18	3.658,46	791,86	203,58	7.334,11
17	Dramaga		475,69	10,45	799,34	1.272,26	2.557,74
18	Gunungputri		4.411,23	541,79	1.402,10	155,91	6.511,03
19	Gunungsindur		3.110,22	914,05	340,96	490,99	4.856,21
20	Jasinga		3.597,47	8.699,00	61,03	1.393,84	13.751,34
21	Jonggol	59,19	1.888,53	3.550,24	3.560,31	4.385,79	13.444,06
22	Kemang		1.151,80	439,17	1.407,51	311,01	3.309,48
23	Klapanunggal	1.214,1	1.379,75	5.783,06	424,64	958,30	9.759,86
24	Leuwiliang		2.610,25	4.800,52	745,27	1.070,82	9.226,86
25	Leuwisadeng		716,30	2.170,47	421,45	298,42	3.606,65
26	Megamendung		783,32	4.722,54	19,30	819,24	6.344,40
27	Nanggung		8.905,33	5.321,03	85,77	1.479,17	15.791,30
28	Pamijahan		1.714,21	5.728,45	677,73	4.396,97	12.517,36
29	Parung		1.593,98		510,74	669,04	2.773,76
30	Parungpanjang		2.032,61	3.169,01	13,67	1.881,85	7.097,14
31	Rancabungur		339,72	763,67	1.042,19	172,76	2.318,35
32	Rumpin		5.010,78	7.246,24	221,56	1.428,76	13.907,34
33	Sukajaya		7.032,90	7.640,25		1.948,92	16.622,07
34	Sukamakmur	74,24	918,81	14.006,57	796,73	2.506,07	18.302,42
35	Sukaraja	99,52	1.862,07	295,46	1.093,32	999,37	4.349,75
36	Tajurhalang		1.308,79		1.672,97	56,47	3.038,22
37	Tamansari		663,82	2.059,52	1.035,83	167,12	3.926,29
38	Tanjungsari	4,76	4.020,64	5.304,71	4.171,04	1.234,45	14.735,59
39	Tenjo		2.893,08	4.396,22	28,95	983,13	8.301,38
40	Tenjolaya		228,49	1.526,21	216,78	1.661,96	3.633,44
Grand Total (Ha)		2.427,6	89.250,3	128.704,0	38.571,4	41.277,1	300.230,4

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Bogor berada pada kelas jasa sedang dengan total luas sebesar 128.703,99 Ha, sebagaimana tertera pada Tabel 2.6.



Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Gambar 2.6
Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bogor

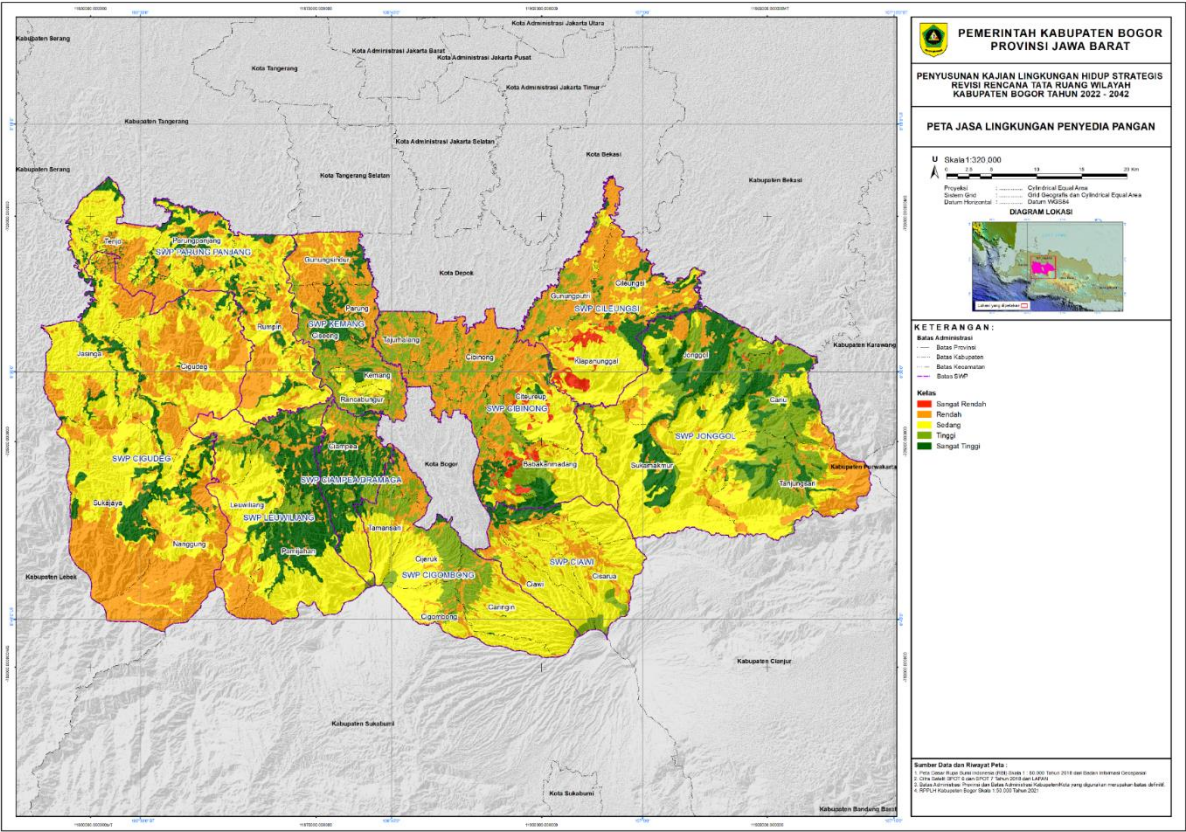
Sementara itu, jasa penyediaan air di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 5 kelas jasa, dari kelas sangat rendah hingga kelas sangat tinggi. Kategori luasan jasa penyediaan air yang paling mendominasi di Kabupaten Bogor berada pada kelas jasa rendah dengan luas sebesar 170.567,01 Ha. Namun terdapat 28 kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas jasa sangat tinggi, dengan total luas sebesar 1.891,52 Ha. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Luasan Jasa Penyediaan Air di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Penyedia Air (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang		4.596,65	4.264,09			8.860,74
2	Bojonggede		2.608,89	278,40		6,68	2.893,97
3	Caringin		690,95	6.945,10		154,94	7.791,00
4	Cariu	30,42	3.667,99	4.683,09		104,56	8.486,05
5	Ciampea		804,19	2.582,36		11,31	3.397,86
6	Ciawi		815,18	3.650,23		241,70	4.707,11
7	Cibinong		4.038,66	633,23		36,81	4.708,71
8	Cibungbulang		574,17	3.137,21		58,54	3.769,92

No	Kecamatan	JE Penyedia Air (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
9	Cigombong		607,33	3.939,10		108,19	4.654,63
10	Cigudeg	148,70	13.335,73	4.425,62		18,54	17.928,59
11	Cijeruk		444,82	4.079,86		275,21	4.799,90
12	Cileungsi	2.866,17	4.428,45		35,74		7.330,36
13	Ciomas		864,70	923,17			1.787,87
14	Cisarua		1.206,79	5.639,74		259,93	7.106,46
15	Ciseeng	94,08	3.837,66		53,61	5,70	3.991,05
16	Citeureup		6.769,73	564,38			7.334,11
17	Dramaga		475,69	2.068,65		13,40	2.557,74
18	Gunungputri	610,22	5.773,95	126,87			6.511,03
19	Gunungsindur	2.235,78	2.594,93		25,51		4.856,21
20	Jasinga	229,52	13.066,04	394,75	48,95	12,08	13.751,34
21	Jonggol	564,13	7.251,43	5.538,26		90,24	13.444,06
22	Kemang		2.180,00	1.083,72		45,76	3.309,48
23	Klapanunggal	395,12	4.749,00	4.597,21	18,52		9.759,86
24	Leuwiliang		7.281,93	1.877,10		67,84	9.226,86
25	Leuwisadeng	188,20	2.959,37	422,35	26,61	10,12	3.606,65
26	Megamendung		1.001,98	5.342,42			6.344,40
27	Nanggung	64,93	9.730,22	5.947,90	15,20	33,04	15.791,30
28	Pamijahan		2.829,18	9.639,20		48,98	12.517,36
29	Parung	50,86	2.706,11			16,80	2.773,76
30	Parungpanjang	228,50	6.854,98	4,04	9,62		7.097,14
31	Rancabungur		719,50	1.570,08	4,96	23,82	2.318,35
32	Rumpin	1.562,01	10.386,24	1.724,08	198,04	36,96	13.907,34
33	Sukajaya	0,12	11.102,10	5.519,85			16.622,07
34	Sukamakmur		8.190,67	10.099,36		12,39	18.302,42
35	Sukaraja		2.900,47	1.449,28			4.349,75
36	Tajurhalang		3.037,17	1,05			3.038,22
37	Tamansari		663,82	3.162,02		100,45	3.926,29
38	Tanjungsari		6.319,40	8.401,78		14,40	14.735,59
39	Tenjo		8.272,43		7,04	21,91	8.301,38
40	Tenjolaya		228,49	3.343,72		61,23	3.633,44
Grand Total (Ha)		9.268,75	170.567,01	118.059,28	443,82	1.891,52	300.230,37

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.7
Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Bogor

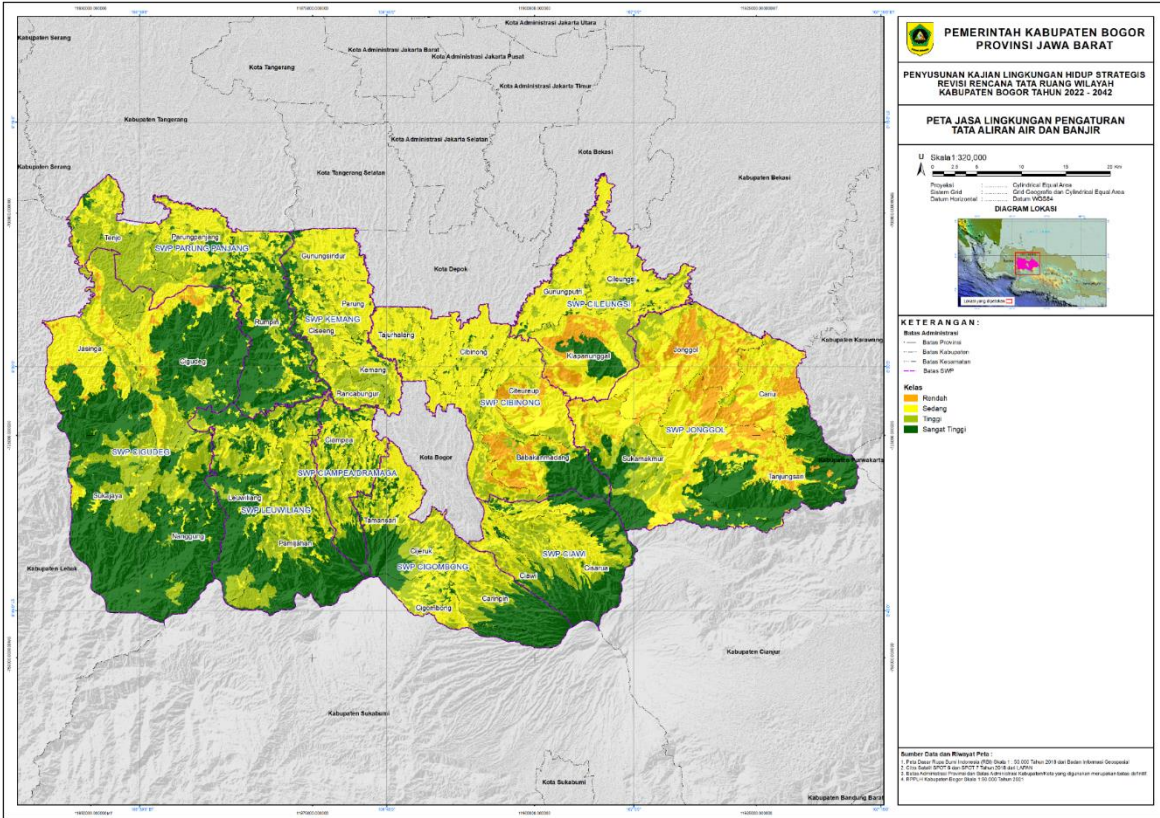
Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Bogor berada pada kelas kategori rendah dengan luas 114.929,14 Ha, terutama disebabkan belum optimalnya pengelolaan DAS dan air limpasan hujan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor

N o	Kecamatan	JE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Babakan Madang	1.851,87	2.882,39	1.096,99	3.029,48	8.860,74
2	Bojonggede		2.557,48	308,63	27,85	2.893,97
3	Caringin		1.948,10	2.288,87	3.554,03	7.791,00
4	Cariu	2.501,10	4.771,95	252,19	960,81	8.486,05
5	Ciampea		1.452,78	1.126,58	818,49	3.397,86
6	Ciawi		1.444,09	1.120,83	2.142,19	4.707,11
7	Cibinong		4.156,68	410,81	141,23	4.708,71
8	Cibungbulang		1.278,08	1.670,22	821,62	3.769,92
9	Cigombong		1.877,56	1.180,67	1.596,40	4.654,63

N o	Kecamatan	JE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
10	Cigudeg	659,91	4.034,17	2.687,00	10.547,51	17.928,59
11	Cijeruk		1.505,46	2.167,45	1.127,00	4.799,90
12	Cileungsi		5.398,74	1.444,69	167,46	7.010,89
13	Ciomas		1.374,38	295,73	117,76	1.787,87
14	Cisarua		2.521,45	1.921,83	2.663,18	7.106,46
15	Ciseeng		1.850,51	1.336,18	804,35	3.991,05
16	Citeureup	989,93	5.397,75	796,46	49,88	7.234,01
17	Dramaga		1.530,00	571,74	456,00	2.557,74
18	Gunungputri		5.054,07	792,65	254,78	6.101,51
19	Gunungsindur		3.283,22	1.146,35	426,64	4.856,21
20	Jasinga	548,19	6.672,08	3.312,73	3.218,33	13.751,34
21	Jonggol	3.909,58	8.322,63	1.197,02	14,83	13.444,06
22	Kemang		1.909,79	1.111,94	287,76	3.309,48
23	Klapanunggal	2.077,32	4.647,63	869,57	1.989,46	9.583,99
24	Leuwiliang		1.399,09	2.325,60	5.502,17	9.226,86
25	Leuwisadeng		725,83	1.259,43	1.621,38	3.606,65
26	Megamendung		2.010,99	1.968,39	2.365,02	6.344,40
27	Nanggung		775,17	2.797,66	12.218,47	15.791,30
28	Pamijahan		1.781,23	3.939,63	6.796,49	12.517,36
29	Parung		2.038,78	669,42	65,56	2.773,76
30	Parungpanjang	29,16	3.443,52	2.813,24	811,23	7.097,14
31	Rancabungur		838,62	1.362,36	117,38	2.318,35
32	Rumpin		3.212,67	2.280,11	8.414,56	13.907,34
33	Sukajaya		957,09	4.787,22	10.877,76	16.622,07
34	Sukamakmur	2.040,10	8.284,78	3.425,67	4.551,88	18.302,42
35	Sukaraja	258,58	2.625,91	1.407,62	57,64	4.349,75
36	Tajurhalang		2.460,13	480,18	97,91	3.038,22
37	Tamansari		1.405,55	819,73	1.701,01	3.926,29
38	Tanjungsari	1.966,17	3.584,73	127,89	9.056,79	14.735,59
39	Tenjo	25,54	2.745,76	5.180,16	258,75	8.210,21
40	Tenjolaya		768,29	1.240,09	1.625,06	3.633,44
Grand Total (Ha)		16.857, 4	114.929, 1	65.991, 6	101.356,1	299.134,2 4

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.8
Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bogor

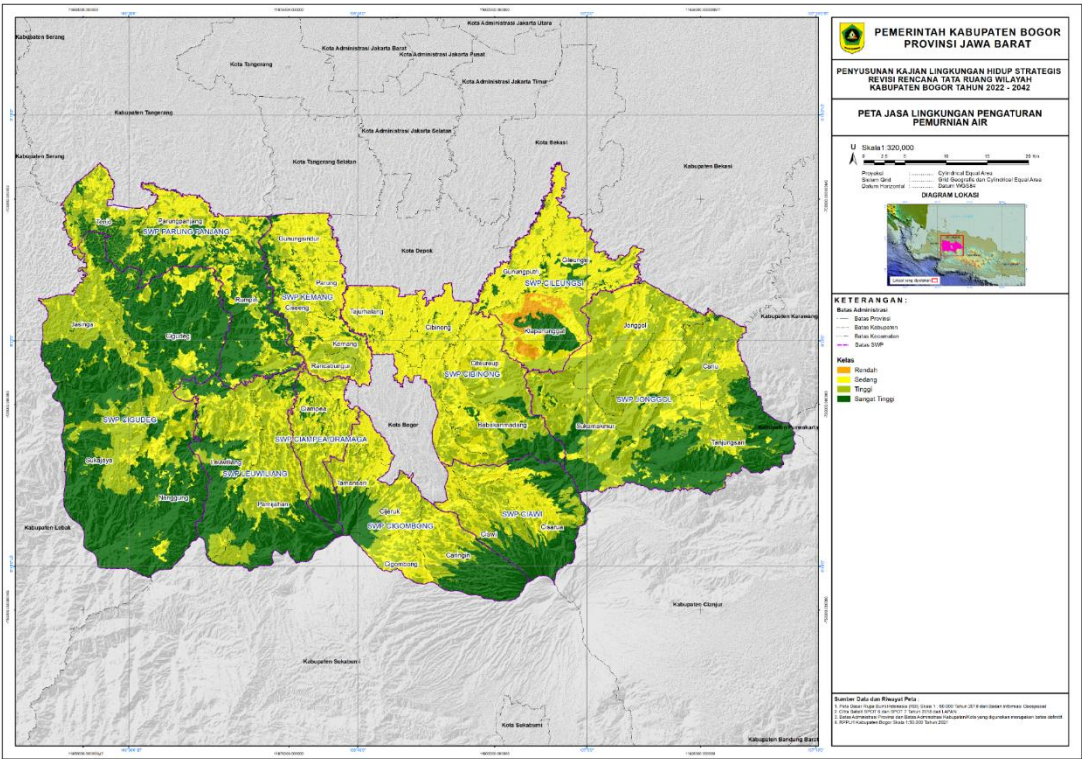
Untuk Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor berada pada kelas sangat tinggi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pemurnian Air (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang		3.243,78	3.462,13	2.154,84	8.860,74
2	Bojonggede		2.557,48	315,40	21,09	2.893,97
3	Caringin		1.948,10	2.358,81	3.484,09	7.791,00
4	Cariu		2.501,10	4.771,95	1.213,00	8.486,05
5	Ciampea		1.452,78	1.489,04	456,04	3.397,86
6	Ciawi		1.444,09	1.218,42	2.044,60	4.707,11
7	Cibinong		4.156,68	470,56	81,48	4.708,71
8	Cibungbulang		1.278,08	2.068,36	423,48	3.769,92
9	Cigombong		1.877,56	1.373,91	1.403,16	4.654,63
10	Cigudeg		2.549,23	2.627,85	12.751,51	17.928,59
11	Cijeruk		1.505,46	2.239,78	1.054,67	4.799,90

No	Kecamatan	JE Pemurnian Air (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
12	Cileungsi		5.363,94	998,21	648,74	7.010,89
13	Ciomas		1.374,38	413,49		1.787,87
14	Cisarua		2.521,45	1.952,88	2.632,13	7.106,46
15	Ciseeng		1.832,70	1.353,22	805,13	3.991,05
16	Citeureup		3.324,42	3.479,78	429,81	7.234,01
17	Dramaga		1.547,23	983,80	26,70	2.557,74
18	Gunungputri		5.056,85	637,16	407,51	6.101,51
19	Gunungsindur		3.201,29	1.228,28	426,64	4.856,21
20	Jasinga		1.149,19	6.150,70	6.451,45	13.751,34
21	Jonggol	9,87	5.046,63	8.193,14	194,43	13.444,06
22	Kemang		1.909,79	1.135,21	264,49	3.309,48
23	Klapanunggal	1.894,33	4.020,99	1.692,05	1.976,61	9.583,99
24	Leuwiliang		1.399,09	3.279,70	4.548,07	9.226,86
25	Leuwisadeng		793,38	1.617,82	1.195,45	3.606,65
26	Megamendung		2.010,99	2.225,57	2.107,84	6.344,40
27	Nanggung		1.651,73	2.206,32	11.933,24	15.791,30
28	Pamijahan		1.781,23	4.537,17	6.198,96	12.517,36
29	Parung		1.985,76	722,44	65,56	2.773,76
30	Parungpanjang		3.224,41	2.249,69	1.623,04	7.097,14
31	Rancabungur		838,62	1.309,22	170,51	2.318,35
32	Rumpin		3.263,45	2.697,71	7.946,18	13.907,34
33	Sukajaya		619,82	4.936,89	11.065,36	16.622,07
34	Sukamakmur		2.839,88	10.678,17	4.784,37	18.302,42
35	Sukaraja		2.721,72	1.613,62	14,41	4.349,75
36	Tajurhalang		2.420,44	519,87	97,91	3.038,22
37	Tamansari		1.405,55	1.334,95	1.185,79	3.926,29
38	Tanjungsari		1.966,17	3.584,73	9.184,69	14.735,59
39	Tenjo		2.027,21	3.038,96	3.144,03	8.210,21
40	Tenjolaya		768,29	1.514,60	1.350,56	3.633,44
Grand Total (Ha)		1.904,20	92.580,94	98.681,52	105.967,57	299.134,24

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.9
Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Bogor

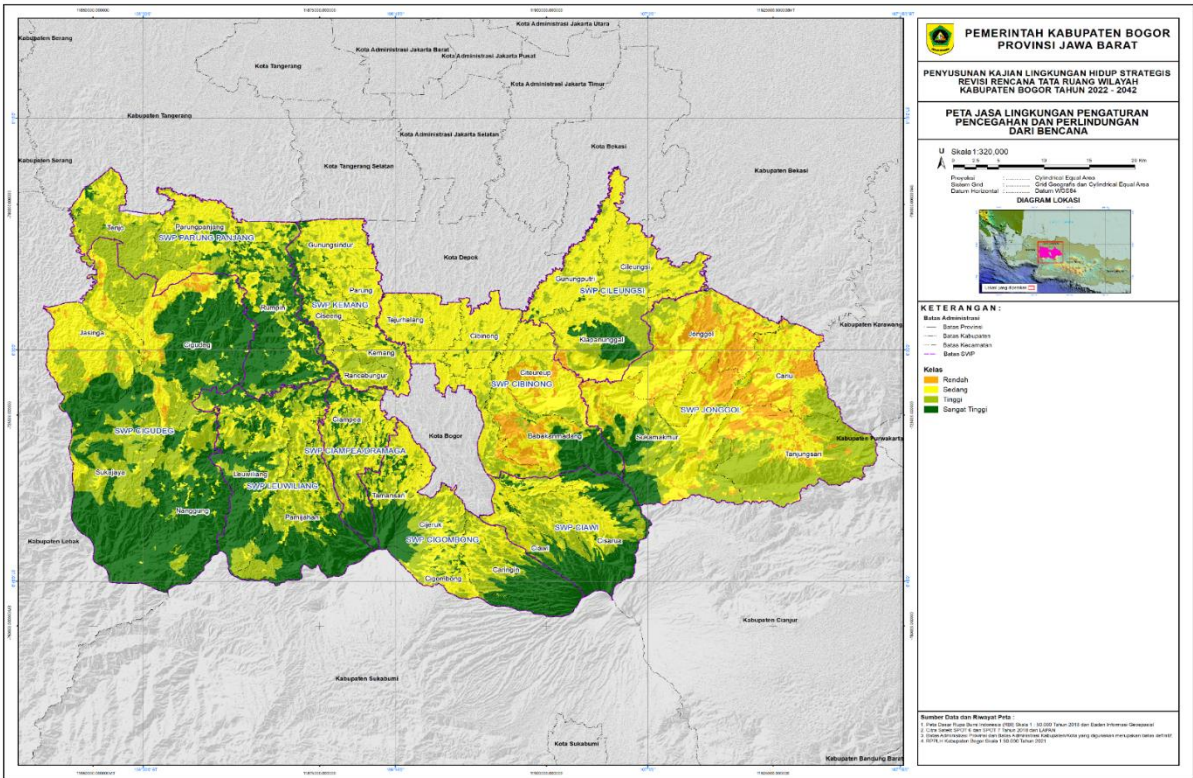
Pada Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor luasan terbesar berada pada kelas Jasa Lingkungan Sedang sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	1.851,87	2.882,39	1.109,87	3.016,61	8.860,74
2	Bojonggede		2.557,48	313,92	22,57	2.893,97
3	Caringin		1.948,10	2.288,87	3.554,03	7.791,00
4	Cariu	2.501,10	4.771,95	1.213,00		8.486,05
5	Ciampea		1.452,78	1.126,58	818,49	3.397,86
6	Ciawi		1.444,09	1.120,83	2.142,19	4.707,11
7	Cibinong		4.156,68	470,70	81,34	4.708,71
8	Cibungbulang		1.278,08	1.670,22	821,62	3.769,92
9	Cigombong		1.877,56	1.180,67	1.596,40	4.654,63
10	Cigudeg	744,46	3.987,27	3.013,14	10.183,72	17.928,59

No	Kecamatan	JE Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
11	Cijeruk		1.505,46	2.167,45	1.127,00	4.799,90
12	Cileungsi		5.398,74	1.602,19	9,97	7.010,89
13	Ciomas		1.374,38	295,73	117,76	1.787,87
14	Cisarua		2.521,45	1.921,83	2.663,18	7.106,46
15	Ciseeng		1.850,51	1.349,62	790,91	3.991,05
16	Citeureup	989,93	5.408,25	787,10	48,73	7.234,01
17	Dramaga		1.530,00	576,43	451,32	2.557,74
18	Gunungputri		5.054,07	830,10	217,34	6.101,51
19	Gunungsindur		3.318,39	1.118,88	418,95	4.856,21
20	Jasinga	548,19	6.710,19	5.216,20	1.276,75	13.751,34
21	Jonggol	3.899,71	8.034,12	1.495,40	14,83	13.444,06
22	Kemang		1.909,79	1.153,02	246,67	3.309,48
23	Klapanunggal	182,99	4.553,64	2.881,63	1.965,73	9.583,99
24	Leuwiliang		1.399,09	2.325,60	5.502,17	9.226,86
25	Leuwisadeng		725,83	1.259,43	1.621,38	3.606,65
26	Megamendung		2.010,99	1.968,39	2.365,02	6.344,40
27	Nanggung		775,17	2.799,95	12.216,18	15.791,30
28	Pamijahan		1.781,23	3.939,63	6.796,49	12.517,36
29	Parung		2.038,95	693,15	41,67	2.773,76
30	Parungpanjang	45,19	3.427,49	2.844,40	780,06	7.097,14
31	Rancabungur		838,62	1.362,36	117,38	2.318,35
32	Rumpin		3.239,30	2.391,62	8.276,41	13.907,34
33	Sukajaya		957,09	6.016,06	9.648,91	16.622,07
34	Sukamakmur	2.040,10	8.284,78	5.262,94	2.714,61	18.302,42
35	Sukaraja	258,58	2.625,91	1.407,62	57,64	4.349,75
36	Tajurhalang		2.460,13	494,04	84,05	3.038,22
37	Tamansari		1.405,55	819,73	1.701,01	3.926,29
38	Tanjungsari	1.966,17	3.584,73	9.184,69		14.735,59
39	Tenjo	25,54	2.745,76	5.184,91	254,00	8.210,21
40	Tenjolaya		768,29	1.240,09	1.625,06	3.633,44
Grand Total (Ha)		15.053,82	114.594,29	84.098,00	85.388,12	299.134,24

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.10
Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kabupaten Bogor

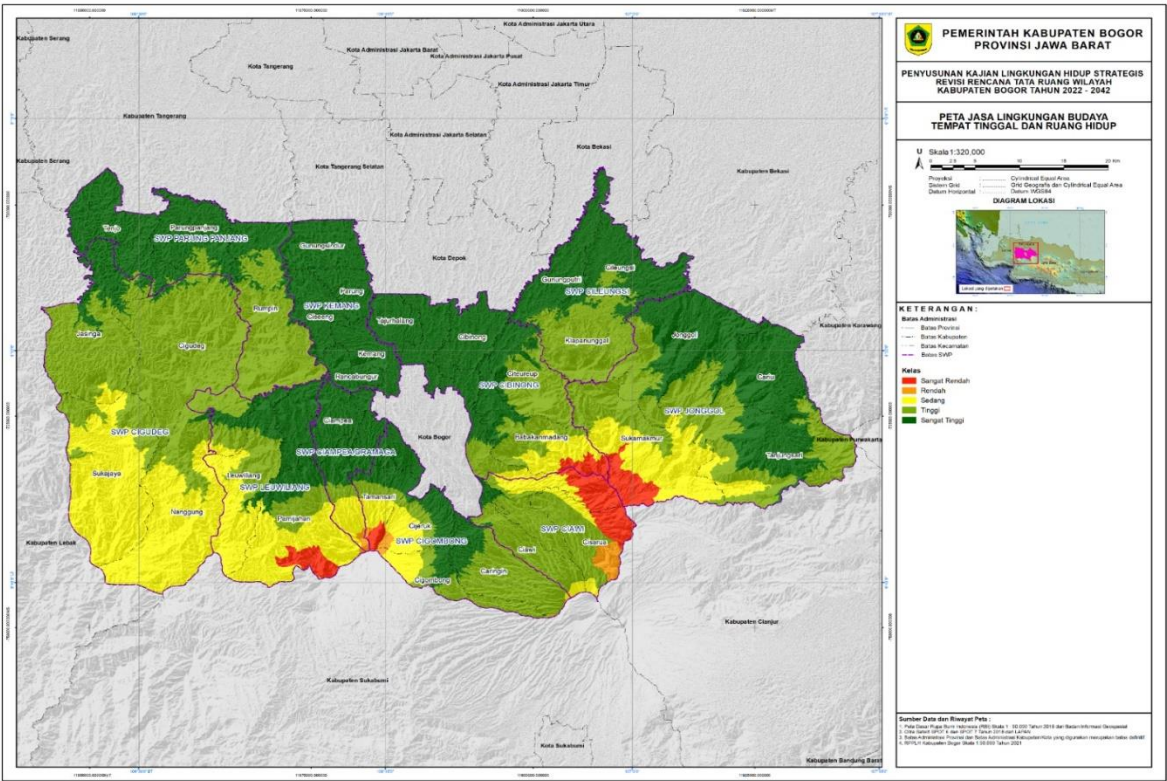
Untuk luasan Jasa Lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 5 kelas, dengan rata-rata kelas jasa yang berada di Kabupaten Bogor didominasi oleh kelas jasa sangat tinggi sebagaimana yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.11
Luasan Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang	981,51		2.413,97	3.072,98	2.392,28	8.860,74
2	Bojonggede					2.893,97	2.893,97
3	Caringin		30,58	34,91	5.834,74	1.890,77	7.791,00
4	Cariu				1.094,71	7.391,34	8.486,05
5	Ciampea					3.397,86	3.397,86
6	Ciawi		6,58	246,50	3.939,63	514,41	4.707,11
7	Cibinong					4.708,71	4.708,71

No	Kecamatan	JE Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
8	Cibungbulang				9,11	3.760,81	3.769,92
9	Cigombong	0,18	77,73	1.083,26	2.547,56	945,90	4.654,63
10	Cigudeg			0,49	17.343,11	584,98	17.928,59
11	Cijeruk	37,09	218,38	1.728,22	968,57	1.847,63	4.799,90
12	Cileungsi				716,53	6.613,84	7.330,36
13	Ciomas					1.787,87	1.787,87
14	Cisarua	1.453,6	1.043,2	817,60	3.792,10		7.106,46
15	Ciseeng				10,24	3.980,81	3.991,05
16	Citeureup				4.711,26	2.622,85	7.334,11
17	Dramaga					2.557,74	2.557,74
18	Gunungputri				54,92	6.456,12	6.511,03
19	Gunung sindur					4.856,21	4.856,21
20	Jasinga			434,30	10.012,04	3.305,00	13.751,34
21	Jonggol			87,38	4.152,62	9.204,06	13.444,06
22	Kemang					3.309,48	3.309,48
23	Klapanunggal				8.246,97	1.512,89	9.759,86
24	Leuwiliang			4.582,21	2.789,46	1.855,20	9.226,86
25	Leuwisadeng			315,74	2.586,51	704,41	3.606,65
26	Mega mendung	1.908,2		1.459,56	2.922,13	54,47	6.344,40
27	Nanggung			12.308,9	3.291,10	191,26	15.791,30
28	Pamijahan	1.466,4	31,66	6.643,59	2.014,87	2.360,83	12.517,36
29	Parung					2.773,76	2.773,76
30	Parung panjang				677,84	6.419,30	7.097,14
31	Rancabungur				7,52	2.310,83	2.318,35
32	Rumpin				10.426,36	3.480,98	13.907,34
33	Sukajaya			13.014,4	3.607,68		16.622,07
34	Sukamakmur	2.054,2		7.711,25	7.909,04	627,95	18.302,42
35	Sukaraja			438,92	1.431,35	2.479,48	4.349,75
36	Tajurhalang					3.038,22	3.038,22
37	Tamansari	389,44	72,78	1.028,29	847,49	1.588,29	3.926,29
38	Tanjungsari			1.276,78	7.319,33	6.139,48	14.735,59
39	Tenjo				160,83	8.140,55	8.301,38
40	Tenjolaya	4,93	208,62	1.408,73	559,38	1.451,77	3.633,44
Grand Total (Ha)		8.295,5	1.689,6	57.035,0	113.058,0	120.152,3	300.230,4

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.11
Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

D. Kebencanaan

Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas dengan dominasi dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, memiliki curah hujan tinggi, dan dialiri oleh 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini mengindikasikan tingginya kerawanan bencana terutama tanah longsor, pergerakan tanah, angin kencang, banjir, dan kebakaran. Hal tersebut sesuai dengan data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bogor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

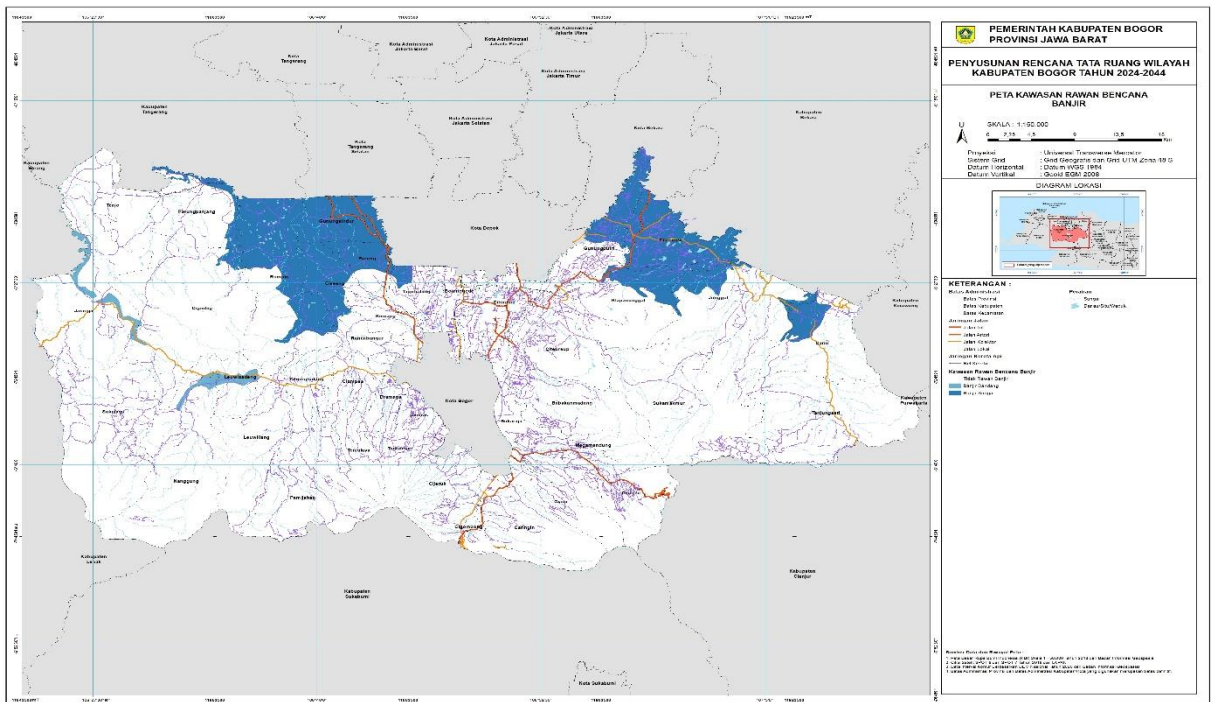
Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023
Tanah Longsor	212	428	513	176	487
Banjir	51	175	112	55	87
Kebakaran	-	-	27	17	49
Angin Kencang	244	375	449	192	699
Kekeringan	-	-	20	8	643
Pergeseran Tanah	-	-	56	34	44
Gempa Bumi	-	-	2	10	44
Lain-Lain	316	359	104	72	108
Total	823	1.337	1.283	564	2.161

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Pengelolaan DAS dan air limpasan hujan yang belum optimal menyebabkan tingginya angka bencana banjir di Kabupaten Bogor sebagai bencana terbanyak. Selain itu, akibat kondisi topografi dan morfologi di Kabupaten Bogor yang didominasi permukaan rawan gerakan tanah serta rusaknya kawasan perbukitan oleh perubahan tata guna lahan, maka bencana longsor menjadi bencana kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Adapun jenis bencana terbanyak yang terjadi di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

➤ **Kawasan Rawan Banjir**

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan dengan tingkat rawan bencana banjir tinggi adalah Kecamatan Cibinong, Citeureup, Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunungputri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

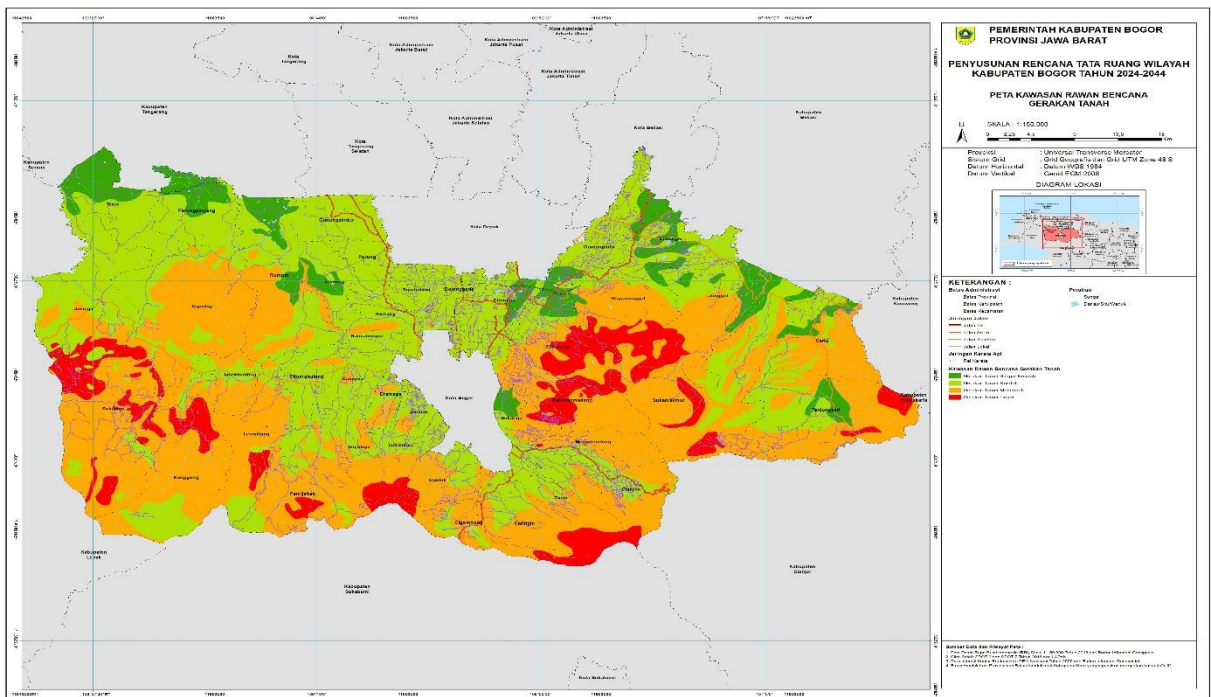


Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

Gambar 2.12
Peta Rawan Banjir di Kabupaten Bogor

➤ **Kawasan Rawan Gerakan Tanah dan Longsor**

Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menjadi penyebab suatu Kawasan mengalami erosi dan longsor. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah dimana beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, dan Gunungsindur termasuk yang berpotensi pergerakan tanah sangat rendah.



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

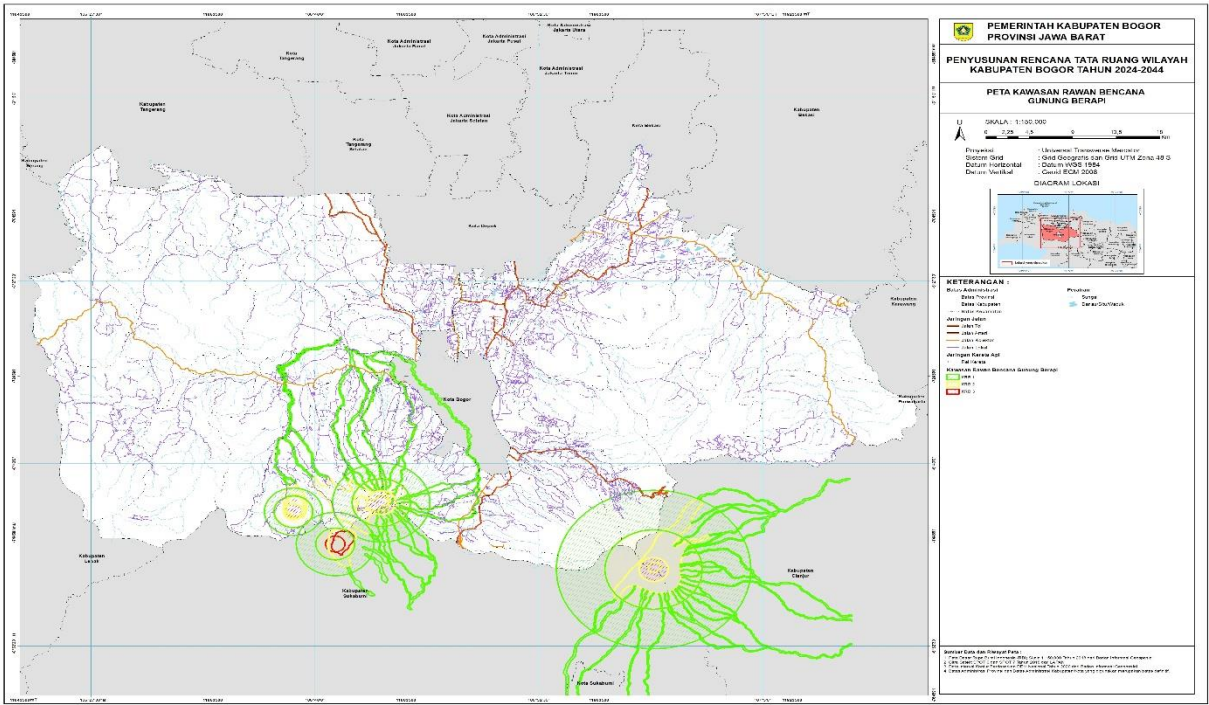
Gambar 2.13
Peta Rawan Pergerakan Tanah di Kabupaten Bogor

➤ **Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi**

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif yang rawan terhadap bencana letusan gunung berapi, dimana gunung berapi aktif yang dimaksud yaitu:

- Gunung Salak yang terletak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
- Gunung Gede-Pangrango yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan

- Gunung Halimun yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

Gambar 2.14
Peta Rawan Bencana Gunung Api di Kabupaten Bogor

Selama tahun 2023, bencana yang terjadi di Kabupaten Bogor sejumlah 619 bencana yang terdiri dari 87 kejadian banjir, 44 gempa bumi dan 488 tanah longsor. Berdasarkan data tersebut, 5 wilayah Kecamatan yang paling sering terjadi bencana yaitu Caringin dengan 50 kejadian bencana, Nanggung dengan 45 kejadian bencana, Cigombong dengan 43 bencana, Ciawi dengan 42 kejadian bencana dan Cijeruk dengan 40 kejadian bencana. Jumlah kejadian bencana yang terjadi di masing-masing kecamatan pada tahun 2023 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Tabel Kejadian Bencana di Kecamatan di Kabupaten Bogor

No	Wilayah Kecamatan	Jenis Bencana		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1	Nanggung	2	7	36
2	Leuwiliang	1	4	15
3	Leuwisadeng	3	1	10
4	Pamijahan	0	7	18

No	Wilayah Kecamatan	Jenis Bencana		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
5	Cibungbulang	0	1	6
6	Ciampea	0	2	5
7	Tenjolaya	0	0	5
8	Dramaga	3	0	14
9	Ciomas	4	1	13
10	Tamansari	3	0	11
11	Cijeruk	1	0	39
12	Cigombong	3	1	39
13	Caringin	0	13	37
14	Ciawi	8	1	33
15	Cisarua	2	0	8
16	Megamendung	0	2	35
17	Sukaraja	11	0	20
18	Babakan Madang	3	0	9
19	Sukamakmur	1	2	17
20	Cariu	0	0	0
21	Tanjungsari	2	0	3
22	Jonggol	2	0	5
23	Cileungsi	2	0	1
24	Klapanunggal	1	0	3
25	Gunungputri	6	1	7
26	Citeureup	2	0	11
27	Cibinong	8	0	18
28	Bojonggede	3	0	4
29	Tajurhalang	3	0	3
30	Kemang	2	0	2
31	Rancabungur	0	0	5
32	Parung	2	0	0
33	Ciseeng	2	0	5
34	Gunungsindur	1	0	1
35	Rumpin	1	0	8
36	Cigudeg	0	1	16
37	Sukajaya	2	0	21
38	Jasinga	2	0	5
39	Tenjo	1	0	0
40	Parungpanjang	0	0	0
Kabupaten Bogor		87	44	488

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

Tabel 2.14
Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Gempa Bumi dan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Rawan Bencana Letusan Gunung Api dan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi
1	Babakan Madang				v		
2	Bojonggede						
3	Caringin		v			v	v
4	Cariu	v					
5	Ciampea					v	
6	Ciawi					v	v
7	Cibinong						
8	Cibungbulang					v	
9	Cigombong		v			v	v
10	Cigudeg	v			v		
11	Cijeruk					v	v
12	Cileungsi	v					
13	Ciomas					v	
14	Cisarua					v	
15	Ciseeng	v					
16	Citeureup				v		
17	Dramaga					v	
18	Gunungputri	v	v				
19	Gunungsindur	v		V			
20	Jasinga	v	v		v		
21	Jonggol	v			v		
22	Kemang	v				v	
23	Klapanunggal	v	v	V	v		
24	Leuwiliang	v			v	v	
25	Leuwisadeng	v					
26	Megamendung				v	v	
27	Nanggung	v			v		
28	Pamijahan		v		v	v	
29	Parung	v					
30	Parungpanjang	v	v	V			
31	Rancabungur	v				v	
32	Rumpin	v	v	V		v	
33	Sukajaya				v		
34	Sukamakmur				v		
35	Sukaraja				v		
36	Tajurhalang	v					
37	Tamansari					v	
38	Tanjungsari				v		
39	Tenjo	V	v				
40	Tenjolaya					v	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

E. Kerentanan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

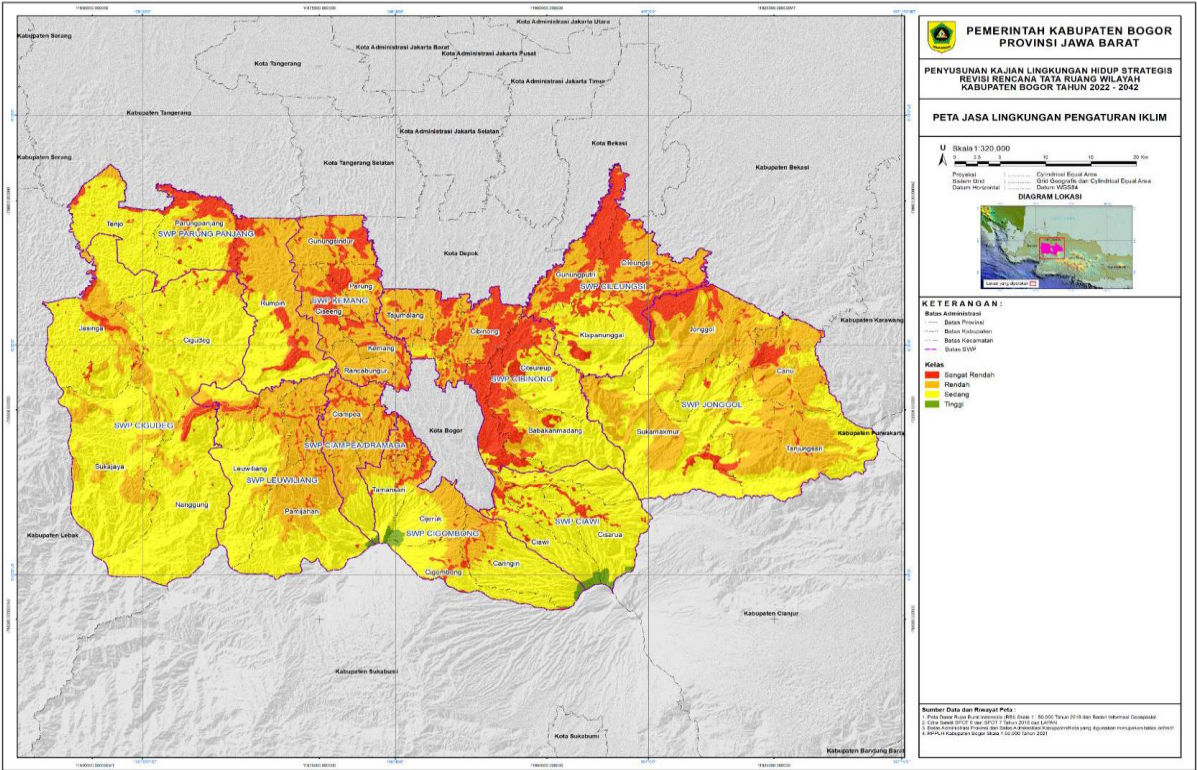
Kerentanan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Bogor dapat diidentifikasi melalui Jasa Lingkungan pengaturan iklim. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Bogor berada pada kelas Jasa Lingkungan sedang dengan luas sebesar 157.595,11 Ha sedangkan untuk luasan kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Bogor didominasi pada kelas sedang dengan luas 295.900,70 Ha, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	JE Pengaturan Iklim (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Babakan Madang	2.161,98	2.642,37	4.056,39		8.860,74
2	Bojonggede	1.950,94	806,79	136,24		2.893,97
3	Caringin	690,95	1.504,51	5.446,76	148,78	7.791,00
4	Cariu	840,31	5.270,91	2.374,82		8.486,05
5	Ciampea	804,19	2.582,36	11,31		3.397,86
6	Ciawi	809,87	308,02	3.347,53	241,70	4.707,11
7	Cibinong	3.286,17	1.370,33	52,22		4.708,71
8	Cibungbulang	567,76	3.137,33	64,83		3.769,92
9	Cigombong	607,33	712,06	3.238,91	96,32	4.654,63
10	Cigudeg	1.375,52	1.532,89	15.020,18		17.928,59
11	Cijeruk	444,82	1.531,09	2.626,78	197,21	4.799,90
12	Cileungsi	5.383,57	1.911,05	35,74		7.330,36
13	Ciomas	864,70	923,17			1.787,87
14	Cisarua	1.206,79		5.639,74	259,93	7.106,46
15	Ciseeng	2.583,45	1.348,28	59,31		3.991,05
16	Citeureup	2.600,21	807,60	3.926,30		7.334,11
17	Dramaga	475,69	2.068,65	13,40		2.068,65
18	Gunungputri	4.538,05	1.892,46	80,53		6.511,03
19	Gunungsindur	3.601,21	1.229,50	25,51		4.856,21
20	Jasinga	1.116,76	1.398,98	11.235,60		13.751,34
21	Jonggol	2.419,48	7.002,06	4.022,52		13.444,06
22	Kemang	1.301,82	1.961,78	45,88		3.309,48
23	Klapanunggal	3.475,45	634,00	5.650,42		9.759,86
24	Leuwiliang	512,69	1.746,88	6.967,30		9.226,86
25	Leuwisadeng	564,50	711,00	2.331,15		3.606,65
26	Megamendung	783,32	838,54	4.722,54		6.344,40
27	Nanggung	856,14	1.587,44	13.347,71		15.791,30
28	Pamijahan	418,34	5.044,31	7.005,74	48,98	12.517,36

No	Kecamatan	JE Pengaturan Iklim (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
29	Parung	2.246,23	510,74	16,80		2.773,76
30	Parungpanjang	1.838,96	1.984,08	3.274,11		7.097,14
31	Rancabungur	374,69	1.913,99	29,67		2.318,35
32	Rumpin	3.161,87	5.454,05	5.291,42		13.907,34
33	Sukajaya	293,00	2.164,64	14.164,42		16.622,07
34	Sukamakmur	501,23	3.290,42	14.510,77		18.302,42
35	Sukaraja	1.961,60	2.040,33	347,83		4.349,75
36	Tajurhalang	1.365,25	1.672,70	0,27		3.038,22
37	Tamansari	663,82	1.199,33	1.962,69	100,45	3.926,29
38	Tanjungsari	694,18	5.933,74	8.107,67		14.735,59
39	Tenjo	456,54	966,94	6.877,91		8.301,38
40	Tenjolaya	228,49	1.817,52	1.526,20	61,23	3.633,44
Grand Total (Ha)		60.027,84	81.452,83	157.595,11	1.154,60	299.177,85

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

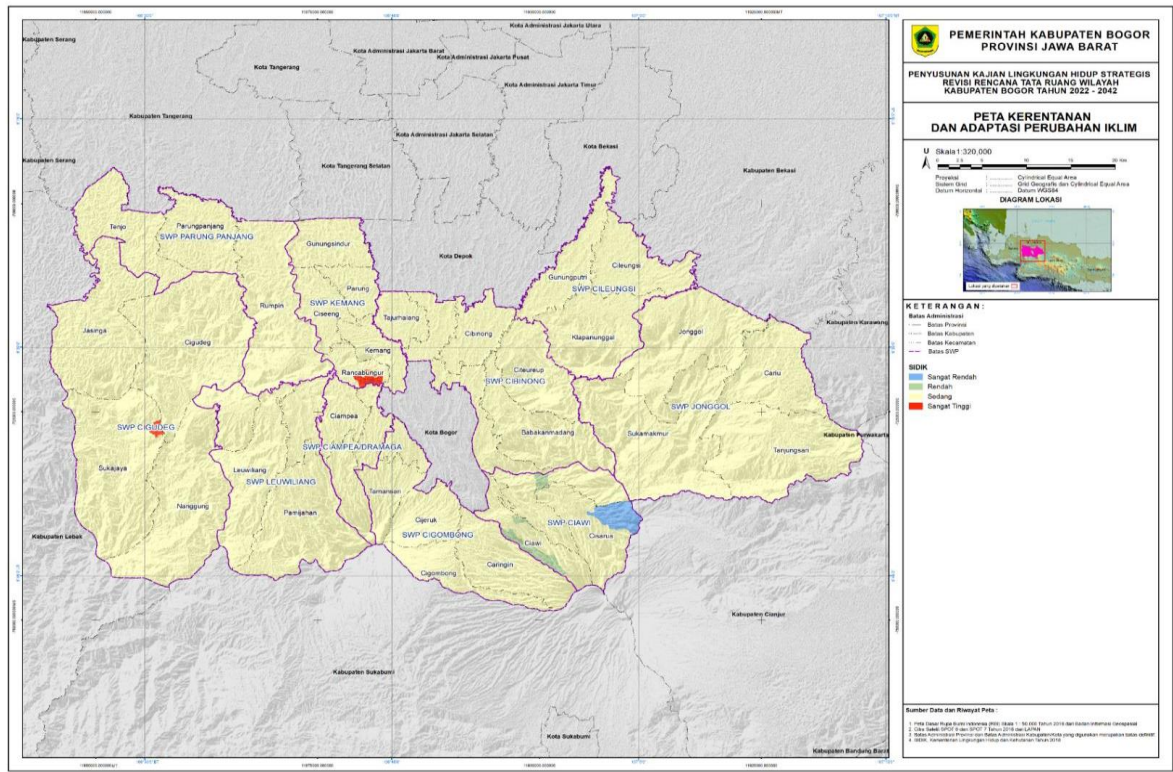
Gambar 2.15
Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bogor

Tabel 2.16
Luasan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Luasan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	
1	Babakan Madang			8.860,74		8.860,74
2	Bojonggede			2.893,97		2.893,97
3	Caringin			7.791,00		7.791,00
4	Cariu			8.486,05		8.486,05
5	Ciampea			3.397,86		3.397,86
6	Ciawi		946,82	3.760,29		4.707,11
7	Cibinong			4.708,71		4.708,71
8	Cibungbulang			3.769,92		3.769,92
9	Cigombong			4.654,63		4.654,63
10	Cigudeg			17.928,59		17.928,59
11	Cijeruk			4.799,90		4.799,90
12	Cileungsi			7.010,89		7.010,89
13	Ciomas			1.787,87		1.787,87
14	Cisarua	1.451,89		5.654,57		7.106,46
15	Ciseeng			3.991,05		3.991,05
16	Citeureup			7.234,01		7.234,01
17	Dramaga			2.557,74		2.557,74
18	Gunungputri			6.101,51		6.101,51
19	Gunungsindur			4.856,21		4.856,21
20	Jasinga			13.751,34		13.751,34
21	Jonggol			13.444,06		13.444,06
22	Kemang			3.309,48		3.309,48
23	Klapanunggal			9.583,99		9.583,99
24	Leuwiliang			9.226,86		9.226,86
25	Leuwisadeng			3.606,65		3.606,65
26	Megamendung		261,77	6.082,63		6.344,40
27	Nanggung			15.791,30		15.791,30
28	Pamijahan			12.517,36		12.517,36
29	Parung			2.773,76		2.773,76
30	Parungpanjang			7.097,14		7.097,14
31	Rancabungur			1.856,97	461,38	2.318,35
32	Rumpin			13.907,34		13.907,34
33	Sukajaya			16.419,22	202,84	16.622,07
34	Sukamakmur			18.302,42		18.302,42
35	Sukaraja			4.349,75		4.349,75
36	Tajurhalang			3.038,22		3.038,22
37	Tamansari			3.926,29		3.926,29
38	Tanjungsari			14.735,59		14.735,59

No	Kecamatan	Luasan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (Ha)				Grand Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	
39	Tenjo			8.301,38		8.301,38
40	Tenjolaya			3.633,44		3.633,44
Grand Total (Ha)		1.451,89	1.208,60	295.900,70	664,22	299.177,85

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.16
Peta Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Bogor

F. Kemampuan Lahan

Klasifikasi kemampuan lahan menunjukkan daya dukung tanah-lahan yang merupakan analisis fisik dan lingkungan yang memberikan informasi mengenai kemampuan tanah dalam mendukung untuk kegiatan konstruksi untuk dikembangkan sebagai perkotaan. Adapun kriteria konstruksi untuk daya dukung tanah ini ditetapkan berdasarkan pada peta hasil analisis SKL, peta topografi, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima tipologi sebagai berikut:

- Kemampuan Pengembangan Tinggi, dengan nilai total 135-160, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan dikembangkan sebagai lahan terbangun tinggi;
- Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi, dengan nilai total 110-134, merupakan tipologi yang memiliki kemampuan sebagai pengembangan lahan terbangun hanya saja kualitasnya satu tingkat di bawah tipologi daya dukung sangat tinggi;
- Kemampuan Pengembangan Sedang, dengan nilai total 84-109, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sedang sebagai lahan terbangun;
- Kemampuan Pengembangan Rendah, dengan nilai total 59-83, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan rendah sebagai lahan terbangun; dan
- Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah, dengan nilai total 32–58, merupakan karakteristik yang menunjukkan kemampuan pengembangan sangat rendah sebagai lahan terbangun, dapat dikembangkan dengan rekayasa dan konstruksi khusus.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bogor didominasi oleh lahan dengan klasifikasi kemampuan pengembangan agak tinggi dengan luasan sebesar 236.885,96 Ha. Sedangkan kondisi lain berupa kemampuan pengembangan kelas sedang dengan luasan 45.162,35 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan kemampuan lahan di wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

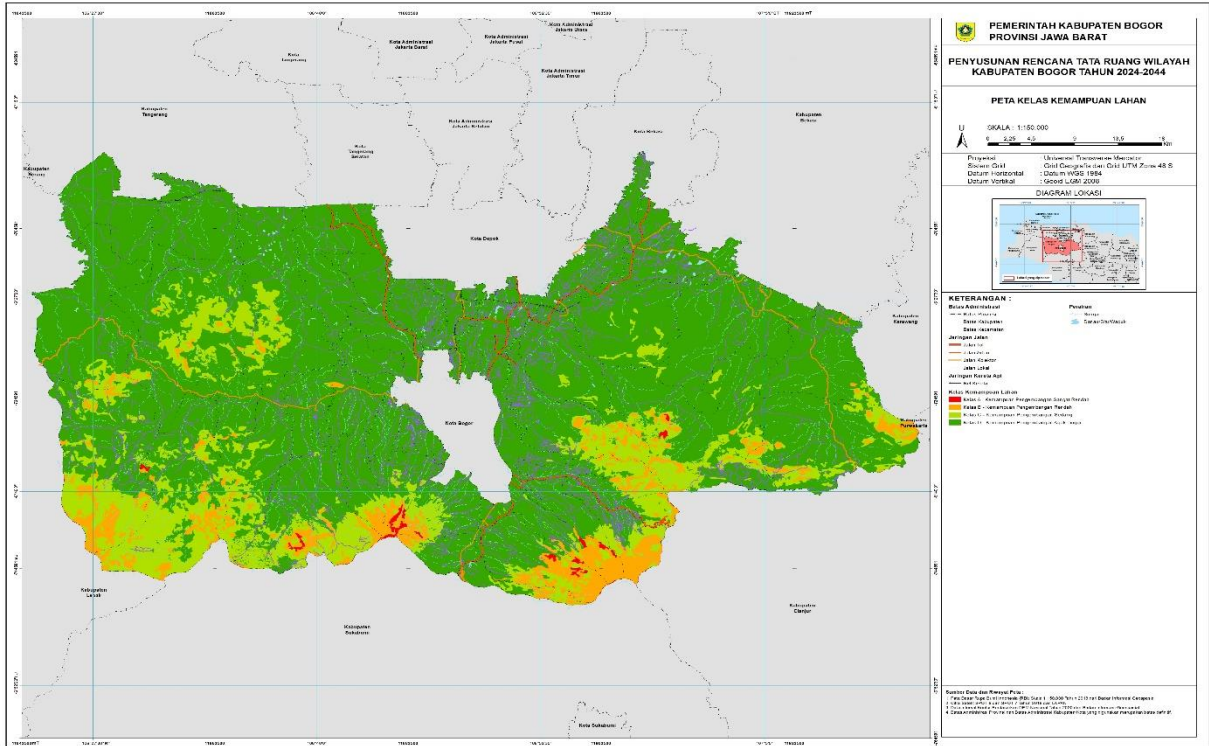
Tabel 2.17
Luas Kemampuan Lahan Kabupaten Bogor

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)			
			Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	Kemampuan Pengembangan Rendah	Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi
1	Nanggung	15.793,58	39,21	1.669,12	7.238,02	6.847,23
2	Leuwiliang	9.240,22	-	290,94	2.737,84	6.211,43
3	Leuwisadeng	3.558,86	-	49,14	258,87	3.250,85
4	Pamijahan	12.514,90	101,57	1.219,87	4.216,07	6.977,38
5	Cibungbulang	3.852,05	-	10,61	21,09	3.820,35
6	Ciampea	3.307,07	-	63,35	1,47	3.242,25
7	Tenjolaya	3.641,76	13,02	476,08	392,52	2.760,15
8	Dramaga	2.527,59	-	-	-	2.527,59
9	Ciomas	1.860,78	-	-	-	1.860,78
10	Tamansari	3.888,15	205,40	440,83	598,96	2.642,96
11	Cijeruk	4.799,93	53,67	515,04	1.136,20	3.095,02
12	Cigombong	4.633,83	0,08	534,65	738,33	3.360,77
13	Caringin	7.811,77	156,26	2.068,49	1.088,81	4.498,21

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)			
			Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	Kemampuan Pengembangan Rendah	Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi
14	Ciawi	4.693,32	130,28	1.385,76	390,51	2.786,77
15	Cisarua	7.166,09	0,80	1.552,11	2.176,42	3.436,76
16	Megamendung	6.252,21	5,95	591,65	1.704,43	3.950,17
17	Sukaraja	4.432,05	-	-	17,42	4.414,62
18	Babakanmadang	9.217,26	-	725,23	2.399,83	6.092,21
19	Sukamakmur	18.307,16	79,91	922,39	4.285,81	13.019,05
20	Cariu	8.484,92	-	68,68	293,06	8.123,18
21	Tanjungsari	14.735,60	-	1.119,55	2.433,25	11.182,80
22	Jonggol	13.445,23	-	-	116,57	13.328,66
23	Cileungsi	7.061,13	-	-	-	7.061,13
24	Klapanunggal	9.549,36	-	-	545,50	9.003,87
25	Gunungsindur	4.899,91	-	-	-	4.899,91
26	Citeureup	6.882,78	-	-	161,58	6.721,20
27	Cibinong	4.665,20	-	-	-	4.665,20
28	Bojonggede	2.836,52	-	-	-	2.836,52
29	Tajurhalang	3.088,27	-	-	-	3.088,27
30	Kemang	3.392,13	-	-	-	3.392,13
31	Rancabungur	2.258,52	-	-	-	2.258,52
32	Parung	2.727,43	-	-	-	2.727,43
33	Ciseeng	3.992,62	-	-	-	3.992,62
34	Gunungputri	6.082,64	-	-	-	6.082,64
35	Rumpin	13.880,58	-	157,68	1.912,49	11.810,41
36	Cigudeg	17.745,14	-	301,79	4.194,36	13.248,99
37	Sukajaya	16.619,69	0,19	2.044,74	5.469,13	9.105,63
38	Jasinga	13.956,60	-	183,06	633,82	13.139,72
39	Tenjo	8.334,72	-	-	-	8.334,72
40	Parungpanjang	7.087,84	-	-	-	7.087,84
KABUPATEN BOGOR		299.225,41	786,34	16.390,76	45.162,35	236.885,96

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor masuk ke dalam kelas kemampuan pengembangan agak tinggi, yang artinya wilayah dengan kemampuan tersebut secara fisik dapat dialokasikan sebagai wilayah terbangun dan secara eksisting lokasi perkembangan permukiman maupun pusat kegiatan sudah sesuai dengan hasil analisis terhadap kemampuan lahan.



Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.17
Peta Kelas Kemampuan Lahan

G. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW ditunjukkan berdasarkan hasil *superimpose* antara peta RTRW dengan peta penggunaan lahan, yang menghasilkan 2 (dua) kategori, yaitu:

- (1) Sesuai; apabila penggunaan lahan sesuai dengan RTRW. Artinya dalam lokasi yang sama, rencana fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW benar-benar sesuai dengan penggunaan lahan aktual di lapangan;
- (2) Belum sesuai; apabila penggunaan tanah belum sesuai dengan RTRW, artinya penggunaan tanah dalam lokasi yang sama belum sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dalam RTRW.

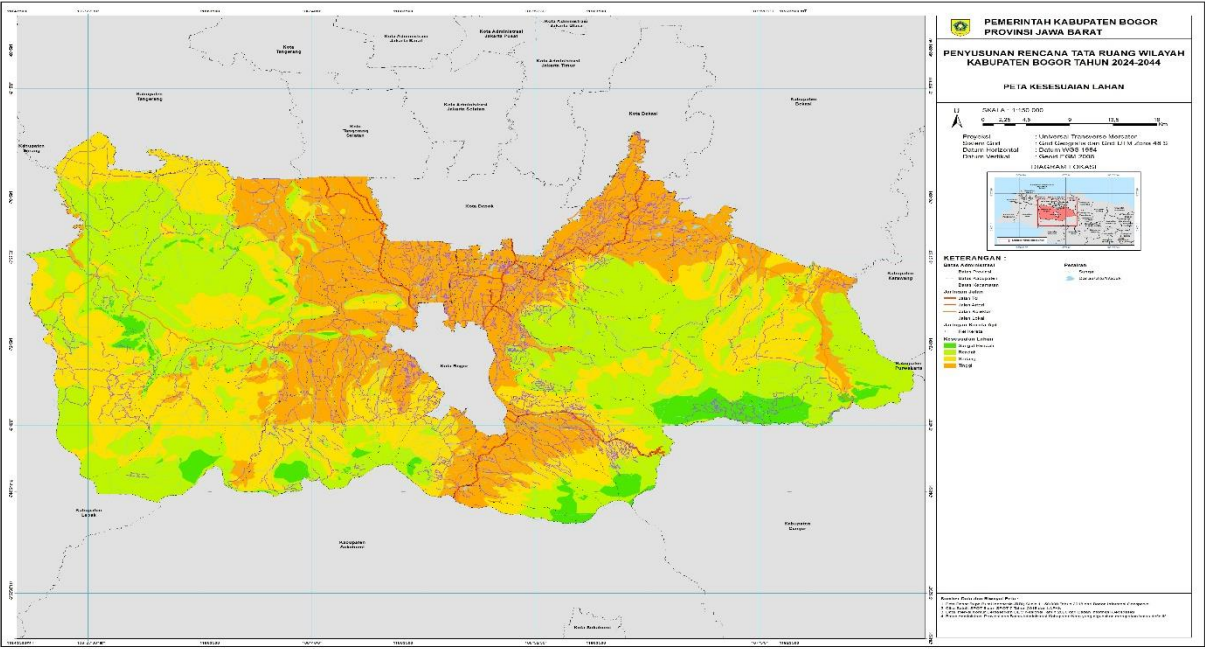
Tabel 2.18
Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RTRW Kabupaten Bogor

Arahan Fungsi Kawasan Dalam RTRW	Kesesuaian Penggunaan Lahan (ha)		
	Sesuai	Belum Sesuai	Jumlah
Enclave Kawasan Hutan	4.414,0	478,8	4.892,8
Kawasan Hutan Konservasi	29.619,0	6.946,9	36.565,9
Kawasan Hutan Lindung	4.057,3	553,1	4.610,4
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9.378,9	6.004,8	15.383,7
Kawasan Hutan Produksi Tetap	14.726,1	8.522,1	23.248,2
Kawasan Khusus Hankam	139,7	383,0	522,7
Kawasan Peruntukan Industri	2.732,2	7.384,0	10.116,3

Arahan Fungsi Kawasan Dalam RTRW	Kesesuaian Penggunaan Lahan (ha)		
	Sesuai	Belum Sesuai	Jumlah
Kawasan Peruntukan Lahan Basah	23.952,5	14.168,0	38.120,5
Kawasan Peruntukan Lahan Kering	11.473,3	8.609,5	20.082,8
Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Tanaman Tahunan	26.269,4	14.259,3	40.528,7
Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	4.463,9	9.780,0	14.243,9
Permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah	6.619,1	20.578,5	27.197,5
Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang	9.973,5	12.268,0	22.241,4
Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi	23.275,7	17.820,9	41.096,5
Rencana Waduk	4,2	109,7	113,9
Situ	209,5	256,5	465,9
Jumlah	171.308,2	128.123,0	299.431,1
% Luas Wilayah	57,21	42,79	100,00

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan fungsi kawasan yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari tiap-tiap kawasan, terlihat bahwa penggunaan lahan yang telah sesuai dengan arahan fungsi kawasan seluas 29.619,0 Ha yaitu pada arahan tata ruang kawasan hutan konservasi. Sedangkan penggunaan lahan yang belum sesuai dengan fungsi kawasan seluas 20.578,5 Ha berada pada arahan tata ruang kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan seluas 873,4 Ha dan seluas 356,3 Ha berada pada fungsi kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya dapat disebabkan oleh tingginya nilai *land rent*. Hal ini antara lain disebabkan oleh mekanisme pengendalian maupun monitoring perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bogor belum efektif.



Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.18
Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRW

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan perubahan penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan dalam RTRW. Perubahan penggunaan tanah terjadi karena peningkatan kebutuhan akan ruang dihadapkan pada ketersediaan lahan yang terbatas. Penggunaan tanah non terbangun seperti pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran, lahan kosong merupakan lahan yang mudah dikonversikan menjadi penggunaan lahan terbangun seperti permukiman teratur, permukiman tidak teratur, kawasan industri, dan fasilitas pendidikan. Perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan dalam kurun waktu antara Tahun 2013 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Perubahan Penggunaan Tanah Pada Fungsi Kawasan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

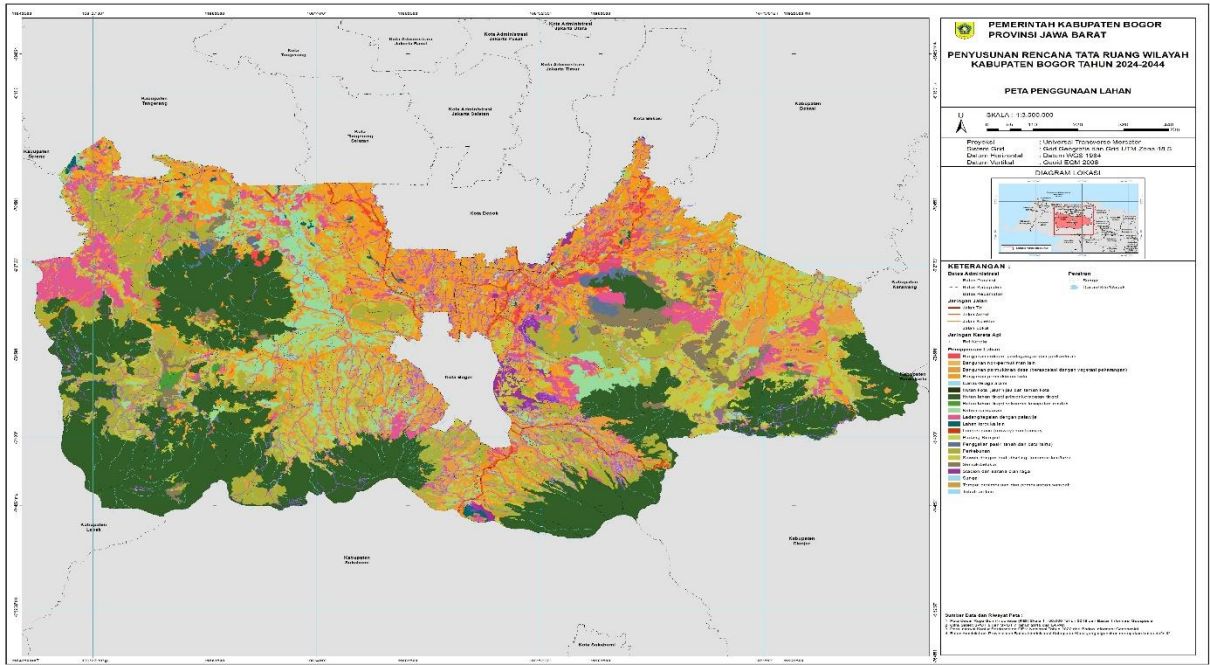
ARAHAN FUNGSI KAWASAN DALAM RTRW	PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (HA)		
	BERUBAH	TIDAK BERUBAH	JUMLAH
Enclave Kawasan Hutan	3,1	4.889,7	4.892,8
Kawasan Hutan Konservasi	6,1	36.559,8	36.565,9
Kawasan Hutan Lindung	-	4.610,4	4.610,4
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	17,0	15.366,8	15.383,7
Kawasan Hutan Produksi Tetap	113,2	23.135,0	23.248,2
Kawasan Khusus Hankam	37,9	484,7	522,7
Kawasan Peruntukan Industri	179,1	9.937,1	10.116,3
Kawasan Peruntukan Lahan Basah	79,7	38.040,8	38.120,5

ARAHAN FUNGSI KAWASAN DALAM RTRW	PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (HA)		
	BERUBAH	TIDAK BERUBAH	JUMLAH
Kawasan Peruntukan Lahan Kering	95,7	19.987,1	20.082,8
Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Tanaman Tahunan	432,5	40.096,2	40.528,7
Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	71,3	14.172,7	14.243,9
Permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah	359,9	26.837,6	27.197,5
Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang	1.020,0	21.221,4	22.241,4
Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi	1.478,4	39.618,1	41.096,5
Rencana Waduk	1,4	112,5	113,9
Situ	0,8	465,1	465,9
JUMLAH	3.896,1	295.535,0	299.431,1
% LUAS WILAYAH	1,3	98,7	100,0

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Jika diperhatikan pada tabel diatas diketahui bahwa perubahan penggunaan tanah selama kurun waktu 7 tahun di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa perubahan terbesar penggunaan tanah pada fungsi kawasan Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi terjadi pada penggunaan tanah sawah tadah hujan menjadi perumahan padat seluas 477,8 Ha, dan tegalan menjadi perumahan padat seluas 297,7 Ha juga pada arahan pola ruang kawasan Permukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi. Selain itu terjadi juga perubahan penggunan tanah dari sawah tadah hujan menjadi perumahan padat seluas 291,9 Ha dalam kawasan Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang. Luas penggunaan tanah yang tidak berubah pada fungsi kawasan seluas 295.535,0 Ha atau sebesar 98,7% dari luas wilayah.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan dapat terjadi di sebabkan karena berubahnya nilai lahan (*land rent*) yang menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi manusia. Harga lahan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan. Jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, kemudian diubah menjadi kegiatan yang lebih produktif, maka maka perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi nilai lahan menjadi lebih tinggi.



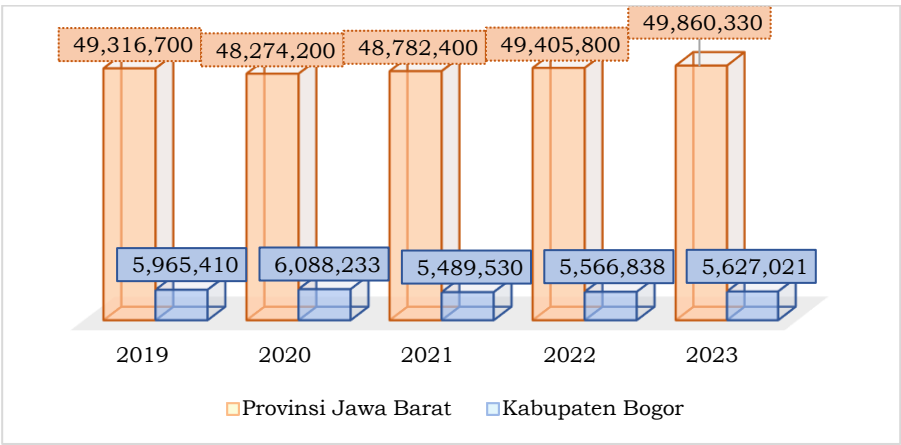
Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Gambar 2.19
Peta Penggunaan Lahan pada Fungsi Kawasan RTRW

2.1.2. Demografi

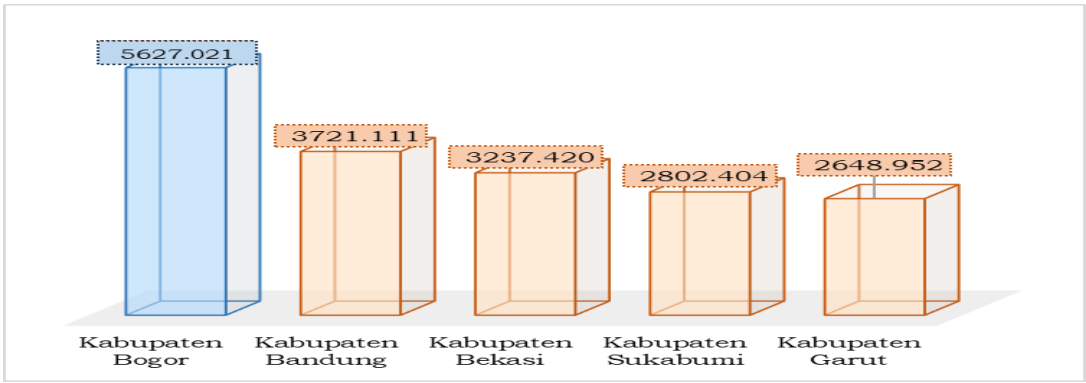
A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mencapai 5.627.021 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.886.435 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.740.586 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar tersebut ekuivalen dengan 11,29 persen dari jumlah total penduduk Provinsi Jawa Barat. Persentase tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung berpenduduk kedua terbanyak di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 7,46 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.20
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

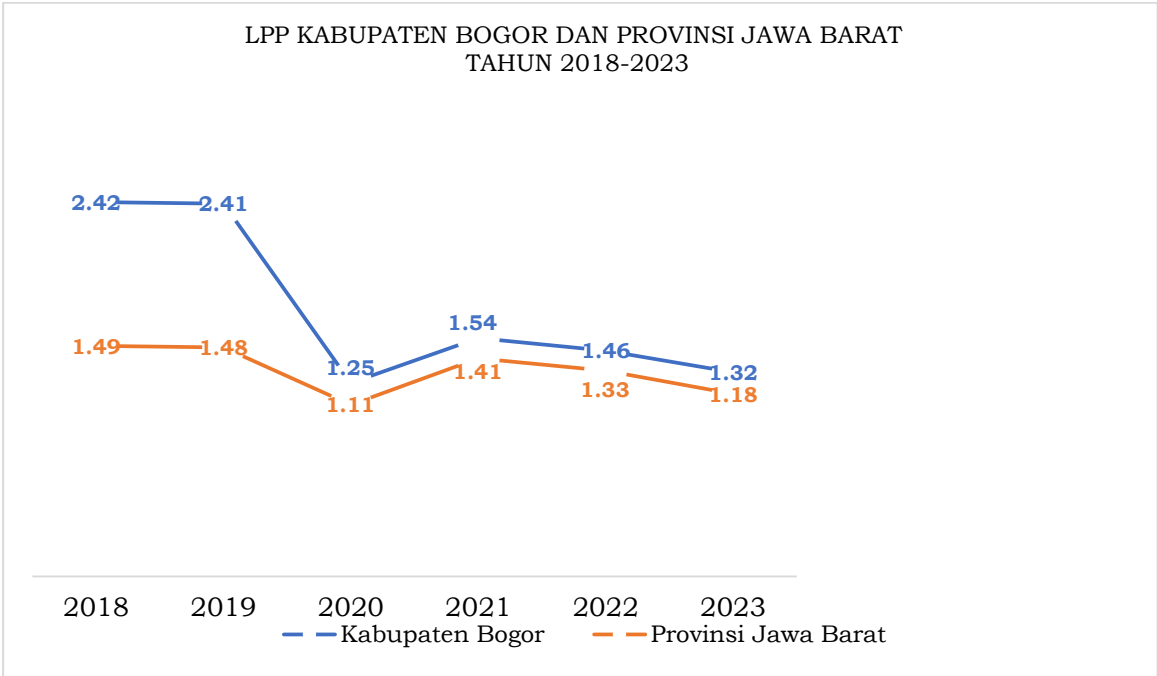


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.21
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Bogor merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki penduduk terbanyak. Selain Kabupaten Bogor, terdapat empat Kabupaten di Jawa Barat dengan penduduk terpadat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut.

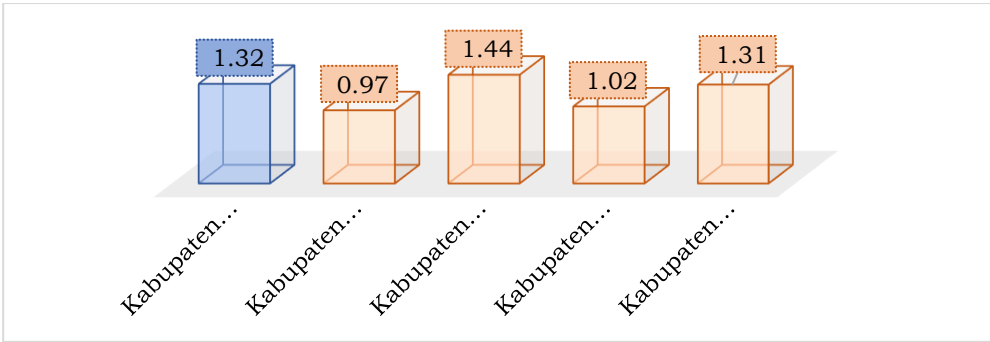
Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.22
Perbandingan LPP Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar dan cenderung terus bertambah setiap tahunnya, namun secara laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor untuk tahun 2023 memiliki nilai sebesar 1,32. Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 1,46. Tetapi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1,18 maka nilai laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor masih diatas nilai rata-rata provinsi. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat yang termasuk daerah berkontribusi besar terhadap jumlah penduduk di Jawa Barat, maka untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor masih di bawah Kabupaten Bekasi sebesar 1,44.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.23
Perbandingan LPP Kabupaten Bogor Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 menunjukkan angka 1,32 persen, menurun sebesar 0,14 persen dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,46 persen. Jika dipetakan, terdapat 22 atau 55 persen kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sama dan melebihi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor. Jika dilihat berdasarkan wilayah pengembangan, komposisi kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan Kabupaten Bogor disajikan pada tabel berikut:

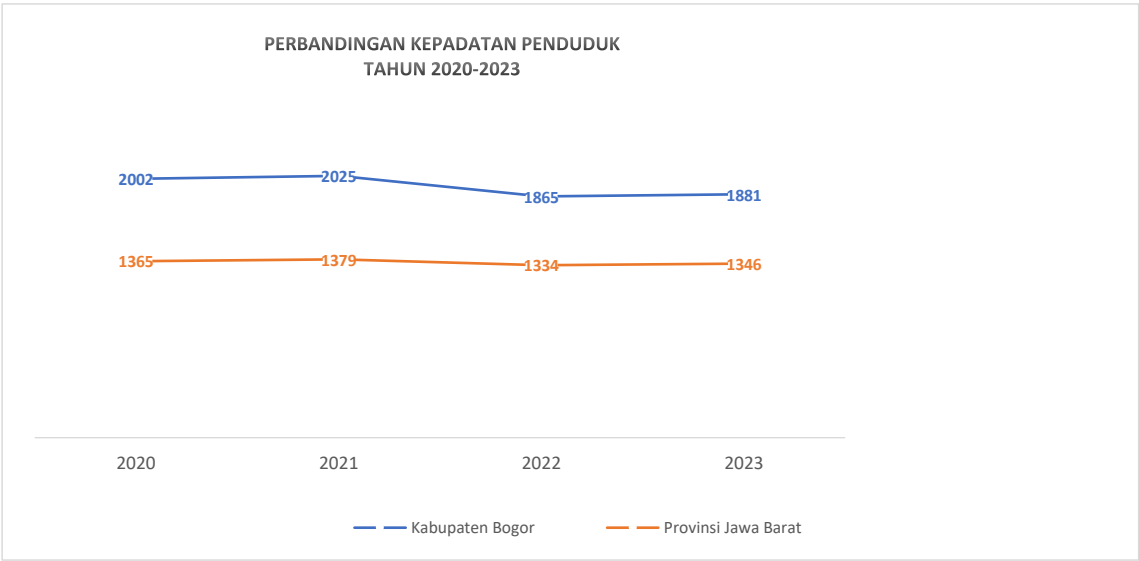
Tabel 2.20
Kondisi kecamatan dengan LPP diatas
LPP Kabupaten Bogor Tahun 2023

Wilayah Pengembangan	Kecamatan dengan LPP≥ 1,32%	Total Kecamatan	Persentase (%)	Keterangan Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2)
WP Barat	8	14	57,14	Nanggung, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga

Wilayah Pengembangan	Kecamatan dengan LPP≥ 1,32%	Total Kecamatan	Persentase (%)	Keterangan Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2)
WP Tengah	10	19	52,63	Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Caringin, sukaraja, bojonggede, tajurhalang, rancabungur, kemang, gunungsindur
WP Timur	4	7	57,14	Sukamakmur, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal

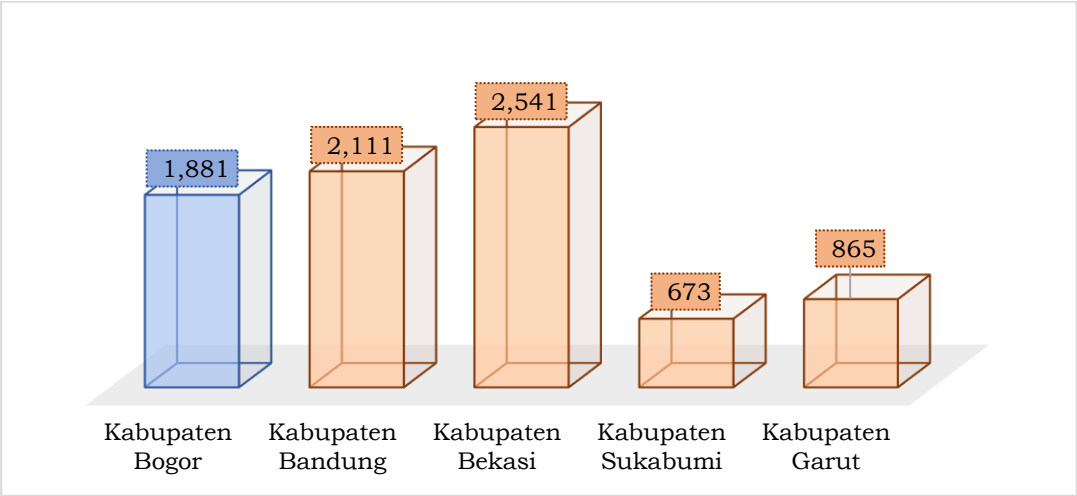
Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Bogor untuk tahun 2023 memiliki jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.881 jiwa/km², jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1.334 km². Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Barat untuk tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebesar 2.111 jiwa/km² dan Kabupaten Bekasi yang memiliki kepadatan 2.541 jiwa/Km² maka angka kepadatan penduduk Kabupaten Bogor masih di bawah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.24
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor
Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.25
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor
dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Adapun rincian mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor per kecamatan diuraikan secara rinci melalui tabel berikut:

Tabel 2.21
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Bojonggede	10.493
2	Ciomas	9.890
3	Cibinong	7.944
4	Ciampea	5.140
5	Sukaraja	4.979
6	Gunungputri	4.875
7	Parung	4.544
8	Dramaga	4.422
9	Tajurhalang	4.345
10	Cileungsi	4.296
11	Cibungbulang	4.029
12	Kemang	3.280
13	Citeureup	3.030
14	Tamansari	2.907
15	Ciseeng	2.861
16	Gunungsindur	2.768
17	Rancabungur	2.763
18	Ciawi	2.513

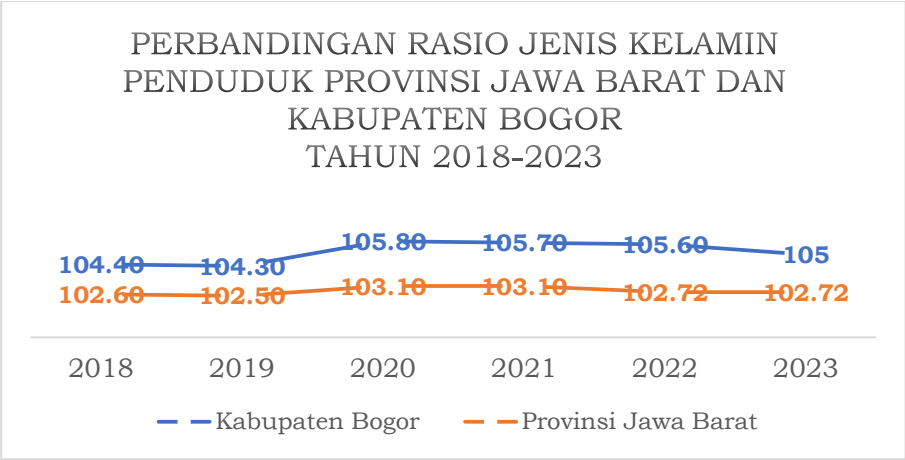
No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Per Km ²
19	Leuwisadeng	2.196
20	Cigombong	2.155
21	Cijeruk	1.992
22	Cisarua	1.848
23	Tenjolaya	1.824
24	Caringin	1.746
25	Megamendung	1.735
26	Parungpanjang	1.696
27	Klapanunggal	1.447
28	Leuwiliang	1.386
29	Babakan Madang	1.332
30	Pamijahan	1.312
31	Jonggol	1.115
32	Rumpin	1.085
33	Tenjo	907
34	Jasinga	802
35	Cigudeg	774
36	Nanggung	652
37	Cariu	627
38	Sukamakmur	486
39	Sukajaya	424
40	Tanjungsari	401
KABUPATEN BOGOR		1.881

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Bojonggede menempati tempat teratas dalam kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor. Setelah Bojonggede, wilayah Kecamatan selanjutnya yang menempati kepadatan penduduk teratas yaitu Ciomas, Cibinong, Ciampea dan Sukaraja.

B. Komposisi Penduduk

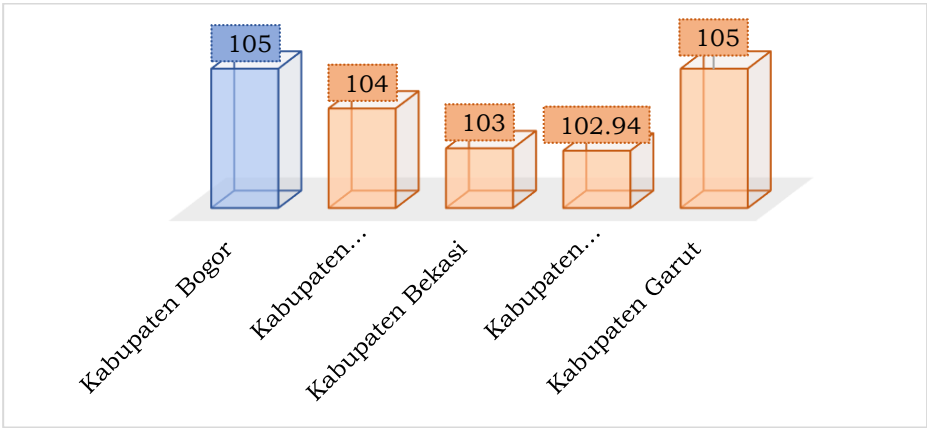
Perhitungan terhadap perbandingan atau rasio antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu (Rasio Jenis Kelamin/*Sex Ratio*) sangat dibutuhkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh suatu daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Bogor,
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 2.26
Perbandingan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

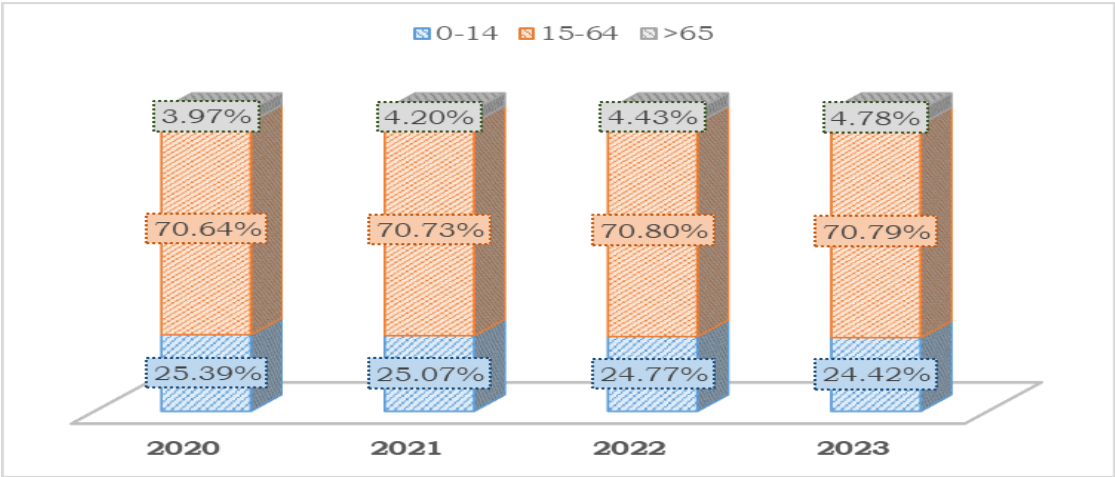
Terkait dengan Rasio Jenis Kelamin ini, pada tahun 2023 Kabupaten Bogor memiliki Rasio Jenis Kelamin sebesar 105. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bogor lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, atau terdapat sekitar 105 laki-laki untuk 100 perempuan. Capaian nilai rasio jenis kelamin untuk tahun 2023 Kabupaten Bogor memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan bahkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.27
Perbandingan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023

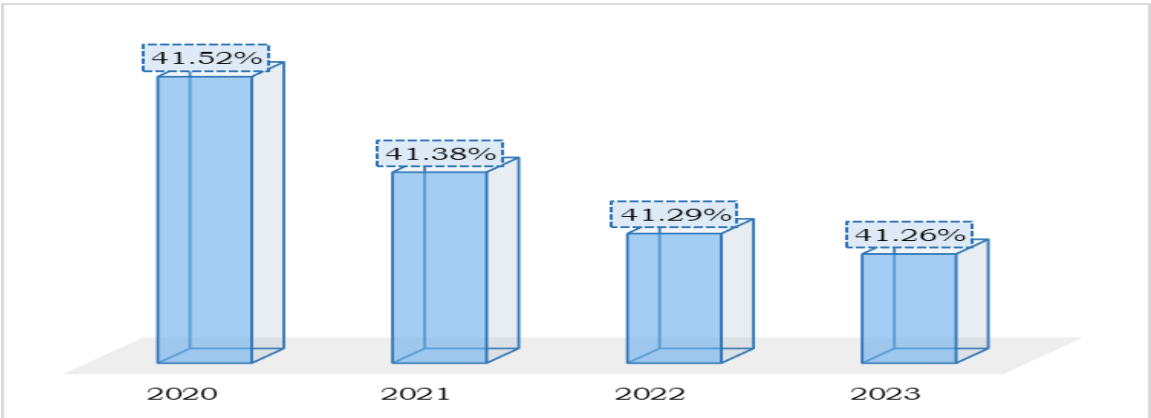
Pengelompokan berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia non produktif.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.28
Perbandingan Komposisi Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023

Terjadi fenomena penurunan jumlah komposisi penduduk usia 0-14 tahun dari 25,39 persen pada tahun 2020 menjadi 24,42 persen pada tahun 2023. Hal ini diasumsikan telah terjadi penurunan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Bogor. Untuk proporsi jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun dari 70,64 persen di tahun 2020 menjadi 70,79 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat proporsi usia produktif mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 4,78 persen di tahun 2023 setelah pada tahun 2020 hanya berkisar 3,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kondisi kesehatan penduduk maupun peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan. Kabupaten Bogor akan memasuki *era aging population* yang harus disiapkan dari sekarang.



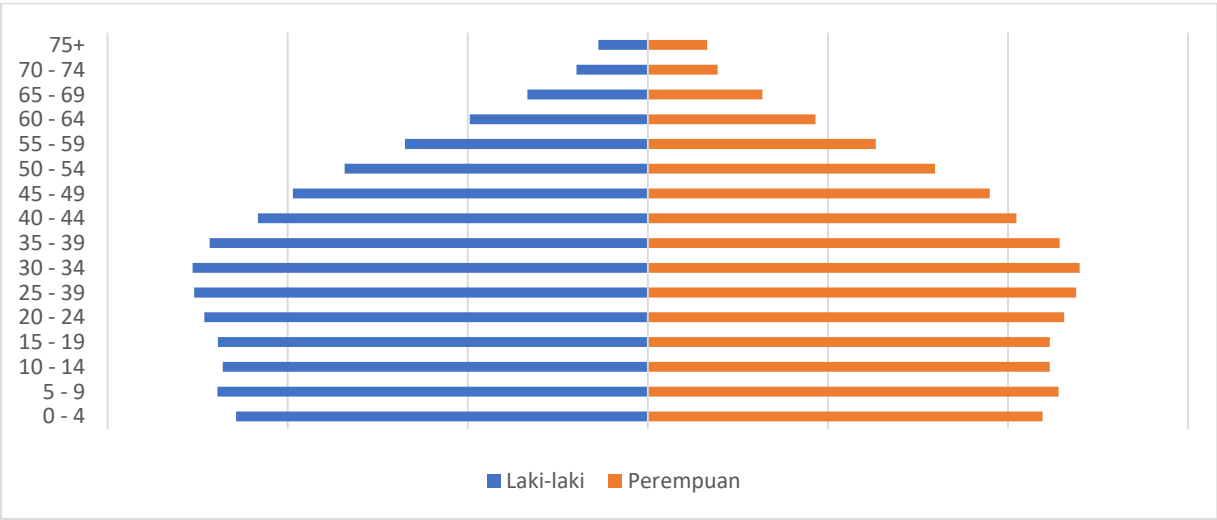
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.29
Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023

Dari data pengelompokan penduduk berdasarkan umur tersebut, kita juga dapat menghitung terkait dengan rasio ketergantungan atau rasio beban

tanggungan (*dependency ratio*) yang dimiliki Kabupaten Bogor. Gambar di atas menunjukkan terjadinya penurunan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Bogor untuk tahun 2020-2023 dari 41,52 di tahun 2020 menjadi 41,26 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan produktif meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bekerja (anak-anak dan lansia). Penurunan tingkat ketergantungan penduduk ini dapat berdampak positif pada ekonomi jika disertai dengan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan angkatan kerja.

Kemudian mengenai komposisi penduduk di Kabupaten Bogor, apabila digambarkan melalui piramida penduduk yang berbentuk limas (*expansive*) menunjukkan ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda. Sementara itu, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan pertumbuhan penduduk tinggi.



Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Gambar 2.30
Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023

Bila dicermati gambar di atas, piramida penduduk Kabupaten Bogor dapat dikatakan berada dalam proses transisi. Hal tersebut disebabkan piramida yang membentuk limas (*expansive*) dengan bentuk gemuk di bagian bawah dan Tengah, kemudian mengerucut di bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan tingkat kematian di usia muda semakin berkurang. Kemudian gambaran lain yang dapat divisualisasikan berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bogor di atas adalah adanya kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor saat ini (tahun 2023) didominasi oleh penduduk usia produktif (kelompok muda).

C. Masyarakat Adat

Meskipun banyak pendatang yang masuk ke Kabupaten Bogor, namun tradisi dan budaya masyarakat lokal Kabupaten Bogor masih banyak yang bertahan sampai sekarang. Apalagi Kabupaten Bogor memiliki cukup banyak kampung adat dimana nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya masih dipegang kuat oleh masyarakatnya. Umumnya masyarakat lokal Kabupaten Bogor adalah suku Sunda yang terbagi dalam kelompok masyarakat kasepuhan dan bukan kasepuhan. Masyarakat kasepuhan berada di kampung-kampung adat yang ada di Kabupaten Bogor dan memiliki susunan organisasi secara adat yang terpisah dari struktur organisasi pemerintah formal (desa).

Contoh masyarakat kasepuhan adalah di Kabupaten Bogor daerah selatan seperti di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya tepatnya di Kampung Adat Urug, Pabuaran dan Cipatat Kolot di wilayah Desa Kiara Pandak dan di Kecamatan Caringin seperti Kampung Budaya Cimande. Masyarakat kasepuhan adat ini memang berada di daerah-daerah gunung seperti di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Masyarakat kasepuhan adat ini merupakan bagian dari warisan budaya nasional.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

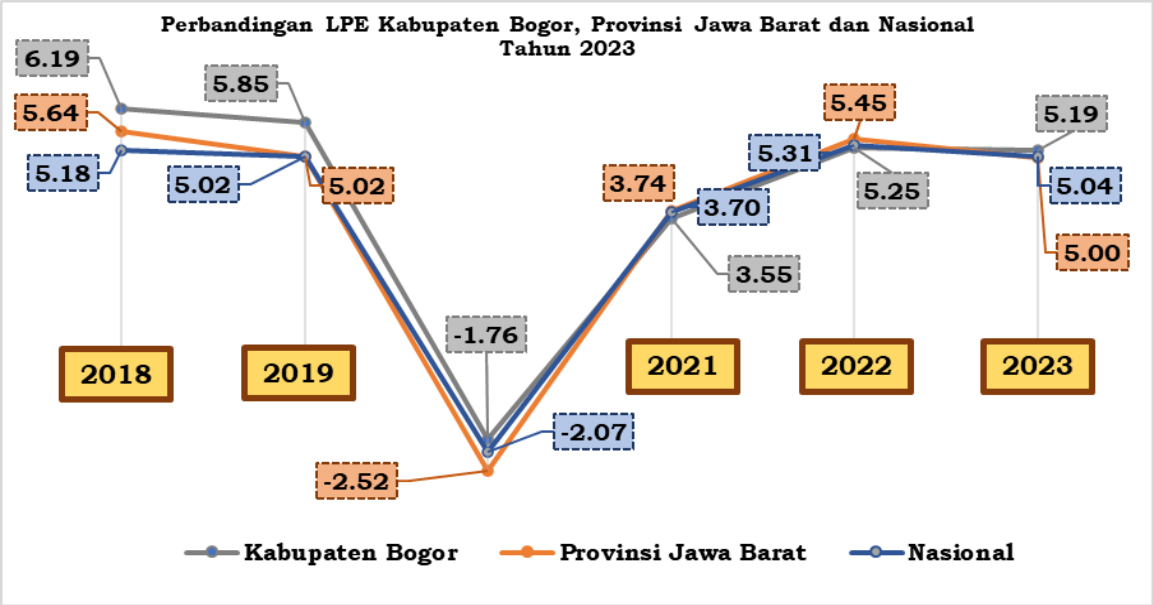
A. Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara makro dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari perspektif kesejahteraan ekonomi yang penjelasannya diuraikan melalui capaian indikator-indikator berikut:

➤ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan sejauhmana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bogor dalam periode waktu tertentu, khususnya periode tahun 2019-2023, dalam hal perubahan nilai seluruh total produksi barang/jasa dari tahun ke tahun. Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tahun 2023 tidak sebaik kinerja tahun 2022. Hal ini terlihat dari capaian LPE Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan nasional yang seluruhnya mengalami penurunan di tahun 2023. Tercatat LPE nasional menurun sebesar 0,27 persen, Jawa Barat menurun 0,45 persen, dan Kabupaten Bogor menurun 0,06 persen. Kinerja tersebut menggambarkan

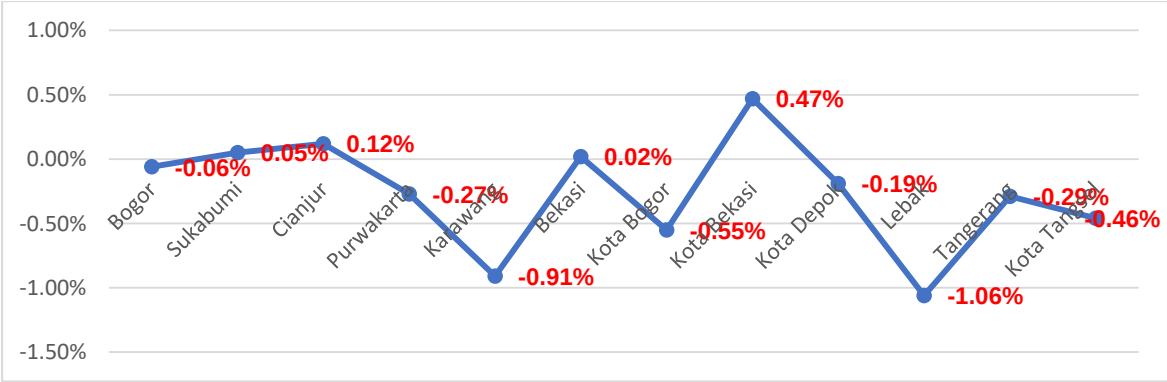
bahwa, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor yang tercatat sebesar 0,06 persen, masih lebih baik dibandingkan dengan penurunan LPE Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.31
Perbandingan LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2023 (%)

Jika kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2023 terhadap tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja kabupaten/kota wilayah perbatasan, maka Kabupaten Bogor merupakan daerah yang mengalami penurunan terendah dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota perbatasan yang juga mengalami penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, meskipun 4 (empat) wilayah perbatasan lainnya mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disajikan dalam gambar berikut:



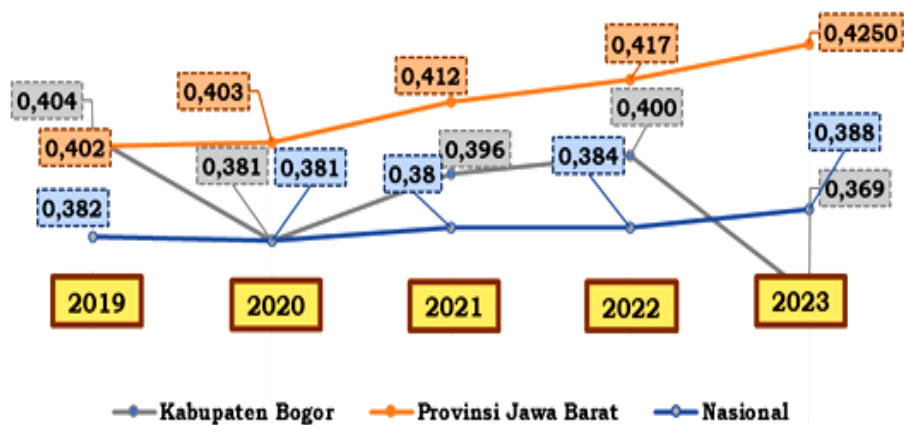
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023 (data diolah)

Gambar 2.32
Perbandingan Perkembangan LPE Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023
dengan Kabupaten/Kota Perbatasan

➤ **Indeks Gini**

Indeks gini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat dalam sebuah wilayah. Sampai dengan tahun 2023, Indeks gini Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,369 poin, dengan kategori ketimpangan sedang. Kondisi ketimpangan ini menurun sebesar 0,031 poin dari tahun 2022 yang mencapai 0,4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan. Keterkaitan peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan menurunnya indeks gini, berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2023 yang juga mengalami penurunan sebesar 0,46 persen, penurunan tingkat pengangguran sebesar 2,17 persen, serta peningkatan daya beli masyarakat sebesar 293 ribu rupiah.

Jika dibandingkan dengan kinerja penurunan ketimpangan pendapatan antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional tahun 2022-2023, diketahui bahwa ketimpangan pendapatan Jawa Barat mengalami peningkatan ketimpangan sebesar 0,008 poin, nasional meningkat 0,004 poin, sedangkan Kabupaten Bogor justru mengalami penurunan ketimpangan sebesar 0,031 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Bogor dalam menurunkan ketimpangan pendapatan lebih baik dibandingkan nasional dan Jawa Barat, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Gambar 2.33
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat, Nasional
dan Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023

➤ **Angka Kemiskinan**

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah sejauhmana penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika terjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, maka penduduk terkategori miskin. Kemiskinan di Kabupaten Bogor sebelum terjadinya pandemi COVID-19 berada pada tingkat 6,66 persen, dan mengalami peningkatan setelah pandemi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang cukup signifikan akibat pandemi, namun cenderung mengalami penurunan kembali secara berangsur-angsur bersamaan dengan terjadinya proses pemulihan ekonomi di tahun 2021. Perkembangan persentase penduduk miskin selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti yang terlihat pada tabel berikut:

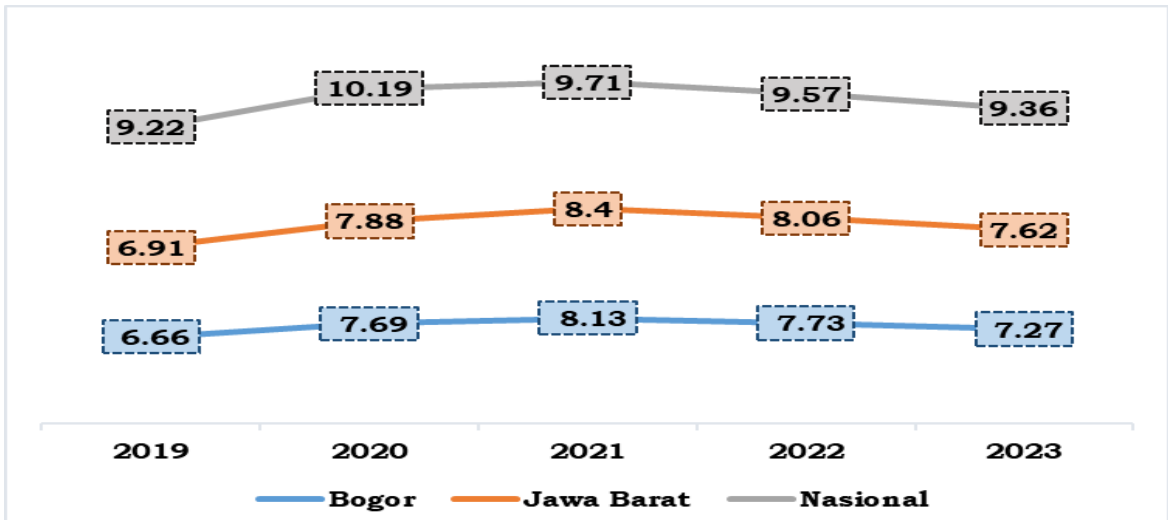
Tabel 2.22
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
Jumlah Penduduk Miskin	ribu orang	395,0	465,6	491,2	474,74	453,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Hingga tahun 2023 kemiskinan sudah mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini lebih besar dibandingkan dengan penurunan tahun 2021-2022 yang hanya tercapai sebesar 0,4 persen. Adapun jika dibandingkan capaian kinerja penurunan

angka kemiskinan antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan nasional tahun 2023 terhadap tahun 2022, maka data dapat dilihat pada gambar berikut:

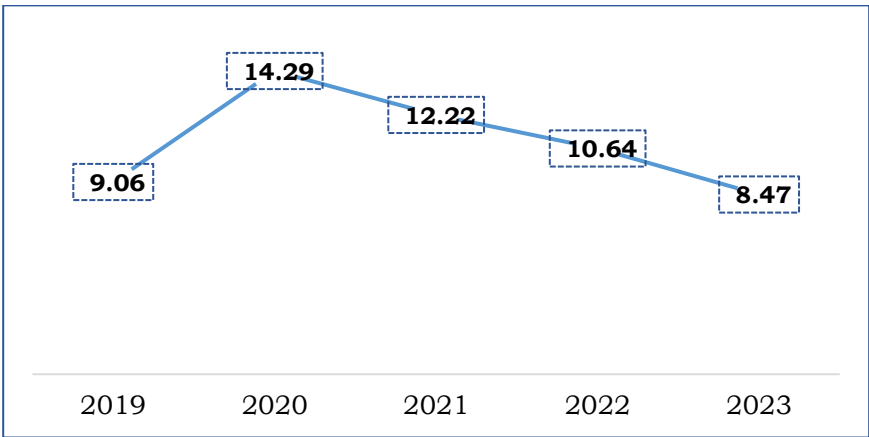


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.34
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 (%)

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka**

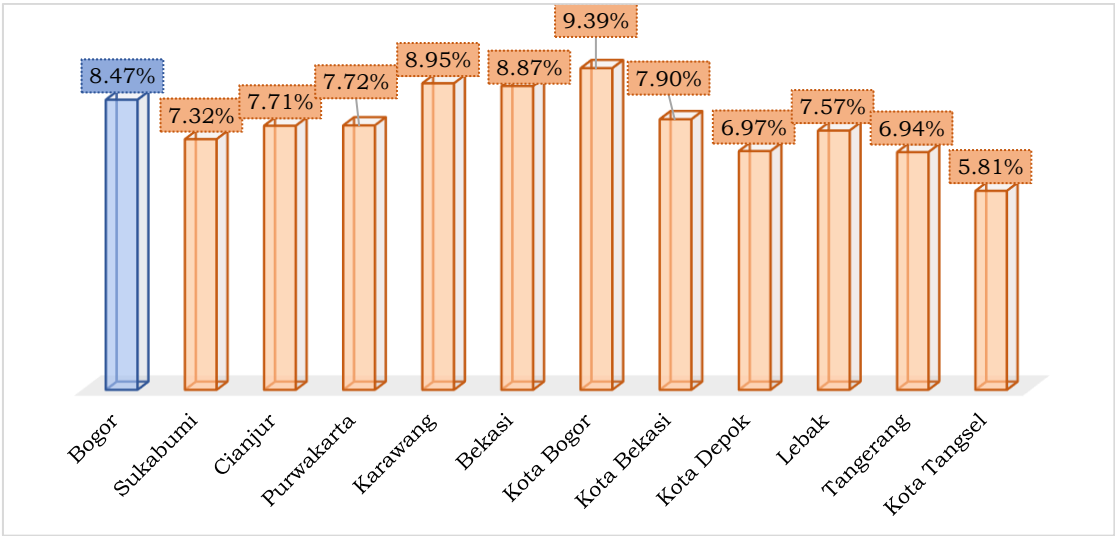
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,47 persen, turun sebesar 2,17 persen dari tahun 2022 yang tercatat cukup tinggi yaitu 10,64 persen. Penurunan ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan penurunan tingkat pengangguran pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2010, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.35
Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor 2019-2023

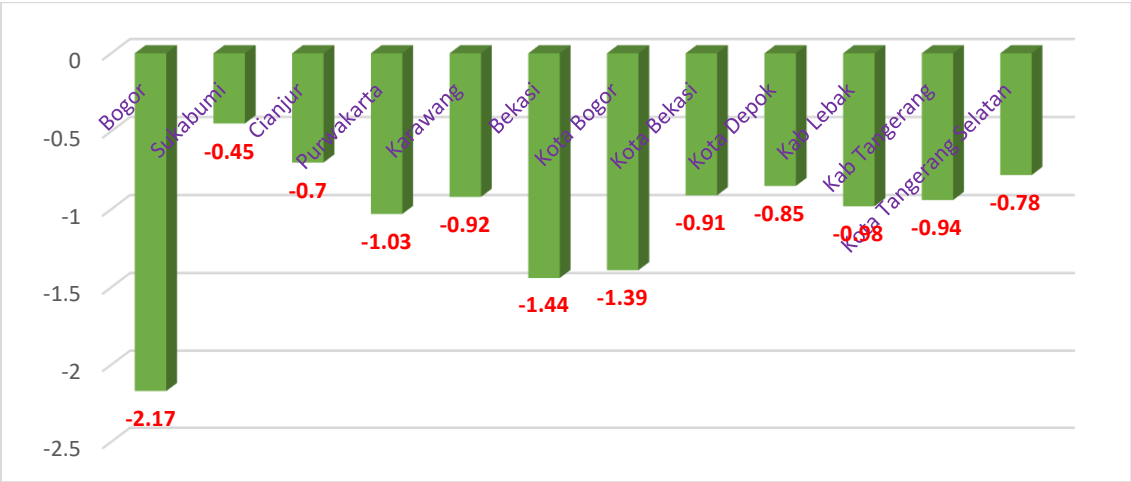
Jika dibandingkan dengan kondisi pengangguran di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor tahun 2023 terhadap 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mampu menurunkan pengangguran sebesar 2,17 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.36
Perbandingan TPT Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

Kinerja ini adalah kinerja tertinggi jika dibandingkan dengan kinerja kabupaten/kota perbatasan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

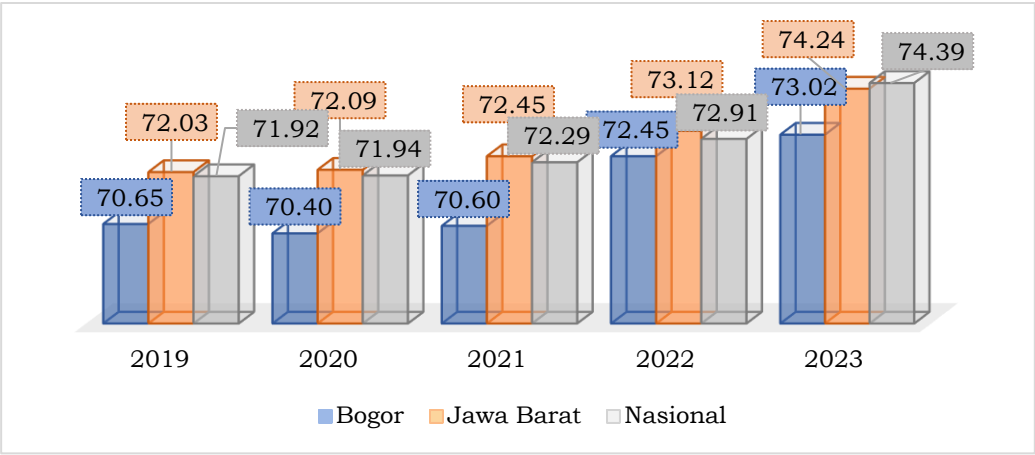


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 2.37
Kinerja Penurunan Tingkat Pengangguran Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2022-2023

➤ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

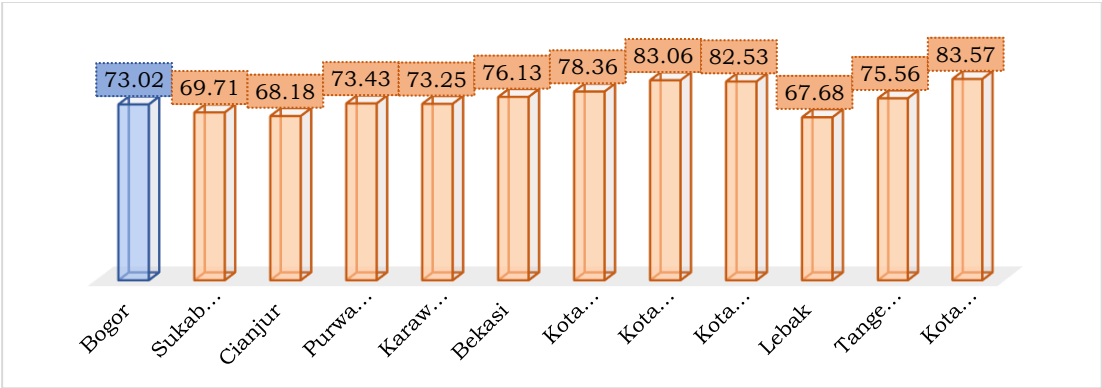
Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor dari tahun 2019-2023 menunjukkan adanya trend peningkatan yang tercermin capaian IPM yang semakin meningkat. Adapun kinerja peningkatan IPM tahun 2022-2023 tercapai sebesar 0,57 poin. Pencapaian ini berada di bawah capaian kinerja Jawa Barat yang meningkat 1,12 poin, serta nasional yang meningkat 1,48 poin. Perkembangan capaian IPM nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.38
Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

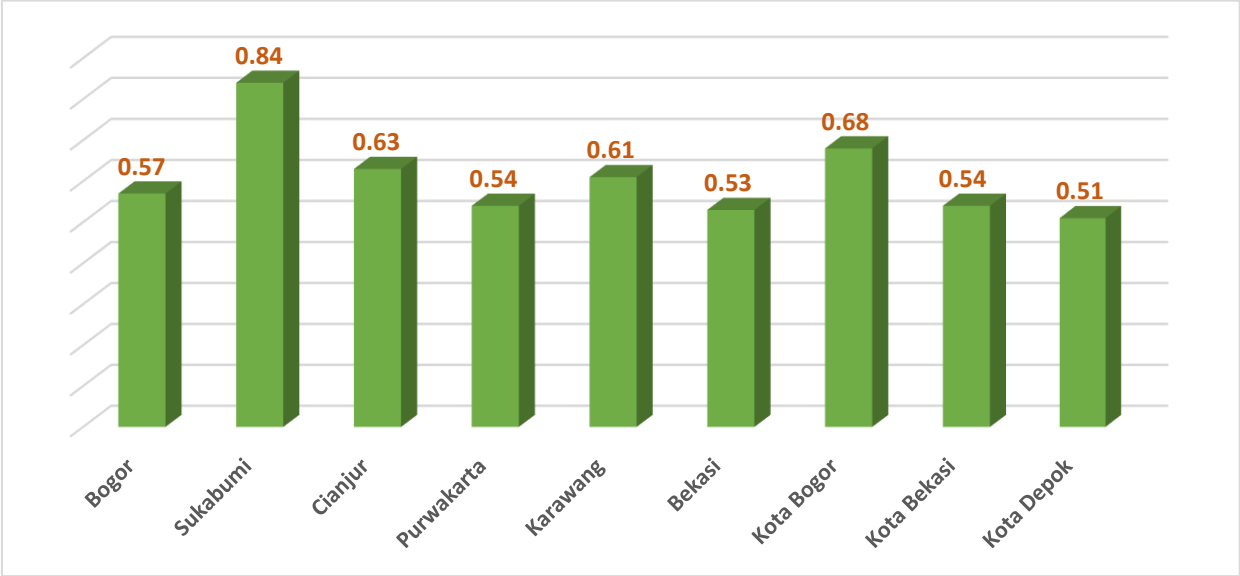
Jika dibandingkan dengan kondisi kabupaten/kota wilayah perbatasan, IPM Kabupaten Bogor berada pada peringkat 9 dibawah Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi,Kabupaten Tangerang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Nilai IPM Kabupaten Bogor dan kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023 (data diolah)

Gambar 2.39
Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

Secara komposit, IPM Kabupaten Bogor tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,57 poin dari tahun 2022. Katagori IPM Kabupaten Bogor adalah tinggi, yaitu 73,02 poin tahun 2023. Jika dibandingkan pencapaian kinerja IPM dengan kabupaten/kota perbatasan lainnya, maka Kabupaten Bogor berada pada urutan ke lima peningkatan terbesar setelah Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, sebagaimana disajikan dalam Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023 (data diolah)

Gambar 2.40
Kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2022-2023

Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian komponen pembentuk IPM seperti di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup, bidang pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta bidang ekonomi yaitu daya beli. Realisasi indikator indeks pembangunan manusia selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	70.65	71.63	71.83	72.45	73.02
	Komponen IPM terdiri dari :					
-	Angka Harapan Hidup	71.01	73.90	74.09	74.42	74.67

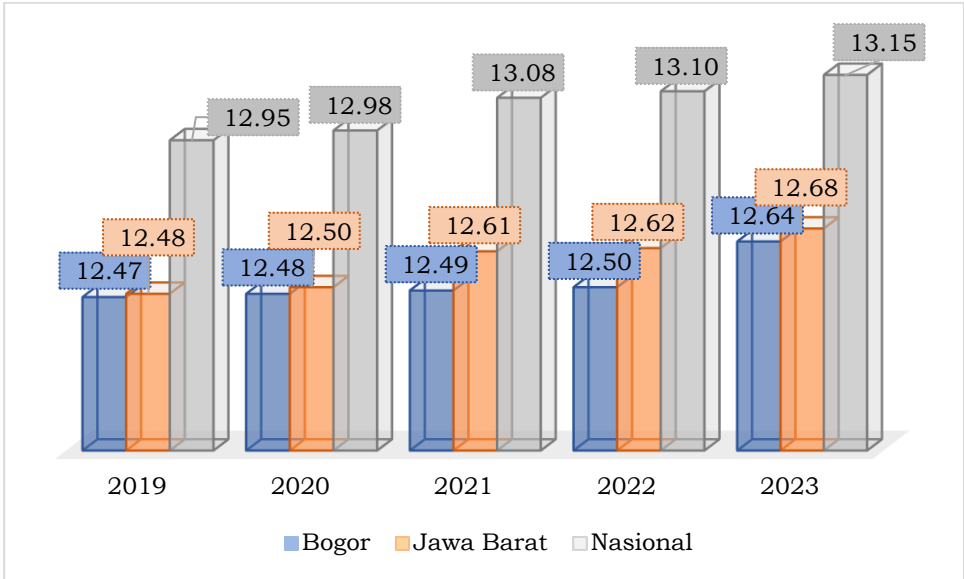
No		Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	-	Rata-rata Lama Sekolah	8.29	8.30	8.31	8.34	8.37
	-	Harapan Lama Sekolah	12.47	12.48	12.49	12.50	12.64
	-	Daya Beli (ribu rupiah)	10,683	10,317	10,410	10,860	11,153

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Adapun mengenai penjelasan masing-masing komponen penyusun IPM diuraikan sebagai berikut:

➤ **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



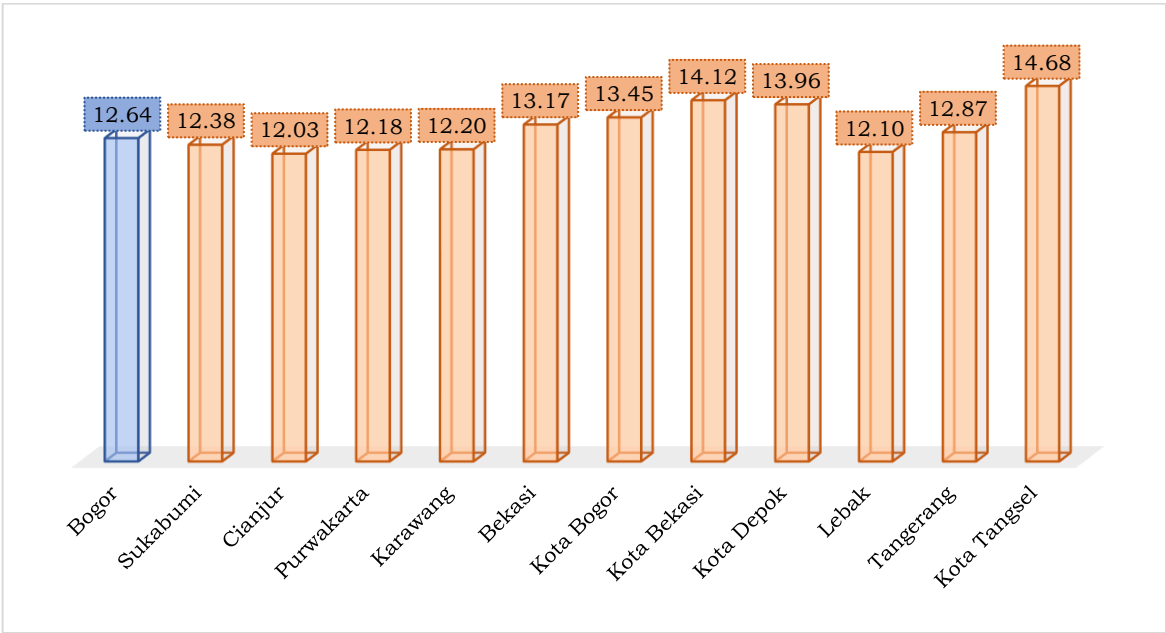
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.41
Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023

Capaian HLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren yang meningkat. Hal tersebut selaras dengan kondisi capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.30. Meskipun pada grafik terlihat bahwa HLS Kabupaten Bogor berada dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional, HLS Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan bahkan peningkatannya diatas peningkatan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2023, HLS kabupaten Bogor mengalami

peningkatan sebesar 0,14 poin, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebesar 0,06 dan 0,05 poin.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan, HLS Kabupaten Bogor berada pada peringkat 7 dibawah Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bogor dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023;
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.42
Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

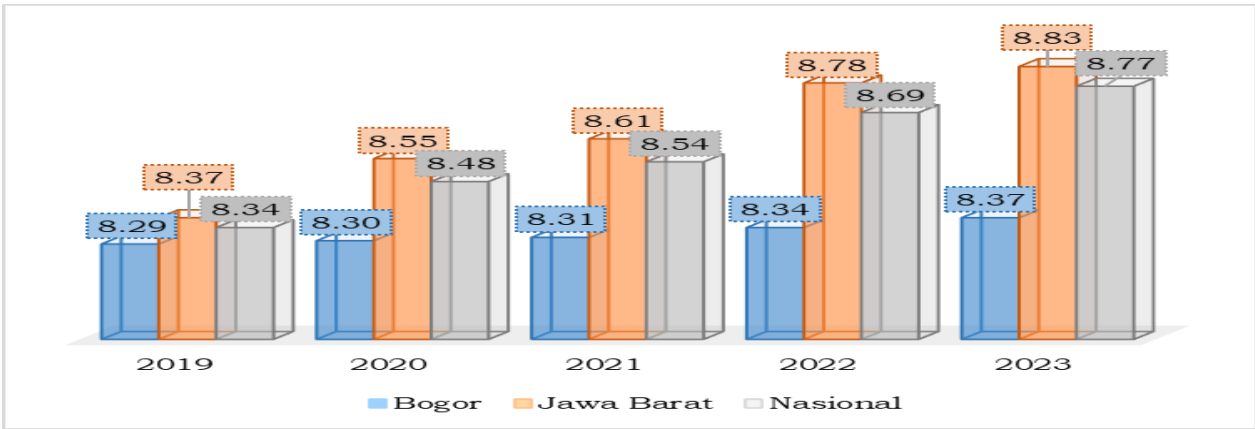
➤ **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Melalui ukuran ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan estimasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Akan tetapi, jumlah tahun bersekolah ini belum memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun

bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, RLS Kabupaten Bogor masih berada dibawah. Dimana pada tahun 2023, RLS Kabupaten Bogor sebesar 8,37 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebesar 8,83 tahun dan 8,77 tahun. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan RLS pada tahun 2023, dimana meskipun RLS Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, namun peningkatan ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 0,05 poin dan nasional sebesar 0,08 poin, sedangkan peningkatan RLS Kabupaten Bogor sebesar 0,03 poin. Berikut ini merupakan data capaian RLS Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Jawa Barat dengan Nasional yang dijelaskan pada gambar berikut:

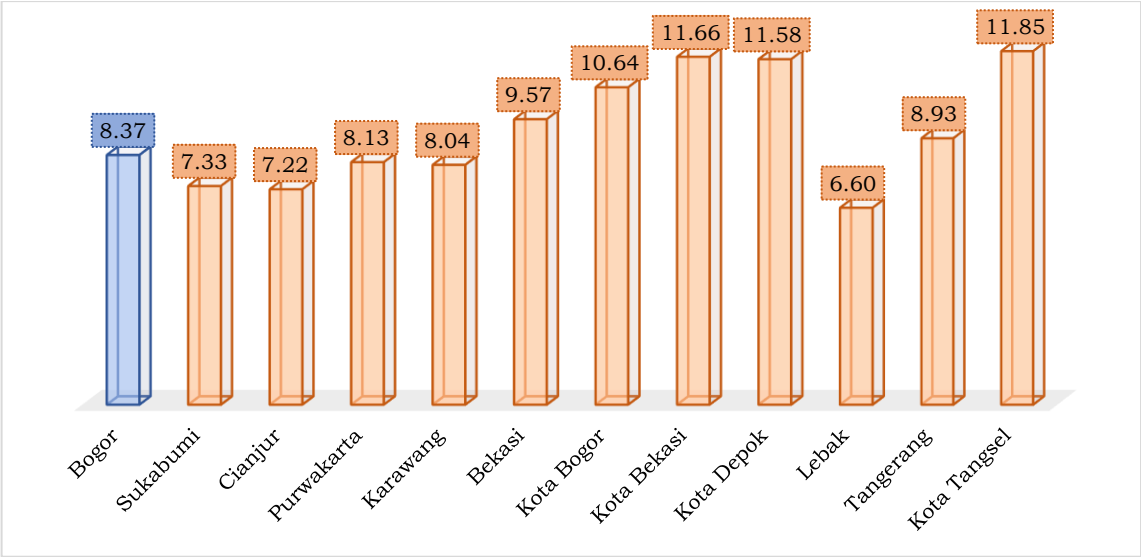


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.43
Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2019-2023

Capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren yang positif. Walaupun hasil dari penghitungan tersebut selalu menunjukkan pertumbuhan lebih dari 0 di setiap tahunnya, namun posisi capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tersebut selalu berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan, RLS Kabupaten Bogor berada pada peringkat 7 dibawah Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Capaian RLS kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:

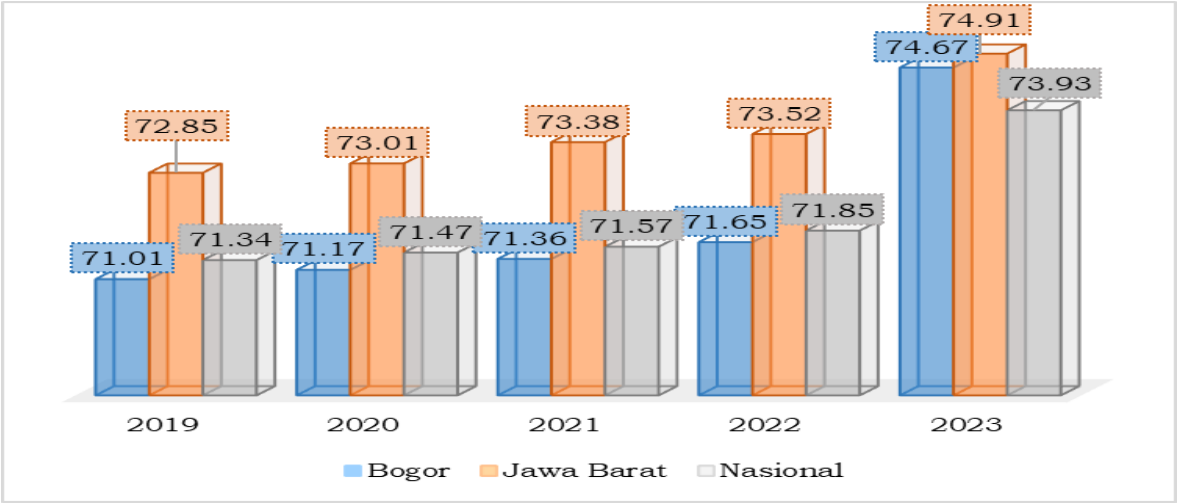


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.44
Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

➤ **Angka Harapan Hidup (AHH)**

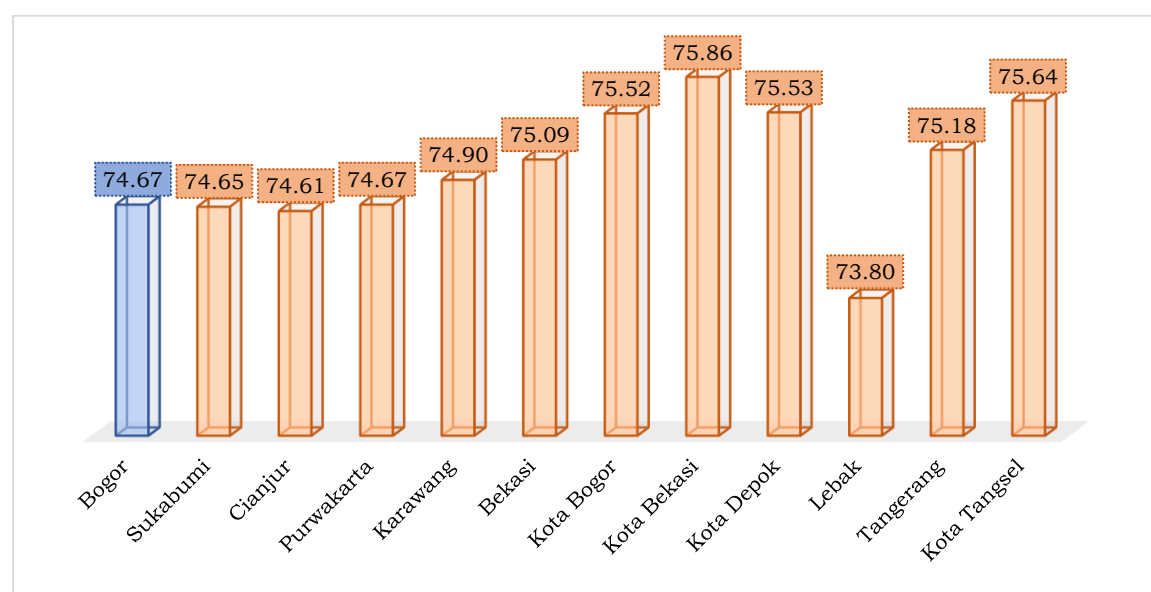
AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2023 capaiannya berhasil melampaui 0,74 tahun atau 1,00 persen di atas capaian nasional. Meskipun trennya menunjukkan perkembangan yang positif, namun capaian AHH Kabupaten Bogor selalu berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.45
Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Gambaran perkembangan capaian AHH Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan AHH di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 1,11 persen dengan peningkatan sebesar 0,79 tahun. Kemudian dalam periode yang sama, AHH Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan sebesar 0,86 tahun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Sedangkan untuk capaian nasional, tingkat pertumbuhannya paling kecil jika dibandingkan dengan kedua capaian sebelumnya, yaitu sebesar 0,91 persen dengan peningkatan yang hanya mencapai 0,65 tahun. AHH Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Meskipun capaiannya masih berada dibawah Provinsi Jawa Barat dan nasional, peningkatan AHH Kabupaten Bogor berada diatas Provinsi Jawa Barat dan nasional. Peningkatan yang terjadi di tahun 2023, AHH Kabupaten Bogor sebesar 3,02 poin, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan nasional sebesar 1,39 dan 2,08 poin. Perbandingan capaian AHH Kabupaten Bogor dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.46
Perbandingan AHH Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

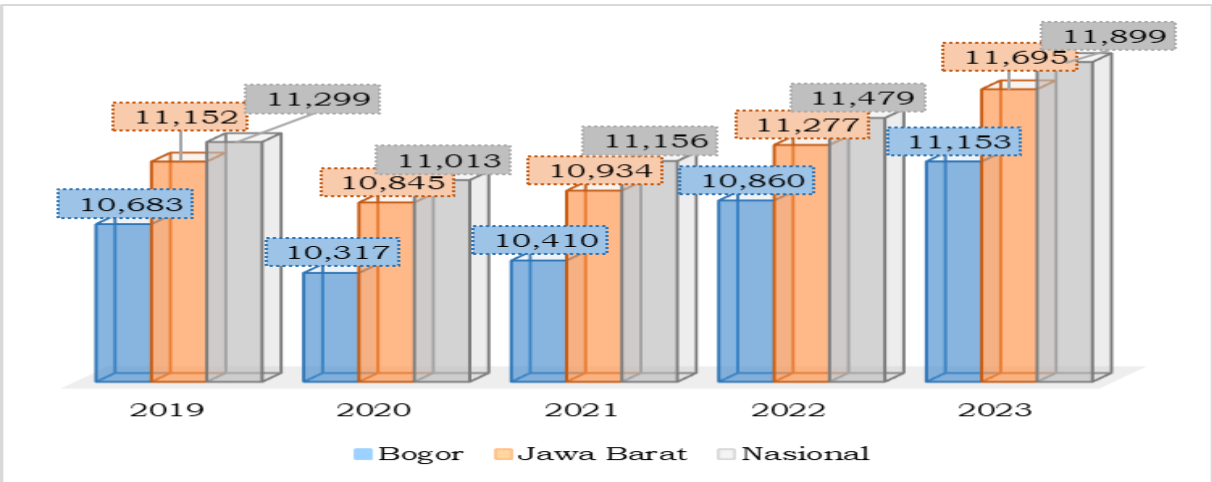
Berdasarkan grafik di atas, AHH Kabupaten Bogor berada di peringkat ke-8 jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota wilayah perbatasan dibawah Kota Bekasi, Kota Tangsel, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sedangkan

Kabupaten Purwakarta mendapatkan capaian AHH sama dengan Kabupaten Bogor pada tahun 2023.

➤ **Pengeluaran Per Kapita**

Komponen IPM yang mencerminkan kondisi kesejahteraan ekonomi adalah pengeluaran per kapita per tahun. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor mengalami tren yang fluktuatif sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penurunan terjadi pada tahun 2023 ketika terjadi pandemi COVID-19, dan berangsur-angsur mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp 11.153.000,-/tahun di tahun 2023.

Jika dibandingkan secara nilai mutlak antara capaian Kabupaten Bogor dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional, pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian keduanya. Hal ini berbanding lurus dengan perkembangan pengeluaran per kapita hingga tahun 2023. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, namun peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor masih dibawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 293 rupiah, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan nasional sebesar 418 rupiah dan 420 rupiah. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan melalui gambar berikut:

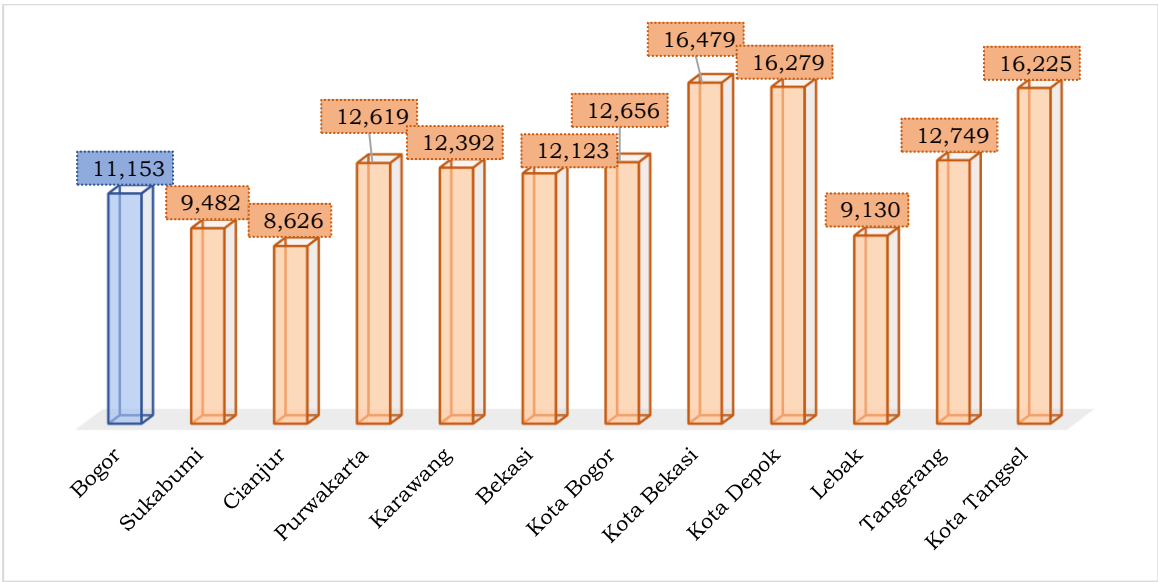


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.47
Perkembangan Pengeluaran per Kapita (ribu Rp) per Tahun
Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan kabupaten/kota wilayah perbatasan, pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor berada pada posisi ke-9 setelah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten

Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Perbandingan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor dengan capaian kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.48
Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Rp) per Tahun Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan Tahun 2023

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif sosial. Beberapa indikator yang menjadi representasi kesejahteraan sosial budaya, diuraikan sebagai berikut:

➤ **Keluarga Sehat**

Indeks Keluarga Sehat mencerminkan kondisi keluarga yang memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Kondisi capaian tahun 2023 menunjukkan angka 0,195 poin, tahun 2022 mencapai 0,167 poin, meningkat sebesar 0,028 poin, meskipun masih termasuk dalam kategori tidak sehat (<0,50 poin).

Jika dibandingkan kondisi capaian ini terhadap Jawa Barat dan nasional tahun 2022 dimana capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,17 poin, capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor masih berada di bawah Jawa Barat. Perlu ada upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan status keluarga sehat.

Jika dibandingkan dengan Indeks Keluarga Sehat kabupaten/kota perbatasan seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang, Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor masih berada di atas kabupaten perbatasan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2022, Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cianjur sebesar 0,111 poin,

Kabupaten Purwakarta sebesar 0,176 poin dan Kabupaten Karawang sebesar 0,154 poin. Adapun Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi sebesar 0,208 poin, Kabupaten Bekasi sebesar 0,225 poin atau kota Bogor sebesar 0,40 poin, Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor masih berada di bawah kabupaten/kota tersebut. Diperlukan upaya yang optimal untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor, dengan begitu diharapkan capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bogor dapat lebih baik dan berada di atas kabupaten/kota perbatasan bahkan di atas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

➤ **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Salah satu aspek yang mencerminkan kesejahteraan sosial budaya adalah terdapatnya PPKS di tengah-tengah masyarakat yang perlu ditangani. Hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 14 jenis PPKS dengan total 470.186 orang. PPKS terbanyak berasal dari kelompok fakir miskin/rumah tangga miskin, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bogor Tahun 2023

NO	JENIS PPKS	JUMLAH	PERSENTASE
1	Anak Terlantar	923	0,1963
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	2	0,0004
3	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	35	0,0074
4	Lanjut Usia Terlantar	6.790	1,4441
5	Penyandang Disabilitas	5.833	1,2406
6	Tuna Susila	171	0,0364
7	Gelandangan Pengemis	1.093	0,2325
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	43	0,0091
9	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	23	0,0049
10	Korban Penyalahgunaan NAPZA	2	0,0004
11	Korban Tindak Kekerasan	3	0,0006
12	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	27	0,0057
13	Korban Bencana Alam	1.481	0,3150
14	Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin (BPS)	453.760	96,5065
Total		470.186	100,0000

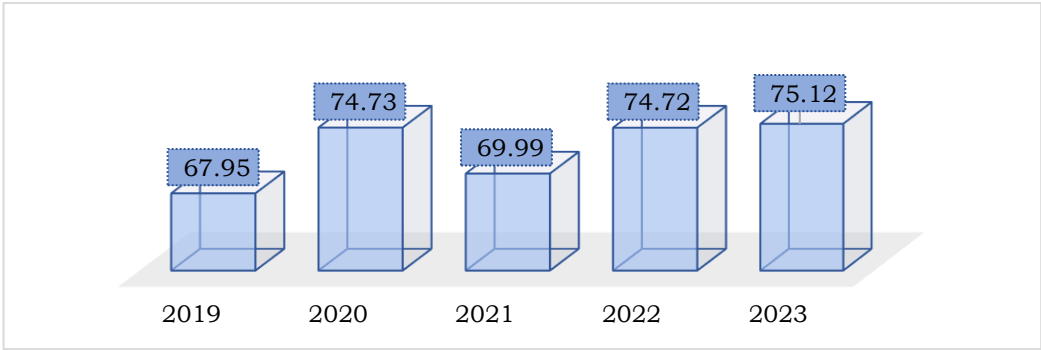
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bogor, 2023

Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 didominasi oleh fakir miskin/rumah tangga miskin yaitu sebanyak

453.760 atau 96,51 persen. Kemudian selanjutnya adalah lanjut usia terlanter sebanyak 6.790 atau 1,4441 persen.

➤ **Indeks Kebahagiaan**

Indeks kebahagiaan merupakan representasi dari kesenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin, serta dapat diartikan juga sebagai konsep berupa hasil evaluasi kehidupan yang menggambarkan kondisi yang *good life* dan *meaningful life*. Pengukuran indeks kebahagiaan berdasarkan 3 dimensi utama yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan penilaian terhadap diri sendiri/makna hidup (*eudaimonia*). Rata-rata indeks kebahagiaan Kabupaten Bogor tahun 2023 adalah 75,12 poin. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,4 poin dibandingkan tahun 2022. Perlu ditelaah lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kebahagiaan pada tahun 2023.



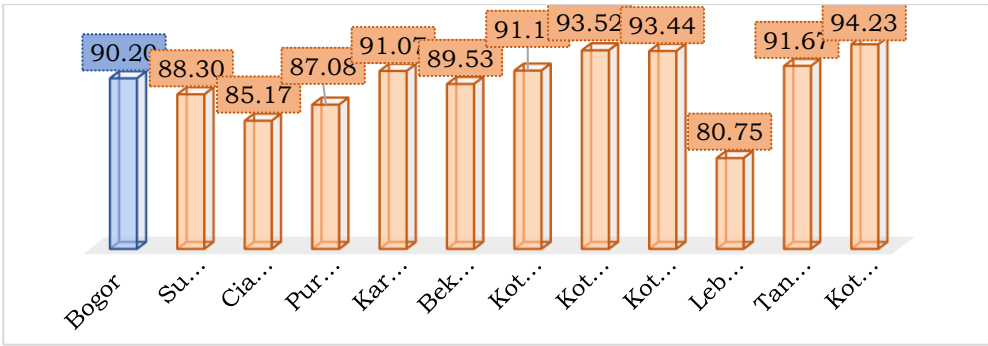
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.49
Capaian Indeks Kebahagiaan Tahun 2019-2023

➤ **Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bogor tahun 2023 adalah sebesar 90,20 poin. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan yang dikontribusi oleh laki-laki dan perempuan hampir setara. Kondisi ini masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 91,85 poin, serta capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 90,23 poin. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota perbatasan, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor masih berada di bawah Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karawang sebesar 91,07 poin, Kabupaten Tangerang sebesar 91, 67 poin, Kota Bekasi sebesar 93,52 poin, Kota Depok sebesar 93,44 poin, Kota Bogor sebesar 91,11 poin dan Kota Tangerang Selatan sebesar 94,23 poin. Kendati demikian, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor jika dibanding dengan Kabupaten perbatasan lain, seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi atau bahkan Kabupaten Lebak maka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor masih berada di atas

Kabupaten tersebut. Selengkapnya mengenai gambaran Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor dan kabupaten/kota perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



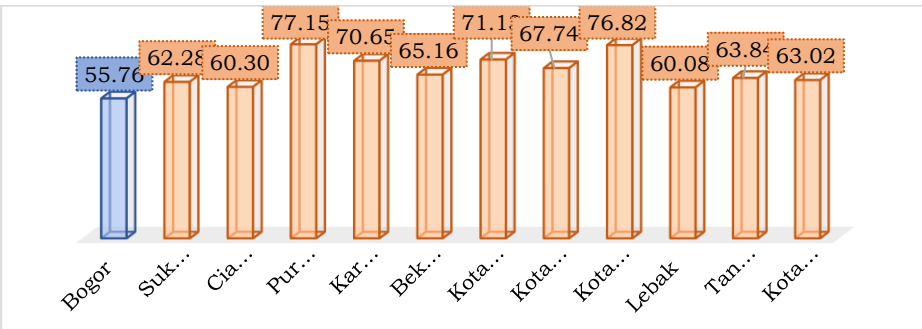
Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2023

➤ **Pemberdayaan Gender (IDG)**

Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan merupakan perwujudan sasaran pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan hal tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender. IDG menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bogor tahun 2023 sebesar 55,76 poin. Kondisi ini lebih rendah dari capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing sebesar 76,90 poin dan 71,74 poin. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota perbatasan, baik yang berada di provinsi Jawa Barat maupun provinsi Banten, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor masih berada di bawah kabupaten/kota perbatasan. Gambaran mengenai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor dan kabupaten/kota perbatasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Prov Banten, 2023

Gambar 2.51
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Perbatasan Tahun 2023

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah dapat dilihat dari kondisi PDRB dan PDRB per kapita, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Selain itu, diuraikan pula capaian indeks ekonomi inklusif dan indeks ekonomi hijau di Kabupaten Bogor, sampai dengan tahun 2023.

➤ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang terbagi ke dalam berbagai jenis lapangan usaha. Gambaran pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

No	Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91	4,42	4,52	3,98	6,83	-4,42	2,98	8,22	5.66
2	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,2	8,72	8,49	7,06	5,11	-9,31	5,95	12,35	9.26
3	Jasa Lainnya	9,6	8,85	9,57	8,36	8,04	-3,09	2,41	14,38	6.68
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,88	7,11	7,72	5,65	5,3	9,65	8,55	11,5	2.61
5	Industri Pengolahan	5,36	5,93	5,33	6,18	5,66	-2,47	2,51	5,46	4.54
6	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	4,48	2,82	2,33	1,76	0,58	2,43	3,47	1.50
7	Jasa Perusahaan	8,15	8,1	8,76	6,53	9,02	-10,9	8,47	6,75	7.52
8	Real Estate	6,48	6,18	9,32	9,63	9,4	4,44	10,68	5,29	5.70
9	Transportasi dan Pergudangan	9,84	8,73	7,65	8,11	8,24	-1,3	2,05	6,35	12.12
10	Jasa Pendidikan	10,66	7,47	8,64	5,79	5,59	7,13	1,26	3,63	4.24

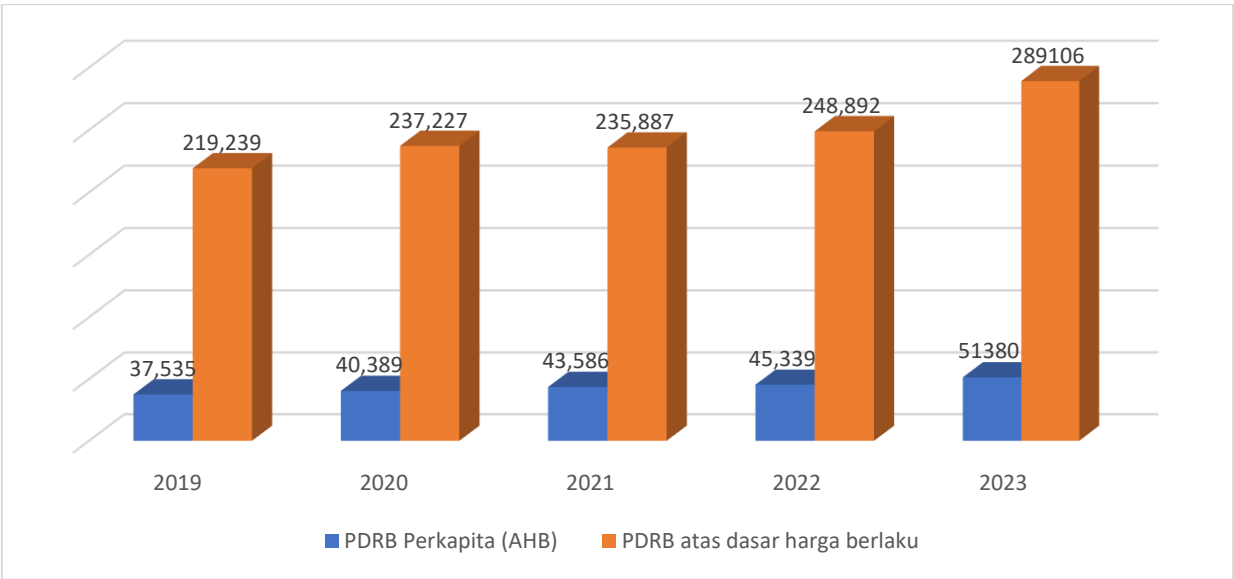
No	Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Informasi dan Komunikasi	17,21	14,24	11,82	9,09	9,22	32,33	10,69	5,66	4.77
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,35	10,1	9,08	7,72	6,56	-6,83	7,35	2,39	2.19
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	3,05	4,63	1,56	2,15	-1,89	0,71	-0,05	0.08
14	Konstruksi	9,29	5,93	10,7	10,55	7,72	-5,75	6,76	-1,12	8.72
15	Jasa Keuangan	7,6	11,2	4,87	7,02	6,99	1,25	4,79	-2,09	1.17
16	Pertambangan dan Penggalian	-0,72	-2,8	-0,6	2,56	-1,27	1,62	7,95	5,23	1.15
17	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,11	6,48	1,79	0,99	2,36	-4,12	9,49	5,23	3.29
18	PDRB Kabupaten dengan Migas	6,09	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25	5.19
19	PDRB Kabupaten tanpa Migas	6,09	5,84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.19

Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2023, diolah

Tahun 2023 merupakan tahun dimana terdapat banyak lapangan usaha yang mengalami penurunan laju pertumbuhan terhadap tahun 2022. Tercatat sebanyak 11 lapangan usaha yang mengalami penurunan, sedangkan 8 lapangan usaha mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan laju pertumbuhan produksi pada sebagian besar sektor lapangan usaha, meskipun secara global, total PDRB mengalami peningkatan.

Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (-8,89%), jasa lainnya (-7,7%), dan pertambangan dan penggalian (-4,08%) merupakan 3 besar lapangan usaha yang mengalami penurunan laju pertumbuhan tertinggi, sedangkan yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi (9,84%), transportasi dan pergudangan (5,77%), dan jasa keuangan (3,26%).

Apabila dilihat dari PDRB atas harga berlaku, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana halnya PDRB per kapita. Hal ini disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.52
PDRB ADHB dan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Kondisi PDRB ADHB Kabupaten Bogor selama tahun 2019-2023 terhadap kabupaten/kota di wilayah perbatasan, disajikan pada Tabel berikut:

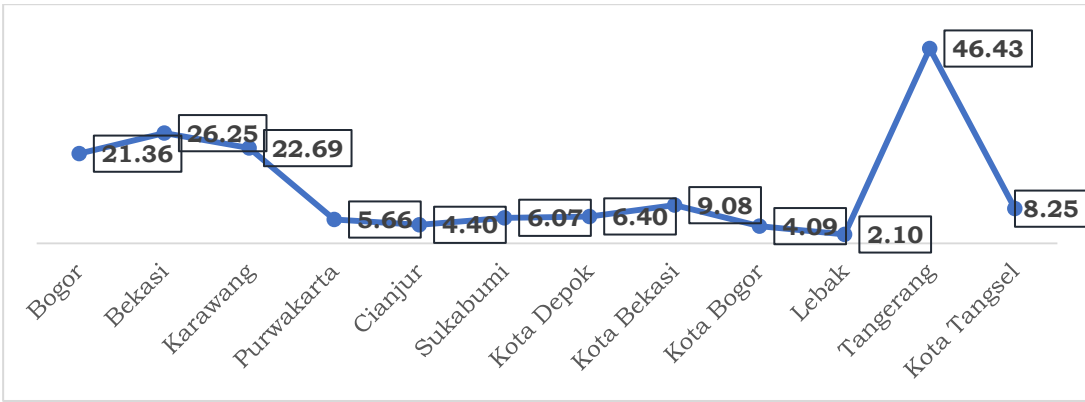
Tabel 2.26
Perbandingan PDRB AHB Kabupaten/Kota Perbatasan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	Miliar Rupiah	237.227	235.887	248.892	267.743	289.106
2	Bekasi	Miliar Rupiah	326.083	317.633	340.389	367.573	393.822
3	Karawang	Miliar Rupiah	230.201	223.422	243.713	268.228	290.916
4	Purwakarta	Miliar Rupiah	67.709	66.971	70.778	76.468	82.129
5	Cianjur	Miliar Rupiah	46.957	47.535	50.137	53.988	58.391
6	Sukabumi	Miliar Rupiah	67.423	67.462	70.738	76.243	82.317
7	Kota Depok	Miliar Rupiah	70.964	70.386	74.382	81.166	87.568
8	Kota Bekasi	Miliar Rupiah	98.107	96.492	101.383	109.881	118.963
9	Kota Bogor	Miliar Rupiah	46.197	45.911	48.325	52.914	57.003
10	Lebak	Miliar Rupiah	28.725	29.055	30.804	33.469	35.571
11	Tangerang	Miliar Rupiah	140.089	135.732	145.284	160.168	206.597
12	Kota Tangsel	Miliar Rupiah	82.769	82.531	88.065	96.137	104.387

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota perbatasan, PDRB AHB Kabupaten Bogor hanya lebih rendah dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Namun, jika dilihat capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022, maka kinerja peningkatan PDRB ADHB tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Kabupaten Bogor menempati urutan keempat, sebagaimana disajikan dalam Gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Gambar 2.53
Perbandingan Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023 dengan Kabupaten/Kota Perbatasan

PDRB dapat digunakan untuk melihat per kapita masyarakat dengan membaginya dengan jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, dapat diketahui bahwa posisi Kabupaten Bogor tahun 2023 berada pada urutan ke-7, setelah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat banyak, sehingga hasil PDRB per kapita akan kecil. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

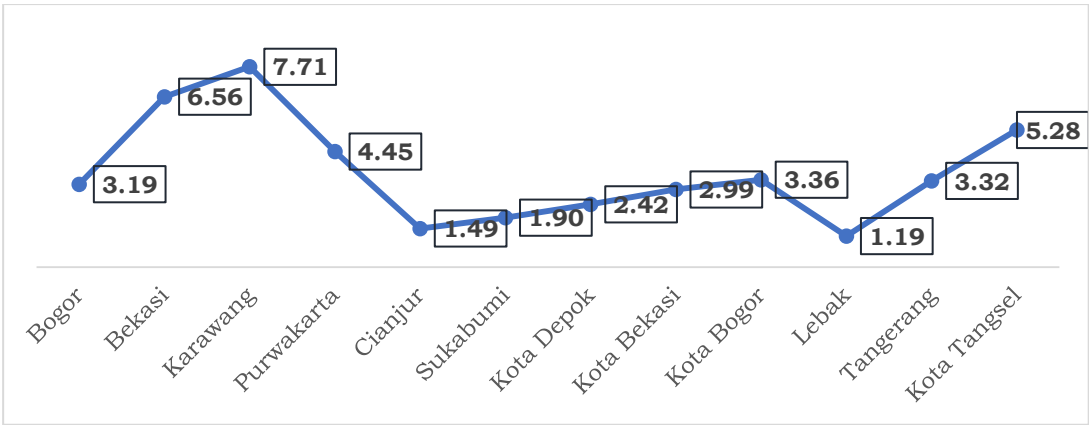
Tabel 2.27
Perbandingan PDRB AHB per Kapita Kabupaten/Kota Perbatasan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	Juta Rupiah	37.535	40.389	43.586	45.384	48.187	51.378
2	Bekasi	Juta Rupiah	84.155	88.37	102.419	108.104	115.085	121.647
3	Karawang	Juta Rupiah	92.272	98.626	91.873	98.846	107.455	115.169
4	Purwakarta	Juta Rupiah	66.201	71.58	67.349	70.152	74.745	79.194
5	Cianjur	Juta Rupiah	19.009	20.373	19.241	20.050	21.341	22.826
6	Sukabumi	Juta Rupiah	25.04	26.968	24.836	25.747	27.472	29.374
7	Kota Depok	Juta Rupiah	27.62	30.079	34.358	35.741	38.402	40.817

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Kota Bekasi	Juta Rupiah	31.031	33.33	37.999	39.479	42.293	45.281
9	Kota Bogor	Juta Rupiah	38.53	42.403	44.1	45.984	49.875	53.239
10	Lebak	Juta Rupiah	20.53	22.097	21.027	22.011	23.618	24.811
11	Tangerang	Juta Rupiah	35.137	37.974	41.964	44.298	48.219	51.538
12	Kota Tangsel	Juta Rupiah	44.24	49.345	61.017	64.499	69.730	75.010

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

Adapun capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022, Kabupaten Bogor menempati posisi ke-7 dalam perkembangan PDRB per kapita dari 2022 ke 2023. Perkembangan tersebut terdapat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024

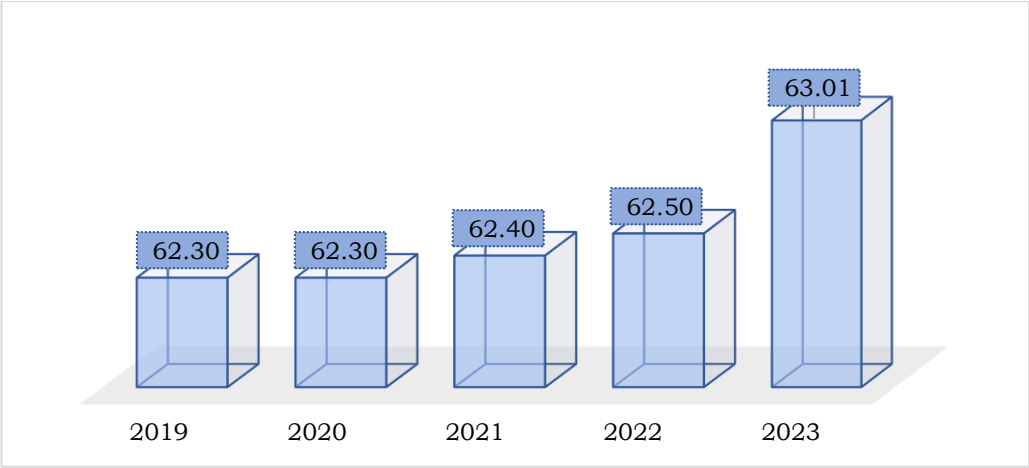
Gambar 2.54
Perbandingan Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2022-2023 dengan Kabupaten/Kota Perbatasan

2.3.2. Daya Saing SDM

Daya saing daerah dapat dilihat dari manifestasi sumber daya manusia yang ada. Beberapa faktor yang dapat merepresentasikan daya saing SDM diuraikan sebagai berikut:

➤ **Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan menggambarkan kualitas pendidikan suatu daerah, dengan melihat rata-rata dan harapan lama sekolah masyarakat. Capaian indeks pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut:



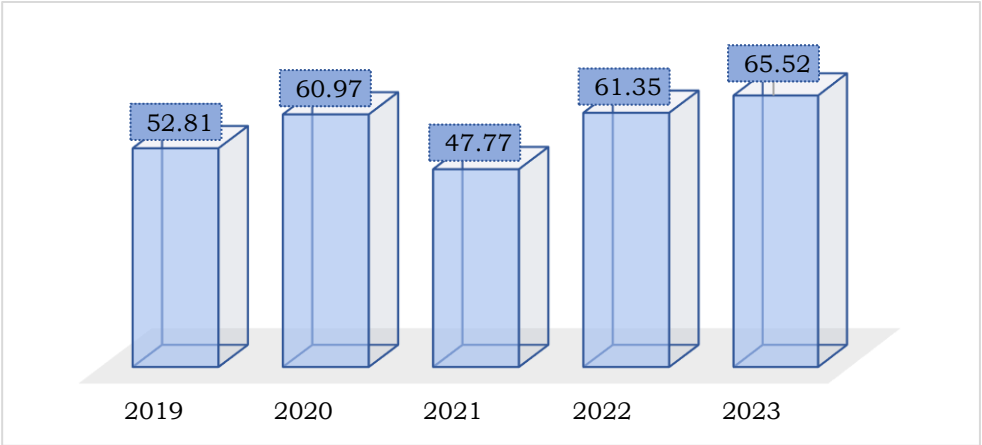
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.55
Indeks Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Indeks Pendidikan di Kabupaten Bogor meningkat perlahan sejak tahun 2019-2022, dan meningkat cukup besar pada tahun 2023 dengan peningkatan kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar 0,51 poin.

➤ Indeks Membaca

Indeks membaca merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mendekati kondisi SDM. Sepanjang tahun 2019-2023, indeks membaca mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



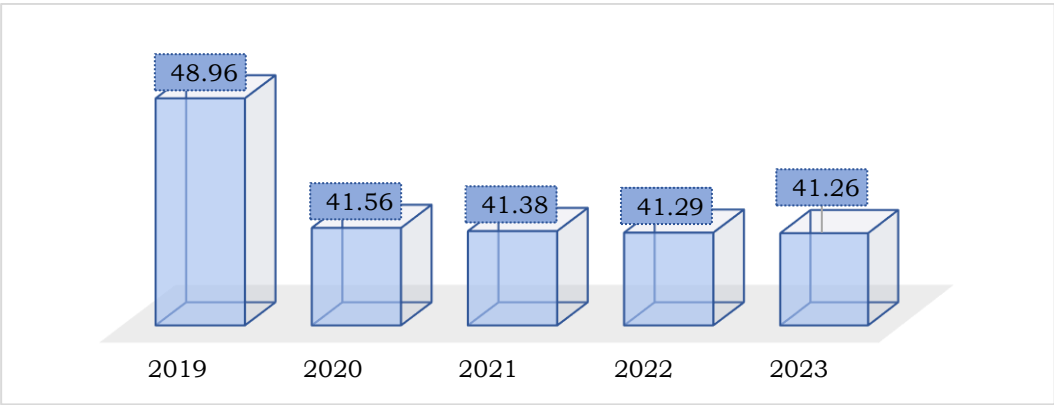
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.56
Indeks Membaca Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Indeks membaca masyarakat Kabupaten Bogor tahun 2023 masuk dalam kategori tinggi (65,52). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor memiliki tingkat kegemaran membaca yang tinggi, dengan peningkatan 4,17 poin terhadap tahun 2022. Angka ini masih berorientasi pada perpustakaan sebagai tempat orang membaca, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan desa.

➤ **Angka Ketergantungan**

Angka ketergantungan menunjukkan sejauhmana penduduk usia produktif menanggung pendudukn usia belum dan tidak lagi produktif. Kondisi angka ketergantungan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan dalam gambar berikut:



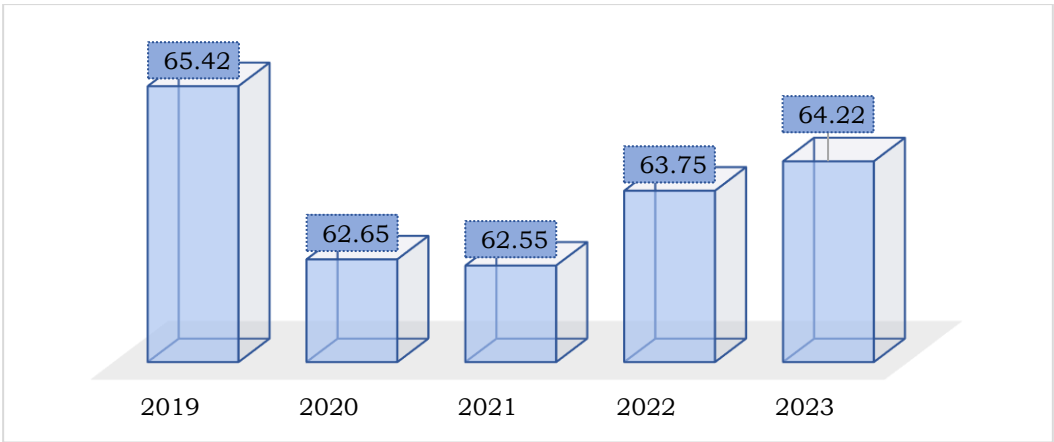
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.57
Angka Ketergantungan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Angka ketergantungan selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan adanya penurunan. Hal ini berarti bahwa lambat laun beban penduduk usia produktif semakin besar karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia belum dan tidak lagi produktif.

➤ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

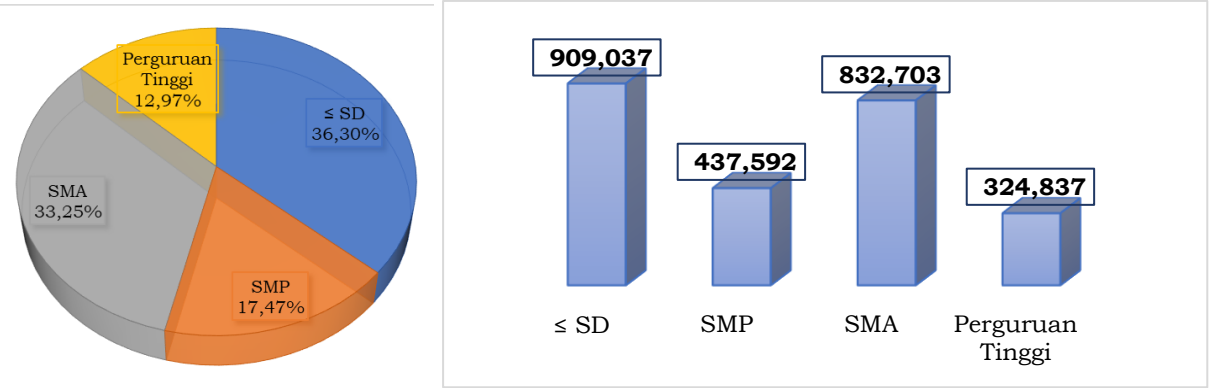
Indikator ini menggambarkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK tahun 2023 meningkat sebesar 0,4 persen dari tahun 2021. Kondisi ini disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.58
Kondisi TPAK Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Hal lain yang dari ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja di Kabupaten Bogor didominasi oleh lulusan SD sampai dengan lulus SD sebanyak 909.037 orang atau 36,30 persen dari total pekerja. Jumlah pekerja di Kabupaten Bogor berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Gambar 2.59
Jumlah Pekerja berdasarkan Jenjang Pendidikan

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur menjadi hal penting dalam peningkatan perekonomian di suatu wilayah. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kondisi pembangunan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Indikator Pembangunan Infrastruktur Wilayah

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketimpangan Williamson	poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,96	0,93	0,99	0,98	0,88	0,84
2	Indeks Desa Membangun	poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7	0,73	0,77	0,79
3	Indeks Konektivitas Infrastruktur	poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,49	N/A	1,50

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Pemerataan pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan apabila pemerataan kesejahteraan masyarakat ingin dicapai. Kondisi pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh fokus pembangunan yang belum merata.

Kondisi desa yang berada pada wilayah Kabupaten Bogor dapat dilihat melalui Indeks Desa Membangun. Saat ini, rata-rata kondisi desa di

Kabupaten Bogor adalah sebagai Desa Maju. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari intervensi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan di desa. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dapat membantu mendongkrak Indeks Desa Membangun agar status desa-desa di Kabupaten Bogor menjadi Desa Mandiri.

Kondisi infrastruktur Kabupaten Bogor juga dapat terlihat dari indeks konektivitas infrastruktur. Capaian indeks konektivitas infrastruktur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Indeks konektivitas infrastruktur ini dibentuk oleh indikator kondisi jalan mantap dan v/c ratio. Capaian kondisi jalan mantap pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,68 persen dan v/c ratio sebesar 0,756.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Berbagai macam aspek dapat menjadi faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi di Kabupaten Bogor. Hal tersebut diantaranya adalah aspek kemudahan investasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk di Kabupaten Bogor. Kondisi iklim dan tingkat investasi di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kondisi Iklim dan Tingkat Investasi Kabupaten Bogor

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67,8	67,9	82,1	96,6	82,8	82,7
2	Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,36	82,05	N/A
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	0	72	87	105	98	331	328	357	365	408	N/A
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	0	13	13,9	11,2	4,41	8,69	9,17	9,16	9,89	15,3	12,06

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/Perusahaan	0	309	324	278	278	20	29	10,8	N/A	N/A	N/A
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	172	-23,5	-32,8	10,4	-54,4	97,1	5,64	-0,22	7,97	31,4	-8,3

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan cerminan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kemajemukan masyarakat di Kabupaten Bogor yang tinggi menjadi penyebab terjadinya fluktuasi pada tingkat kerukunan antarumat. Hal ini harus segera diselesaikan dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor.

Tingkat kepatuhan perda dan perkara juga ikut andil dalam menentukan iklim investasi di Kabupaten Bogor. Diketahui hingga pada tahun 2022 tingkat kepatuhan perda dan perkara di Kabupaten Bogor mencapai 82,05 persen. Tingkat kepatuhan ini akan berpengaruh terhadap investasi yang berjalan di Kabupaten Bogor, karena dapat menentukan kondusifitas ketentraman dan ketertiban di suatu daerah.

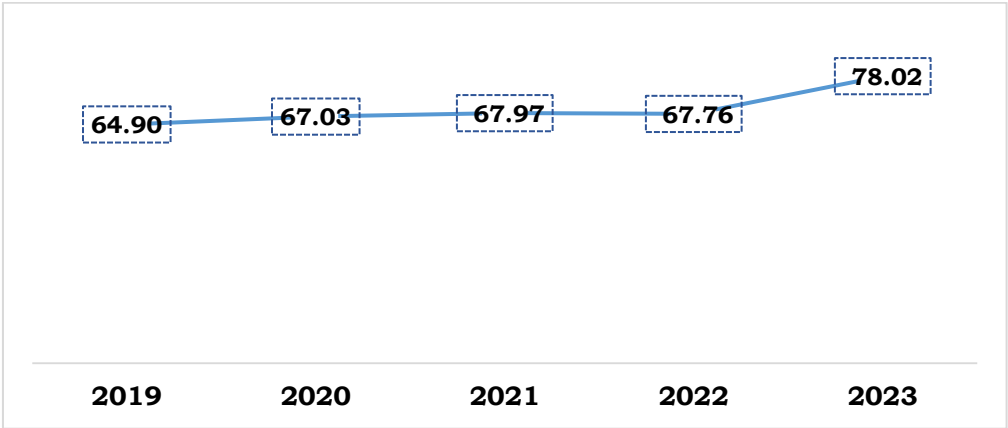
Selain itu, tingkat investasi di Kabupaten Bogor juga mengalami fluktuasi terutama pada tahun politik dan saat terjadi pandemi COVID-19. Situasi politik dan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bogor harus dapat dikendalikan agar menjadi jaminan kepada investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bogor. Meningkatnya investasi di Kabupaten Bogor harus juga diimbangi dengan mempersiapkan angkatan kerja yang tersedia agar rasio daya serap tenaga kerja juga turut meningkat. Diketahui jumlah nilai investasi PMDN/PMA mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 12,06 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 15,3 triliun.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian dari salah satu implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terkait dengan kinerja tata kelola pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik dalam lingkup kewenangan daerah. Kondisi gambaran umum aspek pelayanan umum diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi fokus utama dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bogor. Capaian kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor menunjukkan huruf mutu B dengan nilai capaian hingga tahun 2023 sebesar 78,02 poin, yang berarti bernilai baik, namun masih perlu perbaikan. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2023 kembali meningkat signifikan bahkan mencapai 10,26 poin. Perkembangan nilai indeks reformasi tercantum pada grafik berikut:



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.60
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bogor 2019-2023

2.4.2. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan di Kabupaten Bogor salah satunya terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Indeks kepuasan masyarakat hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa 84,11 persen masyarakat puas akan pelayanan publik. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,5 persen.

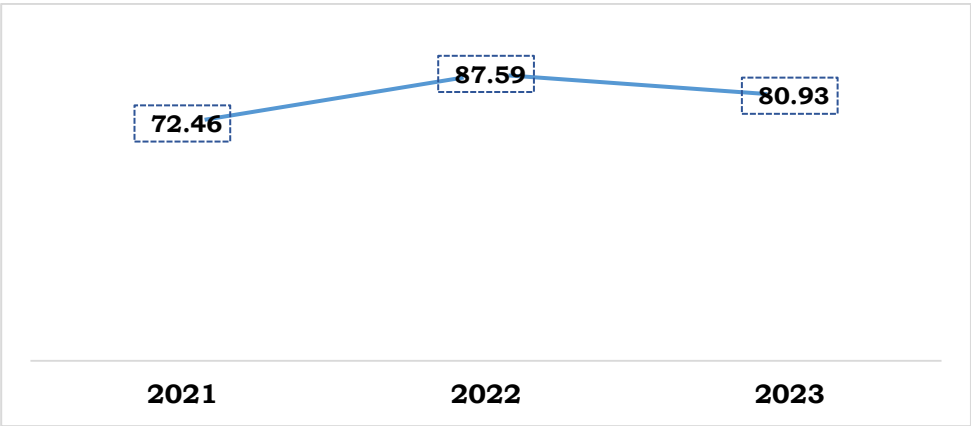
2.4.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dengan layanan berkualitas, diantaranya adalah melalui pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik, Kabupaten Bogor telah mendapatkan nilai SPBE sebesar 3,71 poin pada skala 1-5 yang berarti bahwa, telah masuk dalam kategori baik.

2.4.4. Inovasi Daerah

Daerah yang inovatif akan terlihat dari kemajuan pembangunan yang dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nilai Indeks Inovasi Daerah

yang telah dicapai oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2023 adalah sebesar 80,93 poin. Capaian indeks inovasi daerah di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Perkembangan nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2021 hingga 2023 tercantum pada grafik berikut:



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

Gambar 2.61
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2019-2023

2.4.5.Akuntabilitas Kinerja Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dapat dilihat dari capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Bogor telah mencapai nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sebesar 69,06 poin dengan kategori baik. Capaian ini mengalami peningkatan 0,13 poin.

2.4.6.Kualitas Kebijakan

Salah satu pembentuk indeks reformasi birokrasi adalah indeks kualitas kebijakan. Pengukuran indeks kualitas kebijakan menggambarkan proses penilaian kebijakan dalam bentuk perda maupun perkara dari mulai proses perencanaan hingga evaluasi. Pengukuran nilai indeks kualitas kebijakan ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Diketahui pada tahun 2021 nilai indeks kualitas kebijakan Kabupaten Bogor adalah 38,95 poin dengan kategori kurang. Kemudian pada tahun 2023, nilai indeks kualitas kebijakan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 90,53 poin dengan kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa proses perencanaan kebijakan, implementasi hingga evaluasi sudah mengalami peningkatan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2045 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya, selanjutnya pada Pasal 297 ayat (1) menyebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup daerah kabupaten/kota mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

2.5.1 Capaian Pembangunan berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Per-tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Selanjutnya, capaian indikator sasaran pokok pada setiap misi, diuraikan sebagai berikut:

A. Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, ada 4 sasaran pokok, yaitu:

(a) Penurunan angka kemiskinan, dengan indikator Angka Kemiskinan di tahun ke-5, periode:

(1) Periode Renstra 2005-2008

Angka kemiskinan pada tahun 2008 mencapai 26,71 dari target yang ditetapkan sebesar 26,04, yaitu meningkat sebesar 0,67 persen.

(2) RPJMD 2008-2013

Angka kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 9,54 dari target yang ditetapkan sebesar 8,62, yaitu meningkat sebesar 0,92 persen.

- (3) RPJMD 2013-2018
- Angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah sebesar 7,14 persen, dari target di rentang 8,00-5,00 persen. Sehingga capaian pada periode tersebut adalah sebesar 100 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
- Angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 7,27 dari target yang ditetapkan sebesar 7,14 dengan tingkat capaian 98,18 persen.

Angka kemiskinan Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan setiap periodenya, peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Angka Kemiskinan

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	persen	26,04	8,62	8,00-5,00	7,14
Capaian	persen	26,71	9,54	7,14	7,27
Tingkat Capaian	persen	97,43	89,33	100,00	98,18

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(b) Pengurangan angka pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka di tahun ke-5, periode:

- (1) Renstra 2005-2008
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 dapat ditekan sebesar 15,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar 15,5 persen.
- (2) RPJMD 2008-2013
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 dapat ditekan sebesar 10,73 persen dari target yang ditetapkan sebesar 10,73 persen.
- (3) RPJMD 2013-2018
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 mencapai 9,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar 9,75 persen dapat ditekan 0,67 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mencapai 8,47% dari target yang ditetapkan sebesar 11,05 persen.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor semakin membaik mulai dari Periode I sampai dengan Periode III, namun pada Periode IV di tahun 2022 kembali meningkat akibat dampak Covid-19. Lalu, pada tahun berikutnya pada 2023, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor mengalami penurunan di angka 8,47 persen. Dengan demikian, capaian Tingkat pengangguran terbuka dari target RPJMD periode IV (2018-2023) mengalami penurunan, yaitu sebesar 11,05 persen.

Tabel 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	persen	15,5	10,73	9,75	11,05
Capaian	persen	15,5	10,73	9,08	8,47
Tingkat Capaian	persen	100,00	100,00	106,87	123,35

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(c) Penurunan ketimpangan pendapatan, dengan indikator Indeks Gini, di tahun ke-5, periode:

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1, nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil.

- Renstra 2005-2008

Indeks Gini pada tahun 2008 mencapai 0,31 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,31 poin atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- RPJMD 2008-2013

Indeks Gini pada tahun 2013 mencapai 0,38 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,38 poin atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- RPJMD 2013-2018

Indeks Gini pada tahun 2018 mencapai 0,42 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,34 poin atau tingkat capaiannya sebesar 76,47 persen.

(4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)

Indeks Gini pada tahun 2023 mencapai 0,369 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,31 poin atau tingkat capaiannya sebesar 73,16 persen.

Selanjutnya, capaian Indeks Gini Kabupaten Bogor pada setiap periode dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indeks Gini

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	poin	0,31	0,38	0,34	0,31
Capaian	poin	0,31	0,38	0,42	0,369
Tingkat Capaian	persen	100,00	100,00	76,47	80,97

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di tahun ke-5, periode:

Proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah hendaknya mencakup seluruh aspek, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan demi mencapai kemakmuran suatu wilayah. Adapun untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini menjadi strategis, karena merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik dengan 3 (tiga) dimensi dasar yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Mengenai pertumbuhan tingkat capaian IPM Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat dan nasional, IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah dan belum mampu untuk melampaui capaian dari keduanya.

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Oleh

sebab itu, berbagai program telah dilaksanakan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bogor yang berkualitas dan berdaya saing. Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian IPM setiap periode Pembangunan jangka menengah, adalah sebagai berikut:

- (1) Renstra 2005-2008
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 mencapai 70,76 persen dari target yang ditetapkan sebesar 77,18 persen atau tingkat capaiannya sebesar 91,68 persen.
- (2) RPJMD 2008-2013
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 66,74 persen dari target yang ditetapkan sebesar 72,87 persen atau tingkat capaiannya sebesar 91,59 persen.
- (3) RPJMD 2013-2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2018 mencapai 69,69 persen dari target yang ditetapkan sebesar 69,69 persen atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 73,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar 72,07 persen atau tingkat capaiannya sebesar 101,32 persen.

Tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode I sampai dengan periode IV (capaian tahun 2023), disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Indeks Pembangunan Manusia

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	poin	77,18	72,87	69,69	72,07
Capaian	poin	70,76	66,74	69,69	73,02
Tingkat Capaian	persen	91,68	91,59	100,00	101,32

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

B. Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi, ada 2 sasaran pokok, yaitu:

(a) Peningkatan Produksi Daerah, dengan indikator Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (triliun), di tahun ke-5, periode:

- (1)

Renstra 2005-2008

Nilai PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2008 mencapai 59,38 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 22,53 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 263,56 persen.
- (2)

RPJMD 2008-2013

Nilai PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 135,88 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 135,88 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- (3)

RPJMD 2013-2018

Nilai PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 219,24 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 219,24 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- (4)

RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)

Nilai PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mencapai 289,11 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 308,7 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 93,65 persen.

Nilai PDRB yang dicapai Kabupaten Bogor periode I sampai dengan periode IV (Capaian tahun 2023) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Triliun rupiah	22,53	135,88	219,24	308,7
Capaian	Triliun rupiah	59,38	135,88	219,24	289,11
Tingkat Capaian	persen	263,56	100,00	100,00	93,65

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(b) Peningkatan investasi daerah, dengan indikator Nilai investasi Daerah (triliun), di tahun ke-5, periode:

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Peningkatan investasi yang dilakukan melalui penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran.

- (1) Renstra 2005-2008
Nilai Investasi Daerah pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya/(N/A).
- (2) RPJMD 2008-2013
Nilai investasi Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 4,5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 4 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 112,50 persen.
- (3) RPJMD 2013-2018
Nilai investasi Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 8,69 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 9,9 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 87,78 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
Nilai investasi Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mencapai 12,06 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 9,6 triliun atau tingkat capaiannya sebesar 126,63 persen.

Nilai investasi Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dan penurunan di setiap periodenya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Nilai Investasi Daerah

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Triliun rupiah	N/A	4	9,9	9,6
Capaian	Triliun rupiah	N/A	4,5	8,69	12,06
Tingkat Capaian	persen	N/A	N/A	87,78	125,63

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

C. Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah, ada 2 sasaran pokok, yaitu:

- (a) **Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Indeks Ketimpangan Williamson, di tahun ke-5, periode:**

Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Indeks Ketimpangan Williamson, pada tahun ke-5 pada masing-masing periode dirangkum sebagai berikut:

- (1) Renstra 2005-2008
Indeks Williamson Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (2) RPJMD 2008-2013
Indeks Williamson Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 0,98 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,96 persen atau tingkat capaiannya sebesar 97,92 persen.
- (3) RPJMD 2013-2018
Indeks Williamson Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 0,98 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,96 persen atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
Indeks Williamson Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mencapai 0,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,93 persen atau tingkat capaiannya sebesar 109,68 persen.

Berdasarkan data diatas, Indeks Williamson Kabupaten Bogor dapat disajikan kedalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Indeks Ketimpangan Williamson

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	0,96	0,96	0,93
Capaian	Poin	N/A	0,98	0,96	0,84
Tingkat Capaian	Persen	N/A	97,92	100,00	109,68

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(a) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dengan indikator peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, di tahun ke-5, periode:

- (1) Renstra 2005-2008
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (2) RPJMD 2008-2013
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2013 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (3) RPJMD 2013-2018
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2018 mencapai 14,05 persen dari target yang

ditetapkan sebesar 14,05 persen atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.

(4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)

Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2023 mencapai 98,12 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen atau tingkat capaiannya sebesar 61,83 persen.

Indikator peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman periode III sampai dengan periode IV (capaian tahun 2023) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Permukiman

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Persen	N/A	N/A	14,05	100,00
Capaian	Persen	N/A	N/A	14,05	98,12
Tingkat Capaian	Persen	N/A	N/A	100,00	98,12

Sumber : Evaluasi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025,
Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

4. Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan, ada 3 sasaran pokok, yaitu:

(a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di tahun ke-5, periode:

Pembangunan tidak pernah lepas dari kerusakan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan lingkungan, baik biotik, abiotik, maupun juga sosial budayanya. Hal tersebut perlu dilakukan agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, sehingga generasi mendatang bisa menikmati lingkungan yang lestari.

(1) Renstra 2005-2008

Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya/ (N/A).

(2) RPJMD 2008-2013

Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2013 tidak dapat disajikan datanya/ (N/A).

- (3) RPJMD 2013-2018
- Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2018 mencapai 52,63 persen dari target yang ditetapkan sebesar 56,21 persen atau tingkat capaiannya sebesar 93,63 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
- Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2023 mencapai 60,61 persen dari target yang ditetapkan sebesar 56,25 persen atau tingkat capaiannya sebesar 107,75 persen.
- Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor baru mulai dihitung pada periode III, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	N/A	56,21	56,25
Capaian	Poin	N/A	N/A	52,63	60,61
Tingkat Capaian	Persen	N/A	N/A	93,63	107,75

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

- (b) **Peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator Persentase gangguan trantibum, di tahun ke-5, periode:**
- (1) Renstra 2005-2008
- Persentase gangguan trantibum pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (2) RPJMD 2008-2013
- Persentase gangguan trantibum pada tahun 2008 mencapai 15,37 persen dari target yang ditetapkan sebesar 15,37 persen atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.
- (3) RPJMD 2013-2018
- Pada periode 2013-2018 terjadi perubahan indikator persentase gangguan trantibum menjadi persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Bogor dari rencana sebesar 97,73 persen terealisasi sebesar 97,73 persen, atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen;

(4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)

Pada periode 2018-2023 terjadi perubahan kembali dari persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Bogor menjadi Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada dari rencana sebesar 92,31 persen terealisasi sebesar 92,31 persen, atau tingkat capaiannya sebesar 100 persen.

Dari keterangan di atas, persentase gangguan trantibum dari periode I sampai dengan periode IV (capaian tahun 2023) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Persentase Gangguan Trantibum

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Persen	N/A	15,37	97,73	92,31
Capaian	Persen	N/A	15,37	97,73	92,31
Tingkat Capaian	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(c) Penurunan risiko bencana, dengan Indeks Risiko Bencana, di tahun ke-5, periode:

(1) Renstra 2005-2008

Indeks risiko bencana Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A)

(2) RPJMD 2008-2013

Indeks risiko bencana pada tahun 2013 mencapai 152,40 poin dari target yang ditetapkan sebesar 152 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target indeks risiko bencana masih melampaui sebesar 0,40 poin atau tingkat capaiannya sebesar 99,74 persen.

(3) RPJMD 2013-2018

Indeks risiko bencana pada tahun 2018 mencapai 136,88 poin dari target yang ditetapkan sebesar 142 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target indeks risiko bencana sebesar 103,61 persen.

(4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)

Indeks risiko bencana pada tahun 2023 mencapai 107,93 poin dari target yang ditetapkan sebesar 132 poin. Hal ini

menunjukkan bahwa pencapaian target indeks risiko bencana sebesar 118,23 persen.

Indeks risiko bencana di Kabupaten Bogor periode II sampai dengan periode IV (capaian tahun 2023) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Indeks Risiko Bencana

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	152	142	132
Capaian	Poin	N/A	152,4	136,88	107,93
Tingkat Capaian	Persen	N/A	99,74	103,61	118,23

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

5. Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ada 4 sasaran pokok, yaitu:

(a) Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN, dengan indikator persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural, di tahun ke-5, periode:

- (1) Renstra 2005-2008
- Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural pada tahun 2008 mencapai 4,230 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,62 poin.
- (2) RPJMD 2008-2013
- Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural pada tahun 2013 mencapai 3,61 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,64 poin.
- (3) RPJMD 2013-2018
- Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural pada tahun 2013 mencapai 6,10 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,66 poin.
- Capaian ini diperoleh dari jumlah ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural sebanyak 1.020 orang dari jumlah seluruh ASN Kabupaten Bogor sebanyak 16.710 orang. Adapun jenis diklat yang dilaksanakan adalah:
1. Peningkatan mutu pembelajaran guru SD = 100 orang

2. Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar = 160 orang

3. Diklat Kepala Sekolah Dasar = 250 orang

4. Diklat Pengawas Sekolah TK SD = 35 orang

5. Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP = 70
 6. Diklat Guru SMP Bid.Studi Bahasa Sunda = 40 orang
 7. Diklat Guru SMP Bid.Studi Bahasa Indonesia = 40 orang
 8. Diklat Guru SMP Bid.Studi Matematika = 40 orang
 9. Diklat Guru SMP Bid.Studi IPA dan Fisika = 40 orang
 10. Diklat Program Induksi Guru Pemula = 40 orang
 11. Diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah dan PAK = 35 orang
 12. Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = 40 orang
 13. Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah = 40 orang
 14. Diklat Protokol dan Kehumasan = 40 orang
 15. Diklat Kearsipan = 40 orang
 16. Diklat Kepemimpinan = 55 orang
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023),
- Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural pada tahun 2023 mencapai 14,9 poin.
- Salah satu sasaran strategis Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Walaupun nomenklaturnya tidak sama persis dengan indikator di RPJPD 2005-2025, tetapi cara mengukur indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sama dengan cara mengukur persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan struktural. Target kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2019 sebesar 11 persen, Tahun 2020 sebesar 9,68 persen, Tahun 2021 sebesar 10,64 persen, Tahun 2022 sebesar 11,71 persen, dan Tahun 2023 sebesar 12,88 persen. Capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2018 sebesar 6,10 persen, Tahun 2019 sebesar 15,76 persen, Tahun 2020 sebesar 9,32 persen.
- Sejak Tahun 2021 sejalan dengan Perubahan Nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor (BKPSDM), Rencana Strategis BKPP 2018-2023 dilakukan perubahan menjadi

Rencana Strategis BKPSDM 2018-2023. Pada Renstra BKPSDM Perubahan 2018-2023 tersebut sasaran BKPSDM berubah menjadi meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit dengan indikator Indeks Sistem Merit. Indikator persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural tidak lagi digunakan sebagai indikator sasaran BKPSDM. Pada Perubahan Renstra BKPSDM 2018-2023, indikator kinerja yang sepadan dengan indikator RPJPD persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan struktural adalah ada pada indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP/Orang/Tahun. Target kinerja pada tahun 2021 adalah 16,16 persen, Tahun 2022 sebesar 18,91 persen, dan Tahun 2023 sebesar 21,45 persen. Capaian kinerja indikator tersebut pada Tahun 2021 sebesar 13,53 persen.

Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Persentase ASN yang mengikuti diklat
formal dan struktural

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	0,62	0,64	0,66	N/A
Capaian	Poin	4,23	3,61	6,10	14,9
Tingkat Capaian	Persen	582,26	464,06	824,24	N/A

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(b) Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah, dengan indikator Nilai AKIP, di tahun ke-5, periode:

- (1) Renstra 2005-2008
 Nilai AKIP Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (2) RPJMD 2008-2013
 Nilai AKIP Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A).

- (3) RPJMD 2013-2018
- Nilai AKIP pada tahun 2018 mencapai 65,14 poin dengan predikat B dari target yang ditetapkan predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target nilai AKIP tercapai.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
- Nilai AKIP pada tahun 2023 mencapai 69,06 poin dari target sebesar 75 poin.
- Nilai AKIP yang diperoleh Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Nilai AKIP

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	N/A	80	75
Capaian	Poin	N/A	N/A	65,14	69,06
Tingkat Capaian	Persen	N/A	N/A	81,43	92,08

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(c) Peningkatan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), di tahun ke-5, periode:

- (1) Renstra 2005-2008
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A)
- (2) RPJMD 2008-2013
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A)
- (3) RPJMD 2013-2018
- Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dengan target 82 poin terealisasi sebesar 80,28 poin atau 97,90 persen.
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023)
- Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan target 87,5 poin terealisasi sebesar 84,11 poin atau 96,13 persen.
- Capaian indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Indeks Kepuasan Masyarakat

	satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	N/A	82	87,5
Capaian	Poin	N/A	N/A	80,28	84,11
Tingkat Capaian	Persen	N/A	N/A	97,90	96,13

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

(c) Peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung pelayanan publik (IT Governance), dengan indikator Indeks SPBE, di tahun ke-5, periode:

Indeks SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan indikator baru pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019.

- (1) Renstra 2005-2008
Indeks SPBE Kabupaten Bogor pada tahun 2008 tidak dapat disajikan datanya (N/A)
- (2) RPJMD 2008-2013
Indeks SPBE Kabupaten Bogor pada tahun 2013 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (3) RPJMD 2013-2018
Indeks SPBE Kabupaten Bogor pada tahun 2013 tidak dapat disajikan datanya (N/A).
- (4) RPJMD 2018-2023 (Capaian Tahun 2023).

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh sebab itu, Indeks SPBE dijadikan indikator tujuan kedua yang diampu oleh Diskominfo. Indeks SPBE pada tahun 2023 mencapai

3,71 dari target yang ditetapkan sebesar 3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target indeks SPBE masih melampaui sebesar 0,50 poin atau tingkat capaiannya sebesar 123,67 persen. Capaian tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Indeks SPBE

	Satuan	Periode I 2005-2008	Periode II 2008-2013	Periode III 2013-2018	Periode IV 2018-2023
Target	Poin	N/A	N/A	N/A	3
Capaian	Poin	N/A	N/A	N/A	3,71
Tingkat Capaian	Poin	N/A	N/A	N/A	123,67

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

2.5.2. Capaian Pembangunan berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 pada Tahun 2023

Capaian pembangunan berdasarkan evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2023 meliputi capaian kinerja makro yang terdiri atas: (1) Indeks Pembangunan Manusia; (2) Angka Kemiskinan; (3) Angka Pengangguran; (4) Pertumbuhan Ekonomi; (5) Pendapatan Perkapita; (6) Ketimpangan Pendapatan, dan (7) PDRB per Kapita.

Capaian kinerja makro pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2023, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Makro pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun berjalan (2023)
1	2	3	4
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	68,41	73,02
2.	Angka Kemiskinan (%)	26,45	7,27
3.	Angka Pengangguran (%)	4,99	8,47
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,82	5,19
5.	Pendapatan Perkapita (Rp)	8,257	51.378
6.	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini (poin)	0,290	0,369
7.	PDRB (AHB)	34,63	289.106

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023

Capaian tahun 2023 pada setiap indikator makro, dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada awal periode perencanaan atau tahun 2005, capaian IPM sebesar 68,41 poin, sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 73,02 poin, meningkat sebesar 4,61 poin. Capaian ini menunjukkan kategori masyarakat sejahtera menengah atas, tetapi belum termasuk masyarakat sejahtera tinggi, karena nilai IPM nya belum mencapai 80 poin. Adapun kinerja dari komponen pembentuk IPM yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*=PPP) semuanya menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun.

➤ **Angka Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebanyak 1.084.718 jiwa dengan total jumlah penduduk sebanyak 4.100.934 jiwa atau sekitar 26,45 persen. Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bertambahnya data keluarga miskin berkenaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, sehingga jumlah penduduk yang semula belum termasuk kategori miskin, kemudian berubah kategorinya menjadi keluarga miskin. Pada tahun 2023, angka kemiskinan menjadi sebesar 7,27 persen. Dibutuhkan pengendalian yang cukup intensif, baik secara regulasi maupun pelaksanaan program-program tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

➤ **Angka Pengangguran**

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2005 sebanyak 204.858 orang dari jumlah penduduk sebanyak 4.100.934 atau sebesar 4,99 persen, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 8,47 %. Hal tersebut akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional serta dimulainya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

➤ **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2005 sebesar 5,82 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah investasi dan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga nilai PDRB berdasarkan harga konstan juga meningkat secara signifikan, yang kemudian akan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen.

Indikator LPE secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang perkembangannya bergerak secara fluktuatif. Hal tersebut terjadi dikarenakan dampak adanya pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2018 LPE Kabupaten Bogor yang mencapai 6,19 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan selama dua tahun berturut-turut sampai pada posisi -1,76 persen di tahun 2020. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pertumbuhan LPE Kabupaten Bogor kembali mengalami kenaikan sebagaimana pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2023 berada di angka 5,19 persen.

➤ **Pendapatan perkapita**

Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor adalah indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pendapatan per kapita secara rata-rata untuk penduduk Kabupaten Bogor. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2005, yang dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk adalah mencapai sebesar Rp. 8,257 juta. Pada tahun 2023 menjadi Rp51,378 Juta.

➤ **Ketimpangan Pendapatan**

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Pada tahun 2009, nilai Indeks Gini Kabupaten Bogor sebesar 0,290 poin, dan sampai dengan tahun 2023 indeks gini sebesar 0,369 poin, artinya masih dalam kategori pemerataan sedang di wilayah Kabupaten Bogor.

➤ **PDRB AHB**

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber

daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor akan dinilai baik apabila dapat menstimulus fungsi-fungsi perekonomian yang dapat meningkatkan PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar 34,63 Triliun Rupiah. Kemudian pada Tahun 2023 PDRB atas dasar harga berlaku ditargetkan sebesar Rp244,05 Triliun dan berhasil terealisasi sebesar Rp289,106 Triliun.

2.5.3. Rekomendasi Tindak Lanjut berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:

A. Penurunan angka kemiskinan, dengan indikator Angka Kemiskinan

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Angka kemiskinan yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu:
 - a. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c. Menurunkan jumlah kantong kantong kemiskinan.
3. Merumuskan kembali program-program pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Meningkatkan cakupan layanan program asuransi usaha tani untuk menjamin ketidakpastian iklim dan cuaca.
5. Meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan terintegrasi lintas sektor.
6. Alokasi anggaran lebih besar pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang terukur.
7. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat berkomitmen dalam penurunan angka kemiskinan dengan melibatkan seluruh elemen khususnya keluarga yang mempunyai peran dalam kelompok-kelompok Ketahanan Keluarga dan Kelompok Perempuan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bogor.

B. Pengurangan angka pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Tingkat pengangguran terbuka yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha industri agar bisa kembali berusaha.
3. Mengembangkan petani milenial melalui program Yess Kementan.
4. Alokasi anggaran lebih besar pada upaya-upaya penanganan pengangguran yang fokus dan terintegrasi.

C. Penurunan ketimpangan pendapatan, dengan indikator Indeks Gini

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Indeks Gini yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Melakukan pembinaan petani agar menjadi petani yang mandiri.
3. Membangun industri pariwisata pada KSPD dan KPPD Kabupaten Bogor.
4. Memperluas akses modal dan kesempatan kerja (mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi masyarakat menengah kebawah seperti UMKM yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan kepada Masyarakat).
5. Meningkatkan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan.

D. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui Indikator sasaran pokok Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan terus berupaya menekan tingkat kemiskinan dengan cara menurunkan nilai selisih kebutuhan layak hidup terhadap upah minimum kabupaten, sehingga taraf

hidup masyarakat meningkat dan akan berdampak baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Meningkatkan ketersediaan jumlah ruang kelas sesuai kebutuhan.
4. Merekrut tenaga kesehatan yang dibutuhkan, baik oleh puskesmas maupun rumah sakit sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas maupun Rumah Sakit.
5. Pelatihan Teknis Tenaga Kesehatan yang ada untuk memenuhi standar.
6. Dibuat Jadwal Binaan ke 20 Puskesmas yang akan akreditasi.
7. Memenuhi standar minimal tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas.
8. Revitalisasi/Rehabilitasi/Relokasi Puskesmas sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.

E. Peningkatan produksi daerah, dengan indikator Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (triliun)

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Indeks Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (Triliun) yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Meningkatkan kualitas barang dan jasa agar mampu bersaing dengan daerah lain.
3. Kerjasama dan kemitraan untuk mendapatkan pangsa pasar.
4. Melanjutkan pemberian bantuan modal bagi para UMKM dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
5. Membuat kajian tentang kebutuhan sarana distribusi perdagangan.
6. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait sarana distribusi perdagangan maupun kebutuhan lainnya yang tidak mendapatkan alokasi dana APBD.
7. Melakukan pendataan pelaku usaha.
8. Pemberdayaan dan pengembangan IKM/UKM.
9. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten sebagai pedoman kerja.
10. Menguji kesuburan tanah dan menggunakan benih/bibit unggul bersertifikat.
11. Mengembangkan pola dan intensitas tanam melalui optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi.

12. Melaksanakan mitigasi, pengendalian dan pencegahan terhadap OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).
13. Meningkatkan penerapan *Good Agriculture Product* (GAP) dan *Good Handling Product* (GHP) serta sertifikasi produk pertanian.
14. Mengembangkan usaha melalui pengolahan hasil, penyediaan outlet/pasar, dan lembaga keuangan.
15. Mengembangkan sentra produksi usaha dengan komoditas unggulan.
16. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
17. Meningkatkan penerapan pola usaha *Integrated Farming*.
18. Meningkatkan kompetensi penyuluh, petani, dan pelaku usaha pertanian.

F. Peningkatan investasi daerah, dengan indikator Nilai investasi Daerah (triliun)

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Nilai Investasi Daerah (triliun) yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.
2. Memperbaiki mekanisme pelayanan investasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri mikro-kecil, dan pariwisata.
3. Menyusun Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah.
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pelaporan investasi melalui LKPM.
5. Membentuk Bidang Pengendalian yang khusus menangani pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha.
6. Melakukan evaluasi secara berkala dalam mengatasi hambatan yang ada.

G. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Indeks Ketimpangan Williamson

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui Indikator sasaran pokok Indeks Ketimpangan Williamson yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat memfasilitasi atau memperbaiki faktor-faktor pendorong yang memacu pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan selain sektor ekonomi yang sudah ada.
3. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan potensi ekonomi daerah sehingga sumber daya yang selama ini belum dikelola dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan sinergi dan kolaborasi dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan untuk bersama-sama mengintegrasikan pusat-pusat perekonomian dan pariwisata melalui konektivitas transportasi yang memadai.

H. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dengan indikator peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman

Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui beberapa perangkat daerah pengampu.

I. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Indeks Lingkungan Hidup yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.

J. Peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator Persentase gangguan trantibum

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok persentase gangguan trantibum yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.
2. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang aturan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum melalui media sosial, sosialisasi tatap muka ataupun media lainnya.

3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban.
4. Menyiapkan regulasi penanganan ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan terbaru.

K. Penurunan risiko bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui Indikator sasaran pokok Indeks Risiko Bencana yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pos pemadam, kendaraan, peralatan dan perlengkapan pemadaman.

L. Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN, dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas ASN dan peningkatan kualitas sistem dan prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan serta pengembangan *core value* ASN Berakhlak dan Bangga Melayani Bangsa.
3. Melakukan Pemetaan Kompetensi dan Kinerja melalui implementasi Manajemen Talenta.
4. Meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti Assessment.
5. Merencanakan perekrutan Assessor SDM Aparatur dan pembentukan *Assessment Center*.
6. Merencanakan perekrutan Widya Iswara dan pembentukan UPT Diklat.

M. Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah, dengan indikator Nilai AKIP

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Nilai AKIP yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.

2. Digitalisasi Proses Administrasi: Pemerintah Kabupaten Bogor dapat melakukan digitalisasi proses administrasi dengan menggantikan proses manual dengan sistem digital. Misalnya, penggunaan formulir elektronik, sistem penandatanganan digital, dan alur kerja otomatis dapat mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi dalam administrasi pemerintahan.

N. Peningkatan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus fokus mengawal ketercapaian sasaran pokok melalui indikator sasaran pokok Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang nantinya akan dijabarkan dalam pencapaian perencanaan jangka menengah melalui perangkat daerah pengampu.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kepastian sistem dan prosedur pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilakukan secara berkala.
3. Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap nilai per-unsur yang masih rendah.
4. Seluruh unit pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan serta mempublikasikan Standar Pelayanan.
5. Mendorong unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, prosedur pelayanan, dan pengelolaan pengaduan untuk mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Seluruh unit pelayanan publik melaksanakan SKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

O. Peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung pelayanan publik (*IT Governance*), dengan indikator Indeks SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dijabarkan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan adalah:

1. Melakukan optimalisasi peran Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bogor, dilakukan review evaluasi secara berkala dan terjadwal pada setiap kegiatan SPBE.

2. Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tenaga ahli dalam penyusunan pedoman manajemen SPBE.
3. Review dan perbaikan pada rencana induk SPBE yang telah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Domain layanan SPBE dapat menjadi prioritas untuk optimalisasi karena memiliki bobot penilaian paling besar diantara domain lainnya, sehingga sangat membantu untuk menaikkan nilai indeks SPBE.

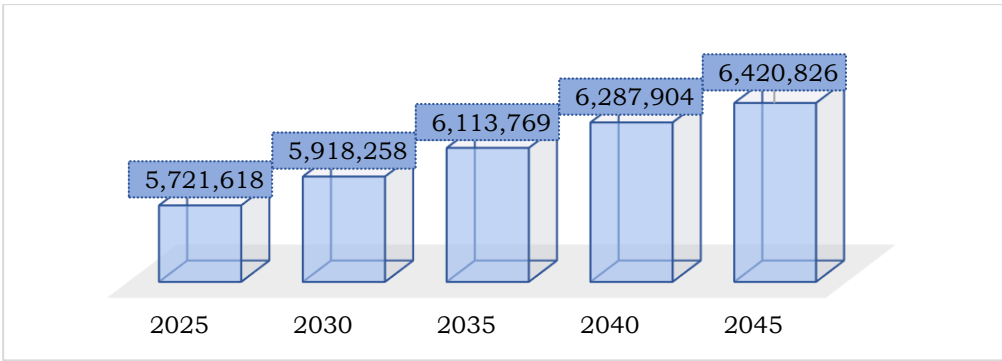
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk adalah perkiraan atau prediksi mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara pada masa mendatang, berdasarkan data penduduk yang ada pada saat ini dan asumsi-asumsi tertentu tentang tren-tren demografis yang mungkin terjadi. Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk berguna untuk perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, ekonomi dan infrastruktur, serta memberikan dasar untuk alokasi sumber daya yang tepat.

A. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

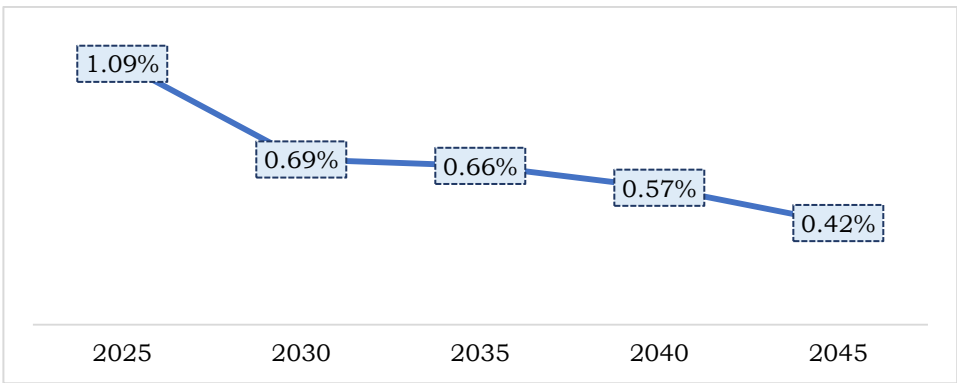
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2025 sebesar 5.721.620 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun proyeksi maksimum yaitu tahun 2045 mencapai 6.402.221 jiwa.



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.62
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

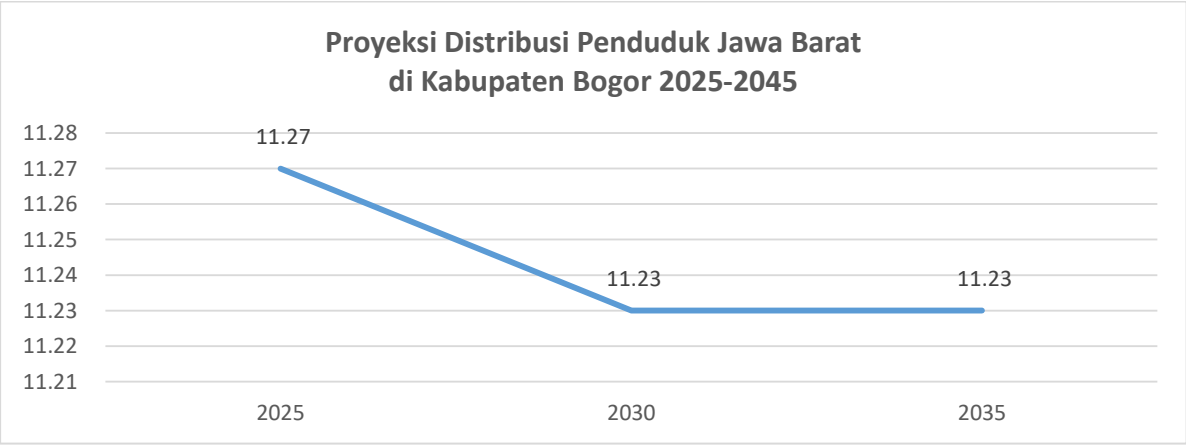
Apabila dilihat dari besaran proyeksi jumlah penduduk setiap per lima tahun, kita bisa melihat bahwa terjadi kecenderungan penambahan jumlah penduduk di tiap tahunnya. Namun, jika secara jumlah, maka bisa dilihat pertambahan jumlah penduduk tersebut semakin melambat. Hal ini memperlihatkan bahwa secara laju pertumbuhan penduduk, untuk Kabupaten Bogor cenderung menurun. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk merupakan bagian dari keberhasilan penurunan tingkat fertilitas.



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Gambar 2.63
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 1,09%, kemudian cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2045 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor berada di angka 0,42%. Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor hingga tahun 2045, berdasarkan perhitungan rata-rata yang menggunakan jumlah penduduk setiap 5 tahun. Pertumbuhan penduduk yang terkendali memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pelambatan laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan semakin rendahnya tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor.



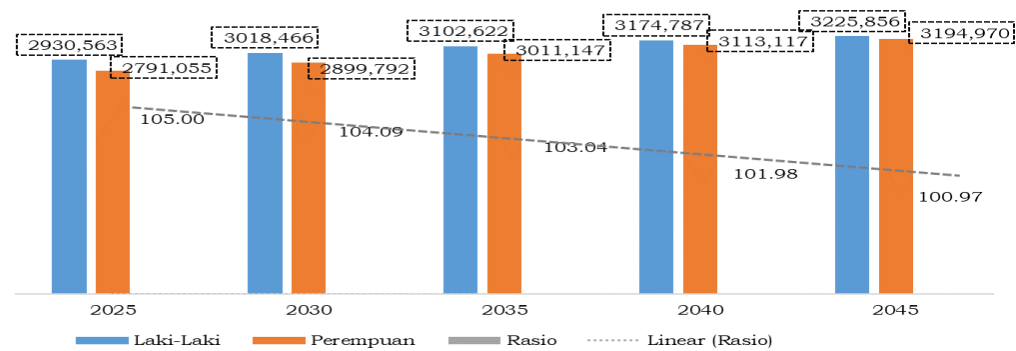
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023 (data diolah)

Gambar 2.64
Proyeksi Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

Besaran proyeksi jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap besaran persentase distribusi penduduk di suatu daerah. Distribusi penduduk merujuk pada cara penduduk terdistribusi atau tersebar di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Distribusi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor geografis, ekonomis, sosial, dan politik.

Dilihat dari data proyeksi diatas, terlihat bahwa Kabupaten Bogor tetap masih menjadi pilihan utama dalam pola distribusi penduduk di Jawa Barat. Perbedaan kesempatan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat menyebabkan distribusi jumlah penduduk yang tidak merata. Jumlah distribusi penduduk yang cukup besar akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat diantaranya di bidang perumahan, pendidikan dan kesehatan.

B. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



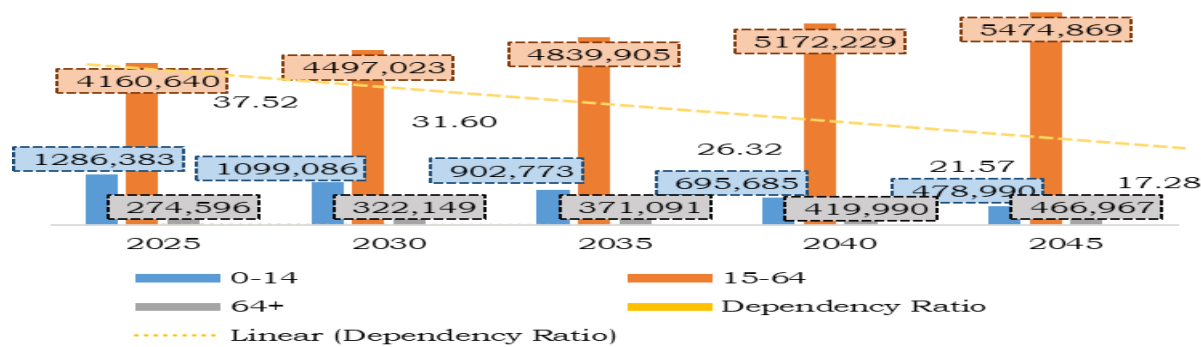
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.65
Proyeksi Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

Informasi terkait dengan bentuk analisis dari sudut pandang gender sangat diperlukan mengingat perencanaan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan. Apabila melihat hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin diatas, kita bisa melihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bogor akan semakin mendekat sama. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan penurunan nilai rasio jenis kelamin dari 105,00 di tahun 2025 menjadi 100,97 pada tahun 2045.

C. **Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memiliki banyak kepentingan strategis dan praktis dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya.



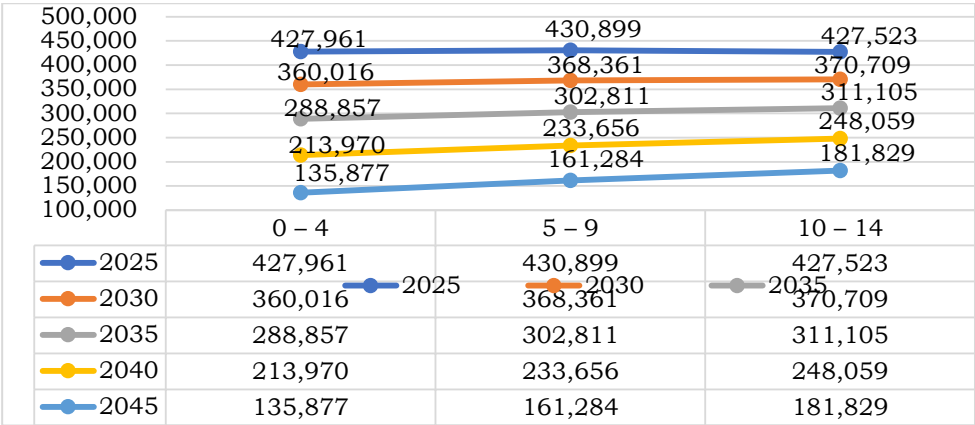
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.66
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Terdapat kecenderungan penurunan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dari 22,48 persen di tahun 2025 menjadi 7,46 persen di tahun 2045. Hal ini memberikan asumsi bahwa terjadi penurunan nilai *Total Fertility Rate* (TFR) yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun) di Kabupaten Bogor. Hal lain terjadi untuk usia 15-64 tahun yang masuk ke dalam usia produktif, terjadi peningkatan dari 70,30 di tahun 2025 menjadi 85,27 di tahun 2045. Peningkatan juga terjadi pada jumlah usia 65+ tahun dari 4,80 di tahun 2025 menjadi 7,27 di tahun 2045. Hal ini menunjukkan tingkat capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor yang semakin membaik dengan ditunjang oleh pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

1) **Proyeksi Penduduk Usia 0-14 Tahun**

Berdasarkan proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2035, didapatkan angka jumlah penduduk usia 0-14 tahun Kabupaten Bogor tahun 2045 sebesar 7,46 persen atau sebanyak 478.990 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2045 sebanyak 6.420.826 jiwa.



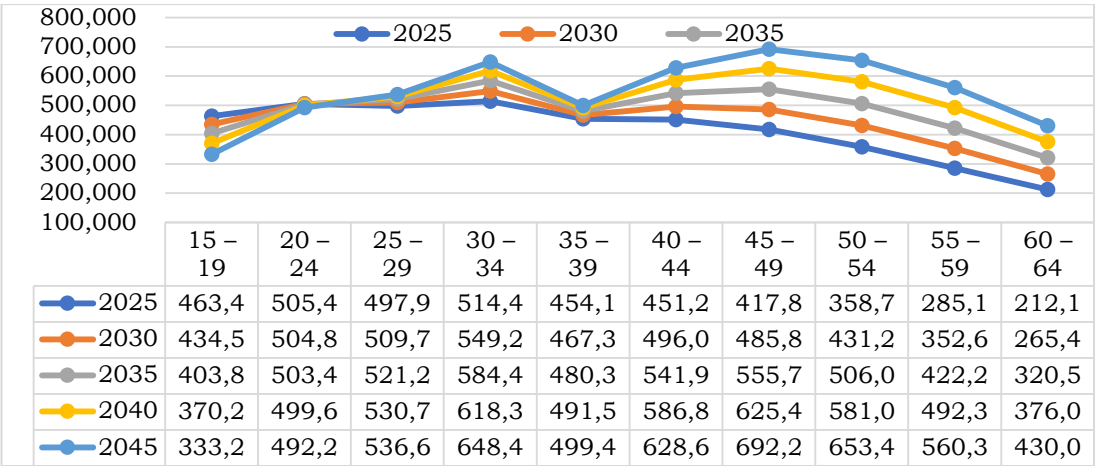
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.67
Proyeksi Usia 0-14 Tahun

Dari data diatas terjadi penurunan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun dalam kurun waktu per lima tahun hingga tahun 2045. Hal ini akan berpengaruh terhadap proyeksi pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memadai terutama untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah.

2) **Proyeksi Penduduk Usia 15-64 Tahun**

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, khususnya untuk jumlah penduduk usia 15-64 tahun, didapatkan angka bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Bogor pada tahun 2045 sebesar 85,27 persen atau sekitar 5.474.869 jiwa dari jumlah total penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 6.420.826 jiwa.



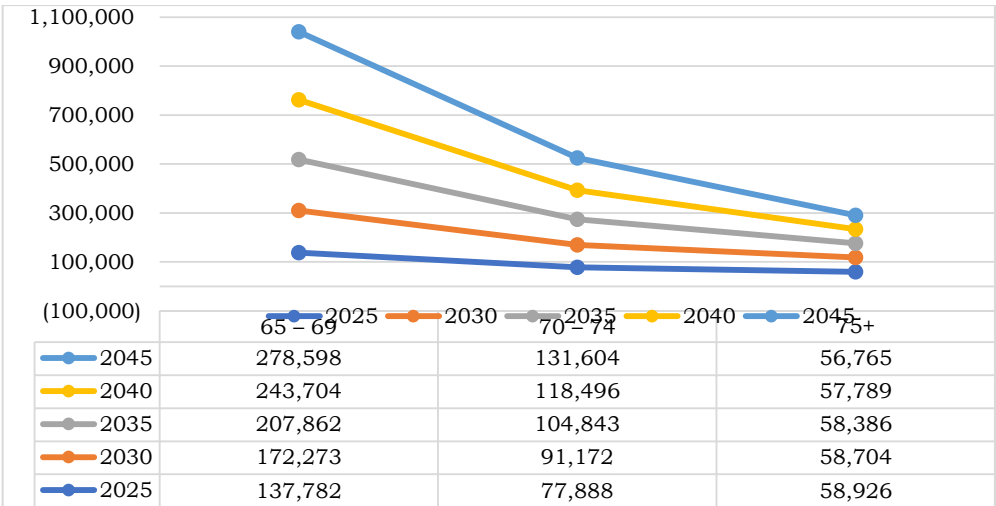
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.68
Proyeksi Usia 15-64 Tahun

Jumlah penduduk usia produktif masih tetap mendominasi secara jumlah hingga tahun 2045. Hal ini perlu mendapat fokus perhatian, mengingat jumlah penduduk usia produktif akan berpengaruh terhadap pemanfaatan bonus demografi terutama pada sektor ekonomi sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan khusus terutama terkait dengan pendidikan dan ketenagakerjaan.

3) Proyeksi Penduduk Usia 65+ tahun

Terdapat hal yang sangat menarik terkait dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia, yaitu jumlah penduduk usia 65+ proyeksi ke depan akan mengalami peningkatan. Hal ini bisa terlihat dengan rilis angka jumlah penduduk usia 65+ di Kabupaten Bogor yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk usia 65+ sebesar 7,27 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 6.420.826 jiwa atau sekitar 466,967 jiwa.



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Gambar 2.69
Proyeksi Usia 65+ Tahun

Kecenderungan kenaikan jumlah usia lanjut (65+tahun) harus segera mendapatkan respon yang cepat oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera mengeluarkan kebijakan untuk mempersiapkan masa lanjut usia, pada semua aspek antara lain ekonomi, sosial, mental, memerlukan upaya lintas sektor. Hal tersebut harus dilakukan untuk mewujudkan penduduk lanjut usia yang mandiri, sehat, dan bermartabat.

D. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur akan menyebabkan perubahan terkait dengan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pemanfaatan data ketergantungan dapat memberikan informasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan ekonomi suatu daerah dan memberikan dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Beberapa cara pemanfaatan data rasio ketergantungan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Penentuan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

Jika rasio ketergantungan rendah, dapat menunjukkan potensi untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan karena lebih banyak populasi yang produktif secara ekonomi. Hal ini dapat membantu menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing.

2) Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Rasio ketergantungan juga dapat memberikan informasi tentang jumlah populasi yang mungkin membutuhkan dukungan sosial, seperti anak-anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus. Data ini dapat membantu perencanaan program kesejahteraan sosial yang sesuai dan adaptif.

3) Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan

Jika terdapat peningkatan jumlah populasi yang produktif, pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengembangkan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan pekerjaan.

4) Perencanaan Infrastruktur

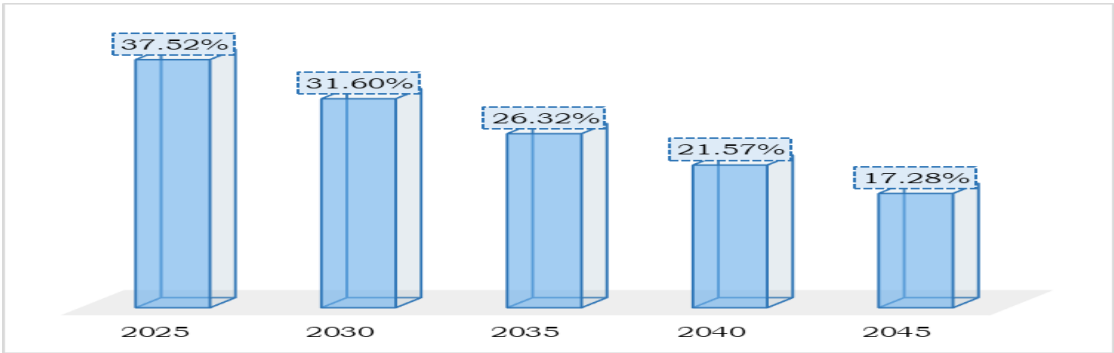
Rasio ketergantungan berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur suatu daerah. Jika terdapat peningkatan populasi yang produktif, maka diperlukan investasi dalam infrastruktur seperti transportasi, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

5) Perencanaan Kesehatan

Rasio ketergantungan berpengaruh terhadap sistem kesehatan daerah. Jika terdapat peningkatan jumlah lansia, perluasan layanan kesehatan khusus untuk lansia akan segera diperlukan beserta jaminan sosial pendukungnya.

6) Perencanaan Keuangan Daerah

Pemerintah perlu memastikan bahwa ada cukup sumber daya untuk mendukung populasi yang bergantung tanpa memberatkan ekonomi daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024, diolah

Gambar 2.70
Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan pada tahun 2025 diproyeksikan adalah sebesar 37,52 persen. Rasio ketergantungan ini akan terus menurun sebesar 17,28 persen pada tahun 2045.

Pemanfaatan data rasio ketergantungan ini sebaiknya dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.6.2. Kebutuhan Sarana Prasarana

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya juga kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, listrik, air bersih, dan persampahan. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, listrik, air bersih, dan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025 - 2045

Tahun	Sarana Pendidikan (Unit)					
	TK	SD	SMP	SMA	Taman Baca	Perguruan Tinggi
2025	966	966	232	193	193	83
2030	1.032	1.032	248	206	206	88
2035	1.104	1.104	265	221	221	95
2040	1.182	1.182	284	236	236	101
2045	1.267	1.267	304	253	253	109

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di atas, terlihat bahwa kebutuhan tersebut cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045, dari mulai jenjang TK hingga Perguruan Tinggi. Peningkatan kebutuhan sarana pendidkan ini harus diantisipasi dalam penyediaan jumlah sarana dan juga tenaga pendidiknya.

Tabel 2.47
Proyeksi Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan Tahun 2025 - 2045

Tahun	Kebutuhan Lahan (M2)						Total Kebutuhan Lahan (M2)	Kebutuhan Lahan (Ha)
	TK	SD	SMP	SMA	Taman Baca	Perguruan Tinggi		
2025	482.930	1931.719	2086.257	2414.649	96.586	1655.759	8667.899	867
2030	516.137	2064.546	2229.710	2580.683	103.227	1769.611	9263.914	926
2035	552.104	2208.417	2385.090	2760.521	110.421	1892.929	9909.481	991
2040	591.083	2364.334	2553.480	2955.417	118.217	2026.572	10609.103	1.061
2045	633.351	2533.404	2736.077	3166.755	126.670	2171.489	11367.747	1.137

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan lahan sarana pendidikan cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Hal ini juga berkaitan dengan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan yang juga meningkat. Kebutuhan lahan ini, harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Tabel 2.48
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025 - 2045

Tahun	Sarana Kesehatan (Unit)							
	POSYANDU	Balai pengobatan Warga/Klinik	BKIA/RS Bersalin	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Dan Balai Pengobatan	Prakter Dokter/Praktek Bidan	Apotek/Rumah Obat	Rumah Sakit
2025	4.636	2.318	193	193	48	1.159	193	24
2030	4.955	2.477	206	206	52	1.239	206	26
2035	5.300	2.650	221	221	55	1.325	221	28
2040	5.674	2.837	236	236	59	1.419	236	30

Tahun	Sarana Kesehatan (Unit)							
	POSYANDU	Balai pengobatan Warga/Klinik	BKIA/RS Bersalin	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Dan Balai Pengobatan	Prakter Dokter/Praktek Bidan	Apotek/Rumah Obat	Rumah Sakit
2045	6.080	3.040	253	253	63	1.520	253	32

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di atas, terlihat bahwa kebutuhan tersebut cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045, dari mulai posyandu hingga rumah sakit. Peningkatan kebutuhan sarana Kesehatan ini harus diantisipasi dalam penyediaan jumlah sarana dan juga tenaga kesehatannya.

Tabel 2.49
Proyeksi Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan Tahun 2025 – 2045

Tahun	Sarana Kesehatan (Unit)								Total Kebutuhan Lahan (m²)	Kebutuhan Lahan (Ha)
	POSYANDU	Balai pengobatan Warga/Klinik	BKIA/RS Bersalin	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Dan Balai Pengobatan	Prakter Dokter/Praktek Bidan	Apotek/Rumah Obat	Rumah Sakit		
2025	278.167,54	695.418,84	579.515,70	57.951,57	48.292,98	69.541,88	48.292,98	241.464,88	3035.252,13	303,53
2030	297.294,67	743.236,68	619.363,90	61.936,39	51.613,66	74.323,67	51.613,66	258.068,29	3244.434,56	324,44
2035	318.012,00	795.030,00	662.525,00	66.252,50	55.210,42	79.503,00	55.210,42	276.052,08	3470.526,79	347,05
2040	340.464,05	851.160,12	709.300,10	70.930,01	59.108,34	85.116,01	59.108,34	295.541,71	3715.550,36	371,56
2045	364.810,22	912.025,56	760.021,30	76.002,13	63.335,11	91.202,56	63.335,11	316.675,54	3981.244,91	398,12

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan lahan sarana kesehatan cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Hal ini juga berkaitan dengan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan yang juga meningkat. Kebutuhan lahan ini, harus diimbangi dengan ketersediaan lahan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan lahan sarana kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Tabel 2.50
Proyeksi Kebutuhan Pemukiman Tahun 2025 – 2045

Tahun	Kepala Keluarga (KK)	Hunian (unit)			Kebutuhan Lahan (m2)			Total Kebutuhan Lahan (M2)	Kebutuhan Lahan (Ha)
		Rumah Besar	Rumah Sedang	Rumah Kecil	Rumah Besar	Rumah Sedang	Rumah Kecil		
2025	1159.031	11590.314	3863.438	1931.719	139083.768	370890.048	139083.768	649057.584	64.906
2030	1238.728	12387.278	4129.093	2064.546	148647.336	396392.896	148647.336	693687.568	69.369
2035	1325.050	13250.500	4416.833	2208.417	159006.000	424016.000	159006.000	742028.000	74.203
2040	1418.600	14186.002	4728.667	2364.334	170232.024	453952.064	170232.024	794416.112	79.442
2045	1520.043	15200.426	5066.809	2533.404	182405.112	486413.632	182405.112	851223.856	85.122

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan pemukiman terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Kebutuhan pemukiman ini dari mulai hunian rumah kecil hingga rumah besar, serta

kebutuhan lahannya. Peningkatan ini juga sebagai dampak dari meningkatnya proyeksi jumlah kepala keluarga.

Tabel 2.51
Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025 – 2045

Tahun	Kepala Keluarga (KK)	Kebutuhan Perkim (VA)	Sarana Lingkungan (VA)	Penerangan Jalan	Cadangan (VA)	Total Kebutuhan	Kebutuhan Gardu		
							Unit	Lahan (m²)	Lahan (Ha)
2025	1.159.031	11.590.314	3.863.438	1.931.719	25.498.690.800	5.022.469.400	1.738.547.100	32.259.707.300	9.677.912.190
2030	1.238.728	12.387.278	4.129.093	2.064.546	27.252.011.600	5.367.820.467	1.858.091.700	34.477.923.767	10.343.377.130
2035	1.325.050	13.250.500	4.416.833	2.208.417	29.151.100.000	5.741.883.333	1.987.575.000	36.880.558.333	11.064.167.500
2040	1.418.600	14.186.002	4.728.667	2.364.334	31.209.204.400	6.147.267.533	2.127.900.300	39.484.372.233	11.845.311.670
2045	1.520.043	15.200.426	5.066.809	2.533.404	33.440.937.200	6.586.851.267	2.280.063.900	42.307.852.367	12.692.355.710

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan listrik hingga 2045 terus mengalami peningkatan. Kebutuhan listrik ini tentu tidak terlepas dari kebutuhan lahan untuk penyediaan gardu listrik. Peningkatan kebutuhan listrik ini sebagai dampak dari peningkatan jumlah kepala keluarga.

Tabel 2.52
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025 – 2045

Tahun	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Domesti (litr/org/hari)		Total Domestik (lt/org/hr)	Non Domestik	Kehilangan Air	Total Kebutuhan	
		SR	KU				(lt/hari)	(lt/detik)
2025	5.795.157	405.660.990	104.312.826	509.973.816	152.992.145	152.992.145	815.958.106	9.444
2030	6.193.639	433.554.730	111.485.502	545.040.232	163.512.070	136.260.058	844.812.360	9.778
2035	6.625.250	530.020.000	79.503.000	609.523.000	182.856.900	121.904.600	914.284.500	10.582
Tahun	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Domesti (litr/org/hari)		Total Domestik (lt/org/hr)	Non Domestik	Kehilangan Air	Total Kebutuhan	
		SR	KU				(lt/hari)	(lt/detik)
2040	7.093.001	567.440.080	85.116.012	652.556.092	195.766.828	65.255.609	913.578.529	10.574
2045	7.600.213	608.017.040	91.202.556	699.219.596	209.765.879	69.921.960	978.907.434	11.330

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air bersih tahun 2025-2045 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga penduduk yang terlayani dalam pemenuhan kebutuhan air bersih juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2045, total kebutuhan air bersih mencapai 978.907.434 lt/hari. Dengan asumsi penduduk yang terlayani pada tahun 2045 sejumlah 7.600.213 jiwa, maka kebutuhan air 128,8 lt/hari setiap jiwa nya.

Tabel 2.53
Proyeksi Kebutuhan Persampahan Tahun 2025-2045

Tahun	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Produksi Sampah Domestik (M3/Hr)	Produksi Sampah Non Domestik (M3/Hr)	Produksi Sampah Total (M3/Hari)	Produksi Sampah Domestik Terlayani (M3/Hari)	Volume Sampah Terlayani (M3/Hari)	Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Persampahan				
							Bak Sampah Individu	Gerobak Dan Bak Sampah	TPS	Mobil Sampah	TPA
2025	3.824.804	1.147.441	688.465	1.835.906	1.560.520	1.652.315	3.824.804	1.530	127	127	0
2030	4.707.166	1.412.150	847.290	2.259.440	1.920.524	2.033.496	4.707.166	1.883	157	139	1
2035	5.697.715	1.709.315	1.025.589	2.734.903	2.324.668	2.461.413	5.697.715	2.279	190	190	3
2040	6.809.281	2.042.784	1.225.671	3.268.455	2.778.187	2.941.609	6.809.281	2.724	227	227	5
2045	7.600.213	2.280.064	1.368.038	3.648.102	3.100.887	3.283.292	7.600.213	3.040	253	253	7

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan persampahan hingga tahun 2045 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya penduduk yang terlayani yang juga menyebabkan produksi sampah meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana persampahan yang juga ikut meningkat harus menjadi perhatian khusus, karena akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Gambaran Arahkan Rencana Tata Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tersebut memiliki fungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Sebagai arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- 2) Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Skenario pembangunan masa depan Kabupaten Bogor 20 (Dua Puluh) tahun kedepan dalam aspek tata ruang berorientasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian wilayah yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada pengembangan sumber daya alam yang dimiliki (pertanian dan pertambangan). Sehingga, rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Bogor adalah Mewujudkan Ruang Wilayah yang Berkualitas untuk Kabupaten Bogor yang Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bogor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tata Ruang Berkualitas yang mendukung kesejahteraan wilayah dan masyarakat;
- 2) Tata Ruang Berkualitas untuk memastikan pemerataan pembangunan yang adil untuk masyarakat; dan
- 3) Tata Ruang Berkualitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup secara harmonis dan selaras.

2.7.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat permukiman yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Kabupaten Bogor diarahkan menjadi 3 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri atas WP Bogor Barat, WP Bogor Tengah dan WP Bogor Timur, dengan 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP). Penetapan Wilayah Pengembangan harus disinkronisasikan agar tercipta pembangunan yang terpadu, seimbang, dan selaras antar kawasan dengan memperhatikan aspek ekonomi, karakteristik wilayah dan masyarakat yang terdiri atas:

- 1) WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pertambangan dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan sistem pengolahan air minum,

- pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, serta pariwisata dan budaya. WP Barat terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
- a. Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg terdiri dari Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung;
 - b. Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang terdiri dari Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Rumpin;
 - c. Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang terdiri dari Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwisadeng dan Kecamatan Pamijahan; dan
 - d. Sub Wilayah Pengembangan Dramaga terdiri dari Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjolaya.
- 2) WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya. WP Tengah terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
- a. Sub Wilayah Pengembangan Cibinong yang terdiri dari Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Tajurhalang;
 - b. Sub Wilayah Pengembangan Parung yang terdiri dari Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rancabungur, dan Kecamatan Gunungsindur;
 - c. Sub Wilayah Pengembangan Cigombong yang terdiri dari Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Ciomas; dan
 - d. Sub Wilayah Pengembangan Ciawi yang terdiri dari Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung.
- 3) WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pertambangan dan energi, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata. WP Timur terdiri dari 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:

- a. Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi yang terdiri dari Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Klapanunggal; dan
- b. Sub Wilayah Pengembangan Jonggol yang terdiri dari Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari.

2.7.3. Rencana Sistem Pusat Permukiman

A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan ditetapkan berdasarkan kriteria yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor, berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Kabupaten Bogor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional termasuk dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan peran dan fungsi Kabupaten Bogor dalam PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, dijelaskan pada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang didalamnya terdapat Kawasan Perkotaan Cibinong yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan dan penelitian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, dan pusat pelayanan olahraga skala nasional dan regional. Kawasan Perkotaan Cileungsi memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan pariwisata dan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.

B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penetapan Pusat Kegiatan Lokal yang ada di Kabupaten Bogor, meliputi:

- 1) PKL Cibinong di Kecamatan Cibinong;

- 2) PKL Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
- 3) PKL Parung di Kecamatan Parung;
- 4) PKL Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang;
- 5) PKL Parungpanjang di Kecamatan Parungpanjang;
- 6) PKL Jonggol di Kecamatan Jonggol; dan
- 7) PKL Cigombong di Kecamatan Cigombong.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan yang ada di Kabupaten Bogor, meliputi:

- 1) PPK Tenjo di Kecamatan Tenjo;
- 2) PPK Cigudeg di Kecamatan Cigudeg;
- 3) PPK Ciampea di Kecamatan Ciampea;
- 4) PPK Bojonggede di Kecamatan Bojonggede;
- 5) PPK Sukaraja di Kecamatan Sukaraja;
- 6) PPK Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang;
- 7) PPK Gunungsindur di Kecamatan Gunungsindur;
- 8) PPK Caringin di Kecamatan Caringin;
- 9) PPK Cisarua di Kecamatan Cisarua;
- 10) PPK Klapanunggal di Kecamatan Klapanunggal;
- 11) PPK Cariu di Kecamatan Cariu;
- 12) PPK Rumpin di Kecamatan Rumpin;
- 13) PPK Ciawi di Kecamatan Ciawi;
- 14) PPK Sukamakmur di Kecamatan Sukamakmur; dan
- 15) PPK Dramaga di Kecamatan Dramaga.

D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Bogor, meliputi:

- 1) PPL Jasinga di Kecamatan Jasinga;
- 2) PPL Sukajaya di Kecamatan Sukajaya;
- 3) PPL Nanggung di Kecamatan Nanggung;
- 4) PPL Cibungbulang di Kecamatan Cibungbulang;
- 5) PPL Leuwisadeng di Kecamatan Leuwisadeng;
- 6) PPL Pamijahan di Kecamatan Pamijahan;
- 7) PPL Tenjolaya di Kecamatan Tenjolaya;
- 8) PPL Citereup di Kecamatan Citereup;

- 9) PPL Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
- 10) PPL Ciseeng di Kecamatan Ciseeng;
- 11) PPL Rancabungur di Kecamatan Rancabungur;
- 12) PPL Cijeruk di Kecamatan Cijeruk;
- 13) PPL Tamansari di Kecamatan Tamansari;
- 14) PPL Ciomas di Kecamatan Ciomas;
- 15) PPL Gunungputri di Kecamatan Gunungputri;
- 16) PPL Kemang di Kecamatan Kemang;
- 17) PPL Megamendung di Kecamatan Megamendung; dan
- 18) PPL Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari.

E. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Bogor bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Pengembangan sistem jaringan transportasi merupakan salah satu target utama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Bogor. Pengembangan sistem jaringan transportasi mempunyai beberapa tujuan penting yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan wilayah kabupaten agar dapat berkembang dan mendukung perkembangan sektor utama di masing-masing kecamatan;
- 2) Mendukung pemerataan pembangunan dengan memperlancar distribusi barang dan menghubungkan wilayah yang memiliki potensi; dan
- 3) Meningkatkan pola pergerakan masyarakat.

Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Bogor terbagi atas:

- 1) Sistem Jaringan Jalan;
- 2) Sistem Jaringan Kereta Api;
- 3) Bandar Udara Khusus.

Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Bogor meliputi:

- 1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Jaringan Ketenagalistrikan.

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Bogor meliputi:

- 1) Jaringan Tetap;
- 2) Jaringan Bergerak.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Bogor meliputi:

- 1) Sumber Air (Sumber air yang berasal dari air permukaan dan Sumber Air yang berasal dari tanah);
- 2) Sistem Jaringan Irigasi;
- 3) Sistem Pengendalian Banjir;
- 4) Sistem Jaringan Air Bersih.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 2) Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
- 3) Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) Sistem Jaringan Persampahan;
- 5) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- 6) Sistem Drainase.

F. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria: (1) Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten; (2) Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan; (3) Mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup; (4) Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan yang kemudian dibagi atas Kawasan Lindung Kabupaten dan Kawasan Budidaya Kabupaten.

G. Kawasan Lindung Kabupaten

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Kawasan Lindung di Kabupaten Bogor terdiri atas:

- 1) Badan Air meliputi sungai, situ, waduk dan kolam bekas galian tambang;

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung;
- 3) Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat ini meliputi sempadan sungai, sempadan danau/waduk/embung/situ, dan sempadan mata air, serta berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW kabupaten.
- 4) Kawasan konservasi, meliputi:
 - Kawasan suaka alam (KSA), dapat meliputi cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa dan/atau suaka margasatwa laut.
 - Kawasan pelestarian alam (KPA), meliputi taman nasional, taman wisata alam.
- 5) Kawasan lindung geologi

H. Kawasan Budaya

Kawasan budaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Arahana Pengelolaan kawasan budi daya di Kabupaten Bogor bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang budidaya, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kawasan budidaya di Kabupaten Bogor dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis serta aspek-aspek keruangan.

Pengelolaan kawasan budidaya di Kabupaten Bogor dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan ruang, dengan sasaran untuk:

- 1) Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang.
- 2) Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan

ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bogor terdiri dari Kawasan Hutan Produksi meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pertanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman meliputi Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

I. Kawasan Strategis Daerah

Dalam rangka mendukung tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor maka ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan kriteria:

- 1) Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 3) Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- 4) Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
- 5) Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- 6) Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- 7) Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- 8) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- 9) Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;

- 10) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; dan
- 11) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kawasan Strategis Daerah memiliki fungsi:

- 1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah;
- 2) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten;
- 3) Mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
- 4) Pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- 5) Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut diarahkan bahwa Kawasan Strategis di Kabupaten Bogor terdiri atas:

- 1) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten Sport Center Pakansari; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten Koridor Poros Tengah Timur.
- 2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Strategis Kabupaten Pengobatan Alternatif dan Budaya Pencak Silat Cimande.
- 3) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Strategis Kabupaten IPB *University Town*;
- 4) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten Puncak;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten Geopark Pongkor;
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Tambang di Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg.
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten Kerentanan Mata Air Ciburial.

J. Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Bogor

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Bogor maka dilakukan percepatan pengembangan infrastruktur melalui proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk direalisasikan, dalam upaya tersebut di Kabupaten Bogor terdapat Proyek Strategis Nasional guna percepatan penyediaan infrastruktur yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya - Cibitung), Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, Jalan Tol Depok – Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojonggede), Jalan Tol Depok-Antasari Seksi 4 (Bojonggede-Salabenda/Penambahan Lingkup), Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3B (Penambahan Lingkup Sp. Semplak-Salabenda), Jalan Tol Bogor-Serpong, *Double Track* Jawa Selatan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Raik Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi serta Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Pembangunan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di Kecamatan Cibinong, serta TPPAS Regional Nambo.

Tabel 2.54
Indikasi Program Utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No		Program		Lokasi
A		SISTEM PUSAT PERMUKIMAN		
1		Pusat Kegiatan Lokal		
	1.1	Perwujudan Sarana dan Prasarana PKL		
		Peningkatan Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Pendidikan, meliputi:	Perkotaan Cibinong Raya, Perkotaan Cileungsi, Perkotaan Cigudeg, Perkotaan Jonggol, Perkotaan Parungpanjang, Perkotaan Cigombong, Perkotaan Parung	
		a. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi; dan		
		b. Pembangunan Ruang Kelas untuk jejaring PAUD, dasar, menengah, tinggi dan vokasi.		
		Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan, meliputi:		
		a. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C; dan		
		b. Pembangunan Puskesmas Poned.		

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya, meliputi:	
			a. Terminal agribisnis;	
			b. Pusat Perbelanjaan atau Pasar;	
			c. Jasa Keuangan;	
			d. IPAL industri komunal;	
			e. Masjid;	
			f. Lapangan olahraga/ruang publik; dan	
			g. Tempat atraksi budaya.	
			Peningkatan infrastruktur dasar permukiman, meliputi:	
			a. Drainase;	
			b. Jalan Lingkungan;	
			c. TPA Lokasi;	
			d. Fasilitas TPST;	
			e. SPAM IKK; dan	
			f. SPALD Komunal.	
			Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:	
			a. Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kec. sekitarnya;	
			b. Penyediaan minimal Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum masal;	
			c. Jalur pedestrian; dan	
			d. Pengembangan kawasan berorientasi transit.	
	1.2		Penyusunan & Legalisasi RDTR Perkotaan	
	1.3		Penyusunan KLHS RDTR Perkotaan	
	1.4		Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas Tertentu	
	1.5		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
2			Pusat Pelayanan Kawasan	
	2.1		Pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan	PPK Bojonggede, PPK Sukaraja, PPK Babakan Madang, PPK Gunungsindur, PPK Caringin, PPK Ciawi, PPK Cisarua, PPK Klapanunggal, PPK Cariu, PPK Sukamakmur, PPK Parungpanjang, PPK Tenjo, PPK Cigudeg, PPK Ciampea
	2.2		Pengembangan fasilitas perkotaan dan perdesaan (Perkantoran, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga, dan Peribadatan)	
	2.3		Pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah	
	2.4		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
	2.5		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
3			Pusat Pelayanan Lingkungan	
	3.1		Pengembangan perumahan dan permukiman pedesaan	PPL Jasinga PPL Sukajaya PPL Nanggung PPL Leuwisadeng PPL Pamijahan PPL Cibungbulang PPL Tenjolaya PPL Citereup PPL Tajurhalang PPL Ciseeng PPL Rancabungur PPL Parung PPL Cijeruk PPL Tamansari PPL Ciomas PPL Megamendung PPL Gunungputri PPL Tanjungsari
	3.2		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas perkantoran skala lokal	
	3.3		Peningkatan dan pengembangan pasar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa skala lokal	
	3.4		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala lokal	
	3.5		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala lokal	
	3.6		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Olahraga skala lokal	
	3.7		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lokal	
B			SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	
1			Sistem jaringan jalan	
	1.1		Jalan Umum	
		1.1.1	Jalan Arteri	
			Jalan Arteri Primer	
			Ciawi-Benda	Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cigombong
			Cilodong/Bts.Depok-Bts.Kota Bogor	Kec. Cibinong, Kec. Sukaraja
			Jalan Arteri Sekunder	
			Rencana Pembangunan Telukpinang-Sukamanah (sebagian Ruas Jalan Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua, Pengembangan Ruas Jalan Teluk Pinang-Banjarwaru dan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Banjarwaru-Nagrok)	Kec. Ciawi, Kec. Megamendung
			Pengembangan Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua	Kec. Megamendung
			Pengembangan Teluk Pinang-Banjarwaru	Kec. Ciawi
			Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Gor Pakansari (Akses Barat-Timur)	Kec. Cibinong
			Pengembangan Kandang Roda – Pakansari (Akses Utara-Selatan Lingkar Gor Pakansari)	Kec. Cibinong
			Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga - Ciampea (Jld 2)	Kec. Ciampea, Kec. Dramaga
			Pengembangan Jalan Lingkar Laladon - Dramaga (Jld 1)	Kec. Ciomas, Kec. Dramaga

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Rencana Pembangunan Lingkar Leuwiliang (Akses Utara-Selatan)	Kec. Leuwiliang
			Pengembangan Lingkar Utara Leuwiliang	Kec. Leuwiliang, Kec. Cibungbulang
			Rencana Pembangunan Jl. Lingkar Pasar Parung	Kec. Parung
		1.1.2	Jalan Kolektor	
			Jalan Kolektor Primer	
			Bts. Depok/Bogor – Bogor	Kec. Kemang, Kec. Parung
			Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang	Kec. Cigudeg, Kec. Jasinga, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Nanggung
			Jln. Raya Jasinga (Jasinga)	Kec. Jasinga
			Jln. Raya Leuwiliang (Leuwiliang)	Kec. Leuwiliang
			Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor	Kec. Ciampea, Kec. Cibungbulang, Kec. Dramaga, Kec. Leuwiliang
			Ciawi – Puncak	Kec. Ciawi, Kec. Cisarua
			Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga	Kec. Jasinga
			Cimanggis – Nagrak	Kec. Gunungputri
			Jln. Cigelung Baru (Jasinga)	Kec. Jasinga
			Jln. Letda Natsir (Cikeas)	Kec. Gunungputri
			Jln. Raya Ciawi (Bogor)	Kec. Ciawi
			Jln. Raya Dramaga (Bogor)	Kec. Ciomas, Kec. Dramaga
			Kemang – Kedung Halang	Kec. Kemang
			Puncak - Bts. Kota Cianjur	Kec. Cisarua
			Trans Yogi (Depok)	Kec. Jonggol
			Pengembangan Batas Tangerang/Bogor-Parung	Kec. Gunungsindur, Kec. Parung
			Pengembangan Cicangkal-Legok	Kec. Rumpin
			Rencana Pembangunan Lapan-Mekarsari	Kec. Rumpin
			Pengembangan Parungpanjang-Ciheulang	Kec. Parungpanjang
			Pengembangan Prumpung-Gn.Sindur-Cicangkal	Kec. Gunungsindur, Kec. Rumpin
			Pengembangan Warung Jata-Ciparigi	Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin
			Rencana Pembangunan Warung Jata-Ciparigi	Kec. Rumpin
			Rencana Pembangunan Bojonggede-Kemang	Kec. Bojonggede, Kec. Kemang, Kec. Tajurhalang
			Pengembangan Jalan Tegar Beriman (Cibinong-Bojonggede)	Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong
			Cibarusah-Cibucil	Kec. Jonggol
			Cileungsi – Cibeet	Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol, Kec. Tanjungsari
			Rencana Pembangunan Cileungsi - Cibeet	Kec. Cariu
			Cileungsi-Cibinong (Citeureup)	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal
			Jl. Harapan Jaya-Bts. Kota Bogor	Kec. Cibinong, Kec. Sukaraja
			Jl. Mayor Oking (Cibinong)	Kec. Citeureup, Kec. Cibinong

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Jl. Mayor Oking (Citeureup)	Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri
			Jl. Moch. Toha	Kec. Parungpanjang
			Narogong-Cileungsi (Bogor)	Kec. Cileungsi
			Parungpanjang – Bunar	Kec. Parungpanjang, Kec. Cigudeg, Kec. Tenjo
			Pondok Rajeg-Jl. Harapan Jaya	Kec. Cibinong
			Pengembangan Cigombong-Palasar/Bts. Kota Bogor	Kec. Cigombong, Kec. Cijeruk
			Pengembangan Cisalada-Benteng/Bts. Kabupaten Sukabumi	Kec. Cigombong
			Pengembangan Batas Tangerang/Bogor-Parung	Kec. Gunungsindur
			Pengembangan Jampang-Ciseeng-Prumpung	Kec. Ciseeng, Kec. Gunungsindur, Kec. Kemang, Kec. Parung
			Rencana Pembangunan Sentul-Sukamakmur-Cipanas	Kec. Babakan Madang, Kec. Citeureup, Kec. Sukamakmur
			Rencana Pembangunan Sukamakmur – Cariu	Kec. Cariu, Kec. Sukamakmur, Kec. Tanjungsari
			Cariu-Jagatamu/Baged (Bts. Kabupaten Bogor/Karawang)	Kec. Cariu
			Pengembangan Citeureup-Sukamakmur	Kec. Citeureup, Kec. Sukamakmur
			Pengembangan Sukamakmur-Sukawangi	Kec. Sukamakmur
			Pengembangan Cigudeg-Banyuresmi	Kec. Cigudeg, Kec. Leuwisadeng
			Pengembangan Cikawung-Banyuasih	Kec. Cigudeg
			Pengembangan Gn. Nyuncung-Muncang	Kec. Rumpin
			Pengembangan Poros Barat	Kec. Cigudeg, Kec. Rumpin
			Pengembangan Curug-Rawakalong/Bts. Kota Tangsel	Kec. Gunungsindur
			Pengembangan Jasinga-Tenjo	Kec. Jasinga, Kec. Tenjo
			Pengembangan Tenjo-Singabangsa/Bts. Kabupaten Tangerang	Kec. Tenjo
			Pengembangan Kedep-Cileungsi	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri
			Pengembangan Ngasuh-Koleang	Kec. Jasinga
			Pengembangan Nagrak-Bojongkulur/Bts. Kabupaten Bekasi	Kec. Gunungputri
			Pengembangan Jonggol-Sukamakmur	Kec. Jonggol, Kec. Sukamakmur
			Pengembangan Lingkar Kota Jonggol	Kec. Jonggol
			Eksisting Janala-Lebakwangi	Kec. Cigudeg, Kec. Parungpanjang Kec, Rumpin
			Pengembangan Kp_Dk_010_Cicangkal-Cikoleang	Kec. Rumpin
			Pengembangan Kp_Dk_010_Janala-Cicangkal	Kec. Rumpin
			Pengembangan Leuwiliang-Kp.Sawah	Kec. Leuwiliang, Kec. Rumpin
			Pengembangan Leuwiliang-Pasir Ipis-Garehong/Bts. Kabupaten Sukabumi	Kec. Leuwiliang, Kec. Pamijahan

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Pengembangan Semplak-Gerendong-Janala	Kec. Ciseeng, Kec. Kemang, Kec. Rancabungur., Kec. Rumpin
			Pengembangan Curug Bitung - Nirmala/Bts. Kabupaten Sukabumi	Kec. Nanggung
			Pengembangan Panyaungan-Nanggung-Curug Bitung	Kec. Leuwisadeng, Kec. Nanggumg
			Rencana Pembangunan Panyaungan-Nanggung-Curug Bitung	Kec. Leuwisadeng, Kec. Namggung
			Pengembangan Parakan Jaya-Semplak/Bts. Kota Bogor	Kec. Kemang
			Jalan Kolektor Sekunder	
			Rencana Pembangunan Ks_Dk_001_Bantarkuning-Linggarmukti	Kec. Klapanunggal
			Pengembangan Ks_Dk_001_Bojong-Linggarmukti-Cibodas	Kec. Cileungsi , Kec. Jonggol
			Rencana Pembangunan Pamipiran-Cikutamahi	Kec. Tanjungsari , Kec. Cariu
			Rencana Pembangunan Cariu-Cikutamahi	Kec. Cariu
			Rencana Pembangunan Linggarmukti-Singasari	Kec. Jonggol, Kec. Klapanunggal
			Rencana Pembangunan Gn.Sindur-Cibadung	Kec. Gunungsindur
			Rencana Pembangunan Lingkar Gn.Sindur	Kec. Gunungsindur
			Rencana Pembangunan Citaringgul – Tajur	Kec. Citeureup
			Pengembangan Gunungputri - Lulut (Jl.Masuk Tpst Nambo)	Kec. Klapanunggal
			Rencana Pembangunan Lulut – Tajur	Kec. Citeureup, Kec. Klapanunggal
			Pengembangan Banjarsari-Bojong Murni	Kec. Ciawi, Kec. Megamendung
			Rencana Pembangunan Ks_Dk_004_Banjarsari-Bojong Murni	Kec. Ciawi
			Pengembangan Banjarwaru-Tapos	Kec. Ciawi
			Pengembangan Citapen – Ciderum	Kec. Caringin, Kec. Ciawi
			Pengembangan Gadog-Cikopo Selatan-Cisarua	Kec. Cisarua, Kec. Megamendung
			Pengembangan Jambu Luwuk-Sukamanah	Kec. Ciawi, Kec. Megamendung
			Pengembangan Seuseupan-Banjarwaru	Kec. Ciawi
			Pengembangan Bojonggede-Kedung Waringin	Kec. Bojonggede
			Pengembangan Kemang-Kedung Waringin	Kec. Bojonggede, Kec. Tajurhalang, Kec. Kemang
			Pengembangan Cibatok-Cipicung	Kec. Pamijahan
			Pengembangan Gunung Sari-Pasarean	Kec. Pamijahan
			Rencana Pembangunan Bantar Karet-Pabangbon (Geopark Pongkor)	Kec. Leuwiliang, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan
			Pengembangan Bungur-Tajurhalang	Kec. Cijeruk

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Pengembangan Cemplang-Ciasmara-Pasir Ipis	Kec. Cibungbulang, Kec. Pamijahan
			Pengembangan Ciapus-Sukamantri	Kec. Tamansari
			Pengembangan Cibatok-Gunung Picung	Kec. Pamijahan
			Pengembangan Cibening-Segog	Kec. Pamijahan
			Pengembangan Cibeureum/Bts.Kota Bogor- Bungur-Tajurhalang	Kec. Cijeruk, Kec. Tamansari
			Pengembangan Cikampak-Gunung Picung	Kec. Nanggung
			Rencana Pembangunan Curug Bitung – Urug	Kec. Nanggung, Kec. Sukajaya
			Pengembangan Curug Bitung-Lingkar Cihiris	Kec. Nanggung
			Pengembangan Gadog-Gn. Malang	Kec. Tamansari, Kec. Tenjolaya
			Pengembangan Kiara Beha-Pasir Madang- Cileuksa/Bts. Kabupaten Lebak	Kec. Sukajaya
			Pengembangan Kota Batu/Bts. Kota Bogor – Ciapus	Kec. Tamansari
			Pengembangan Ngasuh-Cileuksa	Kec. Jasinga, Kec. Sukajaya
			Pengembangan Tenjolaya-Gn.Bunder	Kec. Pamijahan, Kec. Tenjolaya
			Rencana Pembangunan Urug - Kiara Pandak - Pasirmadang (Pasirgocap)	Kec. Sukajaya
			Pengembangan Caringin-Cibadak	Kec. Caringin, Kec. Cijeruk
			Pengembangan Caringin-Nangoh	Kec. Caringin
			Pengembangan Cigombong- Palasari/Bts.Kota Bogor	Kec. Cigombong
			Cigudeg-Kiarasari-Cisangku	Kec. Cigudeg, Kec. Sukajaya
			Pengembangan Cihideung-Situ Daun- Gn.Malang	Kec. Ciampea, Kec. Tenjolaya
			Pengembangan Cikampak-Gunung Picung	Kec. Ciampea, Kec. Pamijahan
			Pengembangan Cikereteg-Pancawati	Kec. Caringin
			Pengembangan Cimande-Lemahduhur	Kec. Caringin
			Pengembangan Cisempur-Tangkil	Kec. Caringin
			Rencana Pembangunan Pancawati- Pangapungan	Kec. Caringin
			Pengembangan Tangkil-Lemahduhur	Kec. Caringin
			Pengembangan Tarikolot-Pangapungan	Kec. Caringin
			Pengembangan Cilebut/Bts. Kota Bogor - Citayam/Bts. Kota Depok	Kec. Bojonggede, Kec. Sukaraja
			Pengembangan Cimanggis - Waringin Jaya/Bts. Kota Bogor	Kec. Bojonggede
			Rencana Pembangunan Jl. Raya Batu Gede	Kec. Bojonggede, Kec. Sukaraja
			Pengembangan Kereteg – Petir	Kec. Ciomas
			Pengembangan Laladon - Ciomas/Bts. Kota Bogor	Kec. Ciomas
			Pengembangan Tenjo-Cilejet	Kec. Parungpanjang, Kec. Tenjo

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Rencana Pembangunan Lingkar Kebun Raya	Kec. Cibinong
			Rencana Pembangunan Lingkar Kebun Raya – Citeureup	Kec. Cibinong, Kec. Citeureup
			Rencana Pembangunan Tegar Beriman - Lingkar Kebun Raya	Kec. Cibinong
			Rencana Pembangunan Rancabungur – Leuwiliang	Kec. Ciampea, Kec. Cibungbulang, Kec. Leuwiliang
			Pengembangan Babakan Raden-Bts Bekasi	Kec. Cariu
			Pengembangan Parungpanjang-Ciheulang	Kec. Parungpanjang
			Rencana Pembangunan Sukaraja – Pasir Angin	Kec. Megamendung, Kec. Sukaraja
			Pengembangan Cijayanti - Babakan Madang	Kec. Babakan Madang
			Pengembangan Cijayanti - Bojong Koneng	Kec. Babakan Madang
			Pengembangan Citeureup - Babakan Madang	Kec. Babakan Madang, Kec. Citeureup
			Pengembangan Gadog - Pasir Karet/Bukit Pelangi	Kec. Megamendung, Kec. Sukaraja
			Pengembangan Jl. Lingkungan Perum. Bukit Pelangi	Kec. Babakan Madang, Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Bojong Koneng – Citaringgul	Kec. Babakan Madang, Kec. Citeureup
			Pengembangan Bojong Koneng – Tapos	Kec. Babakan Madang
			Pengembangan Cijayanti - Bojong Koneng	Kec. Babakan Madang, Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Gadog - Bojong Koneng	Kec. Megamendung, Kec. Sukaraja
		1.1.3	Jalan Lokal	
			Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan Lokal Primer	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Jalan Lingkungan	
			Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
	1.2		Jalan Khusus	
		1.2.1	Pembangunan Jalan Khusus Tambang Bogor	Kec. Cigudeg, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin
	1.3		Jalan Tol	
		1.3.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Tol	
			Jakarta-Bogor-Ciawi	Kec. Babakan Madang, Kec. Ciawi, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Sukaraja
			Bogor Outer Ring Road Seksi 1-2	Kec. Babakan Madang, Kec. Sukaraja

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Ciawi-Sukabumi (Seksi 1 Ciawi-Cigombong)	Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cigombong
		1.3.2	Pembangunan Ruas Jalan Tol	
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari (Seksi 3 Sawangan - Bojonggede)	Kec. Bojonggede
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (JORR II Seksi 2 Jatikarya-Cibitung)	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari (Seksi 4 Bojonggede-Salabenda/Penambahan Lingkup)	Kec. Bojonggede, Kec. Kemang, Kec. Tajurhalang
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3B (Penambahan Lingkup Sp. Semplak-Salabenda)	Kec. Kemang
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Caringin-Dramaga-Salabenda	Kec. Caringin , Kec. Ciampea, Kec. Cijeruk, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, , Kec. Kemang, , Kec. Rancabungur, Kec. Tamansari
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III)	Kec. Babakan Madang, Kec. Cariu, Kec. Citeureup, Kec. Jonggol, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Bogor-Serpong (via Parung) (JORR III)	Kec. Bojonggede, Kec. Ciseeng, Kec. Kemang, Kec. Rumpin
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Pasar Jumat-Parung	Kec. Kemang, Kec. Parung
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Caringin-Cianjur (Akses Puncak)	Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cisarua, Kec. Megamendung
			Rencana Pembangunan Jalan Tol Cikarang-Ciranjang	Kec. Cariu, Kec. Tanjungsari, Kec. Gunungputri
			Rencana Pembangunan Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	
	1.4		Terminal Penumpang	
		1.4.1	Terminal Penumpang Tipe A	
			Rencana Pembangunan Terminal Perkotaan Cibinong Baru	Kec. Bojonggede
		1.4.2	Terminal Penumpang Tipe B	
			Pengembangan Terminal Cileungsi	Kec. Cileungsi
			Pengembangan Terminal Leuwiliang	Kec. Leuwiliang
			Rencana Pembangunan Terminal Parung	Kec. Parung
		1.4.3	Terminal Penumpang Tipe C	
			Pengembangan Terminal Tipe C Cibinong	Kec. Cibinong
			Pengembangan Terminal Tipe C Bojonggede	Kec. Bojonggede
			Pengembangan Terminal Tipe C Ciomas	Kec. Ciomas
			Pengembangan Terminal Tipe C Jasinga	Kec. Jasinga
			Rencana Pembangunan Terminal Tipe C Jonggol	Kec. Jonggol

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Rencana Pembangunan Terminal Tipe C Parungpanjang	Kec. Parungpanjang
			Rencana Pembangunan Terminal Tipe C Tenjo	Kec. Tenjo
			Rencana Pembangunan Terminal Tipe C Cigombong	Kec. Cigombong
			Rencana Pembangunan Terminal Tipe C Ciawi	Kec. Ciawi
	1.5		Terminal Barang	
			Rencana Pembangunan Terminal Barang Cigombong	Kec. Cigombong
	1.6		Pelayanan Angkutan Umum	
		1.6.1	Pengembangan Sistem Angkutan Massal	
			Pengembangan angkutan umum massal dalam kota dan perkotaan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dengan DKI Jakarta dan sekitarnya, meliputi ruas jalan dan/atau koridor:	Jabodetabek
			a. Cililitan – Cibinong – Ciawi (Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. Pajajaran – Jl. Tajur);	
			b. Cililitan – Cibinong – Bubulak (Jl. Raya Bogor – Jl. KS. Tubun – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. KH. Abdullah Bin Nuh);	
			c. Lebak Bulus – Ciputat – Parung Bubulak (Jl. Raya Parung – Jl. KH. Sholeh Iskandar – Jl. Abdullah Bin Nuh);	
			d. Parungpanjang – Lebak Bulus;	
			e. Ciawi – Kampung Rambutan; dan	
			f. Leuwiliang – Kampung Rambutan	
			Rencana pengembangan sistem angkutan umum massal dalam perkotaan, meliputi :	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			a. Sentul Selatan Cileungsi (Sentul Selatan – Sirkuit Sentul – Tugu Pancakarsa – Citeureup – Gunungputri - Klapanunggal – Terminal Cileungsi);	
			b. Sentul Selatan – Bojonggede (Sentul Selatan - Tugu Pancakarsa -Stadion Pakansari – Komplek Perkantoran Pemda – Bambu Kuning – Bojonggede);	
			c. Bojonggede – Parung (Bojonggede – Kedung Waringin – Tajurhalang – Kemang – Parung);	

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			d. Laladon – Jasinga (Terminal Laladon – Ciampea – Leuwiliang – Terminal Jasinga);	
			e. Ciawi – Cigombong (Ciawi – Pasir Caringin – Cigombong – Kawasan Lido – Pasar Cigombong); dan	
			f. Ciawi – Cisarua (Ciawi – Megamendung – Cisarua – Taman Safari).	
			Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penggunaan angkutan umum dengan energi gas dan listrik	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
		1.6.2	Pengembangan Angkutan Wisata	
			Penetapan dan pembangunan rute angkutan wisata	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penyediaan pelayanan angkutan wisata sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pariwisata	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
		1.6.3	Pengembangan Angkutan Sekolah	
			Penetapan dan pembangunan rute angkutan sekolah	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
2			Sistem Jaringan Kereta Api	
	2.1		Jaringan Jalur Kereta Api	
		2.1.1	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Jakarta-Bogor	Kec. Bojonggede, Kec. Sukaraja
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo-Citayam	Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Cileungsi

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Bogor – Sukabumi – Bandung – Yogyakarta	Kec. Cigombong, Kec. Cijeruk
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Tanah Abang – Rangkasbitung	Kec. Parungpanjang, Kec. Tenjo
			Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Cileungsi - Jonggol – Cianjur	Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol, Kec. Tanjungsari
			Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan <i>Light Rail Transit</i> Bodebek (Bogor – Cibubur)	Kec. Babakan Madang, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Nambo – Cikarang – Tanjung Priok	Kec. Cileungsi, Kec. Klapanunggal
			Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Parungpanjang – Citayam	Kec. Bojonggede, Kec. Gunungsindur, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang
			Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan <i>Loop Line</i> Bogor Raya	Kec. Babakan Madang, Kec. Cijeruk, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari
			Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada jalur rel kereta api	Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Cigombong, Kec. Tenjo, Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol, Kec. Tanjungsari, Kec. Gunungsindur, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Gunungsindur, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Babakan Madang, Kec. Cijeruk, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari
			Penyediaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Cigombong, Kec. Tenjo, Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol, Kec. Tanjungsari, Kec. Gunungsindur, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Gunungsindur, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Babakan Madang, Kec. Cijeruk, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Rel Kereta Api Akibat Bencana)	Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Cigombong, Kec. Tenjo, Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol, Kec. Tanjungsari, Kec. Gunungsindur, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Gunungsindur, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Babakan Madang, Kec. Cijeruk, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari
	2.2		Stasiun Kereta Api	

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
		2.2.1	Stasiun Penumpang	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Citayam dan Stasiun Penumpang Bojonggede pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor	Kec. Bojonggede
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cilebut pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor	Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Susukan pada jalur kereta api perkotaan Jakarta-Bogor	Kec. Bojonggede
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cibinong pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam	Kec. Cibinong
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Gunungputri pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Nambo pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Citayam	Kec. Klapanunggal
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Tenjo dan Stasiun Penumpang Gintung Cilejit pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung	Kec. Tenjo
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Parungpanjang pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung	Kec. Parungpanjang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Cigombong pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi	Kec. Cigombong
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Stasiun Penumpang Maseng pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi	Kec. Cijeruk
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cigombong Baru pada jalur kereta api antarkota Bogor – Sukabumi	Kec. Cigombong
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Mampir pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur	Kec. Cileungsi
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cibatutiga pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur	Kec. Cariu

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Jonggol dan Stasiun Penumpang Sukagali pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur	Kec. Jonggol
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Antajaya pada jalur kereta api antarkota Cileungsi - Jonggol – Cianjur	Kec. Tanjungsari
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Kembang Kuning pada jalur kereta api perkotaan Nambo – Cikarang	Kec. Klapanunggal
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Cileungsi dan Stasiun Penumpang Jatisari pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang	Kec. Cileungsi
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Parung , Stasiun Penumpang Arco, Stasiun Penumpang Cogreg pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam	Kec. Parung
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Gunungsindur pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam	Kec. Gunungsindur
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Rumpin pada jalur kereta api perkotaan Parungpanjang – Citayam	Kec. Rumpin
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Karanggan dan Stasiun Penumpang Cimanggis pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor	Kec. Gunungputri
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor	Kec. Babakan Madang
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul Selatan dan Stasiun Penumpang Cibanon pada jalur kereta api perkotaan LRT Cibubur-Bogor	Kec. Sukaraja
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Laladon pada jalur kereta api perkotaan <i>Loop Line</i> Bogor Raya	Kec. Ciomas
			Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Sentul Selatan dan Stasiun Penumpang Cibanon pada jalur kereta api perkotaan <i>Loop Line</i> Bogor Raya	Kec. Sukaraja
		2.2.2	Stasiun Barang	

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Rencana Pembangunan Stasiun Barang Tenjo pada jalur kereta api perkotaan Tanah Abang-Rangkasbitung	Kec. Tenjo
			Pembangunan Stasiun Barang Klapanunggal pada jalur kereta api perkotaan Nambo-Cikarang	Kec. Klapanunggal
	2.3		Kawasan Berorientasi Transit	
			Penyusunan RTBL/Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit	Kawasan Berorientasi Transit Skala Kota
				TOD Cibinong di Kecamatan Cibinong
				Kawasan Berorientasi Transit Skala Sub-Kota
				TOD Bojonggede di Kecamatan Bojonggede
				TOD Gunungputri di Kecamatan Gunungputri
				Kawasan Berorientasi Transit Lainnya yang belum ditentukan skala pelayanannya meliputi:
				TOD Sentul City di Kecamatan Sukaraja
				TOD Parungpanjang di Kecamatan Parungpanjang
				TOD Susukan di Kecamatan Bojonggede
				TOD Lido di Kecamatan Cigombong
				TOD Cibanon di Kecamatan Sukaraja
			Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit	Kawasan Berorientasi Transit Lainnya sesuai hasil kajian dan ketentuan perundang-undangan
3			Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	
	3.1		Bandar Udara Khusus	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Bandar Udara Pertahanan dan Keamanan Atang Sanjaya	Kec. Kemang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Bandar Udara BRIN	Kec. Rumpin
C			SISTEM JARINGAN ENERGI	
1			Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	1.1		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan b. pipa transmisi gas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal Gede – Nagrak	Kec. Gunungputri, Kec. Cileungsi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Sukaraja

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Tempat Penyimpanan	Kec. Babakan Madang, Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Sukaraja, Kec. Bojonggede
2			Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
	2.1		Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak	Kec. Leuwiliang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) UPDL Ciawi	Kec. Megamendung
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap PT. Indesso Aroma Bogor	Kec. Cileungsi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Indocement Tunggul Perkasa	Kec. Citeureup
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gedung Gunungsindur P3TKEBTKE Kementerian ESDM 1	Kec. Gunungsindur
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaraksa	Kec. Tanjungsari
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami	Kec. Leuwiliang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Nurul Ummah	Kec. Leuwiliang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Tirta Investama Bogor	Kec. Caringin
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. Shell Indonesia	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kec. Babakan Madang, Kec. Caringin, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Gunungsindur, Kec. Cileungsi, Kec. Kemang, Kec. Cibinong, Kec. Ciomas
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak	Kec. Pamijahan

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cianten 1B, Cianten 1, Cianten 2, Cianten 3, dan Cipayung	Kec. Megamendung, Kec. Pamijahan
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kec. Caringin, Kec. Cigombong, Kec. Cisarua, Kec. Leuwiliang, Kec. Megamendung Kec Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Sukajaya
			Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPPAS Regional Lulut Nambo	Kec. Klapanunggal
	2.2		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	
		2.2.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Balaraja - Gandul dan SUTET 500 kV Balaraja - Gandul #1,2	Kec. Gunungsindur
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Cibinong - Bekasi dan SUTET 500 kV Cibinong - Muara Tawar	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Cilegon Baru - Cibinong	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cibinong, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang, Kec. Tenjo
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Depok - Cibinong (1) dan SUTET 500 kV Depok - Cibinong (2)	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Saguling - Cibinong 7 (1) dan SUTET 500 kV Saguling - Cibinong 7 (2)	Kec. Cariu, Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri, Kec. Jonggol, Kec. Klapanunggal, Kec. Tanjungsari
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTET 500 kV Tasikmalaya - Depok (1) dan SUTET 500 kV Tasikmalaya - Depok (2)	Kec. Bojonggede, Kec. Ciseeng, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Rumpin, Kec. Tajurhalang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) lainnya	Kec. Cileungsi, Kec. Ciseeng, Kec. Gunungputri, Kec. Gunungsindur, Kec. Jasinga, Kec. Leuwiliang, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Tenjo
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Bogor Baru - Sentul (1) dan SUTT 150 kV Bogor Baru - Sentul (2)	Kec. Babakan Madang, Kec. Sukaraja
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Cianjur - Bogor Baru (1) dan SUTT 150 kV Cianjur - Bogor Baru (2)	Kec. Cisarua

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Ciawi - Bogor Baru (1) dan SUTT 150 kV Ciawi - Bogor Baru (2)	Kec. Ciawi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Cibadak Baru 5 - Bogor Baru, SUTT 150 kV Cibadak Baru 5 - Ciawi (1), dan SUTT 150 kV Cibadak Baru 5 - Ciawi (2)	Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cigombong
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Cibinong 4 - Semen Lama (1) dan SUTT 150 kV Cibinong 4 - Semen Lama (2)	Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Cibinong 5 - Semen Baru (1) dan SUTT 150 kV Cibinong 5 - Semen Baru (2)	Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan 150 kV Cimanggis - Cibinong (1) dan SUTT 150 kV Cimanggis - Cibinong (2)	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Gandul- Serpong (1) dan SUTT 150 kV Gandul- Serpong (2)	Kec. Gunungsindur
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Jatirangon - Cibinong (1) dan SUTT 150 kV Jatirangon - Cibinong (2)	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Kedungbadak - Depok Baru 5 (1) dan SUTT 150 kV Kedungbadak - Depok Baru 5 (2)	Kec. Bojonggede, Kec. Tajurhalang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Salak Baru - Bogor Baru	Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cigombong, Kec. Megamendung, Kec. Pamijahan, Kec. Sukaraja
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Salak baru - Cibadak Baru	Kec. Pamijahan
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Salak Baru - Salak Lama (1) dan SUTT 150 kV Salak Baru - Salak Lama (2)	Kec. Pamijahan
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Sentul - Cibinong (1)	Kec. Babakanmadang, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 150 kV Semen Baru - ITP (1) dan SUTT 150 kV Semen Baru - ITP (2)	Kec. Citeureup, Kec. Klapanunggal
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 70 kV Bogor Baru 4 - Kracak (1) dan SUTT 70 kV Bogor Baru 4 - Kracak (2)	Kec. Ciampea, Kec. Cibungbulang, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga, Kec. Leuwiliang, Kec. Pamijahan

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 70 kV Cibinong 4 - Cileungsi (1) dan SUTT 70 kV Cibinong 4 - Cileungsi (2)	Kec. Cileungsi, Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 70 kV Gandaria - Cibinong (1) dan SUTT 70 kV Gandaria - Cibinong (1)	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 70 kV Kracak - Bunar (1) dan SUTT 70 kV Kracak - Bunar (2)	Kec. Cibungbulang, Kec. Cigudeg, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Nanggung
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan SUTT 70 kV Rangkasbitung - Bunar (1) dan SUTT 70 kV Rangkasbitung - Bunar (2)	Kec. Cigudeg, Kec. Jasinga
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) lainnya	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Klapanunggal, Kec. Megamendung, Kec. Pamijahan, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari, Kec. Tenjolaya
			Saluran Transmisi Lainnya	
		2.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Caringin, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cigudeg, Kec. Cijeruk, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang, Kec. Tamansari, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo, Kec. Tenjolaya
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Distribusi Lainnya	Kec. Bojonggede, Kec. Ciampea, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigudeg, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Dramaga, Kec. Jasinga, Kec. Megamendung, Kec. Pamijahan, Kec. Rumpin, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari, Kec. Tenjolaya
		2.2.3	Gardu Listrik	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GITET 500 kV Cibinong, GI 150 kV Cibinong dan GI 70 kV Cibinong	Kec. Gunungputri
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GIS 150 kV Gunung Salak Baru yang berada di Kecamatan Pamijahan	Kec. Pamijahan

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV Sentul	Kec. Babakanmadang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV Semen Baru (100 MVA No.1), GI 150 kV Semen Baru, GI 70 kV Semen Baru dan GI 70 kV Semen Lama	Kec. Klapanunggal
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV ITP	Kec. Citeureup
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV Cileungsi dan GI 70 kV Cileungsi	Kec. Cileungsi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV Ciawi dan GI 70 kV Ciawi	Kec. Ciawi
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 150 kV Bunar Baru (120 MVA No.1 dan 2) dan GI 70 kV Bunar	Kec. Cigudeg
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI 70 kV Kracak	Kec. Leuwiliang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI Cogreg	Kec. Parung
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan GI Cileungsi II/Jonggol	Kec. Jonggol
			Rencana Pengembangan Gardu Induk	Kec. Bojonggede, Kec. Cigudeg, Kec. Cileungsi, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Sukajaya
D			SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
1			Jaringan Tetap	
			Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area <i>blankspot</i>	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Caringin, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cigudeg, Kec. Cijeruk, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Gunungsindur, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Sukaraja, Kec. Tamansari
			Pengembangan jaringan kabel darat	Kec. Tanjungsari
			Pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya	Kec. Tenjo
2			Jaringan Bergerak	
	2.1		Jaringan Bergerak Seluler	
			Pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area <i>blankspot</i>	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Pemanfaatan dan Pengembangan Stasiun Bumi	Kec. Rancabungur, Kec. Klapanunggal
			Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
E			SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	
1			Prasarana Sumber Daya Air	
	1.1		Sumber Air	
			Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Perlindungan jaringan sumber daya air lintas Prov.	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane
			Pemeliharaan Sungai	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Konservasi Sumber Daya Air	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Pendayagunaan Sumber Daya Air	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Pengendalian Daya Rusak Air	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif	WS Cidanau-Cijujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum
			Pengendalian pencemaran, kerusakan, dan erosi, serta penerapan teknologi untuk mencegah sampah ke laut pada seluruh DAS terutama DAS prioritas	WS Ciliwung Cisadane mencakup DAS Cimanceuri, DAS Ciliwung, DAS Angke, DAS Kali Bekasi dan DAS Cisadane
	1.2		Sistem Jaringan Irigasi	
		1.2.1	Daerah Irigasi	
			Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab/kota	D.I Cipamingkis di Kec. Jonggol dan, Kec. Sukamakmur
				D.I Angke V yang berada di Kec. Parung dan, Kec. Tajurhalang;
				D.I Karadenan yang berada di Kec. Sukaraja dan, Kec. Cibinong;
				D.I Cisadane Empang yang berada di Kec. Ciampea,, Kec. Cibungbulang,, Kec. Dramaga,, Kec. Kemang,, Kec. Rancabungur, dan, Kec. Rumpin;
				D.I Parakanjati yang berada di Kec. Bojonggede dan, Kec. Cibinong;
				D.I Ciliwung Katulampa berada di Kec. Bojonggede, Kec. Ciawi, Kec. Cisarua, Kec. Cibinong, Kec. Megamendung dan, Kec. Sukaraja
				D.I Cibanon berada di Kec. Megamendung dan, Kec. Sukaraja

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
				D.I Bantarjati berada di Kec. Cibinong dan, Kec. Sukaraja
				D.I Kranji berada di Kec. Cibinong
				D.I Cibalok berada di Kec. Ciawi , Kec. Megamendung
			Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi D.I dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha	D.I Cihoe Cikumpeni di Kec. Cariu, D.I Sasak di Kec. Ciseeng dan, Kec. Kemang
			Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi pada waduk yang akan dibangun	Daerah Irigasi Baru meliputi D.I Cijurey D.I Cibeet, DI Cidurian dan D.I Narogong
			Modernisasi seluruh D.I yang ada di Kabupaten Bogor	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pembuatan Irigasi Tetes, Pipa, Curah/ <i>Sprinkler</i> dan lainnya	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Penerapan Metode <i>Sistem of Rice Intencification</i> (SRI)	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya	D.I Ciliwung-Katulampa, D.I Cisdane-Empang
			Peningkatan jaringan irigasi	D.I Cihoe-Cikompeni, D.I Sasak
		1.2.2	Jaringan Irigasi Primer	
			Optimalisasi Jaringan Irigasi Primer	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Ciseeng, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Megamendung, Kec. Parung, Kec. Rancabungur, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang
		1.2.3	Jaringan Irigasi Sekunder	
			Optimaliasi Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Wilayah Kabupaten
	1.3		Sistem Pengendalian Banjir	
		1.3.1	Jaringan Pengendalian Banjir	
			Sistem Pengendalian Banjir Kawasan	Sungai Cimande yang melintas di Kec. Caringin, dan, Kec. Cijeruk;
				Sungai Ciliwung yang melintas di Kec. Ciawi,, Kec. Sukaraja, dan, Kec. Cibinong;
				Sungai Citarik yang melintas di Kec. Ciseeng, Kec. Rancabungur, Kec. Gunungsindur, dan, Kec. Rumpin;
				Sungai Cisdane yang melintas di Kec. Ciampea, Kec. Cibungbulang, Kec. Dramaga, Kec. Kemang, Kec. Rancabungur, dan, Kec. Rumpin;
				Sungai Cibeet yang melintas di Kec. Cariu, Kec. Jonggol, Kec. Sukamakmur, dan, Kec. Tanjungsari;
				Sungai Pesanggrahan yang melintas di Kec. Bojonggede;
				Sungai Kali Angke yang melintas di Kec. Tajurhalang dan, Kec. Parung;
				Sungai Cikeas yang melintas di Kec. Sukaraja, Kec. Babakan Madang, Kec. Citeureup, Gunungputri;
				Sungai Cileungsi yang melintas di Kec. Cileungsi;

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
				Sungai Cipamingkis yang melintas di Kec. Jonggol dan, Kec. Sukamakmur;
				Sungai Cihoe yang melintas di Kec. Cariu;
				Sungai Cimanceuri yang melintas di Kec. Parungpanjang
			Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai	Sungai Cidurian yang melintas di Kec. Jasinga dan, Kec. Sukajaya.
			Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir	Seluruh situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya di Kabupaten Bogor
		1.3.2	Bangunan Pengendalian Banjir	
			Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Sukamahi	Kec. Megamendung
			Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Ciawi	Kec. Megamendung
			Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Cipamingkis	Kec. Jonggol
			Pengembangan dan Pemeliharaan Bendung Cidurian Sodong	Kec. Jasinga
			Rencana Pembangunan Bendungan Cidurian	Kec. Sukajaya
			Rencana Pembangunan Bendungan Cibeet	Kec. Cariu
			Rencana Pembangunan Bendungan Cijurey	Kec. Cariu, Kec. Sukamakmur, Kec. Tanjungsari
			Pengembangan dan Pemeliharaan Bendung Koja	Kec. Gunungputri
			Rencana Pembangunan Bendung Cibongas	Kec. Babakan Madang
			Rencana Pembangunan Bendung Cigudeg	Kec. Cigudeg
			Rencana Pembangunan Bendung Citaringgul	Kec. Babakan Madang
			Rencana Pembangunan Bendung Sumurbatu	Kec. Babakan Madang
			Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir run-off	Sungai Cimande yang melintas di Kec. Caringin, dan, Kec. Cijeruk;
				Sungai Citarik yang melintas di Kec. Ciseeng, Kec. Rancabungur, Kec. Gunungsindur, dan, Kec. Rumpin;
				Sungai Cibeet yang melintas di Kec. Cariu, Kec. Jonggol,, Kec. Sukamakmur, dan, Kec. Tanjungsari;
				Sungai Kali Angke yang melintas di Kec. Tajurhalang dan, Kec. Parung;
				Sungai Cileungsi yang melintas di Kec. Cileungsi;
				Sungai Cihoe yang melintas di Kec. Cariu;

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Pembuatan bangunan pengendali banjir terdiri dari Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, <i>revetment</i> , <i>ground sill</i> , <i>check dam</i> , krib, pengarah arus, jeti, <i>break wate</i> , bendung gerak, rumah, kolam detensi, kolam retensi, <i>polder</i> , <i>long storage</i> , <i>dry dam</i> , <i>retarding basin</i> , <i>floodway</i> , terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah Sungai	Sungai Cidurian yang melintas di, Kec. Jasinga dan, Kec. Sukajaya.
		1.3.3	Bangunan Sumber Daya Air	
			Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ	Situ Asmun, Situ Babakan, Situ Babakan / Darmaga, Situ Balekambang, Situ Cikuda, Situ Burung, Situ Cekdam, Situ Cibaju, Situ Cibanteng, Situ Cibeureum, Situ Cibinong / Gedong / Bekang, Situ Cibodas, Situ Cibolang, Situ Cibuntu, Situ Ciburial, Situ Cicadas, Situ Cicau / Cigadung, Situ Cigorongsong, Situ Cigudeg, Situ Cijantung / Kibing, Situ Cijantungeun girang, Situ Cijantungeun - hilir, Situ Cijapar, Situ Cikaret, Situ Cilala / Jampang, Situ Cilimus, Situ Cimanggis, Situ Ciminggir, Situ Cinangsi / Wedana, Situ Cinyiru, Situ Cipayung, Situ Cipicung / Mekarsari, Situ Cipinang / Pasir Nangka, Situ Ciranji, Situ Ciseungit, Situ Citatah / Ciriung, Situ Ciumbuleuit, Situ Cogreg, Situ Gunung Cabe, Situ Gunung Nyuncung, Situ Gunungputri, Situ Iwul, Situ Jampangbulu, Situ Jati / Lebakwangi, Situ Jeletreng, Situ Jenggot / Cikopomayak, Situ Kabantenan, Situ Kadongdong, Situ Kandang sapi / Kandangbabi, Situ Kemuning, Situ Kolamtando, Situ Lampe, Situ Larangan, Situ Lengkong Barang, Situ Leuwi Batu, Situ Leuwinutug, Situ Lido/Cigombong/Cileutuh, Situ Malangnengah, Situ Malasari, Situ Moyan, Situ Nanggerang, Situ Nurdin, Situ Nyangkoek, Situ Pabrik, Situ Pagam, Situ Pangadegan, Situ Pasirmaung, Situ Rancayuda, Situ Rawa Jejed, Situ Rawa Sudat, Situ Rawabangke, Situ Telagasaat, Situ Sanding, Situ Sela, Situ Selabenda, Situ Singabangsa, Situ Siyang, Situ Sukasari / Rancasaat, Situ Taman, Situ Tamansari, Situ Tarogong, Situ Telaga Warna, Situ Tengah / Cibeureum, Situ Tengsan, Situ Terate, Situ Tlajung Hilir, Situ Tlajung Udik, Situ Tonjong, dan Situ Tunggilis
			Pembangunan embung	Embung Lemahduhur Wangun Jaya, Ciburial 1, Gunungbunder, Citeureup 2, Ciburial 2, Cibuntu, Galuga, Sukawening, Pabuaran Pilar, Ciburial 3, Cibatok 2, Banyuresmi, Sukamulih, Cimande, Harkat Jaya, Pancawati, Jaya Raharja, Pabuaran, Purwasari, Ciaruteun, Gunung Bunder II, Rancabungur, Sukaresmi, Bale Kambang, Sukagalih, Bendungan, dan Kuta Mekar

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
			Operasi dan Pemeliharaan bendungan/waduk	Waduk Sukamahi, Waduk Ciawi
			Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata.	Waduk Cipamingkis, Bendungan Narogong, Bendungan Cijurey, Bendungan Ciawi-Sukamahi
			Pembangunan bendungan untuk air baku non pertanian	Bendungan Klapanunggal
			Relokasi permukiman terdampak pembangunan waduk	Bendungan Cidurian, Bendungan Cibeet, Waduk Cipamingkis
F			SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA	
1			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	1.1		Jaringan Perpipaan	
		1.1.1	Unit Air Baku	
			Peningkatan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Unit Air Baku	Kec. Caringin, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cigombong, Kec. Cijeruk, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jonggol, Kec. Klapanunggal, Kec. Megamendung, Kec. Rumpin, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang, Kec. Tamansari
			Pembangunan Unit Air Baku	Kec. Babakan Madang, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cisarua, Kec. Klapanunggal, Kec. Megamendung, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Tenjo, Kec. Tenjolaya
		1.1.2	Unit Produksi	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit Produksi	Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Leuwiliang, Kec. Parungpanjang, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang
			Pembangunan Unit Produksi	Kec. Babakan Madang, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cisarua, Kec. Dramaga, Kec. Klapanunggal, Kec. Megamendung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang, Kec. Tenjo, Kec. Tenjolaya, Kec. Leuwiliang
		1.1.3	Unit Distribusi	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Unit Distribusi	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Caringin, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cijeruk, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng , Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, , Kec. Gunungputri, Kec. Gunungsindur, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rumpin, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang, Kec. Tamansari
2			Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
	2.1		Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	
			Optimalisasi Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat	Kec. Cibinong
			Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri dan Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	Kec. Babakan Madang, Kec. Caringin, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi,, Kec. Citeureup, Kec. Gunungputri, Kec. Gunungsindur, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Sukaraja, Kec. Tenjo
3			Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
			Optimalisasi Penyediaan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Terpusat dan Setempat	Kec. Klapanunggal, Kec. Jonggol
4			Sistem Jaringan Persampahan	
	4.1		Stasiun Peralihan Antara (SPA)	
			Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana SPA Skala Kawasan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
			Pembangunan SPA yang terlayani TPPAS Regional	TPPAS Regional Lulut Nambo di Kec. Klapanunggal
	4.2		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</i>	
			Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana TPS3R Skala Kawasan dan Kampung Ramah Lingkungan	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor
	4.3		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga	Kec. Cibungbulang
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir TPPAS Regional Lulut Nambo	Kec. Klapanunggal
	4.4		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	
			Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kec. Klapanunggal, Kec. Caringin, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Sukamakmur, Kec. Parungpanjang
5			Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	
	5.1		Tempat Evakuasi Bencana	
			Kajian jalur dan Tempat Evakuasi	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec.

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
				Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo
	5.2.		Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo
	5.3.		Penyediaan/Peningkatan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sistem Peringatan Dini, Pemasangan Papan Informasi Bahaya, Rambu Bahaya, Gerakan Tanah Dan Longsor Pada Daerah Rawan Bencana	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo
	5.4.		Sosialisasi Mitigasi, Evakuasi ,Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Pada Daerah Rawan Bencana	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo
	5.5		Rekayasa Penguatan Lereng Pada Daerah Dengan Riwayat Longsor Baik Secara Teknis dan Non Teknis	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec.

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA STRUKTUR RUANG				
No			Program	Lokasi
				Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo
6			Sistem Drainase	
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Jaringan Drainase Primer	Kec. Babakan Madang, Kec. Bojonggede, Kec. Caringin, Kec. Cariu, Kec. Ciampea, Kec. Ciawi, Kec. Cibinong, Kec. Cibungbulang, Kec. Cigombong, Kec. Cigudeg, Kec. Cijeruk, Kec. Cileungsi, Kec. Ciomas, Kec. Cisarua, Kec. Ciseeng, Kec. Citeureup, Kec. Dramaga, Kec. Gunungputri, Kec. Gunungsindur, Kec. Jasinga, Kec. Jonggol, Kec. Kemang, Kec. Klapanunggal, Kec. Leuwiliang, Kec. Leuwisadeng, Kec. Megamendung, Kec. Nanggung, Kec. Pamijahan, Kec. Parung, Kec. Parungpanjang, Kec. Rancabungur, Kec. Rumpin, Kec. Sukajaya, Kec. Sukamakmur, Kec. Sukaraja, Kec. Tajurhalang, Kec. Tamansari, Kec. Tanjungsari, Kec. Tenjo, Kec. Tenjolaya
			Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Jaringan Drainase Sekunder	Kec. Cibinong , Kec. Sukaraja
7			Sistem Jaringan Air Bersih	
			Pelestarian CAT	CAT Wilayah Kabupaten Bogor
			Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air	Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044, 2024

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian terintegrasi dari pembangunan nasional.

Dalam perjalanan implementasi perencanaan jangka panjang tahun 2005-2025, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dari tahun ke tahun. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut perlu tetap dilanjutkan pada tahapan perencanaan jangka panjang berikutnya, yaitu tahun 2025-2045. Cepatnya dinamika dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat seringkali tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah untuk memfasilitasinya. Sehingga upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat dengan cepat merespon dinamika dimaksud. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada sisi lain, Kabupaten Bogor juga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan di lingkup Jawa Barat maupun nasional, serta dalam sudut pandang keterkaitannya dengan wilayah yang berbatasan. Dinamika internasional pun memiliki pengaruh yang cukup besar, sehingga perlu disikapi sebagai isu strategis yang mewarnai kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam rangka merencanakan hal-hal yang ingin dicapai pada kurun waktu 20 tahun mendatang, perlu dianalisis isu-isu strategis

yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Bogor dalam jangka panjang.

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bogor yang masih perlu diselesaikan hingga 20 tahun mendatang, diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

Permasalahan aspek geografi meliputi masih tingginya risiko rawan bencana, penurunan kualitas lingkungan hidup, semakin meluasnya titik wilayah berdampak bencana alam, tingginya angka ketidaksesuaian penggunaan lahan.

Masih tingginya risiko bencana dan semakin luasnya titik wilayah terdampak bencana alam. Secara geografis, posisi Kabupaten Bogor dikelilingi oleh pegunungan, perbukitan dan dilewati oleh 7 (tujuh) daerah aliran sungai (DAS). Hal ini menyebabkan tingginya potensi bencana di Kabupaten Bogor. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor tahun 2023 telah terjadi sebanyak 2.163 bencana yang dirinci menjadi 7 (tujuh) jenis bencana antara lain tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang, kekeringan, pergeseran tanah, gempa bumi dan bencana lain-lain (rumah ambruk, korban tenggelam, pohon tumbang). Untuk sebaran wilayah kejadian bencana, tahun 2023 tersebar di 40 kecamatan dan 407 desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan tingginya sebaran wilayah terjadinya bencana di Kabupaten Bogor. Upaya optimalisasi mitigasi bencana terus dilakukan, hal ini dapat terlihat dari pencapaian nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), Kabupaten Bogor berhasil menurunkan nilai IRB pada setiap periode (per lima tahun). Pada periode tahun 2008-2013 nilai capaian Indeks Risiko Bencana sebesar 152,4 poin. Nilai tersebut terus mengalami penurunan hingga periode Tahun 2018-2023 mencapai 107,93 poin. Apabila dilihat dari nilai capaian Indeks yang terus menurun, menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan dan penanggulangan bencana yang semakin baik. Penguatan pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan

tematik kawasan rawan bencana, efektifitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana harus semakin diperkuat karena tantangan penanganan risiko bencana ke depan semakin berat

Penurunan kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin tingginya pencemaran sungai, pencemaran udara, serta rendahnya kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas. Pencemaran semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga, sementara itu pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran sungai saat ini masih rendah. Degradasi kualitas lingkungan ini akan mengakibatkan timbulnya potensi terjadinya penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Diperlukan penguatan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, limbah, dan kesadaran lingkungan hidup lainnya.

Tingginya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang. Fungsi lahan di Kabupaten Bogor yang dipetakan berdasarkan dokumen RTRW pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian fungsi, mulai dari *enclave* kawasan hutan, kawasan hutan, kawasan khusus hankam, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan lahan basah dan kering, kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan perkotaan, rencana waduk sampai dengan situ. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya menyebabkan kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, selain menyebabkan turunnya produksi pertanian, juga menyebabkan banjir dan timbunan sampah domestik yang belum tertangani.

B. Demografi

Permasalahan demografi mencakup pertambahan penduduk, kualitas SDM, penduduk usia tua, dan tingkat urbanisasi. Adapun penjelasan terkait masing-masing permasalahan adalah sebagai berikut:

Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk usia produktif dan angka migrasi yang

tinggi. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap penyediaan sumber daya alam dan kesediaan ruang. Pertambahan penduduk juga berpengaruh terhadap tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang, dan jasa yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah (infrastruktur pendukung pergerakan orang, barang dan jasa).

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini terindikasi dengan tingkat rata-rata lama sekolah setara jenjang kelas tiga SMP serta prevalensi stunting pada balita sebesar 27,6 persen pada tahun 2023 (sumber: SKI, 2023). Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses dan kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat, akses dan kualitas kesehatan, gizi buruk, dan akses terhadap sanitasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Bogor yang unggul dan berkualitas. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang rendah sangat berkaitan dengan aspek sosial dan moralitas generasi muda di Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan semakin maraknya tawuran antar pelajar dan maraknya geng motor.

Penduduk usia tua. Jumlah penduduk usia diatas 64 tahun cenderung mengalami peningkatan sehingga menyebabkan Kabupaten Bogor akan memasuki tahapan era penduduk berusia tua (*aging population*). Hal ini bisa dilihat dari nilai capaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang semakin naik. Kondisi eksisting awal UHH pada tahun 2023 sebesar 74,67 tahun. Proyeksi UHH Tahun 2025 sebesar 75,34 tahun. Naiknya angka UHH akan mengakibatkan kebutuhan terkait jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk usia tua semakin meningkat, sarana prasarana yang dibangun harus disesuaikan dan ramah terhadap penduduk usia tua. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengalokasikan kegiatan pembangunan yang ramah terhadap penduduk usia lanjut.

Tingkat urbanisasi yang masih tinggi. Hal ini disebabkan kawasan perkotaan di Kabupaten Bogor yang berfungsi sebagai kantong permukiman dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Hal ini tentu mendorong tingkat

urbanisasi dan menyebabkan ruang perkotaan menjadi lebih padat. Pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik yang belum merata antara perkotaan dan perdesaan juga menjadi faktor pendorong tingginya angka urbanisasi.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kemiskinan merupakan muara dari permasalahan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendapatan minimal yang dapat memenuhi kebutuhan kalori harian. Menurut standar kesehatan dunia, kebutuhan kalori harian setiap orang berada pada rentang 2.000-5.000 kalori yang harus dipenuhi. Jika distandarkan kedalam pendapatan/pengeluaran, diperkirakan seseorang termasuk dalam kategori miskin jika penghasilan hariannya kurang dari Rp 17.851 per kapita per hari.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2023 masih mencapai angka 7,27 persen. Kondisi ini berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen dan Jawa Barat 7,62 persen.

Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Bogor menempati posisi ke 6 dari 11 daerah. Kemiskinan ini dipengaruhi pengeluaran masyarakat. Pengeluaran yang ada dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Bogor yang memiliki pendapatan rendah yang berdampak pada minimnya pemenuhan kebutuhan primer.

Masih banyaknya penduduk yang menganggur/mencari pekerjaan akibat masih rendahnya kesempatan kerja. Pengangguran masih merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hingga tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih tercatat sebesar 8,47 persen, lebih tinggi dari pada tingkat pengangguran nasional yang hanya sebesar 5,32 persen, dan Jawa Barat yang berada pada angka 7,44 persen.

Rendahnya kesempatan kerja yang terjadi dikarenakan minimnya *link and match* antara angkatan kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar. Hal ini yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak optimal.

Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada ketimpangan mengakses sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Masih tingginya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bogor tercermin pada timpangnya nilai IPM dan PDRB di 40 kecamatan, sebagai gambaran, pada tahun 2023, IPM tertinggi berada di Kecamatan Gunung Putri sebesar 83,46 poin dan terendah di Kecamatan Sukajaya sebesar 55,63. Begitupun dengan PDRB, Kecamatan Gunung Putri mempunyai PDRB sebesar Rp 61.204 (Miliar), dan terendah adalah Kecamatan Sukajaya dengan PDRB sebesar Rp 429 (Miliar).

Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ketersediaan sarana pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 adalah sebanyak 31 Rumah sakit (RSUD dan rumah sakit khusus), dan 101 Puskesmas. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebanyak 5.627.021 jiwa, dan proyeksi pada tahun 2045 sebanyak 6.402.221, maka diperlukan dukungan penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Masih rendahnya tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan. Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam politik, pengambilan keputusan, dan kegiatan sosial menjadi tantangan yang penting. Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan lokal dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan sebesar 4,97 persen pada tahun 2022, menunjukkan masih minimnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bogor, sehingga perlu diupayakan peningkatannya.

Masih minimnya fasilitasi perlindungan hak anak dan Perempuan. Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan merupakan perwujudan sasaran pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan hal tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender. IDG

menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bogor tahun 2023 sebesar 55,76 poin. Kondisi ini lebih rendah dari capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing sebesar 76,90 poin dan 71,74 poin.

Pelestarian Warisan Budaya. Pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya lokal, termasuk bangunan bersejarah, tradisi, seni, dan bahasa, penting dilakukan untuk menjaga agar warisan ini tetap hidup dan terawat sampai generasi mendatang. Jumlah kebudayaan yang dilestarikan di Kabupaten Bogor tahun 2022 sejumlah 127 kebudayaan yang terdiri atas Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + Karya Budaya) sejumlah 57 obyek dan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 70 cagar budaya.

3.1.3 Aspek Daya Saing

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan dan daya beli. IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 73,02 poin dengan kategori Masyarakat Sejahtera menengah ke atas, dan meningkat sebesar 4,61 poin jika dibandingkan dengan kondisi awal perencanaan di tahun 2005. Meskipun kinerja dari komponen pembentuk IPM yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity* = PPP) semuanya menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 74,39 poin dan Jawa Barat sebesar 73,74 poin.

Belum meratanya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Ketimpangan PDRB pada masing-masing kecamatan menunjukkan ketimpangan terhadap akses pengembangan ekonomi yang diterima masyarakat.

Belum optimalnya pemenuhan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, kurangnya SDM yang kompeten juga

disebabkan oleh keterbatasan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih yang kompeten, serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.

Belum optimalnya kinerja dan Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM. Hal ini disebabkan oleh kapasitas usaha, termasuk di dalamnya kapasitas teknologi dan akses pembiayaan IKM dan UMKM terbatas, *enabling environment* dalam penciptaan wirausaha baru dan *start up*, maupun peningkatan skala usaha belum optimal, daya saing produk masih rendah, dan kelincahan UMKM, serta keberlanjutannya masih kurang dikarenakan ketidakmampuan untuk memahami teknologi.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Belum optimalnya pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya permasalahan yang sering muncul, terutama terkait konektivitas infrastruktur jalan. Meski capaian kemantapan jalan pada tahun 2023 sebesar 84,68 persen dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,42 persen, namun beberapa permasalahan terkait konektivitas infrastruktur jalan nyatanya masih tetap ada, antara lain: a. Kurangnya Pemeliharaan: Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemeliharaan terhadap jalan yang sudah ada, jalan yang sudah ada sering tidak terawat dengan baik dan cenderung mengalami kerusakan seperti lubang atau retak.; b. Kepadatan Lalu Lintas, kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan konektivitas infrastruktur di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Bogor Barat.; c. Keterbatasan Aksesibilitas, beberapa wilayah di Kabupaten Bogor masih mengalami keterbatasan aksesibilitas akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar.

Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi daerah. Pada tahun 2023, Kabupaten Bogor memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,02, meskipun masuk dalam kategori baik, dan indeks ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2022 sebesar 67,76, namun reformasi birokrasi kabupaten Bogor

masih perlu perbaikan. Komponen penilaian reformasi birokrasi yang perlu ditingkatkan meliputi unsur-unsur (1) pemenuhan, (2) hasil antara area perubahan, dan (3) reform yang merupakan komponen pengungkit, serta unsur-unsur (1) akuntabilitas kinerja dan keuangan, (2) kualitas pelayanan publik, (3) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (4) Penyederhanaan birokrasi.

Belum optimalnya implementasi kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indeks profesionalitas ASN. Pada tahun 2023, Kabupaten Bogor memperoleh nilai indeks profesionalitas ASN sebesar 79,46, jika dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN tahun 2022 sebesar 64,82 poin, maka indeks profesionalitas ASN mengalami kenaikan. namun upaya-upaya optimalisasi implementasi kompetensi aparatur perlu lebih digiatkan kembali.

Penggunaan teknologi untuk pembangunan/pelayanan publik yang belum optimal. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi pemerintahan, dan pelaporan masalah serta mengembangkan program dan inisiatif yang mendukung pembangunan.

3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis jangka panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah dipengaruhi oleh isu strategis skala global, nasional, dan Provinsi Jawa Barat, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu Strategis Global

a. Perubahan Iklim

Tantangan Pemanasan Global akibat Perubahan Iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) yang tinggi pada periode 2020-2050. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa Tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015- 2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi satu isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan Pembangunan ke depan.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

c. Demografi global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan

seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

d. Disrupsi Teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

e. Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

f. Urbanisasi Dunia

Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di

Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

2. Isu Strategis Nasional

a. Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini.

b. Bonus Demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Selain itu, penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia. *Consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat *consuming class* ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu di imbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

c. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi *COVID-19* namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”-nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan *smart grid* termasuk jaringan interkoneksi dalam (*island grid*) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk produk turunanya secara berkelanjutan; (viii) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun nonfiskal untuk mendorong produk produk hijau, melalui pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi hijau, serta (ix) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

d. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antarperiode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan

keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Pelayanan tenaga Listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

e. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun pertahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp. 544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co₂ atau 2,67 persen dari total emisi

GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO₂e GrCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma Pembangunan tidak berubah.

Daya dukung sumber daya alam diperkirakan akan terus menurun. Daya dukung lahan hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU) yang dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektar selama kurun waktu Tahun 2020-2045 serta pengurangan luas lahan sawah sehingga diproyeksikan akan menurun hingga 7 juta hektar diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektar/tahun akibat degradasi tanah. Selain itu, daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan, sampai dengan tahun 2045 tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa sudah berada pada tingkat langka atau kritis sehingga berdampak pada ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan yang diprediksi akan mengalami penurunan. Adapun, daya dukung ekosistem laut yang diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari, selain itu naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem yang mengancam pemutihan pada ekosistem terumbu karang.

Daya tampung kualitas air, lahan, dan lingkungan laut diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen IKA nasional memiliki tren fluktuatif

dengan rata-rata Tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK 2021) nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun, daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim namun pengelolaan yang berkelanjutan yang disebabkan aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi, dan sampah laut masih rendah. Namun disisi lain, daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu saat ini konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

f. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan trend pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Trend pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas

belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

a. *Green dan blue economy* serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik antarindividu, antarkelompok, dan antarwilayah.

b. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, dan karakter sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber

daya manusia dengan menciptakan karakter sosial budaya yang inklusif yang akan membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan akses, dan kualitas layanan dasar.

Kesenjangan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan sosial masyarakat di kedua wilayah tersebut. Percepatan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur fasilitas pendidikan akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

d. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan

baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumberdaya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka Panjang.

e. Keberlanjutan Penataan Ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik.

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut diatas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

f. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan

dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Isu Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

Isu Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

a. Bonus demografi

Kabupaten Bogor telah mengalami perubahan demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2035-2040. Dalam periode tersebut Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan angkatan kerja terbanyak di Jawa Barat. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) juga meningkat. Pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk usia 65+ sebesar 7,27 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 6.420.826 jiwa atau sekitar 466,967 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk usia 65+ yang berdampak pada meningkatnya angka ketergantungan penduduk yang perlu menjadi perhatian, karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan perekonomian Kabupaten Bogor, diantaranya: 1. Beban Ekonomi, semakin tinggi angka ketergantungan penduduk, semakin banyak jumlah individu yang bergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok pekerja. 2. Tekanan pada Sistem Kesehatan dan Sosial, tingginya angka ketergantungan penduduk dapat menimbulkan tekanan pada sistem kesehatan dan sosial. Lebih banyak orang tua yang membutuhkan perawatan kesehatan

dan dukungan sosial. Oleh karenanya, jaminan sosial dan dukungan kesehatan terhadap mereka perlu terus ditingkatkan. 3. Penurunan Produktivitas, jika angka ketergantungan penduduk meningkat, tingkat produktivitas secara keseluruhan dapat menurun. Oleh karenanya, perlu dilakukan berbagai upaya agar penduduk usia 65+ tetap dapat produktif dan dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi.

b. Percepatan dan peningkatan efektivitas pengentasan kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bogor merupakan isu yang kompleks dan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bogor. kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Bogor berada di angka 7,27 persen, diproyeksikan angka kemiskinan kabupaten Bogor pada tahun 2045 berada dikisaran 0,84-1,39 persen. Beberapa substansi yang harus diperhatikan untuk mencapai angka kemiskinan 0,84-1,39 persen pada tahun 2045, yaitu: (1) peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) akses terhadap pelayanan kesehatan, (4) penguatan infrastruktur, (5) perlindungan sosial, (6) ketimpangan sosial ekonomi, (7) partisipasi masyarakat. Menghadapi isu strategis pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan yang melibatkan kerjasama pemerintah, sektor swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

c. Daya saing sumber daya manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau angkatan kerja suatu daerah untuk bersaing secara efektif di pasar kerja global. Hal Ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, kreativitas, dan adaptabilitas SDM dalam lingkungan ekonomi secara kompetitif. Dalam perspektif lain SDM juga melihat kepada tingkat pendidikan, dan derajat kesehatan penduduk, serta kemampuan ekonomi penduduk suatu daerah.

Pembangunan masyarakat dari sisi aspek sosial dan moralitas juga perlu mendapat perhatian. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat, yang mempunyai kesadaran sosial, tata nilai dan hukum yang tinggi sehingga pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang berkeadaban.

d. Konektivitas dan infrastruktur dasar

Konektivitas dan infrastruktur dasar merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap isu strategis ini adalah (1) transportasi, (2) telekomunikasi, (3) energi, (4) air bersih dan sanitasi, (5) pengelolaan sampah dan limbah domestik, (6) konektivitas digital, serta (7) konektivitas regional.

Investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar merupakan langkah penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang bagi pembangunan berkelanjutan.

e. Kualitas dan daya dukung lingkungan

Isu ini mengacu pada upaya untuk menjamin bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Untuk memantau dan mengevaluasi daya dukung lingkungan, digunakan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 60,61 poin, dan diproyeksikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor pada tahun 2045 berada dikisaran 65,12 poin. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait isu ini selain konservasi lingkungan dan keadilan bagi generasi berikutnya, adalah (1) kesejahteraan sosial, (2) inklusif, (3) partisipasi masyarakat, dan (4) kolaborasi antar sektor.

f. Ketimpangan pembangunan antar wilayah

Isu ini mengacu pada upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan kemudahan dalam mendapatkan akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait isu ini adalah (1) kualitas dan kuantitas infrastruktur, (2) akses terhadap pelayanan publik, (3) ekonomi dan lapangan kerja, (4) investasi dan pengembangan penanaman modal, (5) sumber daya alam, (6) kebijakan dan perencanaan pembangunan, (7) mobilitas dan migrasi penduduk dan (8) kualitas sumber daya manusia.

Terkait wilayah Kabupaten Bogor yang luas, hal ini berpengaruh terhadap rentang kendali dalam proses penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, selain peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan, pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu dengan mengoptimalkan kendali pembangunan di wilayah yang lebih kecil untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut (1) kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan yang masih rendah dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, (2) birokrasi yang kompleks dan tidak efisien, (3) transparansi dan akuntabilitas yang rendah, (4) perencanaan dan penganggaran yang kurang matang, (5) minimnya partisipasi publik, dan (6) pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, mendorong partisipasi publik, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan perencanaan dan penganggaran yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Ada pun hubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis daerah Kabupaten Bogor, isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan isu strategis global dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Sanding Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH/KABUPATEN	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS GLOBAL
1	Aspek Demografi	Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi	Bonus Demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Bonus Demografi Indonesia	Demografi Global
2	Aspek Demografi	Jumlah penduduk usia tua yang cenderung meningkat				Urbanisasi Dunia
3	Aspek Demografi	Tingkat urbanisasi yang masih tinggi				
4	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Masih banyaknya penduduk yang menganggur/mencari pekerjaan akibat masih rendahnya kesempatan kerja	Percepatan dan Peningkatan Efektivitas Pengentasan Kemiskinan	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-	-
5	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Masih tingginya angka kemiskinan				
6	Aspek Demografi	Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	-

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH/KABUPATEN	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS GLOBAL
7	Aspek Daya Saing	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan dan daya beli				
8	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Masih rendahnya tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan				
9	Aspek Daya Saing	Belum optimalnya pemenuhan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja				
10	Aspek Daya Saing	Belum optimalnya kinerja dan kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM				
11	Aspek Pelayanan Umum	Belum optimalnya implementasi kompetensi aparatur				

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH/KABUPATEN	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS GLOBAL
13	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar	Disrupsi Teknologi
14	Aspek Pelayanan Umum	Belum optimalnya pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar				
15	Aspek Daya Saing	Belum meratanya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat				
16	Aspek Geografi	Masih tingginya risiko bencana	Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Ketahanan Bencana	Perubahan Iklim
17	Aspek Geografi	Penurunan kualitas lingkungan hidup				
18	Aspek Geografi	Semakin meluasnya titik wilayah terdampak bencana alam				

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH/KABUPATEN	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS GLOBAL
19	Aspek Geografi	Tingginya ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang	Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah/Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan	Keberlanjutan Penataan Ruang	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Geopolitik dan Geoekonomi
20	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada ketimpangan mengakses sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat		<i>Green and Blue Economy</i> serta Pembangunan Inklusif		Perdagangan Internasional
21	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Masih minimnya fasilitasi perlindungan hak anak dan perempuan	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Disrupsi Teknologi
22	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya lokal				

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH/KABUPATEN	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS GLOBAL
23	Aspek Pelayanan Umum	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi daerah				
24	Aspek Pelayanan Umum	Penggunaan Teknologi Untuk Pembangunan/ Pelayanan Publik Yang Belum Optimal				

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor, diolah, 2024

Berdasarkan data permasalahan dan isu strategis diatas, beberapa hal terkait dengan potensi yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Bogor di dalam menyikapi dan merespon berbagai permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Potensi: Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja muda untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta mengembangkan program-program pelatihan vokasional dan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
 - Isu strategis: Bonus Demografi; Daya Saing Sumber Daya Manusia; Percepatan dan Peningkatan Efektivitas Pengentasan Kemiskinan
2. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 - Potensi: Kabupaten Bogor memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata alam yang luar biasa, seperti pegunungan, air terjun, dan kawasan konservasi, yang bisa menjadi daya tarik utama untuk pariwisata. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan bisa menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
 - Isu strategis: Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah/ Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
3. Pengembangan Infrastruktur
 - Potensi: Dengan perkembangan urbanisasi yang pesat, pengembangan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum dan konektivitas digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas antar wilayah. Perluasan dan peningkatan infrastruktur ini harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
 - Isu strategis: Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
4. Pertanian dan Agrowisata
 - Potensi: Kabupaten Bogor memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan agrowisata. Pengembangan pertanian modern dan pengembangan agribisnis

berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani/nilai tambah sekaligus memastikan ketahanan pangan.

- Isu strategis: Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah/ Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

5. Pendidikan dan Penelitian

- Potensi: Kabupaten Bogor bisa menjadi pusat pendidikan dan penelitian, terutama terkait dengan ilmu pertanian, kehutanan dan lingkungan. Investasi dalam fasilitas pendidikan dan penelitian bisa dilakukan berkolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi untuk pengembangan inovasi dan teknologi
- Isu strategis: Daya Saing Sumber Daya Manusia

6. Industri kreatif dan Teknologi

- Potensi: Mengembangkan industri kreatif dan teknologi digital untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menarik investasi. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam teknologi dan kreativitas, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung.
- Isu strategis: Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

- Potensi: Kabupaten Bogor memiliki banyak sumber daya alam, diantaranya sumber daya air yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan dampak perubahan iklim serta menyediakan kebutuhan dasar di masa depan.
- Isu strategis: Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan

8. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lingkungan

- Potensi: Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bogor salah satunya pemanfaatan potensi alam dengan pendekatan ekonomi hijau yang menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

- Isu strategis: Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah/ Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
9. Pengelolaan Kawasan Urban dan Rural
- Potensi: Perencanaan ruang yang efektif antara kawasan urban dan rural untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pengelolaan tata ruang yang seimbang untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mempertahankan ruang hijau.
 - Isu strategis: Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah/ Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan
10. Ketahanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
- Potensi: Mengembangkan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim untuk mengantisipasi risiko alam seperti banjir, longsor dan cuaca ekstrem yang mungkin meningkat di masa yang akan datang
 - Isu Strategis: Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan

Dengan fokus pada potensi-potensi yang dimiliki tersebut, Kabupaten Bogor bisa lebih siap menghadapi tantangan strategis di masa depan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.

Terkait dengan kondisi saat ini disandingkan dengan proyeksi isu strategis Kabupaten Bogor pada tahun 2045 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Proyeksi Isu Strategis Kabupaten Bogor

ISU STRATEGIS	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (Tahun 2023)	PROYEKSI (Tahun 2045)	KETERANGAN
Bonus demografi	Dependency Ratio (%)	41,26	17,28	Kondisi saat ini belum bisa menggambarkan terjadinya bonus demografi, hal ini terlihat dari masih besarnya angka <i>dependency ratio</i> . Namun diproyeksikan pada tahun 2035-2040 akan terjadi puncak bonus demografi di Kabupaten Bogor

ISU STRATEGIS	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (Tahun 2023)	PROYEKSI (Tahun 2045)	KETERANGAN
Percepatan dan peningkatan efektivitas pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,27	0,1-0,65	Angka kemiskinan Kabupaten Bogor akan terus didorong semakin kecil dari tahun ke tahun. berbagai upaya yang akan dilakukan, antara lain: Peningkatan Akses Pendidikan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Memperkuat jaminan sosial untuk masyarakat
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial (%)	N/A	100	
Daya saing sumber daya manusia	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,37	12,07	Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing SDM antara lain: 1. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan 2. Penciptaan Lapangan Kerja 3. Pada dimensi lain, terkait dengan peningkatan derajat kesehatan juga harus mendapatkan perhatian
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,64	13,62	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,47	4,5-5,59	
	Indeks Inovasi Daerah (poin)	80,93	80,54	
	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,67	82,34	
Konektivitas dan infrastruktur dasar	Indeks Smart City (poin)	N/A	4	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	N/A	100	
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	33,21	
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N/A	100	

ISU STRATEGIS	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI (Tahun 2023)	PROYEKSI (Tahun 2045)	KETERANGAN
Kualitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	60,61	65,12	Pembangunan di Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan dilaksanakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi namun tetap mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah	Jumlah Desa Mandiri	N/A	330	
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,71	4,75	Untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan penggunaan Teknologi Informasi secara optimal. Penerapan teknologi informasi harus terus didorong karena berdampak pada efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pemberian layanan publik yang lebih efektif.
	Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,50	
	Indeks Kualitas Kebijakan (poin)	90,53	*	

5. Isu strategis dalam KLHS dan RPJPD

Hubungan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat

erat dan saling mendukung dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut adalah sebagai berikut: a. KLHS digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang ada di dalam dokumen RPJPD.; b. KLHS memberikan rekomendasi untuk mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan.; c. KLHS mengidentifikasi isu-isu strategis yang krusial yang perlu diperhatikan dalam RPJPD.

Berkaitan dengan hubungan isu strategis dalam KLHS dengan isu strategis pada dokumen RPJPD, disajikan pada lampiran dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka mengawal upaya pencapaian tujuan bernegara yang menjadi target penyelenggaraan pemerintahan, perlu dirumuskan sebuah visi jangka panjang daerah yang akan menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk menyusun visi-visi jangka menengah. Selanjutnya, visi jangka panjang daerah, akan diimplementasikan secara garis besar ke dalam misi-misi praktis yang juga akan menjadi pedoman teknis bagi unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Visi jangka panjang daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi nasional dan Jawa Barat sebagai bentuk perwujudan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Visi** didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, visi mencerminkan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis.

Visi yang ingin dicapai juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang hingga akhir periode jangka panjang tahun 2005-2025 belum terselesaikan. Visi juga diharapkan dapat terwujud setelah mempertimbangkan faktor-faktor krusial yang menjadi isu strategis dan perlu diantisipasi selama perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah.

Misi, didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi jangka panjang daerah dirumuskan secara teknokratik berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan dan isu strategis, serta analisis-analisis yang bersifat akademis, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang daerah dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Misi juga merupakan upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045 yang disusun sebagai langkah teknis yang bersifat global dengan maksud memberikan arahan terkait cara mencapai visi.

Uraian visi dan misi dijabarkan sebagai berikut :

4.1 Visi

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertimbangkan otonomi daerah, visi pembangunan daerah tidak terlepas dari visi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting untuk menyamakan gerak langkah pembangunan daerah dengan tidak menghilangkan karakteristik

daerah. Visi pembangunan nasional jangka panjang adalah Indonesia Emas 2045, yaitu '**Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**'.

Adapun arti visi Indonesia Emas 2045 adalah sebagai berikut :

- NKRI merupakan negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- Bersatu artinya kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika
- Berdaulat artinya ketahanan, kesatuan, mandiri, aman dan tangguh;
- Maju artinya berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif dan adil;
- Berkelanjutan artinya lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2045 adalah :

'Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan'

Adapun arti visi Jawa Barat adalah :

- Termaju
merupakan kondisi Jawa Barat tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern, serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, dengan didukung teknologi yang modern.

Kemajuan Provinsi Jawa Barat tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

- Berdaya saing dunia

merupakan kondisi Jawa Barat tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerjasama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif dan inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

- Berkelanjutan

ditandai dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik termanifestasi dengan penerapan perilaku yang ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang,

sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas polusi (air, udara, suara dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan indeks ekonomi hijau dan biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas keidupan yang tinggi.

Visi Kabupaten Bogor tahun 2045 adalah:

“ Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan “

Gambaran keselarasan visi pemerintah pusat, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Keselarasan Visi Pusat, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2045

Visi maju dan berkelanjutan merupakan visi yang wajib ada dalam visi Kabupaten Bogor. Hal ini dimaksudkan agar kerangka otonomi daerah tidak terlepas dari kerangka NKRI, sehingga terwujud harmonisasi, sinkronisasi dan keselarasan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Secara garis besar, terdapat 3 kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor hingga akhir tahun 2045, yaitu maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun penjelasan masing-masing kondisi terinci sebagai berikut:

1. Maju

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maju diartikan telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi.

Kabupaten Bogor maju memiliki arti:

- mampu berkompetisi dengan wilayah kabupaten/kota, baik di Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, maupun di Indonesia dalam hal pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- memiliki laju peningkatan kinerja yang lebih besar daripada pencapaian kinerja nasional, Jawa Barat, maupun kabupaten/kota lainnya;
- memiliki produktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi dengan laju pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian kinerja nasional, Jawa Barat, maupun kabupaten/kota lainnya;
- inovatif dan adaptif;
- mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif dan efisien;
- senantiasa aktif berpartisipasi dalam mendukung program nasional dan Jawa Barat;
- mampu mewujudkan kemajuan pada berbagai aspek yang menjadi kewenangan daerah;
- mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mendorong religiusitas dan daya saing masyarakat;

- mampu mewujudkan kemandirian daerah;
- mampu mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

2. Berkeadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkeadilan diartikan mempunyai keadilan.

Kabupaten Bogor Berkeadilan memiliki arti:

- pembangunan di setiap wilayah dilakukan secara merata serta memperhatikan potensi dan keunggulan masing-masing, karakteristik, dan prioritas kebutuhan wilayah.
- setiap warga masyarakat mendapatkan hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik.
- mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang bahagia dan berbudaya melalui pemenuhan kebutuhan pada aspek ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan dengan laju penurunan yang tinggi;
- mampu mewujudkan suasana tertib, tenteram, masyarakat yang ramah, santun, berbudaya dan bertaqwa.

3. Berkelanjutan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus; berkesinambungan.

Kabupaten Bogor yang berkelanjutan memiliki arti:

- mampu mengelola potensi daerah secara tepat guna dan tepat sasaran;
- mampu mempertahankan daya dukung lingkungan secara lestari;
- melaksanakan kinerja kewenangan daerah secara bertahap dan berkesinambungan, terintegrasi, dan harmonis dengan pusat dan Jawa Barat;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, sehingga tercipta masyarakat yang sadar dan cinta akan lingkungan;
- memfokuskan pembangunan berorientasi ekonomi hijau dan hilirisasi ekonomi;

- mampu menyeimbangkan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- mampu mengelola kebencanaan dengan tepat;
- melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang dan berorientasi masa depan.

Di sisi lain, berkelanjutan dimaknai sebagai bentuk sinergi antar tahapan yang berkesinambungan, mulai dari tahapan fondasi (2025-2029), tahap akselerasi (2030-2034), tahap pemantapan (2035-2039), dan tahap perwujudan (2040-2045) yang bermuara pada dukungan terhadap terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Visi Kabupaten Bogor Tahun 2045 yaitu Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan terimplementasi dalam 5 (lima) sasaran visi, yang secara *mandatory* bersinergi dengan sasaran visi nasional dan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Sasaran Visi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BOGOR 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Pendapatan per kapita meningkat	a. PDRB per kapita (RpJuta)	57,14 – 57,42	273,17 – 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	55,31- 55,67	96,67- 148,75
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,65	495,56				
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	52,38	50,44
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 – 5,85	0,09 – 0,34	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,39 - 7,05	0,1-0,65
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 – 0,390	0,357 – 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,364 - 0,371	0,342 - 0,365

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BOGOR 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi (%)	10,94	11,00
										d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,15-5,81	5,27-6,47
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index (peringkat)</i>	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,87	5	Kepemimpinan daerah di tingkat regional dan nasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,57	4,71
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,02	86,66

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KABUPATEN BOGOR 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/ Milyar Rupiah)	0,55	3,65
										Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	59,26	61,13

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN dan RPJPD Jawa Barat, dan Penyelarasan Target dari Provinsi Jawa Barat 2025-2045

4.2 Misi

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi yang telah diuraikan dalam sub bab 4.1, dirumuskan pernyataan misi untuk mengarahkan segala aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga visi 2045 tercapai. Sementara itu, sebagai bentuk sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, dan dalam rangka menjamin terciptanya dukungan perencanaan Kabupaten Bogor terhadap pembangunan nasional dan Jawa Barat, maka perumusan misi Kabupaten Bogor menyelaraskan dengan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan nasional serta 8 (delapan) misi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045, terdiri atas: 3 (tiga) agenda Transformasi Indonesia, yaitu (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Sementara itu, misi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 terdiri dari berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif;
3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif;
4. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah;
5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan;
6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif;
7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas; dan
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk menjamin keselarasan dengan misi (agenda) nasional dan misi Provinsi Jawa Barat, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Bogor sebanyak 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya;
Misi ini didasari oleh adanya keinginan bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang agamis, memiliki akhlak/perilaku baik, sopan santun, bertata krama, sehat lahir batin dengan pendidikan yang berkualitas. Dengan ini diharapkan Kabupaten Bogor memiliki SDM yang berdaya saing tinggi.
2. Membangun perekonomian yang kuat, produktif, berkelanjutan, dan inovatif;
Misi ini didasari oleh adanya keinginan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan melalui stabilitas makro ekonomi, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sistem keuangan yang sehat, regulasi yang efektif, dan ketahanan terhadap gejolak pasar. Produktif memiliki tingkat output yang tinggi per unit input, yang mencakup tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Ini dicapai melalui investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan pendidikan, serta efisiensi dalam proses produksi dan penggunaan sumber daya.
Perekonomian yang berkelanjutan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan atau mengorbankan kebutuhan generasi mendatang melalui pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan promosi energi terbarukan. Perekonomian yang berkelanjutan juga memperhatikan dimensi sosial, dengan memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
3. Mengembangkan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan;
Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas yang adaptif terhadap perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan teknologi informasi.
4. Mewujudkan kabupaten yang bersih, akuntabel dan kondusif;
Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan.

5. Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan;
Misi ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai pilar dasar bermasyarakat, Kabupaten Bogor tangguh bencana dengan orientasi pembangunan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;
Misi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh wilayah melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang merata di seluruh wilayah.
7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas;
Misi ini berorientasi pada pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan wilayah.
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan;
Misi ini ditujukan agar pembangunan yang dilaksanakan per tahapan periode pembangunan dapat berkelanjutan untuk mengawal pencapaian visi melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang akuntabel.

Adapun keselarasan misi Kabupaten Bogor terhadap misi pembangunan nasional dan Jawa Barat, dijabarkan Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Misi Kabupaten Bogor
dengan Misi (Agenda) Nasional dan Misi Provinsi Jawa Barat

RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025 – 2045	RPJPD KABUPATEN BOGOR 2025 - 2045
Kelompok Agenda	Agenda (Misi)	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	1. Transformasi Sosial	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berbudaya
	2. Transformasi Ekonomi	2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	2. Membangun Perekonomian yang Kuat, Produktif, Berkelanjutan dan Inovatif
	3. Transformasi Tata Kelola	3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif;	3. Mengembangkan Modernisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Landasan Transformasi	4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	4. Mewujudkan Kabupaten yang Bersih, Akuntabel dan Kondusif
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju dan Peduli Lingkungan	5. Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan
Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif	6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
	8. Kestinambungan Pembangunan	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

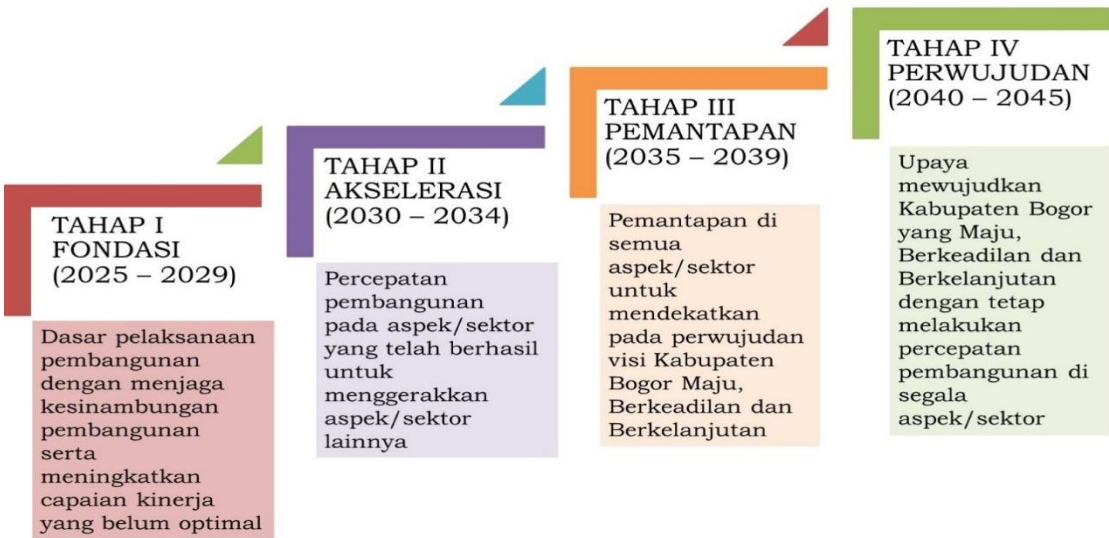
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, perlu diuraikan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan sehingga visi dan misi tersebut dapat diimplementasikan dalam kerangka pembangunan 20 tahun. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan, yang merupakan rumusan kerangka kerja untuk melaksanakan misi sebagai upaya pencapaian visi daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan selama periode 20 tahun dibagi menjadi 4 (empat) tahapan dengan tema setiap tahapan yang sejalan dan selaras dengan tahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, sebagai berikut:



Gambar 5.1

Tahap Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

- I. Tahap Pertama (2025-2029): Fondasi
- Pada tahap pertama, pembangunan Kabupaten Bogor akan diarahkan pada penguatan fondasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan serta

berorientasi pada peningkatan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan kompetensi SDM;
- 2) Pengembangan potensi ekonomi daerah;
- 3) Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- 4) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Pengembangan konsep masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6) Penataan potensi unggulan kecamatan;
- 7) Penataan sarana prasarana dasar secara merata;
- 8) Penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

II. Tahap Kedua (2030-2034): Akselerasi

Tahap ini merupakan tahap akselerasi pembangunan pada aspek atau sektor yang telah berhasil atau berpotensi mencapai keberhasilan sehingga dapat menstimulasi atau mendorong keberhasilan pada aspek/sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan daya saing SDM;
- 2) Penguatan sektor ekonomi basis/potensial;
- 3) Pengembangan modernisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
- 4) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Penataan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6) Pengembangan potensi unggulan wilayah kecamatan;
- 7) Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana kewilayahan;
- 8) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

III. Tahap Ketiga (2035-2039): Pemantapan

Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan pemantapan pembangunan di semua aspek/sektor untuk mendekatkan pada perwujudan visi Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Upaya pemantapan ini dilakukan melalui:

- 1) Penguatan daya saing SDM;
- 2) Peningkatan daya saing daerah
- 3) Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
- 4) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Penguatan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6) Penguatan potensi unggulan wilayah kecamatan;
- 7) Pengembangan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah berdasarkan prioritas;
- 8) Pemantapan kualitas penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

IV. Tahap Keempat (2040-2045): Perwujudan

Tahap ini merupakan upaya perwujudan Kabupaten Bogor yang Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan, dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek/sektor. Upaya perwujudan ini dilakukan melalui:

- 1) Pemantapan kualitas SDM berbudaya;
- 2) Pemantapan daya saing daerah;
- 3) Pemantapan kinerja pelayanan publik yang modern;
- 4) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Pemantapan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6) Perwujudan pemerataan pembangunan berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan;
- 7) Pemantapan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
- 8) Perwujudan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, upaya yang dilakukan untuk melaksanakan misi per tahapan pembangunan Kabupaten Bogor untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tahapan Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TAHAP PEMBANGUNAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1) Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya	Pengembangan kompetensi SDM	Pengembangan daya saing SDM	Penguatan daya saing SDM	Pemantapan kualitas SDM berbudaya
	2) Membangun perekonomian yang kuat, produktif, berkelanjutan, dan inovatif	Pengembangan potensi ekonomi daerah	Penguatan sektor ekonomi basis/potensial	Peningkatan daya saing daerah	Pemantapan daya saing daerah
	3) Mengembangkan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Pengembangan modernisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Pemantapan kinerja pelayanan publik yang modern
	4) Mewujudkan kabupaten yang bersih, akuntabel dan kondusif	Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	5) Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Pengembangan konsep masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan	Penataan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan	Penguatan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan	Pemantapan kehidupan masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan
	6) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan	Penataan potensi unggulan kecamatan	Pengembangan potensi unggulan wilayah kecamatan	Penguatan potensi unggulan wilayah kecamatan	Perwujudan pemerataan pembangunan berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan
	7) Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	Penyediaan sarana prasarana dasar secara merata	Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana kewilayahan	Pengembangan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah berdasarkan prioritas	Pemantapan kualitas sarana dan prasarana wilayah
	8) Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi	Perwujudan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan

VISI	MISI	TAHAP PEMBANGUNAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2045)
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
		serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Bogor 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahapan, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan koridor bagi kesatuan langkah transformasi, yang selaras dengan Provinsi Jawa Barat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun menyesuaikan dengan karakteristik dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Secara terinci, arah kebijakan Kabupaten Bogor adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.2. Sementara itu, kebijakan pembangunan yang menyeluruh, termasuk program dan kegiatan yang non transformatif, akan dituangkan dalam penyusunan RPJMD, maupun RKPD.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
KABUPATEN BOGOR MAJU, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN						
1	Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya	Kesehatan untuk semua	Penerapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan	Percepatan dan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan	Pemantapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perwujudan masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik dan membudayakan perilaku hidup sehat
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Perluasan akses layanan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Percepatan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemenuhan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
			Pencegahan dan pengendalian penyakit	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi	Pemantapan pemberdayaan masyarakat	

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	dasar lengkap dengan pendekatan budaya	dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Perwujudan keluarga sehat dan tangguh terhadap penyakit
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Pemantapan percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ke seluruh wilayah	Pemantapan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ke seluruh wilayah	Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Percepatan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar	Pemantapan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar	Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar
			Penyiapan penuntasan dan pencegahan stunting	Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting	Percepatan New Zero Stunting	Pemantapan New Zero Stunting
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Pemantapan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Optimalisasi ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Penguatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Pemantapan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Penuntasan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Pemantapan pemerataan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Perwujudan pemerataan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Percepatan perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Pemantapan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Pemenuhan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	Percepatan dan perluasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemenuhan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Penerapan dan pemerataan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Pemantapan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
			Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik sampai ke tingkat nasional dan internasional	Optimalisasi manajemen talenta dan prestasi peserta didik sampai ke tingkat nasional dan internasional
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Percepatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Pemantapan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Pemenuhan dan pemerataan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kualitas serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Percepatan peningkatan kualitas serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemantapan kualitas serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemenuhan dan pemerataan kualitas serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Perluasan pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Pemantapan dan pemerataan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
			Peningkatan dukungan terhadap sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Perluasan dan peningkatan dukungan terhadap sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Pemantapan dukungan terhadap sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Optimalisasi dukungan terhadap sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan penuntasan kemiskinan	Penguatan penuntasan kemiskinan	Pemantapan penuntasan kemiskinan	Optimalisasi penuntasan kemiskinan
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Penguatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif	Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perluasan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial	Penyediaan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif	Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif	Perwujudan perlindungan sosial adaptif terintegrasi dan inklusif, yang tepat sasaran, tepat guna dan efisien
			Penataan dan pemenuhan dukungan penyediaan jaminan sosial			
			Penguatan sistem pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas infrastruktur	Pemerataan akses infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas infrastruktur	Optimalisasi akses infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas infrastruktur
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga			
			Penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak	Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemerataan akses layanan rumah layak huni

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
2	Membangun perekonomian yang kuat, produktif, berkelanjutan, dan inovatif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pemantapan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendayagunaan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
			Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Pemantapan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Optimalisasi penerapan hasil riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
			Pengembangan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Penguatan tingkat produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Perwujudan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyediaan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Pengembangan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Optimalisasi pemanfaatan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
			Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Pengembangan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Perluasan pemanfaatan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Perwujudan peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
			Penyediaan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD)	Penguatan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD)	Pemantapan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD)	Optimalisasi dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD)
			Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Pengembangan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Perluasan pemanfaatan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Perwujudan peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pengembangan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan	Percepatan pengembangan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan	Penguatan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan	Pemantapan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>)	Penataan dan penguatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif secara kolaboratif dan partisipatif	Pemantapan daya saing potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan	Optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan
			Pengembangan kolaborasi antarpelaku usaha IKM untuk proses produksi yang bersifat massal, melalui koperasi, kesepakatan/ perjanjian atau asosiasi	Penguatan kolaborasi antarpelaku usaha IKM untuk proses produksi yang bersifat massal, melalui koperasi, kesepakatan/ perjanjian atau asosiasi	Pemantapan kolaborasi antarpelaku usaha IKM untuk proses produksi yang bersifat massal, melalui koperasi, kesepakatan/perjanjian atau asosiasi	Optimalisasi kolaborasi antarpelaku usaha IKM untuk proses produksi yang bersifat massal melalui koperasi, kesepakatan/perjanjian atau asosiasi
			Penataan dan restrukturisasi BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing	Optimalisasi bisnis BUMD yang berdaya saing

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penguatan tata kelola perdagangan serta perlindungan konsumen	Pengembangan tata kelola perdagangan dan perlindungan konsumen	Penguatan sistem jejaring perdagangan serta perlindungan konsumen	Perwujudan sistem jejaring perdagangan serta perlindungan konsumen yang handal dan aman
			Fasilitasi perluasan akses pembiayaan usaha melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi, baik untuk operasional dan pemeliharaan, maupun untuk peningkatan skala usaha	Pemerataan akses pembiayaan usaha melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi, baik untuk operasional dan pemeliharaan, maupun untuk peningkatan skala usaha	Penguatan akses pembiayaan usaha melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi, baik untuk operasional dan pemeliharaan, maupun untuk peningkatan skala usaha	Optimalisasi akses pembiayaan usaha melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi, baik untuk operasional dan pemeliharaan, maupun untuk peningkatan skala usaha
		Penerapan ekonomi hijau	Penyiapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Peningkatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
			Penyiapan infrastruktur industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Percepatan penerapan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyiapan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi	Pengembangan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi	Peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi	Perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low cost financing</i> , bagi investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor ekonomi hijau dan energi baru terbarukan	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low cost financing</i> , bagi investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor ekonomi hijau dan energi baru terbarukan	Optimalisasi kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low cost financing</i> , bagi investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor ekonomi hijau dan energi baru terbarukan	Perwujudan investasi yang efisien pada sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor ekonomi hijau dan energi baru terbarukan
			Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan dan penguatan kolaborasi untuk <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan	Perluasan akses pembiayaan bagi <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan	Optimalisasi penerapan <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan
		Transformasi Digital	Peningkatan peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk melalui jejaring media <i>online</i> dan <i>offline</i>	Penguatan dan pengembangan peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk melalui jejaring media <i>online</i> dan <i>offline</i>	Pemantapan peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk melalui jejaring media <i>online</i> dan <i>offline</i>	Optimalisasi peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk melalui jejaring media <i>online</i> dan <i>offline</i>

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pemanfaatan teknologi digital sebagai basis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan	Percepatan dan perluasan pemanfaatan pemanfaatan teknologi digital sebagai basis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan	Penguatan pemanfaatan teknologi digital sebagai basis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan	Pemantapan pemanfaatan teknologi digital sebagai basis pengendalian, pengawasan, dan pelaporan
			Pembangunan ekosistem digital yang mencakup penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis; peningkatan literasi digital, keamanan informasi dan siber	Percepatan pembangunan ekosistem digital, yang mencakup penuntasan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis; peningkatan literasi digital, serta peningkatan keamanan informasi dan siber	Pemantapan ekosistem digital, yang mencakup penuntasan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis; peningkatan literasi digital, serta peningkatan keamanan informasi dan siber	Optimalisasi ekosistem digital, yang menjamin ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis; peningkatan literasi digital, serta peningkatan keamanan informasi dan siber
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Pengembangan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Pemantapan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Perwujudan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan dan integrasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Percepatan penyediaan dan integrasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Pemantapan penyediaan dan integrasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Perwujudan integrasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, antara lain melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Percepatan peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, antara lain melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Pemantapan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, antara lain melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan kontribusi UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	Percepatan peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	Pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	Pendayagunaan rantai nilai global untuk perkembangan kota jasa dan optimalisasi pengembangan sektor unggulan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
		Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	Penyediaan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	Peningkatan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	Pemantapan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	Perwujudan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
			Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan	Perwujudan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan
			Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyiapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
			Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi
			Pengembangan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
			Penyiapan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourist</i>	Pengembangan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourist</i>	Pemantapan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourist</i>	Perwujudan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourist</i>
			Penyiapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyiapan infrastruktur yang menginterkoneksi antar kawasan strategis	Pengembangan infrastruktur yang menginterkoneksi antar kawasan strategis	Peningkatan infrastruktur yang menginterkoneksi antar kawasan strategis	Perwujudan infrastruktur yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
			Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan desa
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
			Pembangunan jalan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan	Pembangunan jalan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan	Pembangunan jalan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan	Pembangunan jalan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan
			Reaktivasi layanan perkeretaapian	Reaktivasi layanan perkeretaapian	Reaktivasi layanan perkeretaapian	Reaktivasi layanan perkeretaapian
			Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi)	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi)	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi)	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi)

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
3	Mengembangkan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Pemantapan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Penerapan regulasi di daerah yang mendukung investasi dan meningkatkan daya saing daerah
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Penguatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Pemantapan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Percepatan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemantapan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Optimalisasi tata kelola pemerintah daerah dan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Perwujudan <i>e-government</i> dan <i>smart city</i>
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Percepatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Penguatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Perwujudan pemda yang akuntabel dan berorientasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional
			Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Optimalisasi penerapan manajemen risiko pembangunan daerah

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
4	Mewujudkan kabupaten yang bersih, akuntabel dan kondusif	Demokrasi yang Berkualitas	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perluasan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perwujudan kabupaten yang aman dan tertib
			Peningkatan penegakan hukum	Penguatan penegakan hukum	Pemantapan penegakan hukum	Optimalisasi penegakan hukum
			Peningkatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan
			Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik
			Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Pemantapan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat
		Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Pemantapan kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Optimalisasi kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	Percepatan pengendalian inflasi daerah	Pemantapan pengendalian inflasi daerah	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah
		Kerjasama Daerah yang Berkualitas	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
			Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan	Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan	Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan	Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan
5	Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Kerukunan Umat Beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Penguatan karakter dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat	Pemajuan kebudayaan dan penguatan diplomasi kebudayaan	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Optimalisasi kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Optimalisasi ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penurunan ketimpangan gender dalam pembangunan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Penguatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Percepatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pemantapan implementasi dan monev pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Perwujudan implementasi dan monev pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis kewilayahan dan masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Peningkatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis kewilayahan dan masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis kewilayahan dan masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis kewilayahan dan masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan	Penguatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan	Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan
			Peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Percepatan peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Pemantapan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Optimalisasi pelestarian hutan kota dan ekosistem alami
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Pemantapan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Perluasan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Optimalisasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
		Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Percepatan peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Pemantapan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Perwujudan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pengembangan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan	Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan	Pemantapan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan	Perwujudan ketahanan pangan melalui daya saing produk pertanian yang terintegrasi
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana	Percepatan ketahanan bencana	Penguatan ketahanan bencana	Perwujudan ketahanan bencana
			Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
6	Mewujudkan pemerataan pembangunan		Penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Penguatan penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Perwujudan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Penguatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Pemantapan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Penuntasan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated)
			Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria	Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria	Perwujudan pelaksanaan Reforma Agraria
7	Mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas serta TIK	Perluasan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas serta TIK	Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas serta TIK	Pemerataan akses dan layanan infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas serta TIK

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, dengan mendorong pembangunan vertikal	Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, dengan mendorong pembangunan vertikal	Pemantapan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, dengan mendorong pembangunan vertikal	Pemerataan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, dengan mendorong pembangunan vertikal
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Perluasan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Pemantapan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Pemerataan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang memenuhi standar
			Penguatan pengelolaan jalan daerah	Pemantapan pengelolaan jalan daerah	Optimalisasi pengelolaan jalan daerah	Pendayagunaan jalan daerah untuk peningkatan perekonomian daerah
8	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Percepatan pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Penguatan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	Pemantapan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP I TAHUN 2025-2029	TAHAP II TAHUN 2030-2034	TAHAP III TAHUN 2035-2039	TAHAP IV TAHUN 2040-2045
			FONDASI	AKSELERASI	PEMANTAPAN	PERWUJUDAN
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Penguatan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Implementasi dan money rencana tata ruang	Perwujudan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing
			Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan wilayah			

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Sasaran Pokok Kabupaten Bogor dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah sehingga menjadi dasar penentuan Indikator Utama Pembangunan bagi Kabupaten Bogor.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui penyelarasan terhadap koridor arah pembangunan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Mengacu pada hal hasil penyelarasan tersebut, maka Arah Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 adalah (1) Kesehatan untuk semua, (2) Pendidikan berkualitas yang merata, (3) Perlindungan sosial yang adaptif, (4) IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi, (5) Penerapan ekonomi hijau dan digital, (6) Transformasi digital, (7) Integrasi ekonomi domestik dan global, (8) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan, (9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, (10) Demokrasi yang berkualitas, (11) Stabilitas ekonomi makro, (12) Kerjasama daerah yang berkualitas, (13) Kerukunan umat beragama, (14) Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender, (15) Lingkungan hidup berkualitas, (16) Ketahanan pangan dan ketahanan air, serta (17) Ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Tabel 5.3
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bogor
dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Barat		RPJPD Kabupaten Bogor	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	IE 1. Kesehatan untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk semua
	IE 2. Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE 3. Perlindungan sosial yang adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	IE 5. Penerapan ekonomi hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital		Penerapan ekonomi hijau
	IE 6. Transformasi digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Transformasi Digital
	IE 7. Integrasi ekonomi domestik dan global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Barat		RPJPD Kabupaten Bogor	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Ekonomi	IE 8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Transformasi Ekonomi	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Transformasi Ekonomi	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan
Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Demokrasi yang berkualitas
	IE 11. Stabilitas ekonomi makro		Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah		Stabilitas ekonomi makro
	IE 12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan budaya gentar kawasan		Peningkatan kerjasama internasional dan ketahanan daerah		Kerjasama daerah yang berkualitas
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Kerukunan umat beragama

RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Barat		RPJPD Kabupaten Bogor	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
	IE 15. Lingkungan hidup berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Lingkungan Hidup Berkualitas
	IE 16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Ketahanan pangan dan ketahanan air
	IE 17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diolah

Adapun penjelasan dari Arah Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

a. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan Untuk Semua merupakan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2045, dimana derajat kesehatan masyarakat diharapkan tinggi dan setiap penduduk dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas, adil dan bermutu dengan biaya terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.

b. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan mewujudkan generasi unggul yang bermutu dan berkarakter disertai akses layanan pendidikan yang adil dan bermutu, serta pendidikan yang memenuhi standar kompetensi Nasional dan global.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

c. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Perlindungan Sosial Yang Adaptif mencerminkan masyarakat sejahtera, perlindungan inklusif bagi masyarakat, keberpihakan sektor formal dan informal terhadap gender, serta perlindungan sosial terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

d. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan kawasan sains dan teknologi serta iklim inovasi yang kondusif sehingga memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang dimiliki.

e. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan Ekonomi Hijau sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, pelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya, yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan transisi energi baru terbarukan (EBT), pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, dan investasi hijau di berbagai sektor.

f. Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan salah satu upaya transformatif super prioritas di bidang ekonomi dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang memiliki kemampuan mengoptimalkan pengembangan *superplatform digital* tentang tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek regulasi, institusi, infrastruktur, riset dan inovasi digital, keamanan siber, pembiayaan dan insentif, hingga industri digital.

g. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Mewujudkan keterkaitan antar industri kecil, menengah dan besar dalam proses produksi dan perdagangan domestik dan global, yang didukung dengan berfungsinya infrastruktur transportasi dan logistik

h. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Dilakukan melalui penguatan dan pemantapan desa mandiri dengan ketersediaan dan akses terhadap layanan sosial ekonomi yang berkualitas; serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan.

i. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, responsif terhadap perubahan, perilaku *zero corruption* serta mampu menciptakan solusi baru untuk berbagai tantangan yang dihadapi.

j. Demokrasi yang Berkualitas

Peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi merupakan wujud kepatuhan pada peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin rasa aman serta kebebasan dan kesetaraan berdemokrasi. Selain sebagai upaya untuk menghormati kebebasan dan hak asasi manusia, diharapkan dapat memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis sehingga terwujud peningkatan kualitas kebijakan serta ketentraman dan ketertiban daerah.

k. Stabilitas Ekonomi Makro

Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudahan dunia usaha mengakses modal dan pembiayaan, terkendalinya inflasi, mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan bertambahnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.

l. Kerjasama Daerah yang Berkualitas

Peningkatan kerjasama dan ketahanan daerah diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Bogor lebih baik. Melalui kerjasama pula diharapkan Kabupaten Bogor tangguh dan mampu bertahan dan pulih dari berbagai tantangan eksternal, termasuk bencana alam, konflik, perubahan iklim, dan tekanan lingkungan lainnya, serta mampu menghadapi dan mengatasi ancaman dengan cara yang efektif, serta dapat mempertahankan fungsi-fungsi kunci seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

m. Kerukunan Umat Beragama

Menjadikan masyarakat menjunjung nilai luhur agama, menghormati dan memuliakan nilai-nilai spiritual, keyakinan, dan praktik keagamaan yang diyakini oleh individu dan masyarakat, melestarikan kebudayaan serta memiliki toleransi yang tinggi antar etnis, agama dan golongan.

n. Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender

Mewujudkan keluarga harmonis dan berkualitas, didukung dengan masyarakat yang memiliki kepedulian dan berkualitas serta menjamin hak dan perlindungan anak dan perempuan.

o. Lingkungan Hidup Berkualitas

Mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara fisik, biologis, maupun kimia dapat mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya dengan baik, didukung oleh keanekaragaman hayati yang lestari, kualitas udara yang baik, air bersih yang sehat, tutupan lahan yang meningkat di kawasan lindung, sanitasi yang aman, serta sistem pengolahan sampah terpadu dan menyeluruh.

p. Ketahanan Pangan dan Air

Peningkatan ketahanan pangan dan air menjadi arah pembangunan di Kabupaten Bogor. Ketahanan pangan dicirikan berdasarkan 3 (tiga) aspek: ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga dan akses, serta pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat. Ketahanan

air dicirikan dengan tersedianya kapasitas atau daya tampung air baku yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan.

q. Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim

Ketahanan terhadap bencana daerah dan perubahan iklim sejalan dengan semakin berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana; kapasitas pemerintah dan masyarakat menghadapi bencana semakin membaik; nilai bahaya dan kerentanan berkurang.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kabupaten Bogor dan mendukung tercapainya visi Kabupaten Bogor. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial (Kesehatan Untuk Semua)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya
Transformasi Sosial (Pendidikan Berkualitas Yang Merata)	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	Penguatan sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
	Perluasan akses pendidikan di semua jenjang dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat
Transformasi Sosial (Perlindungan Sosial Yang Adaptif)	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas infrastruktur
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .
	Perluasan penyediaan bantuan sosial
	Perluasan penyediaan jaminan sosial
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
	Penguatan sistem pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani ikan
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani ikan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi petani ikan
	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani ikan serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	Modernisasi sarana produksi perikanan.
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal
	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
	Peningkatan ketahanan bencana
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas
	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban touris</i>
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Pengembangan infrastruktur yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan desa.
	Pembangunan jalan intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan.
	Reaktivasi layanan perkeretaapian
	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi)
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
	Peningkatan produktivitas BUMD.
Transformasi Tata Kelola	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishmet, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	Pembinaan partai politik
	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan

Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
Transformasi/Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
	kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik,mDUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diolah

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Bogor sebanyak 34 (tiga puluh empat) indikator, mengacu kepada Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. IUP dan target tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, secara rinci dirumuskan sasaran pokok yang akan dicapai, dan kemudian penetapan Indikator Utama Pembangunan yang akan digunakan oleh Kabupaten Bogor, serta penetapan target dengan tetap memperhatikan kontribusi pencapaian target untuk Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang diuraikan secara bertahap, pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Penyelarasan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan
Kabupaten Bogor dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		
		Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB. BOGOR		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
	TRANSFORMASI SOSIAL						
IE1	Pelayanan Kesehatan Prima Untuk Semua			IE1	Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,34	82,34
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0	5	a	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,20	6,37
b.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151	15	b.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	119	15
3	Penanganan Tuberkulosis:			3	Penanganan Tuberkulosis:		
a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	95	95	a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	98
b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88	98	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,06	99
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran			5	Hasil pembelajaran		
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Literasi Membaca	25,93- 33,33	70,37- 74,07				
	ii) Numerasi	7,41- 14,81	62,96- 66,67				
b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			a	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
	i) Literasi Membaca	45,30- 47,30	71,42- 73,42		i) Literasi Membaca		
					SD	59,44	100
					SMP	73,20	100

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025- 2045	
		Target RPJPD PROVINSI				Target RPJPD KAB. BOGOR	
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
					ii) Numerasi		
					SD	47,59	100
					SMP	68,20	100
c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05-12,09	c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,44	12,07
d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87-12,88	14,24-14,29	d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,68	13,62
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	9,64	9,64-14,50				
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,19	75,00				
IE3	Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Berbudaya Maju			IE3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46	0,09-0,59	6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,39-7,05	0,1-0,65
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	51,33	100
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	24	70				
	TRANSFORMASI EKONOMI						
IE4	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah			IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87-42,00	46,43-47,60	8	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	52,38	50,44
12	Pengembangan Pariwisata			9	Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	5,36	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,16	5,13
				b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	105	278,596
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	22,81	18,68				
14	Produktivitas UMKM Ekonomi dan Koperasi			10	Produktivitas UMKM Ekonomi dan Koperasi		
a.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	a.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,24	8,84
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			11	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42-6,99	5,16-6,14	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,41-8,07	4,5-5,59

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025- 2045	
		Target RPJPD PROVINSI				Target RPJPD KAB. BOGOR	
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	45	86				
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3	12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	43,23	42,86
17	Tingkat penguasaan IPTEK			13	Tingkat penguasaan IPTEK		
a.	Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	a.	Indeks Inovasi Daerah	70,47	80,54
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE5	Penerapan Ekonomi Hijau		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			14	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,01	85,32
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	23,40	67,91				
IE6	Transformasi Digital			IE6	Transformasi Digital		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	6,4	8	15	Indeks Smart City (poin)	3,20	4,00
IE7	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global			IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5,00	16	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (persen)*	16,91	15,11
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	24,72	21,07	17	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	21,29	22,73
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32	18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	50,96 - 56,01	60,22- 60,96
IE8	Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung kluster prekonomian di setiap wilayah pengembangan			IE8	Perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			19	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	47,27	100
b.	Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	b.	Persentase Desa Mandiri (%)	12,50	34,38
					Jumlah desa mandiri (desa)	154	330
c.	Kemantapan Jalan (%)	86,17	99				
d.	Moda Share Angkutan Umum (%)	13	45				
	TRANSFORMASI TATA KELOLA						
IE9	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif			IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif		
24	Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	20	Indeks Reformasi Hukum	72	100

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025- 2045	
		Target RPJPD PROVINSI				Target RPJPD KAB. BOGOR	
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00	21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,75
26	Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00	22	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,50
27	Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89				
	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA						
IE10	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas			IE10	Demokrasi yang Berkualitas		
28	Indeks kepatuhan daerah	84,08	94,08	23	Indeks Kualitas Kebijakan (poin)	90	90
29	Proporsi penduduk yang merasakan aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	51,78	69,16				
30	Indeks demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi				
IE11	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah			IE11	Stabilitas Ekonomi Makro		
31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	1,58	4,6	24	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	1,04	1,23
32	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,8	1,1-3,2	25	Tingkat Inflasi (%)	3,00	3,00
33	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan						
a.	Total kredit/PDRB (%)	23,7	73,8				
34	Inklusi keuangan (%)	94,22	99,03				
IE12	Peningkatan kerjasama internasional dan ketahanan daerah			IE12	Kerjasama Daerah yang Berkualitas		
35	Efektivitas kerjasama internasional (%)	90,91 (2023)	99,71	26	Jumlah kerjasama daerah	60-70	70-80
36	Indeks ketahanan nasional daerah Jawa Barat	3,022	4,5	27	Indeks ketahanan wilayah (poin)	2,948	4,426
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI						
IE13	Peningkatan kerukunan umat beragama			IE13	Kerukunan Umat Beragama		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73	65,99-66,28				
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68-82,32	28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	82,79	83,39
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			IE14	Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 – 70,95	75,81-76,05	29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60	80
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 – 0,458	0,230-0,215	30	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,589	0,626

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		RPJPD 2025- 2045	
		Target RPJPD PROVINSI				Target RPJPD KAB. BOGOR	
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
IE15	Peningkatan kualitas lingkungan hidup			IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741				
42	Kualitas Lingkungan Hidup			31	Kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	64,06	72,08	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,26	61,13
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49	85,00	b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,34	79,84
c.	Pengelolaan sampah:			c.	Pengelolaan sampah:		
	- Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	11,00	90,00		- Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	12,34	81,35
	- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	48 (2022)	100		- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	69,14	100
IE16	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi			IE16	Ketahanan Pangan dan Air		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			32	Ketahanan air dan pangan		
a.	Ketahanan energi						
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.404	2.670				
	- Intensitas energoi primer (SBM/Rp milyar)	191	165				
b.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32	a.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,55	0,32
c.	Ketahanan air			b.	Ketahanan air		
	- Kapasitas air baku (m³/detik)	4,93	63,12		- Kapasitas air baku (m³/detik)	12,35	33,21
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	34,74	100		- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	36,45	100
IE17	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim			IE17	Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	109,18	92,98-79,08	33	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	105	90
45	Penurunan Emisi GRK			34	Penurunan Emisi GRK		
a.	Kumulatif (Ton CO ₂ eq)	2,66	31,65	a.	Kumulatif (Ton CO ₂ eq)	484.301,08	7.967.976,86
b.	Tahunan	9,27	70,08				

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diolah

Tabel 5.6
Misi, Arah Pembangunan, Sasaran Pokok
dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
1	Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya	Kesehatan untuk semua	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
				2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) b. Jumlah kasus kematian Ibu per Tahun per 100.000 kelahiran hidup (jumlah)
				3. Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dan daya saing SDM	5. Hasil pembelajaran: a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca: - SD - SMP ii) Numerasi: - SD - SMP b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) c. Harapan Lama Sekolah (tahun)
2	Membangun perekonomian yang kuat, produktif, berkelanjutan, dan inovatif	Perindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	6. Tingkat Kemiskinan (%)
				7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	8. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
				9. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)
				10. Produktivitas UMKM, Ekonomi dan Koperasi

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
				a. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
				11. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
				12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
				13. Tingkat Penguasaan IPTEK a. Indeks Inovasi Daerah (poin)
		Penerapan ekonomi hijau	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	14. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (poin)
		Transformasi Digital	Terwujudnya transformasi digital	15. Indeks Smart City (poin)
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global	16. Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat Kabupaten (persen)
				17. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
				18. Ekspor Barang dan Jasa - berlaku (% PDRB)
		Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	Terwujudnya tata ruang dan infrastruktur yang mantap dan berkualitas	19. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) b. Jumlah Desa Mandiri (desa) Persentase Desa Mandiri (%)
3	Mengembangkan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	20. Indeks Reformasi Hukum (poin)
				21. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin)
				22. Indeks Pelayanan Publik (poin)
4	Mewujudkan kabupaten yang bersih, akuntabel dan kondusif	Demokrasi yang Berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan serta ketentraman dan ketertiban daerah	23. Indeks Kualitas Kebijakan (poin)
		Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	24. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				25. Tingkat Inflasi (%)
		Kerjasama Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya kerjasama dan ketahanan daerah	26. Jumlah Kerjasama Daerah (kerjasama)
				27. Indeks ketahanan wilayah (poin)

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
5	Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya inklusivitas masyarakat yang berbudaya	28. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (persen)
		Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender dan masyarakat inklusif	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	29. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)
				30. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (poin)
		Lingkungan Hidup berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Kualitas lingkungan hidup a. Indeks kualitas lingkungan hidup (poin) b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan sampah: - Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)
		Ketahanan Pangan dan Air	Terwujudnya ketahanan pangan dan air	32. Ketahanan pangan dan air a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) b. Ketahanan Air: - Kapasitas Air Baku (m ³ /dt) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
				33. Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin) 34. Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif (Ton CO ₂ eq)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 5.7

Penetapan Target Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
					2025	2045
1	Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya	Kesehatan untuk semua	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,34	82,34
				2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) b. Jumlah kasus kematian Ibu per Tahun per 100.000 kelahiran hidup (jumlah)	24,20 119	6,37 15
				3. Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91 91	98 98
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,06	99
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dan daya saing SDM	5. Hasil pembelajaran: a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca: - SD - SMP ii) Numerasi: - SD - SMP	 59,44 73,20 47,59 68,20	 100 100 100 100

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
					2025	2045
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,44	12,07
				c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,68	13,62
				6. Tingkat Kemiskinan (%)	6,39 – 7,05	0,1 – 0,65
				7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	51,33	100
				8. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	52,38	50,44
2	Membangun perekonomian yang kuat, produktif, berkelanjutan, dan inovatif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	9. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,16 105	5,13 278,596
				10. Produktivitas UMKM, Ekonomi dan Koperasi a. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,24	8,84
				11. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,41 – 8,07	4,5 – 5,59
				12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	43,23	42,86
				13. Tingkat Penguasaan IPTEK a. Indeks Inovasi Daerah (poin)	70,47	80,54
		Penerapan ekonomi hijau	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	14. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (pilar ekonomi) (poin)	67,01	85,32
				15. Indeks Smart City (poin)	3,20	4,0
		Transformasi Digital	Terwujudnya transformasi digital			
			Terwujudnya integrasi	16. Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat Kabupaten (persen)	16,91	15,11

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
					2025	2045
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	ekonomi domestik dan global	17. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	21,29	22,73
		Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	Terwujudnya tata ruang dan infrastruktur yang mantap dan berkualitas	18. Ekspor Barang dan Jasa - berlaku (% PDRB)	50,96-56,01	60,22-60,96
				19. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan:		
				a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	47,27	100,00
				b. Jumlah Desa Mandiri (desa)	154	330
				Persentase Desa Mandiri (%)	12,50	34,38
3	Mengembangkan modernisasi penyelenggaraan pemerintahan	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	20. Indeks Reformasi Hukum (poin)	72	100
				21. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin)	3,77	4,75
				22. Indeks Pelayanan Publik (poin)	4,40	4,50
4	Mewujudkan kabupaten yang bersih, akuntabel dan kondusif	Demokrasi yang Berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan serta ketentraman dan ketertiban daerah	23. Indeks Kualitas Kebijakan (poin)	90	90
		Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	24. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,04	1,23
				25. Tingkat Inflasi (%)	3,00	3,00
				26. Jumlah Kerjasama Daerah (kerjasama)	60-70	70-80

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
					2025	2045
		Kerjasama Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya kerjasama dan ketahanan daerah	27. Indeks ketahanan wilayah (poin)	2,948	4,426
5	Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya inklusivitas masyarakat yang berbudaya	28. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (persen)	82,79	83,39
		Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender dan masyarakat inklusif	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	29. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	60	80
				30. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (poin)	0,589	0,626
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Kualitas lingkungan hidup a. Indeks kualitas lingkungan hidup (poin) b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan sampah: - Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	59,26 8,34 12,34 69,14	61,13 79,84 81,45 100,00
		Ketahanan Pangan dan Air	Terwujudnya ketahanan pangan dan air	32. Ketahanan pangan dan air a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,55	0,32

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
					2025	2045
		Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	b. Ketahanan Air: - Kapasitas Air Baku (m ³ /dt) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	12,35 36,45	33,21 100,00
				33. Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	105	90
				34. Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif (Ton CO ₂ eq)	484.301,08	7.967.976,86

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diolah

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi jangka menengah.

Secara umum, pemberlakuan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 ditindaklanjuti dengan serangkaian kaidah pelaksanaan yang bersifat yuridis dan teknis agar implementasi kinerja visi dan indikator utama pembangunan dapat dievaluasi dengan baik. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, konsekuensi pendanaan/pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk pencapaian visi tahun 2045 dilaksanakan secara teknis dan dijabarkan berdasarkan pentahapan perencanaan jangka menengah. Perlu dipertimbangkan dinamika yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan setiap tahapan RPJPD, baik dari aspek fiskal, dan non fiskal, kendali manajemen dan risiko yang antisipatif, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat perubahan mendasar, kebijakan nasional dan/atau sisa masa berlaku RPJPD belum melampaui 7 (tujuh) tahun dari masa berakhirnya, maka RPJPD ini dapat diubah untuk disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa pengaruh yang harus diantisipasi terkait risiko tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah tahun 2045 mendatang, adalah:

- a. Perubahan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh secara signifikan terhadap substansi RPJPD Kabupaten Bogor.
- b. Kemampuan keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan tahapan per tahapan pembangunan jangka menengah dan tahunan.
- c. Faktor keamanan negara, ketenteraman dan ketertiban daerah, kependudukan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dan digitalisasi, serta perubahan global yang terjadi, namun belum diantisipasi dalam aturan perundang-undangan.

d. Bencana yang tidak diperhitungkan dan belum terantisipasi.

Langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya risiko adalah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menggunakan strategi pengelolaan risiko yang tepat dan efektif.
- b. Mengawasi dan memantau risiko dan potensi risiko secara terus menerus, serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko.
- c. Memantau dan menyesuaikan kebijakan daerah terhadap kebijakan global, nasional, dan provinsi secara tepat dan cermat.
- d. Membangun suasana tertib dan patuh bagi seluruh pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipedomani.
- e. Meningkatkan pencapaian target pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi risiko kelembagaan/organisasi.
- f. Mengoptimalkan peluang kondusivitas bagi semua unsur yang mendukung pencapaian tujuan nasional dan daerah.

Demikian, dokumen ini disusun untuk Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

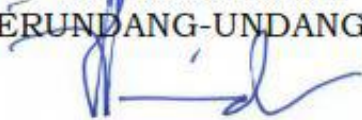
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI